

**INVENTARIS ARSIP**  
**SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**(1945) 1959 – 1968 (1973)**



**DIREKTORAT PENGOLAHAN**  
**DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP**  
**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA, 2015**

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamankan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pengelolaan arsip statis bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis yang dikelola ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sumber informasi publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pengelolaan arsip statis, maka khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap.

Pada Tahun Anggaran 2015 ini, salah satu program kerja Sub Direktorat Pengolahan Arsip I yang berada di bawah Direktorat Pengolahan adalah menyusun Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973). Inventaris arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis Sekretariat Negara RI yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip.

Seperti kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”, maka inventaris arsip ini tentunya belum sempurna dan masih ada kekurangan. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan ANRI, anggota tim, Kementerian Sekretariat Negara RI dan semua pihak yang telah membantu penyusunan inventaris arsip ini hingga selesai. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. Amin.

Jakarta, Desember 2015  
Direktur Pengolahan,

Azmi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN .....	v
A.    Sejarah Organisasi.....	v
B.    Sejarah Arsip .....	vii
C.    Pertanggungjawaban Pembuatan Inventaris Arsip.....	ix
1. Pengolahan Arsip .....	ix
2. Petunjuk Penggunaan Inventaris Arsip .....	x
3. Petunjuk Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data .....	xi
URAIAN DESKRIPSI ARSIP	
I. FASILITATIF	
A.    Keuangan.....	1
B.    Kepegawaian .....	3
1. Administrasi Pegawai .....	3
2. Data Pegawai .....	7
3. Kesejahteraan Pegawai .....	9
4. Perkumpulan Pegawai.....	11
C.    Organisasi dan Tata Laksana .....	15
D.    Hukum.....	16
E.    Kearsipan.....	16
F.    Perlengkapan .....	18
II. SUBSTANTIF	
A.    Pembantu Teknis Presiden .....	20
1. Kerumahtanggaan .....	20
2. Keprotokolan.....	21
3. Keamanan Presiden.....	25
B.    Administrasi Pemerintahan .....	25
1. Keuangan.....	25

a.	Anggaran.....	25
b.	Otorisasi .....	37
c.	Pembukuan.....	47
d.	Pengawasan dan Pemeriksaan.....	49
e.	Gantu Rugi dan Hutang .....	61
2.	Organisasi.....	68
3.	Kepegawaian .....	78
4.	Hukum dan Perundang-undangan .....	96
a.	Kerjasama Luar Negeri .....	72
b.	Grasi dan Kewarganegaraan .....	100
c.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan .....	101
1)	TAP MPR/S .....	101
2)	Undang-Undang.....	101
3)	Undang-Undang Darurat.....	110
4)	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	111
5)	Peraturan Pemerintah .....	116
6)	Peraturan Presiden .....	136
7)	Keputusan Presiden.....	146
8)	Instruksi Presiden.....	190
5.	Perlengkapan .....	192
C.	Persidangan dan Rapat-Rapat.....	194
D.	Penghubung Pemerintahan.....	203
1.	Lembaga Negara .....	203
2.	Masyarakat .....	204
3.	Khusus.....	209
E.	Pemberian Tanda Kehormatan .....	214
F.	Analisis Urusan Pemerintahan .....	215
1.	Sosial Politik .....	215
a.	Otonomi Daerah.....	215
b.	Kehakiman .....	222
c.	Keagamaan.....	224

d.	Bantuan Sosial .....	225
e.	Kesehatan .....	226
f.	Pendidikan dan Kebudayaan.....	228
g.	Olahraga .....	233
2.	Ekonomi dan Keuangan Negara.....	234
a.	Produksi .....	234
1)	Pertanian/Agraria .....	234
2)	Perburuhan .....	239
3)	Pekerjaan Umum.....	241
4)	Perindustrian dan Pertambangan.....	243
5)	Research Nasional.....	248
b.	Distribusi.....	252
1)	Perdagangan.....	252
2)	Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi .....	259
3)	Transmigrasi, Koperasi dan PMD.....	264
c.	Fiskal dan Moneter .....	265
1)	Pendapatan dan Pembiayaan.....	265
2)	Anggaran Negara .....	268
3)	Perbankan.....	271
3.	Administrasi-Organisasi.....	274
4.	Pertahanan dan Keamanan .....	276

## LAMPIRAN

1.	Indeks Nama Orang .....	291
2.	Indeks Nama Lembaga .....	300
3.	Indeks Nama Tempat .....	312
4.	Indeks Masalah dan Peristiwa .....	319
5.	Daftar Singkatan.....	323
6.	Daftar Istilah .....	327

## PENDAHULUAN

### A. Sejarah Organisasi

Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia (RI). Keesokan harinya, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selanjutnya untuk menjalankan tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dibentuk lembaga-lembaga negara salah satunya adalah Sekretariat Negara RI.

Sekretariat Negara RI dibentuk pada 2 September 1945 yang ditandai dengan pengangkatan seorang Sekretaris Negara. Sekretariat Negara RI menjadi bagian dalam struktur kabinet yang mempunyai fungsi membantu tugas sehari-hari Presiden dan wakil Presiden dalam hal administrasi kenegaraan dan pemerintahan. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia, Sekretariat Negara RI mengalami banyak perubahan baik dari segi struktur kelembagaan maupun tugas dan fungsinya. Perubahan yang terjadi dalam Sekretariat Negara RI salah satunya dipengaruhi oleh konstelasi politik yang terjadi di tanah air termasuk pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1968.

Sebelum memasuki masa Demokrasi terpimpin, Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer dan juga dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Sekretariat Negara RI pada periode ini bernama Kabinet Presiden yang dipimpin oleh Direktur Kabinet Presiden. Pada periode ini juga dibentuk organisasi baru yaitu Kabinet Perdana Menteri yang bertugas memberikan dukungan staf serta administrasi kepada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Memasuki masa Demokrasi Terpimpin, Sekretariat Negara RI kembali mengalami perubahan organisasi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 221 tahun 1960 yaitu dengan dihapusnya Kabinet Presiden dan pengembalian nama Sekretariat Negara RI. Sementara itu Kabinet Perdana Menteri diubah menjadi Kabinet Menteri Pertama. Perubahan lainnya yaitu kedudukan Sekretariat

Negara RI yang menjadi sejajar dengan kementerian dan berada langsung di bawah Presiden.

Badan-badan yang ada di dalam Sekretariat Negara RI pada periode ini, adalah Kabinet Presiden, Sekretariat Militer Presiden, Rumah Tangga Presiden, Komando Resimen Tjakrabirawa, Ajudan Presiden, Biro Administrasi dan Organisasi (Biro I), Biro Ekonomi dan Keuangan (Biro II), Biro Politik dan Keamanan (Biro III), Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro IV), Biro Musyawarah (Biro V), Biro Tanda Kehormatan (Biro VI).

Kabinet Presiden bertugas mengurus surat-surat yang bersifat sipil yang diajukan kepada pribadi Presiden, upacara kepresidenan, perjalanan, keuangan Presiden, hubungan antara Presiden dengan pers, dan kesehatan pribadi Presiden beserta keluarganya. Sekretariat Militer Presiden bertugas mengurus surat-surat yang bersifat militer dan kepolisian yang ditujukan kepada Presiden. Rumah Tangga Presiden bertugas mengurus istana, gedung, kendaraan dan peralatan yang disediakan untuk Presiden. Resimen Tjakrabirawa bertugas menjaga keselamatan pribadi Presiden beserta keluarga dan istana-istana Presiden. Sementara Ajudan Presiden bertugas mengurus pengawalan pribadi Presiden secara protokoler militer.

Biro I bertugas mengurus administrasi, organisasi, personalia seluruh aparatur negara, anggaran pendapatan dan belanja negara bagi seluruh lembaga tertinggi negara dan badan pemerintahan tertinggi di bawah Presiden dan Menteri Utama. Biro II bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan bidang produksi, distribusi dan keuangan. Biro III bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan keamanan, serta hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara.

Biro IV bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Biro V bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan musyawarah-musyawarah dalam ruang lingkup musyawarah Pimpinan Negara, kabinet, dan lembaga-lembaga tertinggi lainnya. Sementara Biro VI bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan penganugerahan bintang,

satyalencana, dan tanda-tanda jasa atau penghargaan lainnya. Pada periode ini, terjadi pula perubahan lainnya yaitu di bidang Administrasi Perundang-undangan. Melalui Keppres No. 234 Tahun 1960 disahkan pengembalian wewenang pengundangan dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara RI.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965, menyebabkan perubahan kembali konstelasi politik. Perubahan tersebut diawali ketika Presiden Soekarno mengganti Kabinet Dwikora yang Disempurnakan 100 Menteri pada 25 Juli 1966. Selanjutnya, Presiden Soekarno menugaskan Letnan Jenderal Soeharto sebagai penganan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk membentuk Kabinet Ampera dan diangkat menjadi Ketua Presidium Kabinet.

Pada 20 Februari 1967, Presiden Soekarno mengumumkan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Selanjutnya pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden RI berdasarkan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS Tahun 1967. Masa Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan benar-benar berakhir pada 27 Maret 1968 ketika Soeharto dilantik sebagai Presiden RI. Presiden Soeharto kemudian membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Pembangunan I. Pada kabinet ini, organisasi Sekretariat Negara RI ditata ulang berdasarkan Keppres No. 215 Tahun 1968. Keppres ini menjelaskan bahwa Sekretariat Negara RI adalah suatu badan pusat yang merupakan wadah administrasi dari lembaga-lembaga pemerintah tingkat pusat yang tidak termasuk salah satu departemen.

## **B. Sejarah Arsip**

Sekretariat Negara RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya menghasilkan sejumlah arsip yang sangat penting. Sebagian besar arsip Sekretariat Negara RI pada periode 1945-1968 telah tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sebagian besar telah selesai diolah dengan menghasilkan sarana penemuan kembali arsip statis (*finding aids*) yang dapat diakses diruang baca.



Pada 2004 Sekretariat Negara RI kembali menyerahkan arsip periode 1950-1976. Pada 2013, dilakukan pengolahan pada arsip tersebut dengan menghasilkan Daftar Arsip Sekretariat Negara RI Tahun 1947-1972. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi baik secara informasi maupun fisik, terdapat banyak kelemahan dalam daftar arsip tersebut, antara lain:

1. Periode daftar arsip tahun 1947-1972 dinilai tidak tepat karena sebagian besar periode arsip berasal dari tahun 1959-1968, hanya sedikit arsip diluar periode tersebut yaitu arsip yang tertua tahun 1945 dan termuda tahun 1973. Oleh karena itu, penulisan periode yang tepat pada inventaris arsip ini adalah (1945) 1959-1968 (1973).
2. Penggunaan skema penyusunan yang tidak menggambarkan tugas dan fungsi Sekretariat Negara RI.
3. Ketidaksesuaian antara deskripsi arsip dengan fisik arsip yang diberkaskan.
4. Hasil olah data yang tidak sempurna terutama terkait kronologis waktu.
5. Informasi yang kurang lengkap terutama pada kolom kurun waktu, tingkat perkembangan dan jumlah.

Atas hasil identifikasi tersebut, maka Sub Direktorat Pengolahan I, pada Tahun Anggaran 2015 melakukan pengolahan kembali Daftar Arsip Sekretariat Negara RI 1947-1972. Kegiatan pengolahan tersebut selain untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang telah diuraikan di atas, juga dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dengan merubahnya menjadi Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI Tahun (1945) 1959-1968 (1973).

Informasi yang terkandung di dalam arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973), antara lain terkait dengan kebijakan di dalam negeri seperti pelaksanaan Manipol-Usdek, *retooling* di berbagai bidang, Deklarasi Ekonomi dan Pembangunan Semesta Berencana. Selain itu juga terdapat informasi terkait dengan politik luar negeri seperti pelaksanaan kerja sama bidang ekonomi dan kebudayaan dengan berbagai negara, Asian Games 1962, usaha merebut Irian Barat serta konfrontasi dengan Malaysia.

## **C. Pertanggungjawaban Pembuatan Inventaris Arsip**

### **1. Pengolahan Arsip**

Pengolahan arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973) ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pengolahan arsip Sekretariat Negara RI yang diserahkan kepada ANRI. Sebelumnya ANRI sudah mengolah arsip Sekretariat Negara RI dan menghasilkan *finding aids* antara lain inventaris arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949, Sekretariat Negara RI Yogyakarta 1949-1950, Kabinet Presiden 1949-1950, Kabinet Presiden 1950-1959 dan Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 (jilid 1 dan 2).

Pengolahan arsip ini dilakukan oleh tim kerja di lingkungan Subdit Pengolahan Arsip I, Direktorat Pengolahan berdasarkan Surat Perintah No. KN.03/30/2015 tentang Tim Penyusunan Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI 1959-1968 yang terdiri dari: Azmi sebagai Penanggung Jawab Kegiatan, Retno Wulandari selaku Penanggung Jawab Pelaksana Teknis, Widhi Setyo Putro selaku Koordinator, Nurarta Situmorang, Wiyaningsih, F.X. Ariyanto Adibowo, Khoerun Nisa Fadillah, Dedi Febri Martono, Titik Kurniawati, Risma Anggiyani selaku Anggota.

Pengolahan arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973) dilaksanakan selama dua belas bulan, mulai Januari s.d. Desember 2015. Prosedur pengolahan arsip mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dan kaidah-kaidah pengolahan arsip statis. Tahapan kegiatannya meliputi identifikasi arsip, penyusunan rencana teknis, penelusuran sumber referensi, pembuatan skema pengaturan arsip sementara, rekonstruksi arsip, deskripsi arsip, penyusunan skema pengaturan arsip definitif, manuver data/penyatuan informasi dan fisik arsip, penomoran definitif, pemberian label arsip, penataan arsip dalam boks, penyusunan inventaris arsip, penilaian dan uji petik, pengesahan inventaris arsip.

Skema pengaturan informasi arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Negara RI yang diperoleh dari Keputusan Presiden No. 221 tahun 1960 dan dilengkapi dengan buku *Sekretariat Negara RI dari Masa*

*Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disusun tahun 2009. Adapun skema pengaturan arsip Sekretariat Negara RI 1959-1968 meliputi dua kelompok besar. Pertama adalah Fasilitatif yang terdiri dari Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kearsipan, dan Perlengkapan di lingkungan internal Sekretariat Negara RI. Administrasi/Organisasi, Ekonomi dan Keuangan, Politik dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat, Musyawarah dan Tanda Kehormatan. Kedua adalah Substantif yang terdiri dari Pembantu Teknis Presiden, Administrasi Pemerintahan, Persidangan dan Rapat-Rapat, Penghubung Pemerintahan, Pemberian Tanda Kehormatan, dan Analisis Urusan Pemerintahan.*

## **2. Petunjuk Penggunaan Inventaris Arsip**

Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973) merupakan salah sarana bantu penemuan kembali arsip statis Sekretariat Negara RI yang tersimpan di ANRI. Inventaris ini terdiri atas pendahuluan, uraian deskripsi arsip, lampiran yang memuat indeks (nama, tempat masalah) dan daftar singkatan.

Pengaturan informasi arsip dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Negara RI yang membantu Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Inventaris arsip ini memuat 2133 nomor berkas dan tersimpan dalam 175 boks.

Untuk efektivitas penelusuran arsip yang terdapat dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973), sebaiknya pengguna arsip statis (*user*) di ANRI perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini.

- a. Membaca seluruh pendahuluan inventaris arsip, karena dalam pendahuluan terdapat informasi mengenai sejarah organisasi Sekretariat Negara RI, sejarah arsip Sekretariat Negara RI, dan pertanggungjawaban pembuatan Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973) oleh Tim ANRI;

- b. Memperhatikan daftar isi inventaris arsip secara keseluruhan, karena di daftar isi inventaris arsip terdapat skema pengaturan arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973). Contohnya, untuk mengetahui tentang arsip keuangan Asian Games dapat melihat pada Administrasi Pemerintahan, urusan keuangan, bagian anggaran.
- c. Untuk mencari nama orang, nama lembaga, tempat, dan masalah yang terdapat dalam khazanah arsip dapat menggunakan indeks yang terdapat pada lampiran inventaris arsip ini;

**Contoh melalui indeks:**


**Asian Games : 137, 214, 286, 369, 397, 408, 508, 538, 539, 640**

Nomor pada indeks tersebut merujuk pada nomor inventaris.

- d. Untuk mengetahui kepanjangan suatu singkatan yang terdapat dalam deskripsi arsip, dapat menggunakan daftar singkatan yang terdapat pada lampiran inventaris arsip ini.

Untuk mengakses inventaris arsip ini melalui prosedur di Ruang Baca ANRI, pengguna hanya menuliskan judul inventaris arsip dan nomor inventaris arsip

Contoh:

	<p>Berkas mengenai rencana anggaran belanja untuk Asian Games IV. 2 Desember 1959 - 30 Mei 1960. tembusan 1 sampul</p>
---	--

Penulisan di lembaran peminjaman:

Sekretariat Negara RI Tahun (1945) 1959 – 1968 (1973) No. 214

### **3. Petunjuk Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data**

Arsip sebagai informasi terekam merupakan sumber data primer untuk penelitian ilmiah. Penulisan kutipan penggunaan Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI 1959-1968 yang terdapat dalam inventaris arsip ini sebagai sumber data penelitian/penulisan karya ilmiah dilakukan seberikut.

Contoh:

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI (1945) 1959-1968 (1973)*, Jakarta, 2015, Nomor Inventaris

...

atau

ANRI, *Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI 1959-1968*, Jakarta, 2015, No. Inventaris ...

## DAFTAR PUSTAKA

Gonggong, Anhar, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia* (Jogjakarta: Ombak & Media Presindo, 2002).

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

Simanjuntak, P.N.H., *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003)

Tim Penyusun, *Inventaris Arsip Sekretaris Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950 – 1959*, ANRI.

Tim Penyusun, *30 Tahun Indonesia Merdeka* (Jakarta: Departemen Penerangan, 1981).

Wahid Salim, *et.al*, *Sekretariat Negara RI Republik Indonesia dari Masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2009)

## URAIAN DESKRIPSI ARSIP

### I. FASILITATIF

#### A. Keuangan

- 1 Pembantu Buku Kas m.a. 4.10.4.14 Kabinet Presiden RI Tahun 1953  
Januari-Desember 1953  
asli  
1 sampul
- 2 Surat Direktur Kabinet Presiden mengenai penjelasan tentang Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain, beserta lampiran  
01 Februari 1955  
asli  
1 sampul
- 3 Daftar Pertanggung Jawab Pembayaran Persekot Biaya Perjalanan Dinas dan Daftar Ongkos Perjalanan, Bendaharawan Urusan Perjalanan Sekretariat Negara.  
31 Maret 1957 - 31 Desember 1961  
asli  
1 sampul
- 4 Daftar Pengeluaran Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri Tahun 1957 s.d 1961  
9 Juli 1957 - 13 Juli 1961  
asli  
1 sampul
- 5 Daftar Gaji pegawai/pekerja Kabinet Perdana Menteri, Sekretariat Negara, Sekretariat Menko Penghubung Alim Ulama dan Sekretariat Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA, Menko Kompartemen Pembangunar  
2 November 1957 - 1965  
asli  
1 sampul
- 6 Surat-surat mengenai pemberian restitusi pengobatan dan perawatan Kesehatan bagi pegawai Sekretariat Negara beserta keluarganya  
10 Juli 1959-31 Oktober 1960  
salinan  
1 sampul
- 7 Surat-surat perintah jalan, kwitansi dan daftar pertanggung jawaban biaya perjalanan pegawai Sekretariat Negara.  
2 Oktober 1959 - 7 April 1967  
tembusan  
1 sampul
- 8 Daftar potongan-potongan gaji/honorarium bulanan pegawai kabinet Sekretariat Negara RI.  
1 Januari - 31 Desember 1960  
asli

- 1 sampul
- 9 Surat dari Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Kabinet Presiden mengenai pemberian subsidi kepada koperasi kesejahteraan pegawai  
 17 Maret 1960  
 tembusan  
 1 sampul
- 10 Surat-surat keterangan permintaan honorium penggantian pengobatan dan upah lembur karyawan Kabinet Perdana Menteri.  
 1 Agustus - 31 September 1960  
 asli  
 1 sampul
- 11 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri dan Menteri Pertama tentang pemberian restitusi kepada para pegawai Kabinet Perdana Menteri dan Sekretariat Negara  
 6 Juni 1960 - 17 April 1968  
 asli, salinan, konsep  
 1 sampul
- 12 Surat permohonan uang kerja untuk perongkosan para expert U.S.O.M di Indonesia dari Biro ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri  
 11 Oktober 1960  
 tembusan  
 5 lembar
- 13 Daftar rekapitulasi gaji Kabinet Menteri Khusus  
 01 Januari 1961  
 asli  
 1 sampul
- 14 Surat Keterangan dari Sekretariat Negara RI kepada PN.Garuda Indonesia Airways tentang Biaya perjalanan dalam negeri bagi pegawai Sekretariat Negara RI  
 1 Januari 1961-31 Desember 1962  
 asli  
 1 sampul
- 15 Daftar perhitungan uang-uang diterima untuk diperhitungkan pengeluarannya untuk kesejahteraan pegawai dan ongkos Kantor Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri-menteri Muda periode Januari s.d Desember 1961  
 01 Februari 1961 - 16 Februari 1962  
 asli  
 1 sampul
- 16 Daftar ongkos perjalanan pegawai Kabinet Perdana Menteri dan Sekretariat Presidium Kabinet.  
 22 Februari 1961-27 Februari 1967  
 asli  
 1 sampul

- 17 Surat dari Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-kepala Negara Asing kepada Bagian Keuangan Kabinet Menteri mengenai daftar pertanggungjawaban dan neraca biaya penyambutan atas kunjungan tamu Presiden Ajud Khan dari Pakistan bulan Desember 1960 dan biaya rutin periode bulan April 1961, beserta lampiran  
02 Juni 1961  
asli  
1 sampul
- 18 Kwitansi-kwitansi/tanda dana kesejahteraan pegawai Kabinet Perdana Menteri RI Tahun 1961.  
1 Agustus - 3 November 1961  
tembusan  
1 sampul
- 19 Surat dari pegawai Seksi Pembukuan kepada Kabag. Keuangan Kabinet Menteri Pertama mengenai pengusutan tentang pemberian uang sebesar Rp. 15.000,- dari Firma Tjandrakiturka kepada Seksi Otorisasi Bagaian Keuangan Kabinet Menteri Pertama  
14 Desember 1961  
asli  
2 lembar
- 20 Surat-surat kuasa dari A. Abbas kepada S. Goentoro untuk mengurus atau menerima SPMU, cek dari Sekretariat Negara RI atas perubahan Mata Anggaran Tahun 1964  
14 Januari 1964 - 18 November 1964  
asli  
1 sampul
- 21 Surat Keterangan Menteri Pertama kepada PN. Garuda Airways tentang penanggungan biaya pengangkutan a.n. Dr. J. Leimena, dkk., oleh staf distribusi atas tanggungan Sekretaria Negara.  
21 September 1964  
fotokopi  
1 lembar

## **B. Kepegawaian**

### **1. Administrasi Pegawai**

- 22 Pengumuman-pengumuman hasil rapat Dewan Menteri mengenai Peraturan istirahat bagi wanita hamil, peraturan perburuhan, pengangkatan pegawai dalam jabatan tetap, tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga penerima pensiun  
28 Juli 1951-13 November 1951  
asli  
1 sampul
- 23 Surat-surat keterangan pegawai Kabinet Perdana Menteri tentang pengangkatan, kenaikan gaji, kelahiran dan berita duka  
1 Januari 1952-1 Desember 1962  
salinan  
1 sampul
- 24 Kartu-kartu pegawai yang ditugaskan belajar ke luar negeri  
Juni 1952 - April 1955  
asli



- 1 sampul
- 25 Berkas mengenai pengangkatan dan keterangan pegawai-pegawai bulanan lepas di Sekretariat Negara.
- 7 Juli 1958-13 Januari 1966  
asli  
1 sampul
- 26 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No.197/P.M/1959 tentang Pengangkatan beberapa Pembantu Pribadi untuk Membantu Pekerjaan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri - Menteri dan Menteri Negara serta Pemberian Honor Bulanan.
- 20 Mei 1959  
asli  
3 lembar
- 27 Daftar permintaan ijin kerja lembur pegawai Kabinet Perdana Menteri dan Presidium Kabinet Ampera.
- 02 Januari 1959 - 31 Maret 1967  
asli  
4 sampul
- 28 Daftar keterangan tugas pegawai dan surat keterangan sakit pegawai Biro Ekonomi dan Keuangan pada seksi urusan pegawai Kabinet Perdana Menteri
- 1 Januari - 31 Desember 1960  
asli  
1 sampul
- 29 Surat-surat permintaan dan pemberian cuti/istirahat libur pegawai-pegawai Kabinet Perdana Menteri dan Dewan Pengawas Keuangan
- 09 Januari 1960 - 19 November 1965  
asli, salinan, tembusan  
1 sampul
- 30 Surat Edaran Pejabat Presiden Republik Indonesia kepada segenap Pegawai Sipil dan Militer pada Kabinet Presiden, Rumah Tangga Presiden dan lain-lain untuk melanjutkan Pekerjaan dengan giat, teliti, waspada selama Presiden ke luar negeri, beserta lampiran.
- 01 April 1960  
fotokopi  
2 lembar
- 31 Berkas mengenai lamaran Pekerjaan pegawai Sekretariat Negara
- 1 Januari 1961 - Januari 1962  
asli  
1 sampul
- 32 Berkas mengenai permintaan surat keterangan jalan prive Kabinet Menteri Pertama
- Januari - Juni 1961  
asli  
1 sampul

- 33 Surat-surat mengenai permohonan bantuan tenaga, tugas belajar, permohonan menjadi pegawai, mutasi pegawai, kenaikan pangkat, tugas belajar, pengangkatan pegawai dilingkungan Kabinet Perdana Menteri  
27 Januari 1960 - 04 Januari 1967  
asli, tembusan, salinan  
1 sampul
- 34 Surat-surat keterangan jalan/perintah jalan dari Bagian Pegawai dan Kepegawaian Umum, Sekretariat Negara RI .  
31 Juli 1961 - 30 Desember 1965  
asli  
2 sampul
- 35 Surat-surat tentang pengangkatan, pemberhentian, mutasi dan kesejahteraan (kelahiran anak) pegawai Kabinet Perdana Menteri  
1 Januari - 31 Desember 1962  
asli  
1 sampul
- 36 Surat-surat perintah jalan pejabat menteri dan staf Kabinet Perdana Menteri an. Ir. Sie Kwat Soen Msc, M. Ilyas, Moh. Yamin, dll  
9 Januari 1962 - 15 Oktober 1963  
tembusan  
1 sampul
- 37 Surat Penunjukkan R. Soesilo Darmo sebagai Pejabat Kepala Urusan Keuangan Biro Ekonomi dan Keuangan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1962  
22 Januari 1962  
tembusan  
1 lembar
- 38 Surat-surat mengenai pengajuan pensiun a.n. Soebowo Sorjosoemarc  
Maret 58-24 Januari 1961  
asli  
1 sampul
- 39 Surat keputusan Menteri Pertama RI No.5/I/M.P/T.B/1962 tentang Tugas belajar kepada Kayogi Sudiyono pada Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas (KPAA) di Jakarta.  
18 April 1962  
salinan  
2 lembar
- 40 Surat-surat mutasi dan penetapan kelancaran jalannya Pekerjaan dari Biro Ekonomi dan Keuangan.  
06 Juli 1962  
asli  
1 sampul

- 41 Memo-memo mengenai laporan hasil kerja penyusunan buku-buku research di Biro Ekonomi dan Keuangan, tugas belajar serta dispensasi kuliah di FKIP Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia.  
07 Juli - 19 November 1962  
asli  
1 sampul
- 42 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama tentang pemberian istirahat besar kepada Mr. Sastra Djatmika, Maria Ulfah Santoso, dan lain-lain menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 beserta peraturan pelaksanaannya  
12 September 1962  
salinan  
6 lembar
- 43 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.5/I/M.P./TB/1963 tentang tugas belajar kepada Soekardi pada KPAA.  
27 Maret 1963  
asli  
2 lembar
- 44 Surat penunjukan E.M Ilyas sebagai pimpinan pelaksanaan tugas Pekerjaan Sie. Gudang dan Moh. Ridwan sebagai pembantu utama pada kepala Sub Bagian Bangunan  
30 Mei 1963  
tembusan  
4 lembar
- 45 Berkas nama-nama pegawai Biro II (Ekonomi dan Keuangan) yang melakukan Pekerjaan pelaksanaan Ekonomi Survei atau Review  
14 Oktober 1963 - 11 Juli 1964  
tembusan  
1 sampul
- 46 Surat permohonan dispensasi an. Sutarno Harjono Subroto untuk mengikuti *Games of The New Emerging Forces* pada Sekretariat Pertandingan Kopel Senam  
06 Nopember 1963  
tembusan  
2 lembar
- 47 Surat-surat Keputusan Sekretaris Negara tentang pemberian tunjangan, honararium, kenaikan gaji dan pemberhentian pegawai  
28 Oktober - 21 November 1964  
salinan  
1 sampul
- 48 Surat dari Kabag Pegawai Setneg dan Kepegawaian Umum kepada Ka. Biro II Setneg mengenai Pelatihan Jabatan Administrasi Keuangan Niaga dari Lembaga Administrasi Negara.  
15 Desember 1964  
asli  
5 lembar

- 49 Surat-surat keterangan jalan/perintah jalan pegawai Sekretariat Negara RI, Kabinet Perdana Menteri.  
8 Januari 1965 - 9 Mei 1966  
tembusan  
1 sampul
- 50 Surat-surat perintah jalan/dinas pegawai Sekretariat Presidium Kabinet Ampera RI  
2 Juli 1967 - 3 Desember 1968  
tembusan  
1 sampul
- 51 Surat instruksi dari Kepala Biro Penghubung Sekretariat Kabinet No.003/F/4/1968 tentang penempatan jabatan baru personil biro penghubung dalam lingkungan Sekretariat Kabinet.  
27 April 1968  
tembusan  
4 lembar
- 52 Keterangan tentang Susunan pegawai Rumah Tangga Presiden  
tt  
fotokopi  
1 sampul

## 2. Data Pegawai

- 53 Berkas surat-surat kepegawaian Biro Pusat Statistik Kabinet Perdana Menteri an. Entik bin Dulbaku dan J.D Manopo  
Januari 1950 -30 Mei 1960  
asli  
1 sampul
- 54 Berkas pemberhentian pegawai bulanan Biro Ekonomi dan Keuangan an an.Syarifuddin Hamid, dkk.  
15 Juni 1950-26 Oktober 1961  
asli  
1 sampul
- 55 Daftar keterangan pegawai negeri dan keluarganya untuk keperluan Biro Tata Usaha Kepegawaian kantor urusan pegawai di Jogjakarta an.Abdurrahman, R.Pandu Basuki dkk.  
31 Agustus 1959  
asli  
1 sampul
- 56 Daftar riwayat hidup pegawai Kabinet Perdana Menteri RI an. Santoso, Hadi Sri Sukirno dkk.  
1 Desember 1959-31 Desember 1960  
asli  
1 sampul
- 57 Kartu-kartu pegawai Sekretariat Negara  
01 Januari 1961

- asli  
1 sampul
- 58 Daftar nama-nama sukarelawan Trikora dari pegawai Kabinet Menteri Pertama Bagian Keuangan Seksi Penerimaan  
05 Februari 1962  
asli  
1 sampul
- 59 Daftar tempat tinggal, data pegawai dan keluarga serta golongan pegawai Kabinet Perdana Menteri.  
11 Mei 1962  
asli  
1 sampul
- 60 Surat dari Kepala Bagian Umum/Pegawai kepada Dewan Kerja Pilot proyek Distribusi Pegawai Negeri DKI Jakarta mengenai Daftar nama-nama pegawai yang bertempat tinggal di luar Jakarta Raya.  
23 Mei 1962  
asli  
1 sampul
- 61 Berkas data kepegawaian Kabinet Perdana Menteri RI an. Soeldjana untuk urusan pensiun  
21 Desember 1953-15 Januari 1963  
asli  
1 sampul
- 62 Daftar pegawai-pegawai baru Sekretariat Negara Tahun 1963  
22 April - 21 September 1964  
tembusan  
1 sampul
- 63 Daftar permintaan gaji dan rekapitulasi nama-nama pegawai Sekretariat Negara dari Golongan A s.d D Tahun 1966.  
01 Juli - 16 Agustus 1966  
asli  
1 sampul

### **3. Kesejahteraan Pegawai**

- 64 Surat-surat dari Ketua Tata Usaha Kabinet Menteri tentang tunjangan anak angkat dan penyamaan tunjangan kemahalan bagi pegawai yang belum kawin/tidak kawin  
26 Juni 1951  
asli  
1 sampul
- 65 Surat-surat tentang Perubahan Peraturan Dana Kesejahteraan Pegawai  
07 Desember 1953-8 Februari 1961  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 66 Surat-surat permohonan bantuan kesejahteraan pegawai negeri

- 26 April 1957 - 31 Agustus 1966  
tembusan  
1 sampul
- 67 Surat-surat mengenai pemberian beras bagi pegawai Sekretariat Negara  
September 1958 - 02 Mei 1967  
tembusan  
1 sampul
- 68 Surat-surat dari Kepala Bagian Urusan Kepegawaian Sekretariat Negara tentang penggantian  
cuti besar dengan gaji.  
09 Oktober 1959  
asli  
1 sampul
- 69 Tanda penerimaan angsuran pinjaman pegawai dari Tata Usaha Dana Kesejahteraan Pegawai  
Kabinet Perdana Menteri.  
14 Juli 1959 - 06 Juli 1964  
asli  
1 sampul
- 70 Surat-surat dari Bagian Kepala Umum/Pegawai Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala  
Kantor Urusan Pegawai Sekretaris Dewan Urusan Pegawai tentang perbaikan penghasilan  
pegawai/pekerja negeri dan pengangkatan pegawai negeri tetap tunjangan tetap.  
1 Juni 1960-31 Juli 1960  
asli  
1 sampul
- 71 Daftar potongan Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP) Kabinet Menteri Pertama Tahun 1960  
1965.  
11 Oktober 1960  
asli  
1 sampul
- 72 Surat-surat mengenai penyediaan rumah dan mess bagi pegawai sekretariat negara  
19 Nopember 1960-25 Januari 1969  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 73 Surat dari Ketua Badan Pemeriksa Koperasi Kabinet Perdana Menteri kepada Pengurus  
kooperasi Kabinet Perdana Menteri mengenai hasil pemeriksaan dan neraca akhir Tahun  
1957.  
14 Januari 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 74 Surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan kemahalan dan tunjangan anak  
bagi pegawai Kabinet Perdana Menteri RI an.Komar Soekatmaredja, Arsjiil dkl  
20 Januari 1961  
asli

- 1 sampul
- 75 Pengumuman-pengumuman dari Badan Kesejahteraan Pegawai Kabinet Menteri Pertama tentang sewa rumah, pembagian beras, pemutaran film dll  
26 Februari 1961-23 Juni 1962  
asli  
1 sampul
- 76 Surat dari Kepala Bagian Umum Pegawai kepada Kepala Bagian/Seksi Kabinet Perdana Menteri tentang pelaksanaan P.P.36/1960 tentang tambahan P.P.19/1952 (peraturan pensiun janda/tunjangan anak yatim piatu pegawai negeri sipil)  
24 Oktober-27 November 1961  
asli  
1 sampul
- 77 Berkas mengenai poliklinik (laporan bulanan, penempatan dokter dan jadwal) dan beberapa pelayanan kesehatan lainnya bagi pegawai Setneg  
1961-1965  
asli  
1 sampul
- 78 Surat-surat mengenai pemberian bantuan santunan kematian pegawai Sekretariat Negara dan keluarganya.  
20 Februari 1961- 27 Januari 1971  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 79 Surat-surat mengenai keterangan nikah dan kelahiran anak pegawai Sekretariat Negara  
22 Juli - 15 Agustus 1964  
salinan  
1 sampul
- 80 Surat-surat mengenai kasus pengusiran dari rumah pegawai Sekretariat Negara a.n. Harun Hartono.  
15 Januari - 14 April 1964  
asli, tembusan  
1 sampul
- 81 Bon-bon peminjaman alat-alat olah raga di Sekretariat Negara Tahun 1964-1966  
14 Juli 1964-8 Juli 1966  
asli  
1 sampul
- 82 Surat-surat dari Kepala Seksi Kesejahteraan Pegawai Sekretariat Negara mengenai permohonan jatah rokok, minyak lampu, ban sepeda, beras dan asrama putra/putri  
20 Mei - 12 Juli 1965  
pertinggal  
8 lembar

#### 4. Perkumpulan Pegawai

- 83 Surat-surat mengenai pemotongan gaji pegawai untuk simpanan anggota Koperasi Kabinet Perdana Menteri  
Oktober 1958 - Oktober 1965  
asli  
2 sampul
- 84 Laporan umum Pengurus Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri pada rapat anggota Tahunan Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri  
22 Februari 1959  
salinan  
8 lembar
- 85 Berkas mengenai kegiatan, keanggotaan, pembukuan, inventaris, dan persediaan barang Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri  
10 Juni 1959 - 20 Juli 1961  
asli  
1 sampul
- 86 Daftar pegawai-pegawai yang telah mendaftar menjadi anggota baru Koperasi Pegawai Kabinet Menteri Pertama.  
1 Januari 1960-31 Oktober 1961  
asli  
1 sampul
- 87 Surat-surat mengenai penyediaan barang-barang yang diminta oleh anggota Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri  
Januari 1960-Oktober 1968  
asli  
1 sampul
- 88 Terbitan "Siaran Berkala" oleh Seksi Penerangan/Pendidikan SS dan Pemuda Kabinet Perdana Menteri.  
23 Januari 1960 dan 5 Juni 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 89 Putusan-Putusan Rapat Pengurus Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri.  
25 Februari 1960 - 7 Agustus 1961  
asli  
1 sampul
- 90 Surat-surat mengenai Rencana Kerja Bagian Kesenian Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri periode 1960/1961.  
10 Mei - 29 Agustus 1960  
asli  
6 lembar
- 91 Surat Ketua Serikat SeKerja Kabinet Perdana Menteri kepada Anggota Serikat SeKerja Kabinet Perdana Menteri tentang undangan rapat anggota untuk pemilihan pengurus baru, beserta lampiran.



- 23 Juni 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 92 Laporan Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri pada Rapat Anggota Tahun 1960  
12 Juli 1960-22 Desember 1960  
asli  
1 sampul
- 93 Surat undangan rapat anggota Koperasi Pegawai Sekretariat Negara kepada seluruh anggota Koperasi Pegawai Sekretariat Negara beserta laporan pengurus koperasi  
15 Agustus 1960  
tembusan  
5 lembar
- 94 Surat-surat mengenai Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Sekretariat Negara  
22 Oktober 1960 - 27 Oktober 1963  
asli  
3 lembar
- 95 Pengumuman dari Ketua Tim Pelaksana Rekreasi Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri mengenai tata tertib perjalanan darmawisata ke Proyek Jatiluhur  
29 Oktober 1960  
fotokopi  
1 lembar
- 96 Nota dari Ketua Badan Pemeriksa Koperasi Kabinet kepada Pengurus Koperasi Kabinet Perdana Menteri mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan dan Neraca Akhir Tahun 1957 Koperasi Kabinet Perdana Menteri, beserta lampiran  
14 Januari 1961  
asli  
1 sampul
- 97 Surat-surat mengenai penyelenggaraan malam halal bihalal oleh Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri.  
27 Januari - 17 Maret 1961  
asli  
7 lembar
- 98 Surat Ketua dan Sekretaris Pemuda Kabinet Perdana Menteri kepada S. Soewandhi tentang undangan rapat pleno anggota ke I, beserta lampiran  
5 Februari 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 99 Laporan Umum Pengurus Pemuda Kabinet Perdana Menteri pada Rapat Pleno Anggota ke I.  
10 Februari 1961  
asli  
1 sampul

- 100 Berkas mengenai anggaran dasar, rumah tangga dan tata tertib Yayasan Bunga Kamboja Kabinet Perdana Menteri.  
20 Februari - 4 Maret 1961  
asli  
1 sampul
- 101 Surat dari SS Kabinet Perdana Menteri RI kepada para anggota mengenai wakil dari SS Kabinet Menteri dalam delegasi RKS pusat pegawai negeri  
27 Februari 1961  
fotokopi  
2 lembar
- 102 Terbitan "Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri" oleh Bagian Penerangan SS Kabinet Perdana Menteri, antara lain mengenai kunjungan persahabatan ke Purwakarta  
2 dan 15 Mei 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 103 Surat dari Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri kepada Seluruh Anggota Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri mengenai undangan Rapat Anggota, beserta lampiran.  
20 Juli 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 104 Surat tentang daftar buku-buku yang diperlukan untuk kursus kader Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri.  
12 Agustus 1961  
asli  
3 lembar
- 105 Nota dari Sekretaris Koperasi Pegawai Kabinet Menteri Pertama kepada A. Sjojfan mengenai penyampaian bahan-bahan laporan Koperasi Pegawai Kabinet Menteri Pertama Tahun 1961, beserta lampiran.  
10 Mei 1962  
asli  
1 sampul
- 106 Majalah bulanan "Warta Koperasi" edisi September/Oktober 1962, penerbit Pusat Koperasi Pegawai Negeri Jakarta-Raya.  
Oktober 1962  
asli  
1 sampul
- 107 Surat dari Ketua Pengurus Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri kepada semua anggota koperasi mengenai permintaan persetujuan penggabungan antara Koperasi Pegawai Kabinet Menteri Pertama dengan Koperasi Pegawai Biro Ekonomi dan Keuangan.  
17 Desember 1962  
fotokopi  
1 sampul

- 108 Resolusi Hasil Sidang Pleno RKS SB/SS Pegawai Negeri DIY tentang Uang harian Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Sipil  
18 Oktober 1963  
asli  
1 lembar
- 109 Surat-surat dari Ketua Umum Persatuan Olah Raga Sekretariat Negara tentang hasil Rapat Paripurna Persatuan Olah Raga Sekretariat Negara RI, beserta lampiran  
18 April 1964  
asli  
1 sampul
- 110 Surat dari Sekretaris POR Komisariat Sekretariat Negara kepada Ketua Umum POR Lenati mengenai rencana anggaran belanja latihan/seleksi POR Lenati Komisariat Sekretariat Negara.  
07 April 1965  
asli  
2 lembar

### **C. Organisasi dan Tata Laksana**

- 111 Daftar tugas-tugas dari bagian rumah tangga Kabinet Perdana Menteri RI  
01 Januari 1960  
asli  
1 sampul
- 112 Surat dari Kepala Bagian Rumah Tangga kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai usul peninjauan kembali bentuk dan susunan Kabinet Perdana Menteri  
21 Agustus 1960  
asli  
4 lembar
- 113 Susunan Sub Bagian Pengawasan/Inpeksi pada Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri RI.  
1 September -31 November 1960  
asli  
1 sampul
- 114 Daftar rincian pembagian tugas Pekerjaan dalam lingkungan Seksi UUDP Tahun Anggaran 1962.  
14 Nopember 1961  
asli  
2 lembar
- 115 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No. 140/M.P./1962 tentang pembagian Kabinet Presiden, Sekretarat Militer Presiden, Rumah Tangga Presiden dan Biro-biro dalam Sekretariat Negara. Nb: Tidak disertai lampiran  
31 Oktober 1962  
salinan  
2 lembar

116 Surat-surat tentang pemindahan/pengalihan pegawai berkaitan dengan perubahan nama dari Kabinet Menteri Pertama menjadi Sekretariat Negara  
03 Desember 1962-10 Januari 1963  
asli  
1 sampul

117 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.120/M.P/1963 tentang Tugas Kewajiban dan Susunan Organisasi Bagian Kearsipan Sekretariat Negara  
16 Oktober 1963  
salinan  
5 lembar

#### **D. Hukum**

118 Tinjauan atas rancangan peraturan kerja lembur dari Kepala bagian umum  
08 Januari 1959  
asli  
1 sampul

#### **E. Kearsipan**

119 Agenda surat-surat Kementerian Pertahanan Tahun 1946 - 1960  
1946 - 1947  
asli  
1 sampul

120 Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Sekretariat Kabinet  
1950 - 1952  
asli  
2 sampul

121 Surat dari Perdana Menteri RI kepada semua Kepala Bagian di Perdana Menteri mengenai keamanan dalam surat-menyurat  
23 Januari 1954  
asli  
1 lembar

122 Catatan mengenai surat-surat grasi.  
30 Maret 1957  
asli  
1 sampul

123 Agenda penerimaan pos wessel Tahun 1958 - 1960  
01 November 1958 - 03 November 1960  
asli  
1 sampul

124 Peraturan Pengurusan tata usaha (*Regelen Voor Het Administratief Beheer Statsbland 1923 No.381*)  
1958  
salinan

6 lembar

- 125 Memo Kepala Biro I (Administrasi dan Organisasi) kepada Biro I-VI tanpa tanggal Tahun 1962 tentang penyampaian pedoman kerja tata usaha kearsipan, beserta lampiran.

1 Januari 1962  
asli  
1 sampul

- 126 Agenda surat masuk dan surat keluar Sekretariat Menteri Penghubung DPR/MPR Tahun 1963, beserta lampiran.

Januari 1963  
asli  
1 sampul

- 127 Surat Keputusan Menteri Pertama No.119/M.P/1963 tentang Pilot Project Tatalaksana Kearsipan terhadap administrasi Bagian Arsip dan Ekspedisi dari Biro I Sekretariat Negara.

16 Oktober 1963  
salinan  
1 sampul

- 128 Surat Pemberitahuan Sekretariat Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 5/4/KOTOE-Sekrt/63 tentang cap/stempel tersendiri bagi Panglima dan Stat Kesatuan Operasi I-III.

18 Oktober 1963  
asli  
1 sampul

- 129 Surat Menteri Dalam Negeri kepada semua Menteri tentang penggantian cap jabatar

23 Nopember 1963  
asli  
1 lembar

- 130 Laporan mengenai Survey Design Internship Survey kearsipan Daerah dalam rangka Pilot Project Model Kearsipan Daerah

15 Oktober 1972  
asli  
3 lembar

#### **F. Perlengkapan**

- 131 Surat-surat mengenai penggunaan alat tulis kantor dan barang-barang perlengkapan di lingkungan Sekretariat Negara

13 Februari 1958-30 Maret 1966  
asli  
2 sampul

- 132 Surat dari Ketua DAGI kepada pimpinan Biro V DAGI mengenai peraturan untuk kendaraan bermotor DAGI sebagai milik pemerintah

04 April 1960  
tembusan

- 1 lembar
- 133 Surat-surat mengenai pembangunan dan penggunaan perumahan pegawai Sekretariat Negara.  
 4 Oktober 1960 - 31 Agustus 1963  
 asli  
 4 lembar
- 134 Surat-surat mengenai penaksiran harga rumah di Jalan Ciampelas No. 95 Bandung dan gedung Kramat Raya 156 Jakarta.  
 1 Desember 1960 - 16 Januari 1961  
 asli  
 1 sampul
- 135 Surat Serah Terima tugas Pekerjaan inventaris Seksi Peralatan dari Sdr.Sutisno kepada Sdr.Suparman dan rencana kebutuhan gudang pada Seksi Peralatan  
 02 Januari 1961  
 asli  
 3 lembar
- 136 Surat dan Nota dinas Pemeliharaan gedung kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Kabinet Perdana Menteri RI.  
 1 April 1961-31 Desember 1961  
 asli  
 1 sampul
- 137 Surat-surat dari Dewan Asian Games Indonesia tentang perintah perbaikan kendaraan  
 4 - 27 Juni 1961  
 tembusan  
 1 sampul
- 138 Daftar tarif beristirahat/menginap (dengan makan) Wisma Marga Waluya bagi Pegawai Negeri di Ciumbuleuit Bandung dan Puncak Cianjur mulai tanggal 1 Agustus 1961  
 1 Agustus 1961  
 salinan  
 5 lembar
- 139 Surat-surat Komandan Resimen Sukarelawan Satya Negara tentang permohonan peralatan dan perlengkapan berupa pakaian dan pengobatan untuk sukarelawan yang melakukan konsinyering atau piket.  
 27 Oktober 1961-30 Oktober 1965  
 asli  
 1 sampul
- 140 Surat-surat tentang penerimaan pakaian dinas pegawai Kabinet Menteri Pertama Tahun 1962.  
 20 Januari 1962-27 Oktober 1962  
 asli  
 1 sampul

- 141 Surat-surat tentang ketersediaan radio transistor untuk pegawai Kabinet Menteri Pertama.
- 15 Maret 1962  
asli  
2 lembar
- 142 Surat-surat mengenai bantuan kendaraan untuk antar jemput kerja, kepentingan pengangkutan jenazah dan melayat bagi pegawai - pegawai Sekretariat Negara
- 19 Juni 1963 - 07 Juni 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 143 Surat dari Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus kepada Gubernur DKI Jakarta mengenai pembelian mobil Fiat 1800 untuk Sekretariat Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/DAPERNAS.
- 23 April 1963  
pertinggal  
8 lembar
- 144 Surat-surat tentang permohonan pemakaian, perbaikan dan pembangunan rumah instansi serta gudang.
- 8 April - 26 Maret 1965  
asli, tembusan  
1 sampul
- 145 Surat-surat tentang daftar barang inventaris Sekretariat Kepresidenan yang ditempatkan di kamar kerja officer istana Tahun 1964-1968.
- 9 Desember 1964-8 Februari 1968  
asli  
1 sampul
- 146 Surat Kepala Bidang Pegawai/Kepegawaian Umum kepada Direktorat Perniagaan dan KSLN PN Permina tentang permohonan mendapatkan jatah minyak pelumas untuk kendaraan.
- 26 Juni 1965  
asli  
2 lembar
- 147 Surat Kepala Bagian Rapat dan Sidang kepada Kepala Biro A (Biro Tata Usaha) tentang permintaan *tape recorder* untuk keperluan sidang-sidang presidium kabinet
- 26 Nopember 1966  
asli  
1 sampul
- 148 Surat dari Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan kepada Sekretaris Presidium Kabinet RI tentang penjualan mobil pemerintah
- 11 Oktober 1967  
asli  
8 lembar
- 149 Surat-surat kepada Kepala Bagian Perlengkapan mengenai laporan kerja Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai dan Seksi Kesehatan, Sekretariat Kabinet

7 Juni - 08 November 1968  
asli  
4 lembar

## II. SUBSTANTIF

### A. Pembantu Teknis Presiden

#### 1. Kerumahtangaan

- 150 Surat-surat Kuasa dari Sekretaris Negara kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melakukan perluasan pembaharuan dan perbaikan terhadap Istana- istana Presiden di Jakarta, Bogor, Cipanas.

08 Maret - 20 September 1960  
tembusan  
1 sampul

- 151 Surat Perintah Pejabat Presiden RI No.01 Tahun 1967 tentang penugasan Sdr. Ichsan S.H (Sekretaris Negara), Sekretaris Presidium Kabinet dan Komandan Satuan Tugas POMAD untuk bertanggung jawab dan mengurus inventaris istana berupa personil, materil, keuangan serta dokumen atau arsip/surat menyurat.

2 Mei 1967  
tembusan  
4 lembar

- 152 Daftar makan Rumah Tangga Kepresidenan oleh SPRI urusan umum atau Sekretaris Presiden.

02 Mei 1968  
asli  
1 sampul

- 153 Daftar nama pengirim karangan bunga berhubung dengan lahirnya Dyah Mutiara Sukmawati Sukarno Putri.

tt  
tembusan  
6 lembar

#### 2. Keprotokolan

- 154 Laporan mengenai rencana penjemputan tamu-tamu agung dari India (Pandit Jawaharlal Nehru).

02 Juni 1950  
konsep  
1 sampul

- 155 Surat Pengumuman Pemerintah oleh Perdana Menteri mengenai perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus Tahun 1951.

7 Agustus 1951  
asli  
1 sampul

- 156 Laporan mengenai Upacara Perayaan Hari Tahun Baru 1 Januari 1952 di Istana Negara

01 Januari 1952  
konsep



- 1 sampul
- 157 Naskah-naskah pidato Presiden Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Brazil, di depan Parlemen Brazil dan pernyataan dalam konferensi pers di Rio de Janeiro.
- Mei 1959  
salinan  
1 sampul
- 158 Naskah-naskah pidato Presiden Soekarno dalam kunjungan ke Turki, Vietnam, Jepang, Argentina, dan Penganugerahan Doktor HC di Universitas Warsawa, nb.: Bahasa Inggris
- 1 Juni-31 Juni 1959  
asli  
1 sampul
- 159 Berkas mengenai kunjungan Presiden Soekarno ke Jepang (Jadwal acara dan pidato-pidato Soekarno).
- 9-19 Juni 1959  
salinan  
1 sampul
- 160 Pidato-pidato Presiden Soekarno pada beberapa acara selama kedatangan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchov di Indonesia
- 18 - 29 Februari 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 161 Surat-surat mengenai rencana acara di Istana Merdeka pada perayaan 17 Agustus 1960.
- 6 - 13 Agustus 1960  
asli  
5 lembar
- 162 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Pertama mengenai Keputusan DPA tentang Perincian pidato Presiden pada 17 Agustus 1960 dengan nama Jalannya Revolusi Kita" dan Pidato pada Sidang Umum PBB 30 September 1960 berjudul "Membangun Dunia Kembali" yang disampaikan oleh Sekretaris DPA
- 25 Februari 1961  
asli  
1 sampul
- 163 Surat Menteri Pertama kepada para menteri mengenai pelaksanaan perjalanan ke luar negeri dan Surat Edaran Presiden RI No.2 Tahun 1961 tentang Prosedur Kunjungan Tamu Negara.
- 16 Maret dan 10 Mei 1961  
salinan  
2 lembar
- 164 Daftar rencana acara kunjungan Delegasi Kongres Rakyat Nasional RRT ke Indonesia pada 14 - 25 Agustus 1961.

- Agustus 1961  
asli  
7 lembar
- 165 Surat dari Sekretaris Negara kepada Menteri Luar Negeri mengenai permohonan persetujuan pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Yugoslavia, Burma, Philipina, Persekutuan Tanah Melayu, Belgia dan Australia untuk Indonesia  
8 Januari - 21 September 1962  
asli  
1 sampul
- 166 Naskah pidato Presiden Soekarno pada penerimaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Persekutuan Tanah Melayu untuk RI. (nb: tidak lengkap)  
27 Oktober 1962  
asli  
2 lembar
- 167 Berkas tentang persiapan penyampaian Amanat Presiden pada Peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1962  
3 November 1962-11 Desember 1962  
asli  
1 sampul
- 168 Surat dari Pimpinan DPR-GR kepada para Wakil Menteri Pertama mengenai kunjungan Delegasi Parlemen Selandia Baru  
23 Maret 1963  
asli  
6 lembar
- 169 Surat dari Saenun tentang sumbangan bahan-bahan dalam penyusunan Pidato Kenegaraan P.J.M Presiden Tanggal 17 Agustus 1964.  
24 Juli 1964  
asli  
1 sampul
- 170 Surat-surat mengenai Pelaksanaan Instruksi Wakil Perdana Menteri.III dalam rangka Peringatan Sepuluh Tahun Konferensi Asia - Afrika  
15 Februari - 10 Maret 1965  
salinan  
4 lembar
- 171 Amanat Presiden Sukarno yang berjudul "Nekolim Musuh Kita Yang Terbesar!" dalam pelantikan Menteri/PANGAD, Mayor Jendral Soeharto tentang Nekolim Musuh kita terbesar dari Depertemen Penerangan RI, beserta lampiran  
16 Oktober 1965  
asli  
1 sampul

- 172 Surat Menteri Penasihat Presiden Urusan Politik Umum tentang Daftar Nama-nama Rombongan Menteri Penasehat Presiden Urusan Politik Umum DR. H. Roeslan Abdulgani dalam rangka Kunjungannya ke Bali pada tanggal 16-19 Agustus 1966, beserta lampiran.
- 16 Agustus 1966  
asli  
1 sampul
- 173 Naskah Pidato Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/1966 di depan prajurit ABRI mengenai pengumuman penyerahan kekuasaan dari Presiden kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/1966.
- 23 Februari 1967  
fotokopi  
3 lembar
- 174 Naskah pidato Sekretaris Presidium Kabinet Ampera di depan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia Komisariat.
- 29 Maret 1967  
konsep  
1 sampul
- 175 Naskah Sambutan Ketua Presidium Kabinet Ampera pada Upacara Dies Natalis ke IX Lembaga Administrasi Negara
- 5 Mei 1967  
asli  
1 sampul
- 176 Naskah Pidato Pejabat Presiden pada pelantikan duta besar untuk negara USSR, Vietnam Utara dan kantor PBB di Jenewa
- 13 Mei 1967  
fotokopi  
3 lembar
- 177 Naskah Pidato Pejabat Presiden RI pada Kongres Persit Kartika Chandra Kirana
- Juni 1967  
konsep  
4 lembar
- 178 Naskah Pidato Presiden RI pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila
- 01 Juni 1967  
konsep  
1 sampul
- 179 Naskah sambutan Presiden RI pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-12 Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (Kespekri)
- 12 Juni 1967  
konsep  
1 sampul

- 180 Naskah pidato sambutan Pejabat Presiden RI di muka Forum Seminar Pembangunan Pertanian di Yogyakarta.  
01 Juli 1967  
salinan  
14 lembar
- 181 Naskah Pidato Pejabat Presiden RI pada Mukhtar Partai Nahdatul Ulama  
04 Juli 1967  
fotokopi  
1 sampul
- 182 Sambutan Presiden RI pada peringatan 50 Tahun PIKAT (Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya) di Aula Hankam  
08 Juli 1967  
salinan  
6 lembar
- 183 Naskah sambutan Pejabat Presiden RI pada Kongres PEPABRI (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata RI) dan Peresmian proyek Jatiluhur  
28 Agustus 1967  
konsep  
1 sampul
- 184 Naskah Uraian Presiden Soeharto di depan *Business Internasional Indonesian Roundtable* di Istana Merdeka.  
13 September 1968  
fotokopi  
16 lembar
- 185 Naskah pidato Presiden Soeharto di depan Business International Indonesian Roundtable, di Istana Merdeka, Jakarta.  
13 September 1968  
salinan  
16 lembar
- 3. Keamanan Presiden**
- 186 Surat-surat keterangan pengawal yang mengikuti perjalanan dinas Presiden ke Bandung  
14 Januari - 19 Juni 1961  
tembusan  
6 lembar
- 187 Surat dari Press Officer Istana kepada Komandan Regimen Tjakrabirawa tentang saran-saran konstruktif untuk perbaikan petugas Tjakrabirawa.  
17 April 1964  
tembusan  
1 sampul
- 188 Laporan Piket Petugas Piket Konsinyer dari Ton Tempur BPK di Sekneg Tahun 1966  
Januari 1966

asli  
1 sampul

## **B. Administrasi Pemerintahan**

### **1. Keuangan**

#### **a. Anggaran**

189 Berkas keuangan VPL (Vereeniging Personeel Landskantoren) Perusahaan Pegawai Kantor Negeri.

31 Desember 1945 - 26 November 1959  
asli  
1 sampul

190 Definitieve Opstelling Begroting 1949 Departement Van Economische Zaken, Departement Van Binnenlandse Zaken "Definitieve Opstelling", Departemen Landbouw end Viserij., Dep. Van Justitie.

01 Januari 1949  
asli  
1 sampul

191 Algemene Rekenkamer Jaarverslag 1949 Nederlands Tekst

01 Januari 1949  
asli  
1 sampul

192 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Kepala kantor Jawatan Perjalanan Negeri tentang Ongkos Charter Plane Kabinet Republik Indonesia ke Jogjakarta untuk menjemput para anggota Kabinet RI dari Jogjakarta ke Jakarta

18 Agustus 1950  
tembusan  
1 lembar

193 Surat dari Menteri Penerangan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai penyampaian Surat Edaran Menteri Penerangan No. 1 - 4 tentang anggaran belanja Jawatan Penerangan.

12 Maret 1951  
asli  
7 lembar

194 Rancangan anggaran belanja Kementerian Perekonomian, Perhubungan, Keuangan, PP dan K, Dalam Negeri dan Sosial

1 Januari 1952- Desember 1953  
fotokopi  
1 sampul

195 Rencana anggaran belanja yang diperlukan selama 6 bulan untuk daerah Operasi Besar di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah Sebelah Barat

1952  
salinan  
1 sampul

- 196 Laporan penjelasan Sekretariat Uni Indonesia-Nederland Tahun 1953 tentang Rancangan Urusan Sementara Republik Indonesia dalam Beaja-Beaja Uni Indonesia-Nederland.
- 01 Januari 1953  
fotokopi  
7 lembar
- 197 Berkas mengenai penyusunan buku pedoman mata anggaran Biro Rekonstruksi Nasional Pusat.
- 15 Mei 1954  
asli  
1 sampul
- 198 Surat-surat tentang penggeseran kredit pada mata anggaran lembaga
- 17 Februari 1956 - 8 Januari 1962  
asli  
1 sampul
- 199 Laporan rencana anggaran belanja untuk Angkatan Darat Resimen Infantri 21 Tanjung Pura, Pamong Praja dan Kepolisian di wilayah Kalimantan selatar
- 23 April 1956  
salinan  
1 sampul
- 200 Surat-surat mengenai daftar usul pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Negar
- 19 - 31 November 1956  
asli  
1 sampul
- 201 Daftar Anggaran tentang penjelasan lanjutan Belanja Pegawai Kementerian Kehakimai
- 1956  
fotokopi  
1 sampul
- 202 Surat-surat dari Jawatan Perjalanan delegasi Indonesia ke sidang Konsultatif Meeting Colombo Plan di Saigon dan tentang Anggaran dan biaya perjalanannya Tahun 1957 - 1959.
- 1 Januari-24 September 1957  
asli  
1 sampul
- 203 Pos Anggaran RI untuk Tahun dinas 1957 bagian I pemerintah agung dan badan - badan pemerintah tertinggi.
- Januari 1957  
fotokopi  
1 sampul
- 204 Surat-surat mengenai anggaran belanja Biro Pusat Statistik Tahun dinas 1958-1960
- 05 Desember 1957-5 Oktober 1961  
asli  
1 sampul

- 205 Surat dari Kabinet Presiden Kepada Sekjen DPR mengenai pemberian dana pensiun DPR kepada Sdr. Sidik Kertapati, Sdr H. Masyur Rivai dan Sdr. Ali Sastroamidj  
23 Januari 1958  
asli  
3 lembar
- 206 Catatan jumlah belanja pegawai yang telah dikeluarkan pada Tahun 1957  
20 Februari 1958  
asli  
1 sampul
- 207 Surat-surat tentang anggaran belanja Lembaga Tenaga Atom Tahun dinas 1960- 1963  
28 Maret 1958-29 September 1962  
tembusan  
6 lembar
- 208 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama tentang Penggeseran Kredit Anggaran DPR RI, Kementerian Produksi, dan Sekretariat Negara  
20 September 1958-30 November 1961  
tembusan  
1 sampul
- 209 Surat-surat tentang anggaran biaya pembangunan ekonomi dalam rangka memulihkan dan memelihara keamanan di daerah-daerah bermasalah di terroterium IV  
21 Oktober 1958-31 Januari 1959  
asli  
1 sampul
- 210 Daftar Rencana Anggaran Belanja "Perusahaan Negara Pasteur"  
Januari 1959-1960  
asli  
1 sampul
- 211 Berkas mengenai pengajuan anggaran tambahan Tahun 1959 Biro Perancang Negara  
02 Maret 1959  
asli  
1 sampul
- 212 Surat dari Menteri Keuangan kepada para menteri mengenai Susunan Anggaran Belanja, beserta lampiran.  
29 Agustus 1959  
fotokopi  
1 sampul
- 213 Surat-surat tentang anggaran belanja Dewan Film Indonesia  
31 Agustus 1959-20 Februari 1961  
asli  
1 sampul

- 214 Berkas mengenai rencana anggaran belanja untuk Asian Games IV  
2 Desember 1959 - 30 Desember 1960.  
tembusan  
1 sampul
- 215 Berkas mengenai anggaran belanja, pendapatan dan pengeluaran pada Kantor Panitia Urusan Pemulihan Hak, Jawatan Sandi, Dewan Pertimbangan Agung  
1959  
asli  
1 sampul
- 216 Berkas mengenai daftar perincian mata anggaran dari Anggaran Badan-badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi Tahun dinas 1959-1960  
1959 - 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 217 Daftar rincian Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat.  
1960  
fotokopi  
1 sampul
- 218 Daftar Anggaran Perusahaan (I.B.W.) Garam dan Soda Negara Kementerian Perindustrian.  
1960  
asli  
1 sampul
- 219 Daftar Anggaran RI Departemen Keuangan  
1960  
asli  
1 sampul
- 220 Daftar Anggaran Perusahaan Listrik Negara Direksi Kontruksi dan Direksi Pembangkit dan Penyaluran.  
1960  
asli  
1 sampul
- 221 Konsep Rancangan Anggaran Belanja Depertemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.  
1960  
asli  
1 sampul
- 222 Berkas mengenai ulangan ringkas Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Depertemen Kehakiman, Departemen Perburuhan, Departemen Agraria dan Kabinet Menteri Produksi.  
1960  
fotokopi



		1 sampul
223	Daftar Anggaran Belanja Jawatan pos, Telegrap dan Telepon	1960 asli 1 sampul
224	Daftar Anggaran Belanja Depertemen Perindustrian Rakyat	1960 asli 1 sampul
225	Daftar Anggaran Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat	1960 fotokopi 1 sampul
226	Daftar Anggaran Belanja Pusat Perkebunan Negara	1960 asli 1 sampul
227	Daftar Anggaran Kesejahteraan Rakyat	1960 fotokopi 1 sampul
228	Laporan seksi anggaran belanja Panitia Kerja Persiapan MPRS	02 Januari 1960 asli 4 lembar
229	Surat-surat mengenai Anggaran Belanja Tahun dinas 1960, Anggaran Tambahan dan ralat-ralat atas anggaran Tahun dinas 1959	29 Januari - 16 Februari 1960 salinan 1 sampul
230	Surat-surat dari Lembaga Administrasi Negara tentang Dana Counter Part untuk Proyek Pejempongan.	16 Februari 1960 tembusan 1 sampul
231	Nota dari Wakil Departemen Keuangan dalam Panitia Interdep Pembangunan Ibukota Pekanbaru kepada Menteri Keuangan mengenai kebutuhan anggaran pemindahan Ibukota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru	16 Mei 1960 salinan 6 lembar

- 232 Daftar anggaran belanja Dewan Tanda-tanda Kehormatan  
14 Juni-22 September 1960  
asli  
1 sampul
- 233 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai penggantian anggaran belanja Tahunan dari Biro Bantuan Luar Negeri ke pos Menteri Pertama  
06 Juli 1960  
asli  
1 sampul
- 234 Surat-surat dari Biro Ekonomi dan Keuangan mengenai biaya para expert dalam rangka bantuan luar negeri, beserta lampiran  
29 Juli 1960 - 19 Juli 1961  
asli  
1 sampul
- 235 Daftar rincian beban tetap dan beban sementara Kabinet Perdana Menteri Tahun dinas 1959 s.d 1960.  
01 September 1960 - 26 Mei 1961  
asli  
1 sampul
- 236 Daftar pembayaran beban anggaran beberapa Departemen Badan Kekuasaan Pemerintahan Tertinggi.  
September 1960-30 Desember 1961  
asli  
1 sampul
- 237 Surat-surat mengenai permohonan tambahan anggaran untuk keperluan rombongan atlet Olympic Games asal Indonesia cabang Balap Sepeda di Bangkok, Thailand  
29 September - 06 Desember 1960  
asli  
1 sampul
- 238 Surat dari Kepala Biro Pusat Statistik kepada Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri mengenai rancangan PP dan intruksi terkait tentang sensus penduduk Tahun 1961.  
14 Oktober 1960  
asli  
1 sampul
- 239 Laporan mengenai rencana biaya Pekerjaan perbaikan berat rumah dinas Dewan Pengawas Keuangan Jalan Tampomas No. 11 Bogor Tahun 1960  
25 Oktober 1960  
asli  
1 sampul
- 240 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pengesahan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 1960 untuk kredit bagi panitia kerja persiapan gedung MPRS di Bandung.  
15 November 1960 - 1 Desember 1960  
salinan

- 1 sampul
- 241 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang kredit anggaran beberapa badan-badan pemerintahan seperti DPR, Biro Pusat Statistik, Kabinet Menteri Pertama, Arsip Nasional; beberapa Daerah Swatantra seperti Bandung, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat, serta Panitia Peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan RI, dll  
30 November 1960-23 November 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 242 Surat-surat tentang perubahan No. mata anggaran untuk biaya-biaya follow up keamanan dalam Tahun 1961 oleh Kepala Biro Keamanan Kementerian Keamanan Nasional.  
21 Desember 1960  
asli  
1 sampul
- 243 Daftar rincian Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Departemen Luar Negeri  
1960  
fotokopi  
1 sampul
- 244 Daftar anggaran belanja Departemen Urusan Veteran  
1960  
asli  
1 sampul
- 245 Daftar anggaran belanja penataran Angkatan Laut  
1960  
asli  
1 sampul
- 246 Daftar anggaran Departemen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Pos, Telegram dan Telepon, dan Jawatan Keret Api.  
1960  
asli  
1 sampul
- 247 Daftar anggaran Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.  
1960  
asli  
1 sampul
- 248 Daftar anggaran belanja Perusahaan Reproduksi dan Percetakan Direktorat Topografi A.D.  
1960  
asli  
1 sampul
- 249 Daftar anggaran Perusahaan Pelabuhan.  
1960

		asli
		1 sampul
250	Garis besar politik dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan (Satuan 3A) mengenai konsep rancangan anggaran belanja Departemen P.P dan K	1960 asli 1 sampul
251	Daftar anggaran Perindustrian dasar dan Pertambangan	1960 asli 1 sampul
252	Laporan mengenai penjelasan anggaran belanja dinas modal dan eksploitasi Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (TABA) dan perusahaan negara tambang Timah BangkaTahun.	1960 asli 1 sampul
253	Laporan mengenai penjelasan anggaran belanja Departemen Pertanian Tahun 1960	1960 asli 1 sampul
254	Daftar anggaran Departemen Penerangan	1960 asli 1 sampul
255	Daftar Rencana Anggaran Belanja Percetakan Negara	1960 asli 1 sampul
256	Daftar jumlah kartu - kartu pengawasan kredit anggaran belanja Tahun 1960	1960 asli 1 sampul
257	Daftar anggaran Bagian V Keamanan - Pertahanan, Departemen Kepolisian	1960 asli 1 sampul
258	Berkas mengenai perincian mata anggaran dari Anggaran Badan-badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi Tahun dinas 1960-1961	1960 - 1961 fotokopi 2 sampul

- 259 Berkas mengenai perincian mata anggaran dari Anggaran Badan-badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi Tahun dinas 1961-1962  
1961 - 1962  
asli  
3 sampul
- 260 Daftar Anggaran belanja proyek - proyek Lembaga Tenaga Atom Tahun dinas 1961  
14 Januari 1961-10 Mei 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 261 Surat dari Departemen Keuangan RI kepada Menteri Pertama dan Para Menteri tentang penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Tahun 1961  
03 Februari 1961  
fotokopi  
1 lembar
- 262 Surat Pengantar Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden tentang pengiriman ralat atas RAPB Tahun 1961 dari Departemen: Keuangan, Agraria, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.  
10 Februari 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 263 Surat dari Wakil ketua MPRS kepada Menteri Pertama dan Keuangan tentang persekot lebaran bagi para anggota MPRS.  
20 Februari 1961  
tembusan  
4 lembar
- 264 Surat-surat tentang anggaran belanja beberapa badan-badan pemerintahan seperti Departemen Kepolisian, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kabinet Menteri Pertama, Lembaga Administrasi Negara, Departemen Angkatan Laut, dll., dari Tahun 1961-1962  
1 Maret 1961-1962  
fotokopi  
1 sampul
- 265 Surat Direktur Lembaga Aerial Survey kepada Ketua Dewan Pembangunan tentang Penyampaian Anggaran Belanja Lembaga Aerial Survey Selama 3 Tahun, beserta lampiran.  
28 Maret 1961-6 April 1961  
asli  
1 sampul
- 266 Instruksi dari Thesauri Jenderal Departemen Keuangan RI kepada Kepala Biro Urusan Inspeksi atau Anggaran tentang pelaksanaan anggaran pembangunan diselenggarakan oleh Bank Pembangunan Indonesia  
15 April 1961  
tembusan  
1 lembar

- 267 Surat-surat Keputusan Menteri Penghubung Organisasi Rakyat tentang disahkannya tambahan anggaran Tahun 1961 dan pemberian kuasa kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta.
- 18 Agustus 1961 - 22 Agustus 1961  
tembusan  
1 sampul
- 268 Surat dari Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Biro Urusan Anggaran Thesauris Negara Departemen Keuangan di Jakarta, hal Pengiriman Perhitungan Anggaran Bagian I Tahun Dinas 1959, dan Sub. Bagian I A/VI A dan VII A masing-masing Tahun Dinas 1960, beserta lampiran.
- 23 September 1961  
asli  
1 sampul
- 269 Surat Kepala Seksi Anggaran Bagian Keuangan Kabinet Menteri Pertama kepada Biro Urusan Anggaran tentang ralat mengenai perubahan/tambahan atas pos baru dari Daftar I Lampiran Keputusan Presiden RI No. 108 Tahun 1961, disertai lampiran
- 27 Nopember 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 270 Daftar Rencana Anggaran Belanja dari MPRS, DPR-GR, Menteri Pertama, Kantor Urusan Pegawai, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Tenaga Atom, Badan Pusat Intelligence, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Direktoratium Pengukuran dan Penggambaran Peta, Jawatan Sandi, Dewan Pertimbangan Agung, Bapekan, Depernas, Dewan Tanda-Tanda Kehormatan, Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), Arsip Nasional (tidak ada lampiran), Dewan Pengawas Keuangan, Front Nasional, Biro Pusat Statistik
- 1961  
asli  
1 sampul
- 271 Berkas mengenai anggaran dan pendapatan badan-badan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi Tahun dinas 1962.
- 1 Januari 1961-Agustus 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 272 Memori Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1962 Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata
- Januari 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 273 Daftar Rancangan Anggaran Belanja Rutin 1962
- Januari 1962  
asli  
1 sampul

- 274 Daftar Rencana Anggaran Belanja Dinas Modal dan Dinas Eksploitasi Jawatan Kereta Api Tahun 1962.  
05 Februari 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 275 Surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri Pertama dan Para Menteri mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1963, beserta lampiran.  
14 Februari 1962  
tembusan  
1 sampul
- 276 Daftar rincian dan penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungannya tentang Perusahaan-perusahaan dan Jawatan jawatan Pemerintah yang mempunyai pengurus sendiri  
1962  
fotokopi  
1 sampul
- 277 Berkas mengenai Anggaran Belanja Departemen Perindustrian Rakyat Tahun 1962 (rutin).  
1962  
asli  
1 sampul
- 278 Surat Menteri Penghubung Alim Ulama kepada Departemen Urusan Anggaran Negara tentang APBN Tahun 1963 Bagian IX D (Menteri Penghubung Alim Ulama/Sekretariat), beserta lampiran.  
18 Maret 1963  
fotokopi  
6 lembar
- 279 Rencana Anggaran Belanja Latihan-latihan for "LENATI" untuk "FORAK" Tahun 1965  
27 Maret 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 280 Surat Presidium Kabinet Ampera kepada Menteri Keuangan tentang Pembatasan penyediaan biaya dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 1967  
Juni 1967  
konsep  
1 sampul
- 281 Daftar rincian pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 Triwulan V Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, beserta memori penjelasar  
1968  
salinan  
1 sampul

**b. Otorisasi**

- 282 Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. 10630/M tentang kredit rekonstruksi Provinsi, beserta lampiran.

- 18 Oktober 1951  
fotokopi  
1 sampul
- 283 Surat-Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Menteri Keuangan untuk Kabinet Perdana Menteri RI di Jakarta Tahun 1954-1955.  
23 Januari 1954-24 Februari 1955  
asli  
1 sampul
- 284 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri tentang persetujuan pemberian kredit kepada Panitia Peninjauan Kembali PGPN  
13 Februari dan 26 April 1957  
salinan  
1 sampul
- 285 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama tentang persetujuan pemberian kredit sementara bag Sekretariat Negara, Biro Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan dan lain-lain.  
13 Februari 1957 - 22 April 1963  
salinan  
1 sampul
- 286 Daftar Otorisasi Dewan Asian Games Indonesia dalam anggaran belanja dan tambahan indul Tahun 1962.  
31 Januari 1959-13 Agustus 1962  
tembusan  
1 sampul
- 287 Berkas permintaan kredit/Otorisasi dari instansi pemerintah a.l. MPR, DPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Kabinet Perdana Menteri  
6 Juli 1959 - 29 November 1961  
tembusan  
1 sampul
- 288 Surat-surat tentang specimen tanda tangan pejabat yang berhak menandatangani surat keputusan Otorisasi.  
22 September 1959 - 18 Agustus 1962  
tembusan  
1 sampul
- 289 Surat-surat Keputusan Menteri Muda Kepolisian tentang pemberian kuasa kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara untuk melunasi tagihan dari Pabrik Kapal Indonesia V.P.V N.V. Di Jakarta.  
24 September 1959  
salinan  
1 sampul
- 290 Kutipan Surat-surat Keputusan Menteri Muda Kepolisian tentang otorisasi pembelian perlengkapan keperluan kepolisian, beserta lampiran  
10-12 November 1959  
asli  
1 sampul



- 291 Surat-surat otorisasi Menteri Pertama kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Dewan Perancang Nasional, Biro Pusat Statistik, dll., tentang pemberian kredit untuk menjalankan kegiatan pemerintahan Tahun 1960-1961.  
8 Januari 1960-20 November 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 292 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi bulan Mei - November 1959  
Mei-November 1959  
asli  
1 sampul
- 293 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada Januari - Maret 1960.  
Januari - Maret 1960  
salinan  
1 sampul
- 294 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada April - Mei 1960.  
April - Mei 1960  
salinan  
1 sampul
- 295 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada Juni 1960.  
Juni 1960  
salinan  
1 sampul
- 296 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada Juli 1960.  
Juli 1960  
salinan  
1 sampul
- 297 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada Agustus 1960.  
Agustus 1960  
salinan  
1 sampul
- 298 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada September 1960.  
September 1960  
salinan  
1 sampul
- 299 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada Oktober 1960.

- Oktober 1960  
salinan  
1 sampul
- 300 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada November (I)1960.
- November 1960  
salinan  
1 sampul
- 301 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada November (II)1960.
- November 1960  
salinan  
1 sampul
- 302 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit / Otorisasi pada Desember 1960.
- Desember 1960  
salinan  
1 sampul
- 303 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Januari-Februari 1961.
- Januari - Februari 1961  
salinan  
1 sampul
- 304 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Maret 1961.
- 01 Maret 1961  
salinan  
1 sampul
- 305 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi April 1961.
- April 1961  
salinan  
1 sampul
- 306 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Mei 1961.
- Mei 1961  
salinan  
1 sampul
- 307 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Juni 1961.
- Juni 1961  
salinan  
1 sampul

- 308 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Juli 1961.
- Juli 1961  
salinan  
1 sampul
- 309 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Agustus 1961.
- Agustus 1961  
salinan  
1 sampul
- 310 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi September 1961.
- September 1961  
salinan  
1 sampul
- 311 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Oktober 1961.
- Oktober 1961  
salinan  
1 sampul
- 312 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi November 1961.
- November 1961  
salinan  
1 sampul
- 313 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Januari 1962.
- Januari 1962  
salinan  
1 sampul
- 314 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Februari 1962.
- Februari 1962  
salinan  
1 sampul
- 315 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Maret 1962.
- Maret 1962  
salinan  
1 sampul
- 316 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Mei 1962.

- Mei 1962  
salinan  
1 sampul
- 317 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Juni (I) 1962.
- Juni 1962  
salinan  
1 sampul
- 318 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Juni (II) 1962.
- Juni 1962  
salinan  
1 sampul
- 319 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Juli 1962.
- Juli 1962  
salinan  
1 sampul
- 320 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Agustus 1962.
- Agustus 1962  
salinan  
1 sampul
- 321 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi September 1962.
- September 1962  
salinan  
1 sampul
- 322 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Oktober (I) 1962.
- Oktober 1962  
salinan  
1 sampul
- 323 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Oktober (II) 1962.
- Oktober 1962  
salinan  
1 sampul
- 324 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi November - Desember 1962.
- November-Desember 1962  
salinan  
1 sampul

- 325 Surat-surat tentang otorisasi kredit anggaran belanja Lembaga Administrasi Negara Tahun dinas 1960-1961.  
7 Mei 1960-5 Oktober 1962  
asli  
1 sampul
- 326 Surat-surat mengenai otorisasi kredit Badan Pusat Statistik  
13 Juni 1960-5 Oktober 1961  
salinan  
1 sampul
- 327 Surat Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tentang otorisasi kredit anggaran untuk pembangunan investasi *non development* , beserta lampiran  
10 Oktober 1960  
asli  
1 sampul
- 328 Surat-surat keputusan kepala daerah tentang otorisasi kredit untuk pelaksanaan sensus  
20 Oktober 1960-21 Februari 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 329 Surat-surat tentang otorisasi anggaran belanja untuk perlengkapan kantor Dewan Film Indonesia.  
31 Oktober 1960-2 Januari 1962  
asli, fotokopi  
4 lembar
- 330 Keputusan Menteri Pertama No. 675.60/Keu. OT tentang pemberian kredit kepada Sekretariat Kongres Wanita Indonesia untuk biaya pengiriman delegas  
5 Desember 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 331 Surat-surat Kantor Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI a.l. tentang otorisasi kwartal IV Tahun 1961, rencana pemberian tanda-tanda kehormatan RI oleh P.J.M Presiden RI dalam perjalanan ke luar negeri  
27 Desember 1960 -16 September 1961  
tembusan  
1 sampul
- 332 Surat-surat Keputusan Menteri Distribusi RI tentang Permintaan Kredit / Otorisasi Tahun 1960 - 1961.  
1960 - 1961  
salinan  
1 sampul
- 333 Surat-surat Keputusan Menteri Urusan Khusus RI tentang Permintaan Kredit / Otorisasi Tahun 1960 - 1961.  
1960 - 1961

- salinan  
1 sampul
- 334 Surat-surat Keputusan Menteri Produksi RI tentang Permintaan Kredit / Otorisasi Tahun 1960 - 1961.  
1960 - 1961  
salinan  
1 sampul
- 335 Surat-surat Keputusan Gubernur kepala daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur tentang Permintaan Kredit / Otorisasi, Otonomi Daerah dan Kepegawaian Tahun 1959 - 1965  
1960 -1965  
asli  
1 sampul
- 336 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama tentang Surat permohonan Otorisasi kredit Sekretariat Negara, Badan Aparatur Negara, statistik/sensus Tahun 1961 - 1962.  
2 Januari 1961 - 23 November 1962  
tembusan  
1 sampul
- 337 Surat-surat kuasa kepada Departemen PU dan Tenaga RI untuk melaksanakan pembangunan dan pengeluarannya dibebankan kepada anggaran belanja Tahun 1961  
26 Januari - 30 November 1961  
asli  
1 sampul
- 338 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang persetujuan pemberian kredit kepada Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tk.I di Indonesia a.l. Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Bali.  
16 Februari 1961 - 28 Maret 1961  
tembusan  
1 sampul
- 339 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang pemberian kredit kepada Biro Pusat Statistik Tahun 1961.  
28 April 1961-10 Juli 1961  
asli  
1 sampul
- 340 Surat-suirat tentang pemberian otorisasi kredit anggaran belanja Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga RI Tahun dinas 1960-1961.  
12 September 1959-5 Juni 1961  
tembusan  
1 sampul
- 341 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama tentang otorisasi anggaran belanja negara Tahun 1961 dan 1963.  
26 Juni 1961 - 10 Mei 1963  
tembusan, fotokopi  
1 sampul

- 342 Surat-surat dari Bendaharawan Biro Ekonomi dan Keuangan Kabinet Menteri Pertama kepada Bank Indonesia mengenai pemindahan uang dari rekening Biro Ekonomi dan Keuangan ke rekening perusahaan dan instansi terkait untuk pembayaran pembelian peralatan, persekot kerja dan lain-lain  
14 September 1961 - 11 Desember 1962  
tembusan  
1 sampul
- 343 Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan tentang penunjukkan bendahara pengherotorisir untuk kredit sensus penduduk  
18 Oktober 1961  
tembusan  
1 sampul
- 344 Surat-surat permohonan otorisasi biaya perbaikan kendaraan bermotor milik pemerintah pada Kabinet Perdana Menteri.  
20 November 1961 - 11 November 1962  
tembusan  
1 sampul
- 345 Surat-surat Perintah Membayar (SPM) dari Departemen Urusan Pendapatan dan Pembiayaan dan Pengawasan, dan Departemen Keuangan kepada Bank Indonesia Tahun 1961 dan 1962.  
04 Desember 1961 - 26 Oktober 1962  
tembusan  
1 sampul
- 346 Surat -surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi Desember 1961.  
Desember 1961  
salinan  
1 sampul
- 347 Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Riau tentang Pemberian Kredit / Otorisasi.  
1961  
salinan  
1 sampul
- 348 Surat-surat Gubernur Kepala Daerah Djambi tentang Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Mata Anggaran Tahun 1962 yang telah disetujui KPPN Jambi  
30 April 1962-30 September 1962  
asli  
1 sampul
- 349 Surat-surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Jawatan Perjalanan Kantor Daerah Bandung dan Jambi dalam rangka pembayaran biaya eksploitasi kendaraan bermotor, biaya dan ongkos perjalanan dinas Tahun 1962 s.d 1963.  
03 November 1962 - 14 Januari 1963

- asli  
1 sampul
- 350 Surat-surat Keputusan Menteri / Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pemberian Kredit/Otorisasi.  
November-Desember 1962  
salinan  
1 sampul
- 351 Surat-surat tentang penyediaan kredit biaya perjalanan dinas dalam negeri Direktorat Perjalanan Kabinet Perdana Menteri  
12 Desember 1962 - 28 September 1964  
salinan  
1 sampul
- 352 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama tentang Pemberian Kredit / Otorisasi bulan Januari - Mei, Desember Tahun 1963  
31 Januari - Desember 1963  
salinan  
1 sampul
- 353 Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keamanan Pertahanan Staf Angkatan Bersenjata No.5/KPTS/PS/Dit.Ku/KS tentang kuasa bagi Letda Mathias Lyen Nyoliap sebagai Pemegang kas militer pada Badan Musyawarah Pimpinan Revolus:  
10 Juni 1963  
asli  
3 lembar
- 354 Surat Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan kepada Panitia Negara Urusan Kontrak-kontrak Ekonomi-Kuangan antara RI dengan Luar Negeri tentang penggunaan kredit untuk perluasan Pabrik Pupuk Sriwidjaja Palembang sebesar +/- US. \$ 25 Juta dari Toyo Menka Kaisha Ltd. Tokyo., beserta lampiran  
19 Januari - 13 Maret 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 355 Surat-surat keputusan Menteri Koordinator Kompartemen Perhubungan dengan Rakyat, Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan, dan Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi tentang persetujuan pemberian kredit anggaran dan otorisasi keuangan.  
31 Maret - 26 Nopember 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 356 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan kredit dalam Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 1965.  
09 Juni 1965  
salinan  
4 lembar



- 357 Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. CH-165.66/Keu.OT.PM. tentang persetujuan pemberian persediaan uang untuk keperluan pengeluaran " Dana Rahasia" oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera

12 Oktober 1966  
asli, konsep  
1 sampul

**c. Pembukuan**

- 358 Surat Direktur Bank Timur N.V. No. 488 tentang Laporan Tahunan Pembukuan 1950 dari Bank Timur N.V., beserta lampiran

17 September 1951  
fotokopi  
9 sampul

- 359 Daftar Pemandangan Pembukuan Bagian Keuangan Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak Tahun 1955/1956.

7 Desember 1955 - 23 Februari 1956  
asli  
1 sampul

- 360 Daftar pembukuan penerimaan dan ikhtisar pengeluaran Kementerian Kehakiman

08 Februari 1956 - 10 Januari 1957  
asli  
1 sampul

- 361 Daftar pengumpulan bukti-bukti pembayaran Pekerjaan Jawatan Gedung-gedung Negeri Daerah Jakarta dan Tangerang untuk Pekerjaan pendirian Gedung-gedung Jawatan Sandi di Jakarta.

16 Januari - 16 Agustus 1957  
asli  
1 sampul

- 362 Daftar Berita Pembukuan Kementerian Luar Negeri untuk Perwakilan RI di Den Haag Tahun dinas 1957.

22 Oktober - 16 Desember 1957  
asli  
6 lembar

- 363 Laporan Keuangan Panitia untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak

4 Februari 1952-Desember 1959  
asli, fotokopi  
1 sampul

- 364 Ikhtisar penerimaan triwulanan Biro Pusat Statistik Tahun 1958 s.d 1960

17 Mei 1958 - 02 September 1960  
asli  
1 sampul

- 365 Nota dinas dari Kabag. Pembukuan dan Kontrol kepada Mr. M. Isa Arief mengenai daftar kekayaan dan penanaman modal berbagai panitia per 30 Juni 1959.

- 21 Juli 1959  
asli  
5 lembar
- 366 Laporan singkat tentang Perjalanan dinas ke Jawa Timur dan Jawa Tengah tanggal 30 Desember 1959 - 7 Januari 1960 oleh Kepala bagian Pembukuan dan Kontrol  
30 Desember 1959 - 7 Januari 1960  
asli  
1 sampul
- 367 Laporan-laporan dari Bagian Pembukuan dan Kontrol mengenai hasil - hasil dan biaya - biaya kantor Tahun 1960.  
12 Januari - 16 Mei 1960  
asli  
1 sampul
- 368 Surat-surat Kabinet Perdana Menteri dengan Departemen Perdagangan, Kepolisian,dll., mengenai penyusunan laporan bulanan, jumlah pengeluaran beban tetap dan sementara Tahun dinas 1960.  
11 April 1960-30 November 1960  
asli  
1 sampul
- 369 Surat-surat tentang Pemindahan Pembukuan Bagian Perlengkapan/Materiil Dewan Asian Games Indonesia.  
3 Mei 1960-Juli 1962  
asli  
1 sampul
- 370 Konsep Laporan Pengeluaran Triwulan Tahun Dinas 1960 Bagian I A (Badan-badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi) oleh Bagian Keuangan Seksi Pembukuan  
26 Desember 1960  
konsep  
1 sampul
- 371 Daftar pembayaran uang / kas sub anggaran biasa tetap badan - badan pemerintahan negara (daftar P.4 ) Tahun 1961.  
1 Januari 1961  
asli  
1 sampul
- 372 Surat-surat dari Kepala Bagian Keuangan, Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara, Departemen Keuangan mengenai tata pembukuan perjalananan dinas dalam negeri  
06 Februari dan 23 Mei 1961  
fotokopi  
6 lembar
- 373 Ikhtisar pengeluaran kas negara dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Tahun 1965  
10 Januari - 6 Desember 1964  
asli

1 sampul

- 374 Ikhtisar rencana pembangunan Departemen Pertanian, Anggaran Belanja Pembangunan, Devisa dan Kredit dalam Jutaan Rupiah Tahun 1965

27 Maret 1965

asli

1 sampul

#### **d. Pengawasan dan Pemeriksaan**

- 375 Laporan Keuangan Tahunan Tahun 1948-1949. NB: arsip berbahasa Belanda

3 Februari 1949-31 Desember 1949

asli

1 sampul

- 376 Kartu-kartu pembayaran uang muka (uang yang disediakan untuk dinas) oleh bendaharawan Kementerian Keuangan Tahun dinas 1952-1954

1952-1954

asli

1 sampul

- 377 Berkas mengenai prosedur penyusunan RAPBN dan pedoman untuk para bendaharawan di bawah pengawasan Perdana Menteri RI

27 November 1952 - 23 Oktober 1962

salinan

1 sampul

- 378 Daftar pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran uang persediaan untuk keberangkatan Presiden ke Tanah Suci pada bulan Juli 1955 dari Bagian Keuangan Kabinet Presiden kepada Kabinet Perdana Menteri

15 Oktober 1955

tembusan

1 sampul

- 379 Surat-surat Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian di Surabaya kepada Panitia Untul Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak Bagian II di Jakarta tentang pertanggungjawaban keuangan Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian di Surabaya.

20 Mei 1957-11 Juli 1959

fotokopi

1 sampul

- 380 Surat-surat pertanggungjawaban Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Wilayah Bandung Tahun 1957 s.d 1961.

25 Juli 1957 - 02 November 1961

asli

1 sampul

- 381 Surat-surat mengenai tata cara pembayaran perjalanan dinas untuk pegawai Jawatan Kepolisian Negara dan Daerah Sumatera Barat dan Sulawesi Utara/Tengah

14 Agustus-06 November 1958

fotokopi

- 1 sampul
- 382 Daftar pertanggungjawaban keuangan (UUDP) Kepolisian Komisariat Sumatera Selatan bulan Desember 1958 dan September 1959.  
31 Desember 1958 dan 07 Desember 1961  
salinan  
4 lembar
- 383 Kartu UUDP Dewan Pertimbangan Agung, Bapekan, MPRS, Biro Pusat Statistik Daerah Tingkat I, dan lain-lain Tahun 1959 s.d 1962.  
1959 - 1962  
asli  
1 sampul
- 384 Surat-surat tentang pengawasan dan pemeriksaan keuangan badan-badan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi Tahun 1959-1961.  
02 Januari 1959 - 29 Agustus 1961  
asli  
1 sampul
- 385 Daftar pertanggung jawaban keuangan penerimaan dan pengeluaran uang pada Polisi Negara Kantor Resort Batang Hari Jambi.  
1 Februari - 31 Desember 1959  
tembusan  
1 sampul
- 386 Daftar pertanggungjawaban pembayaran persekot biaya perjalanan dinas dan daftar ongkos perjalanan, ongkos kantor, dan lain-lain para pegawai Lembaga Administrasi Negara Tahun 1959 s.d 1961.  
09 September 1959 - 02 Januari 1962  
asli, tembusan  
1 sampul
- 387 Surat-surat tentang pertanggung jawaban keuangan Panitia Konferensi Colombc  
15 Oktober 1959 - 22 Oktober 1960  
asli, tembusan  
1 sampul
- 388 Surat-surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Pontianak mengenai penyelesaian kelengkapan-kelengkapan SPD-SPD Tahun 1959 s.d 1961  
02 Desember 1959 - 12 Januari 1961  
tembusan  
1 sampul
- 389 Daftar pertanggungjawab pengawasan kas negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1959 - 1960.  
1959 - 1960  
asli  
1 sampul

- 390 Surat-surat mengenai pertanggungjawaban keuangan Badan Koordinasi Badan-badan Kesejahteraan Pegawai Kabinet Perdana Menteri (Baperti) Tahun 1960-1962  
 Januari 1960-14 Juni 1962  
 asli  
 1 sampul
- 391 Daftar pertanggungjawaban uang penerimaan/penghasilan dan diterima untuk diperhitungkan Biro Pusat Statistik Tahun 1960 dan 1961, beserta surat tanda setoran.  
 01 Februari 1960 - 25 April 1962  
 asli  
 1 sampul
- 392 Daftar pertanggungjawaban pembayaran persekot biaya perjalanan dinas dan daftar ongkos - ongkos perjalanan Kabinet Perdana Menteri, Kabinet Menteri Pertama, Kabinet Menteri Urusan Khusus, Kabinet Menteri Distribusi, Kabinet Menteri Produksi, beserta tanda terima pembayaran perjalanan dinas.  
 02 Februari 1960 - 02 November 1962  
 tembusan  
 5 sampul
- 393 Daftar pertanggungjawaban dari UUDP yang diterima oleh DPR dan DPR-GR  
 23 Februari 1960 - 15 Januari 1962  
 asli  
 1 sampul
- 394 Daftar pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran uang untuk keperluan Markas Pimpinan Komandemen Mobile Brigade Daerah III Polisi Negara RI di Semarang untuk bulan Desember 1959  
 20 April 1960  
 asli  
 1 sampul
- 395 Laporan Dewan Pengawas Keuangan kepada Menteri Pertama tentang dana taktis / rahasia selama Konferensi Asia Afrika Tahun 1960  
 4 Juni 1960  
 fotokopi  
 1 sampul
- 396 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan  
 15 Agustus 1960 - 30 November 1962  
 asli, fotokopi  
 1 sampul
- 397 Surat-surat mengenai pertanggungjawaban keuangan Dewan Asian Games Indonesia Tahun 1960-1961.  
 30 Agustus - 3 Juni 1961  
 asli  
 1 sampul
- 398 Laporan-laporan pemeriksaan Tata Buku Tahun 1959 dan Tata Buku Semester Pertama Tahun 1960 Yayasan Dana Bantuan oleh Kantor Akuntan E.F. Jahn  
 28 September dan 17 Oktober 1960  
 asli

- 1 sampul
- 399 Surat dari Ketua Yayasan Hari Ibu kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan keuangan Kegiatan Latihan Kader Wanita III untuk Pembangunan Masyarakat Desa bulan Mei s/d September 1959, beserta lampiran.
- 04 Nopember 1960  
asli  
1 sampul
- 400 Surat-surat pertanggungjawaban keuangan Jawatan Gedung-gedung Negara Daerah Jakarta dan Tangerang, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Tahun 1960 s.d 1962.
- 05 November 1960 - 12 Desember 1962  
asli  
1 sampul
- 401 Daftar pertanggungjawaban keuangan (UUDP) Badan Pusat Intelligence Tahun 1959, 1960 dan 1962, beserta kuitansi-kuitansi pembayaran.
- 30 November 1959 - 30 Juni 1962  
asli  
1 sampul
- 402 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan sensus dan ongkos kantor Daerah Tingkat I dan II Tahun 1960-1963.
- 30 Desember 1960 - 29 Januari 1963  
tembusan  
4 sampul
- 403 Surat-surat dari Direktur Lembaga Administrasi Negara, dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Direktur Kabinet Menteri Pertama mengenai daftar dan ikhtisar laporan Tahunan Counterpart Fund Country Program Tahun 1960 dan 1961, beserta lampiran. NB: fisik arsip berlubang.
- 30 Desember 1960 - 17 Januari 1962  
asli, tembusan  
1 sampul
- 404 Daftar ikhtisar dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Pekerjaan Seksi Istimewa Istana-istana Presiden Jawatan Gedung-gedung Negeri bulan Desember 1960
- 31 Desember 1960  
tembusan  
1 sampul
- 405 Ikhtisar Pengeluaran Triwulan Menteri Urusan Khusus dan Menteri Disribus:
- Januari 1961  
asli  
1 sampul
- 406 Surat-surat dari Kabinet Perdana Menteri mengenai pengiriman pertanggungjawaban keuangan UUDP
- 11 Januari - 10 Juli 1961  
asli

- 1 sampul
- 407 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam negeri pegawai-pegawai pada badan-badan pemerintahan Tahun 1961-1968.  
13 Januari 1961 - 29 Oktober 1968  
asli  
5 sampul
- 408 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan Dewan Asian Games Indonesia Tahun 1961-1963.  
17 Januari 1961- 10 Juli 1963  
asli  
5 sampul
- 409 Surat-surat dari Ketua Lembaga Pembinaan Hukum Nasional kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara mengenai daftar pertanggungjawaban keuangan bulan Desember 1960 dan Januari 1962, beserta lampiran.  
02 Februari 1961  
tembusan  
8 lembar
- 410 Surat-surat Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Front Nasional tentang pertanggungjawaban keuangan Pengurus Besar Front Nasional Tahun 1961-1962  
Maret 1961 - 25 Februari 1962  
tembusan  
1 sampul
- 411 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan Dewan Film Indonesia Tahun 1961-1963.  
30 Maret 1961 - 14 Desember 1963  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 412 Daftar pertanggungjawab uang diterima/diperhitungkan pengeluarannya untuk biaya ongkos kantor yang dibebankan pada mata anggaran belanja Tahun 1961 daerah Pematang periode bulan Maret - November 1961.  
31 Maret - 25 November 1961  
asli  
1 sampul
- 413 Berita Acara Timbang Terima dari Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak kepada Departemen Kehakiman tentang pengembalian alat-alat mobil tua yang tidak terpakai serta Daftar pertanggungjawaban penggunaan anggaran alat tulis kantor dan kendaraan /transportasi oleh Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak selama bulan Mei-Juni 1961.  
31 Maret 1961-26 Juni 1961.  
asli  
1 sampul

- 414 Neraca penerimaan dan pengeluaran Panitia Negara Urusan FAO, Departemen Pertanian Tahun 1961.  
31 Mei - 30 Desember 1961  
asli  
1 sampul
- 415 Daftar pertanggungjawaban keuangan dalam rangka pembayaran - pembayaran keperluan Panitia Kerja Persiapan Pencacahan Jiwa, Biro Pusat Statistik Tahun 1961 s.d 1962.  
31 Mei 1961 - 07 Desember 1962  
tembusan  
1 sampul
- 416 Surat Instruksi Kepala Biro Urusan Inspeksi Anggaran kepada Para Inspektur Biro Inspeksi Anggaran No. 10 b tentang pelaksanaan penghematan anggaran belanja Tahun 1961.  
24 Juni 1961  
fotokopi  
3 lembar
- 417 Surat dari Direktur Kabinet Menteri Pertama kepada Jawatan Gedung-gedung Negara Pusat mengenai perincian biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah di Pusat dan Daerah, beserta lampiran.  
04 Oktober 1961  
tembusan  
4 lembar
- 418 Surat-surat pertanggungjawaban keuangan Kantor Daerah Pajak Hasil Bumi II Bandung periode bulan September 1961.  
05 Oktober 1961  
asli  
4 lembar
- 419 Surat-surat pertanggungjawaban uang persediaan Sekretariat Menteri POR/DISPRI periode bulan September s.d November 1961.  
10 Oktober - 10 Desember 1961  
asli  
1 sampul
- 420 Surat-surat tentang pengadaan barang-barang inventaris Arsip Nasional R.I. Tahun 1961-1965.  
28 Nopember 1961- 29 Desember 1965  
asli  
1 sampul
- 421 Daftar pertanggungjawaban keuangan UUDP Sie Pos/Telekomunikasi Kupag di Dkt. Jawatan Pos, Telegram dan Telepon.  
Desember 1961 - Mei 1962  
asli  
1 sampul



- 422 Daftar pertanggungjawab mengenai penerimaan dan pengeluaran uang persediaan dari Rumah Tangga Presiden yang harus diperhitungkan  
 Januari - Juli 1962  
 asli  
 1 sampul
- 423 Surat-surat pertanggungjawaban keuangan Tahun 1961 Bendaharawan pada Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN), beserta lampiran  
 27 Januari 1962  
 asli  
 1 sampul
- 424 Daftar pertanggungjawaban uang Badan Kerja Sama Interdepartemental Pelaksanaan Wajib Militer.  
 31 Januari - 40 Juni 1962  
 tembusan  
 1 sampul
- 425 Daftar pertanggungjawaban pembayaran uang muka dan daftar ongkos perjalanan dinas Lembaga Tenaga Atom Tahun 1962 s.d 1963.  
 31 Januari 1962 - 06 Maret 1963  
 asli  
 1 sampul
- 426 Daftar pertanggungjawaban keuangan Kantor Bupati KDH. Tk. II Ogan dan Komerung Ulu Baturadja.  
 31 Januari - 31 Desember 1962  
 tembusan  
 1 sampul
- 427 Daftar perhitungan uang - uang yang telah diterima atau diperhitungkan untuk keperluan ongkos kantor, pendidikan Lembaga Administrasi Negara.  
 01 Februari - 8 Oktober 1962  
 tembusan  
 1 sampul
- 428 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan Dewan Pertimbangan Agung Tahun 1962 1963.  
 01 Februari 1962-8 Maret 1963  
 asli, fotokopi  
 1 sampul
- 429 Daftar perhitungan uang diterima atau dipertanggungjawabkan untuk keperluan ongkos kantor dan pendidikan Badan Pemeriksa Keuangan.  
 3 Februari 1962 - 15 April 1963.  
 tembusan  
 1 sampul

- 430 Daftar pertanggungjawaban uang persediaan (UUDP) yang diterima guna melakukan pembayaran pengeluaran keperluan pendidikan dan alat-alat kantor Kabinet Perdana Menteri Jawatan Sandi.  
5 Februari - 7 Juni 1962  
tembusan  
1 sampul
- 431 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan MPRS RI Tahun 1962  
15 Februari - 5 Agustus 1962  
tembusan  
1 sampul
- 432 Daftar pertanggungjawaban uang atas biaya ongkos kantor, dll pada Pendidikan Sentral Pengukuran dan Pengembangan Peta - Surakarta.  
28 Februari 1962 - 31 Maret 1963.  
tembusan  
1 sampul
- 433 Daftar pertanggungjawaban keuangan dari Dewan Penerbangan Nasional periode bulan Maret s.d Juli 1962.  
03 Mei - 06 September 1962  
tembusan  
6 lembar
- 434 Daftar pertanggungjawaban uang atas biaya ongkos kantor, dll pada Direktorat Pengukuran dan Penggambaran Peta Jawatan Fotogrametri Sentral.  
03 Mei - 06 September 1962  
tembusan  
3 lembar
- 435 Daftar perincian pertanggungjawaban uang otorisasi yang dipergunakan untuk tugas menteri penghubung alim ulam RI Triwulan II.  
9 April - 4 Juni 1962.  
tembusan  
2 lembar
- 436 Surat dari Kabag. Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Bendaharawan Biro Ekonomi dan Keuangan mengenai kesimpulan dari hasil Pemeriksaan Kas dan Tata Usaha Keuangan Negara pada Bendaharawan uang muka Cabang Biro Ekonomi dan Keuangan Khusus Bantuan Luar Negeri, beserta lampiran  
14 April 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 437 Daftar pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada Polisi Negara Kantor Resort Cianjur dan Bogor.  
30 April - 30 September 1962  
tembusan  
7 lembar

- 438 Surat dari Kabag. Keuangan Kabinet Menteri Pertama kepada semua Instansi Subbag. IA Sekretariat MPRS dan lain-lain mengenai pembiayaan tindakan pertahanan sipil, beserta lampiran.
- 08 Mei 1962  
fotokopi, salinan  
3 lembar
- 439 Daftar pertanggungjawaban dari belanja barang - barang biasa kantor Gubernur kepala daerah Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- 30 Juni 1962 - 31 Agustus 1964  
tembusan  
1 sampul
- 440 Memo Bagian Hukum kepada Kepala I dan II tentang penyelesaian progress report pertama mengenai Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960, beserta lampiran.
- 17 Juli 1962  
asli  
1 sampul
- 441 Daftar pertanggungjawab biaya penyelenggaraan Coating Team Indoktrinasi daerah TK II yang diadakan dalam daerah TK I Sumatera Barat, beserta lampiran surat keputusan.
- 1 Agustus 1962 - 25 Agustus 1964  
fotokopi  
7 lembar
- 442 Daftar perhitungan uang-uang yang telah diterima untuk diperhitungkan untuk keperluan ongkos kantor Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri-Menteri Muda atas beban mata anggaran Tahun 1962.
- 01 Agustus 1962  
asli  
1 sampul
- 444 Surat Direksi B.P.U. Farmasi Negara Departemen Kesehatan RI kepada Direksi Bank Pembangunan Indonesia tentang laporan perkembangan keuangan dari Bulan Juli-Agustus 1962, beserta lampiran.
- 19 Oktober 1962  
asli  
7 lembar
- 445 Nota, laporan hasil pemeriksaan, dan pengiriman pertanggungjawaban keuangan dari Pemegang Kas Militer, Staf Penguasa Perang Tertinggi Tahun 1962 s.d 1963
- 22 November 1962 - 06 Juni 1963  
asli  
1 sampul

- 446 Surat-surat Wakil Menteri Pertama kepada Para Wakil Menteri Pertama dan Para Menteri mengenai kewajiban mengajukan progress report mengenai pembangunan, beserta lampiran.
- 07 Desember 1962-5 Maret 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 447 Daftar pertanggungjawaban penerimaan uang untuk diperhitungkan dari Komando Daerah Operasi Gerakan Makmur Tk.I Kalimantan Selatan periode bulan Desember 1962.
- 21 - 31 Desember 1962  
asli  
1 sampul
- 448 Surat dari Direksi Perusahaan Negara Garam kepada Kepala Direktorat Perkreditan Bank Pembangunan Indonesia mengenai Financial dan Physical Progress Report Triwulan ke IV dalam Tahun 1962, beserta lampiran.
- 18 Februari 1963  
asli  
3 lembar
- 449 Daftar pertanggungjawaban UUDP yang diterima dari DPR - GR.
- 10 Maret - 10 April 1963  
tembusan  
1 sampul
- 450 Daftar Ikhtisar pengeluaran uang Departemen Penghubung DPR/MPR/DPA/DEPERNAS.
- April 1963 - 31 Januari 1964  
asli  
1 sampul
- 451 Surat dari Biro Keuangan Sekretariat Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) kepada Sekretariat MPPR mengenai daftar keuangan anggota Biro Keuangan Sekretariat MPPR dalam Tahun 1963, beserta lampiran.
- 17 Juni 1963  
asli  
4 lembar
- 452 Surat Kepala Biro Pengawasan/Penyelenggaraan Departemen Perhubungan Udara kepada Sekretaris Negara tentang penyampaian progress report proyek-proyek pembangunan Direktorat Meteorologi dan Geofisik triwulan kedua 1963, beserta lampiran.
- 7 Agustus 1963  
asli  
1 sampul
- 453 Surat Direksi Perusahaan Pertanian Negara kepada Ketua Team Progress Pembangunan tentang penyampaian laporan perkembangan keuangan (Financial Progress Report) B.P.U. Pertanian Tahun 1963 Semester ke I, beserta lampiran
- 1 September - 17 September 1963

asli  
3 lembar

- 454 Surat Kepala Jawatan Kehutanan Departemen Pertanian dan Agraria kepada Bank Pembangunan Indonesia tentang Physical Progress report triwulan II - IV Tahun 1962 dan II /III - 1963, beserta lampiran.

07 Januari 1964  
asli  
1 sampul

- 455 Surat-surat Lembaga Tenaga Atom kepada Bank Pembangunan Indonesia tentang penyampaian laporan-laporan triwulan proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Lembaga Tenaga Atom.

26 Februari - 26 Oktober 1964  
asli  
1 sampul

- 456 Surat Pengantar Bendaharawan Direktorat Perfilman Negara kepada Bank Pembangunan Indonesia tentang penyampaian Laporan Perincian Penggunaan Pembiayaan Triwulan ke IV Tahun 1963 Project Power House P.F.N., beserta lampiran.

10 Maret 1964  
asli  
1 sampul

- 457 Daftar pertanggungjawaban Badan Kesejahteraan Pegawai Jawatan Sandi.

30 April 1964 - 18 Januari 1965  
tembusan  
1 sampul

- 458 Surat Gubernur Sulawesi Selatan kepada Wakil Perdana Menteri I tentang progress report pelaksanaan "crash program", beserta lampiran

10 September 1964  
fotokopi  
1 sampul

- 459 Surat-surat Instruksi Wakil Perdana Menteri III/Ketua Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara tentang Pelaporan dan Pembiayaan Proyek Pembangunan, Hasil Kerja, dan Perkembangan Perusahaan Negara, serta Peminjaman dan Pengadaan Kendaraan.

02 Januari 1965-30 Agustus 1965  
fotokopi  
1 sampul

- 460 surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam negeri Dewan Telekomunikasi Tahun 1965-1966.

5 Januari 1965 - 23 Juli 1966  
fotokopi  
1 sampul

- 461 Surat-surat tentang pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri pada Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi dan Menteri Koordinator Kompartimen Hubungan Rakyat.

2 Februari - 31 Desember 1965  
asli, fotokopi  
1 sampul

- 462 Surat-surat Edaran Direktorat Perjalanan mengenai perjalanan dinas untuk daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

15 - 25 November 1965  
salinan  
4 lembar

- 463 Laporan Triwulan II Departemen Perhubungan Tahun 1967

12 Juli 1967  
asli  
1 sampul

**e. Ganti Rugi dan Hutang**

- 464 Penjelasan mengenai Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak tentang perubahan atas tarif biaya pada Keputusan Dewan Pemerintahan Untuk restitusi di Hindia Belanda (Besluit van het Bestuur van de Raad voor het Rechtsherstel in Nederlandsch-Indie No. R.B/9/Alg).

11 Desember 1947  
asli  
1 sampul

- 465 Surat-surat Keputusan Menteri Kesehatan 1947 - 1954 tentang resitusi pengobatan bagi pegawai negeri.

1947-1954  
salinan  
1 sampul

- 466 Bundel Hutang Negara Jawatan Tentara dan Kepolisian Indonesia tentang Rekening - rekening yang belum dibayar, Beriana bin Djelindo dan Gunung Mesir (Sumatera Selatan).

14 November 1949-19 Nopemebr 1952  
fotokopi  
1 sampul

- 467 Surat-surat Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak tentang pemulihan hak/likwidasi untuk daerah Persil Jambi, Medan dan Lampung Tahun 1950-1958

5 Juni 1950-30 September 1958  
asli  
1 sampul

- 468 Berkas tentang hasil penjualan intan dan tools ex. Tokyo yang belum diserahkan kepada Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak

31 Agustus 1950-April 1958  
asli  
1 sampul

- 469 Surat Bukti No.1 - 5 bulan September 1952 m.a.7.2.4.14 tentang Penggantian kerugian dan ongkos selanjutnya berhubung dengan pemeriksaan perkara pidana dan lain - lain.  
01 September 1952  
asli  
1 sampul
- 470 Berkas mengenai Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak  
10 Februari 1954 - Januari 1961  
asli, salinan  
2 sampul
- 471 Surat-surat mengenai permohonan banding Direktur Handelsbank N.V. tentang pencabutan perlulusan hotel Simpang di Surabaya (Berbahasa Belanda)  
5 April 1954-21 Juli 1954  
asli  
1 sampul
- 472 Daftar sisa uang orang-orang Austria yang diserahkan oleh Balai Harta Peninggalan kepada Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak  
31 Oktober 1956  
asli  
1 sampul
- 473 Surat-surat Panitia untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak tentang penjualan tanah di Surabaya.  
26 Februari 1957-3 Maret 1957  
asli  
1 sampul
- 474 Laporan Kantor "Dr. Teng Sioe Tjhan" N.V. Jakarta kepada Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak di Indonesia berupa buku Rapport No. 1 s.d. 19  
15 Maret 1957-10 Januari 1958  
fotokopi  
3 sampul
- 475 Rekapitulasi daftar permintaan/pembayaran uang lembur untuk pegawai bulanan Sekretariat Konstituante bulan Juli 1957.  
01 dan 02 Agustus 1957  
asli  
1 sampul
- 476 Surat-surat Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta tentang ikhtisar setengah Tahun dari jalannya penagihan hutang-hutang kepada negara Tahun 1957-1961.  
28 November 1957-10 Februari 1961  
asli  
1 sampul

- 477 Surat-surat tentang pemblokiran uang Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak oleh Bank Indonesia dan perubahan mekanisme pembayaran penyewaan tanah di beberapa daerah seperti di Garut, Bandung, dll., yang tidak lagi dikirim ke rekening Balai Harta Peninggalan tetapi langsung ke rekening Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.  
6 Juni 1958-30 Maret 1960  
asli  
1 sampul
- 478 Surat-surat Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak tentang hal-hal yang bersangkutan tentang ganti rugi atas likwidasi kekayaan warga Jermar  
12 Agustus 1958-15 Oktober 1959  
asli  
1 sampul
- 479 Daftar mengenai objek-objek kekayaan yang diurus Panitia Untuk Urusan Pemulihan Hak Seri T/I No. 1-31 Tahun 1959-1960, beserta lampiran.  
1959-1960  
asli  
1 sampul
- 480 Surat-surat tentang laporan hasil pemeriksaan atas laporan-laporan tentang NV. Sussak Tahun Buku 1957 oleh Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak  
10 Desember 1959  
asli  
1 sampul
- 481 Surat-surat mengenai restitusi biaya pengobatan atau perawatan kesehatan pegawai di beberapa lembaga antara lain Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Dirjen Lembaga Tenaga Atom dan Dewan Pengawas Keuangan  
23 Juni 1959 - 20 Maret 1968  
salinan  
1 sampul
- 482 Surat Pengantar Sekretaris Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak tentang pengiriman laporan tentang Tarif Biaya, beserta lampiran  
5 Agustus 1959  
asli  
1 sampul
- 483 Surat-surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara kepada Bendaharawan Kabinet Perdana Menteri mengenai penagihan hutang kepada Negara pegawai-pegawai di lingkungan Kabinet Perdana Menteri Tahun 1959 s.d 1961, beserta lampiran  
02 September 1959 - 06 Desember 1961  
asli  
1 sampul
- 484 Surat menyurat antara Jawatan Kereta Api dengan Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak mengenai penyelesaian pembayaran beheersloon hasil likwidasi dan tariefkosten dari logam tua sisa jalan kereta api Pekan Baru-Muaro  
15 Oktober 1959-25 April 1960



- asli  
1 sampul
- 485 Surat-surat Keputusan Biro Pusat Statistik tentang pemberian restitusi kepada pegawai-pegawai Biro Pusat Statistik.  
15 Januari 1960 - 05 Juli 1962  
salinan  
1 sampul
- 486 Surat-surat Keputusan Direktur Lembaga Administrasi Negara tentang pemberian kuasa kepada bendaharawan untuk mengeluarkan restitusi bagi pegawai-pegawai Lembaga Administrasi Negara.  
19 Januari 1960 - 20 Desember 1961  
salinan  
1 sampul
- 487 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang restitusi/ganti rugi  
Januari - Desember 1960  
salinan  
1 sampul
- 488 Surat Keputusan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung No.1/Rest./DPA/60 tentang pemberian restitusi kepada pegawai-pegawai Dewan Pertimbangan Agung  
01 Februari 1960 - 03 Agustus 1961  
salinan  
1 sampul
- 489 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama tentang pemberian ganti rugi akibat penggarongan dan pembakaran rumah kepada para guru dan pegawai di Garut, Kuningan, Pandeglang dan lain-lain.  
06 Februari - 26 Maret 1960  
salinan  
1 sampul
- 490 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama tentang pemberian restitusi/ganti rugi biaya pengobatan untuk pegawai-pegawai Kantor Urusan Pegawai  
02 Maret - 5 Desember 1960  
salinan  
1 sampul
- 491 Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak dengan Opsir dan Bintara-Bintara dari P.D.M. III/R.I.8 atas sebidang tanah di Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Keresidenan Banten, Provinsi Jawa Barat.  
24 Maret 1960-26 Maret 1960  
asli  
1 sampul
- 492 Surat Petugas Penyelesaian Pembubaran Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa tentang panggilan sidang Pengadilan Negeri dalam perkara Lim Djoe Seng dan Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak yang sedang dalam likwidasi, beserta lampiran

- 2 Mei 1960  
asli  
1 sampul
- 493 Surat-surat Keputusan Ketua DPR (DPR) RI tentang pemberian restitusi/ganti rugi pengobatan kepada anggota-anggota DPR RI Tahun 1960-1961.  
30 Mei 1961-01 September 1961  
salinan  
1 sampul
- 494 Surat-surat Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara tentang penagihan dan sisa lebih UUDP  
23 Juni 1960-4 Oktober 1961  
asli  
1 sampul
- 495 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama tentang pemberian restitusi dan pemberian kuasa kepada KPPN di Jakarta untuk mengeluarkan uang bagi pembayaran restitusi-resitusi pegawai Kantor Urusan Pegawai  
22 September 1960 - 22 September 1962  
salinan  
1 sampul
- 496 Surat dari Menteri Pertama kepada para menteri mengenai persoalan tenaga belanda di jawatan-jawatan pemerintah, pemesanan kapal di Belanda dan hutang pemerintah kepada tenaga pelaut Belanda yang dihentikan  
13 Oktober 1960  
salinan  
8 lembar
- 497 Surat dari Ketua Dewan Pengawas Keuangan kepada semua Menteri mengenai pedoman dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ICW Pasal 74 dan tuntutan perbendaharaan berdasarkan ICW Pasal 77, 79, beserta lampiran  
19 Nopember 1960  
salinan  
1 sampul
- 498 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama tentang pemberian restitusi dan pemberian kuasa kepada KPPN di Jakarta untuk mengeluarkan uang bagi pembayaran restitusi-resitusi pegawai Biro Ekonomi dan Keuangan, Kabinet Menteri Pertama  
19 Desember 1960 - 26 September 1962  
salinan  
1 sampul
- 499 Surat-surat keputusan restitusi/ganti rugi dari Dewan Pengawas Keuangan RI  
1960 - 1961  
salinan  
1 sampul
- 500 Surat-surat Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik RI tentang restitusi/ganti rugi  
1960 - 1961  
salinan

- 1 sampul
- 501 Surat dari Menteri Pertama kepada Menteri Agraria mengenai ketentuan jual-beli tanah/rumah, perusahaan negara milik perorangan Warga Negara
- 16 Januari 1961  
fotokopi  
1 lembar
- 502 Surat-surat tentang biaya perjalanan dinas dalam negeri pejabat/pegawai negeri pada Kabin Menteri Urusan Khusus Tahun 1961-1963.
- 22 Februari 1961-12 Desember 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 503 Surat-surat Keputusan Ketua MPRS tentang pemberian restitusi kepada anggota-anggota MPRS.
- 17 April 1961  
salinan  
6 lembar
- 504 Surat menyurat antara Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dengan Kabinet Perdana Menteri mengenai penyelesaian hutang kepada negara a.n. A.S. Tasimin, Wiloso, dan seterusnya.
- 31 Mei - 11 Oktober 1961  
asli, tembusan  
7 lembar
- 505 Surat-surat keterangan dari Kepala Biro Administrasi Sekretariat Negara kepada Garuda Indonesia Airways mengenai biaya perjalanan dengan pesawat atas tanggungan Sekretariat Negara dan Faktur pembayaran PN. Garuda Indonesia Airways guna panjar perjalanan dinas Sekretariat Negara.
- 11 Juli 1961 - 13 Desember 1965  
asli, tembusan  
1 sampul
- 506 Surat-surat dari Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara mengenai penghapusan dan penagihan hutang negara
- 07 Oktober, 04 November 1961  
tembusan  
2 lembar
- 507 Kuitansi-kuitansi tanda terima pembayaran uang perjalanan dinas pegawai berdasarkan Surat Perintah Menteri Pertama.
- 15 November 1961 - 30 Desember 1962  
asli  
2 sampul
- 508 Surat-surat Keputusan Ketua Umum Dewan Asian Games Indonesia tentang ganti rugi terhadap perusahaan-perusahaan yang terkena proyek Asian Games di Senayar
- 13 Desember 1961  
tembusan  
1 sampul

- 509 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Restitusi / ganti rugi Tahun 1961  
1961  
asli  
1 sampul
- 510 Surat-surat Keputusan Badan Pemeriksaan Keuangan tentang pemberian restitusi bagi pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 1962  
27 Maret - 18 Oktober 1962  
asli  
1 sampul
- 511 Surat-surat tentang pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Rakyat  
13 Januari 1964-23 Desember 1965  
asli  
1 sampul
- 512 Surat menyurat antara Sekretariat Negara dengan Hotel Duta Indonesia mengenai pemberitahuan pembayaran hotel atas nama Ir. Moechamad Soebekti  
30 April - 28 November 1964  
asli  
1 sampul
- 513 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri RI tentang Restitusi / ganti rugi  
30 November 1964 - 20 Januari 1965  
salinan  
1 sampul
- 514 Surat menyurat antara Direksi PN Pantja Niaga dengan Biro Urusan Perusahaan Negara Sekretariat Negara mengenai hutang - piutang antar perusahaan negara  
30 Maret - 28 Mei 1966  
asli, salinan  
1 sampul
- 515 Surat-surat Keputusan Ketua Presidium Kabinet Ampera tentang Pemberian Restitusi bagi pegawai Sekretariat Presidium Kabinet Ampera RI an.J.P.Siregar, Rukmana, Sukirno, B. Abdullah, dkk.  
3 Agustus 1967-6 Oktober 1967  
fotokopi  
1 sampul

## **2. Organisasi**

- 516 Surat dari Kepala Bagian Kehakiman Tentara kepada Menteri Pertahanan mengenai permasalahan antara Inspektorat Kehakiman Tentara dan Bagian Tatahukum pada Kementerian Pertahanan  
Januari 1947  
asli  
1 lembar

- 517 Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan tentang penetapan Komisi Reorganisasi ALRI serta pengangkatan anggotanya.  
24 Maret 1948  
salinan  
5 lembar
- 518 Peraturan-peraturan Menteri Agama RI tentang Susunan dan Tugas Kementerian Agama, Biaya Perkara pada Pengadilan Agama serta Formasi dan Kedudukan Pegawai Pengadilan Agama.  
4 Mei 1950 - 1 Desember 1951  
salinan  
1 sampul
- 519 Laporan Tahunan Jawatan Tera RI Tahun 1950.  
1950  
asli  
1 sampul
- 520 Berkas mengenai rancangan kebijakan pemerintah tentang pendirian Dewan Moneter, Kedudukan Jendral direktur L.A.A.P.L.N dan anggota Dewan Pengawas Keuangan  
19 Agustus- 29 Desember 1952  
salinan  
1 sampul
- 521 Surat dari Menteri Keuangan kepada Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-Kementerian mengenai penyampaian susunan organisasi Kementerian Keuangan.  
12 September 1952  
asli  
5 lembar
- 522 Susunan Organisasi Jawatan Pajak dan hubungannya dengan Jawatan Akuntan Pajak  
15 September 1952  
asli  
1 sampul
- 523 Instruksi Kepala Perwakilan RI di Belanda mengenai susunan dan tugas Perwakilan Diplomatik.  
19 Agustus 1953  
fotokopi  
7 lembar
- 524 Surat dari Kepala Urusan Tata Usaha Direktorat Kabinet Presiden kepada Sekretaris Dewan Menteri tentang penilaian jabatan baru Kepala Jawatan PTT dan kepala Jawatan Kereta Api.  
16 Oktober 1954  
asli  
1 sampul
- 525 Berkas mengenai susunan, tugas-tugas dan reorganisasi Biro Perancang Negara  
05 Februari 1955

fotokopi  
1 sampul

526 Surat Keputusan KASAD tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Penguasa Militer 1957.

22 Maret 1957  
salinan  
9 lembar

527 Surat-surat Keputusan Direktur Lembaga Administrasi Negara tentang pembentukan Panitia Latihan Jabatan, pelaksanaan Latihan Jabatan, penunjukkan dan pemberhentian dosen tidak tetap atau pengajar.

30 Desember 1958 -18 September 1962  
salinan  
1 sampul

528 Surat-surat Keputusan Direktur dan Panitia Pembelian Lembaga Administrasi Negara tentang pembentukan dan pembubaran Panitia Pembelian Barang, penawaran dan pelaksanaan pembelian barang kebutuhan kantor, beserta berita acara penerimaan barang.

04 Juni 1959 - 27 Oktober 1960  
salinan  
1 sampul

529 Surat-surat tentang pembubaran Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak

28 Agustus 1959-9 September 1959  
fotokopi  
1 sampul

530 Surat dari Kabag. Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Semua Bendaharawan mengenai pemindahan tata usaha Pekerjaan Kas Negara yang dilakukan Kantor Pos dari Kantor Pengawas Kas Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya ke Kantor Pengawas Kas Bandung, beserta lampiran.

24 September 1959  
tembusan  
2 lembar

531 Surat dari Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa kepada Kepala Jawatan Transmigrasi tentang administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

08 Desember 1959  
tembusan  
2 lembar

532 Daftar Panitia Negara dan Panitia interdepartemental No.154/60 pada Kabinet Perdana Menteri RI.

07 Januari 1960  
asli  
1 sampul

- 533 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Pertama mengenai Front Nasional DPR, MPR, DPRD, Kepartaian dan Pemilihan Umum  
14 Maret 1960  
asli  
7 lembar
- 534 Surat Menteri Pertama kepada Sekretaris Jenderal DPR No. 5661/60 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR setelah penghentian tugas pasca keluarnya Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.  
21 Maret 1960  
tembusan  
1 lembar
- 535 Surat dari Menteri Pertama kepada Sekjen DPR tentang pelaksanaan tugas administrasi DPR.  
21 Maret 1960  
asli  
1 sampul
- 536 Surat dari Menteri Pertama kepada Presiden tentang pembentukan Dewan dan Kantor Tanda-Tanda Kehormatan.  
22 Maret 1960  
asli  
1 sampul
- 537 Surat Keputusan Menteri Pertama tentang Pembentukan/Susunan Panitia Pembelian Badan Pusat Intelligence.  
28 April 1960  
salinan  
3 lembar
- 538 Notulen Rapat V Panitia ad hoc Kabinet Kerja Urusan Asian Games, disertai Rancangan Tugas Organisasi dan Tata Kerja Dewan Asian Games Indonesia dan Surat Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Asian Games  
26 Mei 1960  
asli  
1 sampul
- 539 Laporan interim mengenai persiapan Pekerjaan 24 jam sehari dan usulan reorganisasi Bagian Angkutan Biro III Lapangan/Bangunan Dewan Asian Games Indonesia  
10 Agustus 1960  
salinan  
1 sampul
- 540 Peraturan Menteri/Kepala Kepolisian Negara tentang Susunan dan Tugas Biro Pengawasan Keuangan pada Departemen Kepolisian  
30 September 1960  
salinan  
2 lembar

- 541 Surat dari Wakil Menteri Pertama RI kepada Dewan Pengawas Keuangan mengenai ralat atas SK Menteri Pertama No.321/M.P/1960 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Rumah-Rumah Pegawai Badan-Badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi.
- 13 Oktober 1960  
asli  
1 sampul
- 542 Surat-surat pengumuman Badan Kesejahteraan Pegawai (BKP) dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kabinet Perdana Menteri
- 1 Februari 1961-31 Maret 1961  
asli  
1 sampul
- 543 Berkas mengenai riwayat singkat Panitia Interdepartmental Perumahan dan Rancangan Undang-Undang tentang Perumahan.
- 14 April 1961  
asli  
1 sampul
- 544 Surat Keputusan Menteri Pertama No.351/M.P/1961 tentang Perubahan nama Kabinet Perdana Menteri menjadi Kabinet Menteri Pertama
- 16 Agustus 1961  
salinan  
1 sampul
- 545 Surat Keputusan Menteri Pertama No.375/M.P/1963 tentang Pembubaran Komisi Penyelesaian Hutang Negara.
- 14 September 1961  
salinan  
2 lembar
- 546 Surat dari Dewan Pariwisata Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Pembantu Utama semua Departemen RI tentang perubahan nama Dewan Tourisme Indonesia menjadi Dewan Pariwisata Indonesia dalam hubungan dengan "Call Passage"
- 12 Desember 1961  
tembusan  
4 lembar
- 547 Surat dari Kepala Biro Tata Usaha kepada semua perwakilan RI tentang kenaikan tingkat Kedutaan Damaskus menjadi kedutaan besar
- 31 Desember 1961  
asli  
1 lembar
- 548 Surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Organisasi Lembaga Tenaga Atom
- 1961  
konsep  
1 sampul



- 549 Tata Kerja Badan Pimpinan Kerja sama Menteri-DPR-GR  
1961  
fotokopi  
1 sampul
- 550 Keputusan Menteri Pertama RI No.1/MP/62 tentang Pembentukan Seksi-Seksi dalam Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan II  
06 Januari 1962  
salinan  
3 lembar
- 551 Keputusan Menteri Pertama RI No.27/MP/1962 tentang Anggota dan Penasehat Ahli Dewan Penempatan Sarjana.  
19 Februari 1962  
salinan  
4 lembar
- 552 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.51/M.P/1962 tentang Penyaluran Tugas dan Aparatur Menteri-Menteri Penghubung Organisasi-Organisasi Rakyat  
28 Maret 1962  
salinan  
4 lembar
- 553 Berkas mengenai perkembangan Pekerjaan Panitia Pengawetan Bahan-Bahan Bangunan Organik.  
April - 8 Desember 1962  
asli  
1 sampul
- 554 Berita Acara Timbang Terima Urusan Distribusi untuk Pegawai Negeri dari Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakyat/Urusan Distribusi untuk Pegawai Negeri kepada Wakil Menteri Pertama/Koordinator Distribusi  
09 April 1962  
asli  
1 sampul
- 555 Surat-surat Keputusan Menteri Urusan Anggaran Negara tentang susunan organisasi dan pembagian tugas kewajiban kesatuan Organisasi Urusan Anggaran Negara  
29 Mei 1962  
salinan  
5 lembar
- 556 Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tentang perubahan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja menjadi "Pagar Baja" dan penjelasan tugas-tugasnya.  
11 Juli 1962  
salinan  
1 lembar

- 557 Pedoman kerja Bagian Anggaran BPU Perusahaan Pertanian Negara. NB. arsip tidak lengkap.  
25 Agustus 1962  
konsep  
3 lembar
- 558 Surat Keputusan Menteri Pertama No. 114/M.P./1962 tentang Team Progress Pembangunan KOTOE.  
01 September 1962  
salinan  
2 lembar
- 559 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.154/M.P/1962 tentang Pembentukan Team Kerja Modal Dasar Perusahaan Negara.  
17 Desember 1962  
salinan  
3 lembar
- 560 Surat Keputusan Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc Retooling Aparatur Negara Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Jawa Tengah.  
19 Desember 1962 dan 15 Januari 1963  
salinan  
4 lembar
- 561 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.6/M.P/1963 tentang Perpanjangan masa kerja bagi Panitia antar Departemen Statistik Pengangkutan Darat, Laut dan Udara  
25 Januari 1963  
salinan  
1 lembar
- 562 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.15/M.P/1963 tentang Perpanjangan masa kerja Komisi Istilah dan Dewan Pertimbangan Istilah dari Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
31 Januari 1963  
salinan  
2 lembar
- 563 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.25/M.P/1963 tentang Pembentukan Dewan Perindustrian Pertahanan.  
23 Februari 1963  
salinan  
1 lembar
- 564 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.29/M.P/1963 tentang Kantor-Kantor Cabang Lembaga Tenaga Atom di Bandung dan Jogjakarta  
7 Maret 1963  
salinan  
2 lembar

- 565 Surat dari Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/DAPERNAS kepada Menteri Sekretaris Negara tentang kelangsungan pelaksanaan tata usaha keuangan dan kepegawaian dari sekretaris Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/DAPERNAS oleh Biro I Sekretariat Negara Tahun 1963.
- 27 Maret 1963  
asli  
3 lembar
- 566 Surat-surat tentang Pembentukan Panitia Interdepartemental Peninjauan Peraturan tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- 13 Mei 1963-11 Juli 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 567 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.54/M.P/1963 tentang Bentuk, Susunan, Wewenang dan Tatacara Kerja Badan Pembantu Menteri Pertama dalam Urusan Koordinasi Perusahaan-Perusahaan Negara.
- 11 Juni 1963  
salinan  
2 lembar
- 568 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.58/M.P/1963 mengenai Peraturan Pembiayaan Panitia-Panitia antara lain Panitia Negara, Panitia Antar Departemen dan Panitia Daerah.
- 18 Juni 1963  
salinan  
1 sampul
- 569 Surat Keputusan Menteri Pertama tentang Kedudukan, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pembantu Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Urusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- 27 Juli 1963  
salinan  
2 lembar
- 570 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.92/M.P/1963 tentang Tata Cara Kerja dan Susunan Organisasi Dewan Telekomunikasi
- 19 Agustus 1963  
salinan  
1 sampul
- 571 Surat dari Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat tentang pembentukan Team Penyelidikan Ilmiah di Pedalaman Irian Bara
- 16 September 1963  
tembusan  
2 lembar
- 572 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI No. 581/M.P/1960 dan No.4/M.P/1963 tentang Pengangkatan dan Pembubaran Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri
- 16 Desember 1963

- salinan  
5 lembar
- 573 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri RI tentang Pembentukan Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara, Yayasan Penerbitan Pembina Perekonomian Nasional dan Panitia Pelaksanaan Kursus Fisika Kesehatan
- 18 Desember 1963 - 8 Februari 1964  
salinan  
1 sampul
- 574 Penetapan Presiden RI No. 12 Tahun 1963 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Disempurnakan).
- 24 Desember 1963  
salinan  
4 lembar
- 575 Surat Keputusan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional No.036/M/1964 tentang Pembentukan Team Penyusun Ikhtisar Tahunan Pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S No.II/MPRS/1960 yang Berkenaan dengan Tahun Pelaksanaan Pembangunan 1963.
- 1 Februari 1964  
fotokopi  
3 lembar
- 576 Rencana Pembangunan Departemen Pertanian 1965-1968 Re-Adjustment PNSB Bidang DEPERTA 1965-1968.
- 27 Maret 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 577 Surat keputusan Menteri perhubungan No.U.18/10/20 -U tentang perpanjangan masa kerja Panitia Penyelenggaraan Sayembara Lambang Departemen Perhubungan Udara
- 31 Agustus 1965  
salinan  
1 lembar
- 578 Surat-surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Panitia Organisasi Departemen Kehutanan, serta Pembentukan Direktorat Pendidikan dan Penyuluhan Kehutanan, dan Pembentukan Direktorat Pembinaan Hutan dan Direktorat Pengusahaan Hutan.
- 14 September 1965 dan 5 Maret 1966  
salinan  
3 lembar
- 579 Surat Keputusan Menteri Koordinator Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Panitia AD-HOC Pengintegrasian Yayasan Dewan Normalisasi Indonesia (JDNI) dengan Institut Standard Industri (ISRI).
- 18 September 1965  
salinan  
1 lembar

- 580 Surat Keputusan Kepala Direktorat Akuntan Negara No. 021/0-18211 tentang penetapan beberapa Bagian pada Direktorat Akuntan Negara  
22 September 1965  
fotokopi  
2 lembar
- 581 Surat dari wakil Perdana Menteri Pertama II/Ketua Pusat Koordinasi Perusahaan Negara kepada Menteri Koordinator Kompartimen tentang Team Pembantu Wakil Perdana Menteri Pertama/Ketua Badan Koordinasi Urusan Perusahaan Negara  
26 Nopember 1965  
tembusan  
3 lembar
- 582 Surat Keputusan Menteri Iuran Negara Republik Indonesia tentang Perubahan nama Direktorat Pajak Hasil Bumi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah  
29 Nopember 1965  
petikan  
1 lembar
- 583 Surat-surat Keputusan Menteri Research Nasional tentang Susunan dan Organisasi Departemen Urusan Research Nasional  
01 Desember 1965  
salinan  
1 sampul
- 584 Surat dari Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan kepada Menteri Pertanian tentang penyampaian memorandum perihal struktur organisasi PN. Gula Negara, beserta lampiran.  
16 Mei 1966  
asli  
1 sampul
- 585 Surat keputusan Presidium Kabinet No.114/U/Kep/S/1967 tentang Pembentukan Badan Urusan Logistik.  
19 Mei 1967  
salinan  
1 sampul
- 586 Daftar badan lembaga yang Non-Departemental Sekretariat Presidium Kabinet Ampera RI Tahun 1967.  
19 Juni 1967  
fotokopi  
2 lembar
- 587 Buletin Mingguan Aneka Karyawan Angkatan Darat tentang Kebijakan Baru Kabinet Ampera.  
06 Februari 1968  
asli  
1 sampul
- 588 Daftar KBRI di Eropa, Asia Pasifik, Afrika dan Amerika

tt  
fotokopi  
1 sampul

- 589 Nota Panitia ADHOC Dewan Menteri mengenai Pemilihan Badan Perwakilan Pusat yaitu Konstituante dan DPR.

tt  
asli  
1 sampul

### 3. Kepegawaian

- 590 Catatan mengenai pengangkatan pegawai dan penerimaan gaji pegawai berdasar Osamu Sei Zin No. 13 (Peraturan tentang pengangkatan dan gaji pegawai negeri di Jawa

17 Desember 1947  
asli  
1 sampul

- 591 Catatan mengenai Surat-surat Keputusan Sekretaris Dewan Menteri No. 1-43 Tahun 1948 tentang kepegawaian.

7 Januari 1948-8 Desember 1948  
asli  
1 sampul

- 592 Surat-surat tentang pendelegasian wewenang, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Bagian Intendance Kementerian Pertahanan Tahun 1948

31 Mei 1948-9 Desember 1948  
asli, fotokopi  
1 sampul

- 593 Surat dari Sekretaris Menteri Kemakmuran kepada JM Menteri Pertahanan di Jogjakarta tentang Perintah kepada Kapten Harjono tentara bagian Intendance untuk perjalanan dinas ke Manila dan Tokyo sebagai pegawai Jawatan Perdagangan

9 Juli 1948  
tembusan  
2 lembar

- 594 Surat Keputusan Menteri Pertahanan No.A/591/1948 tentang pemberian jaminan kepada anggota tentara dan pemberian tunjangan bahan makanan kepada keluarga anggota tentara.

29 Oktober 1948  
salinan  
1 sampul

- 595 Surat-surat mengenai permohonan berhenti an. Moh. Sulaiman Komisaris Kepala Direktorat Planing/Policy Kementerian Perdagangan dan Industri

23 September 1948-8 Maret 1951  
asli  
1 sampul

- 596 Surat-surat Keputusan dari Kepala Jawatan Persenjataan tentang pemberhentian pegawai an. Kartina Wati, Marwan dkk.

29 September 1948

- asli  
1 sampul
- 597 Surat-surat Keputusan Staf Angkatan Darat tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada Kementerian Pertahanan  
8 Oktober- 7 Desember 1948  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 598 Surat-surat keterangan mengenai data pegawai untuk penetapan gaji pegawai dalam jabatan negeri, a.n.Waisapey Y Paulus dkk. NB: Sebagian berbahasa Belanda  
20 November 1948-8 Juni 1949  
asli  
1 sampul
- 599 Berkas kenaikan pangkat pegawai Biro Pusat Statistik an.R.Santang Tjakranata  
1 Januari 1949-29 Mei 1957  
asli  
1 sampul
- 600 Berkas kenaikan gaji berkala pegawai Kementerian Perdagangan an.Jaumil Abdul Malik.  
1 Januari 1949-31 Desember 1957  
asli  
1 sampul
- 601 Surat-surat tentang pangkat dan kedudukan, gaji dan uang lembur, serta pengaduan pegawai pada Kementerian Kehakiman  
7 Januari 1949-1 Desember 1957  
asli  
1 sampul
- 602 Berkas mengenai mutasi an. D.M.H Tombeng dari Kementerian Perekonomian Negara Indonesia Timur ke Jawatan Perikanan Laut di Jakarta  
8 April 1949-24 Februari 1951  
asli  
1 sampul
- 603 Surat Kuasa Direktur Kabinet Presiden kepada S.P. Paku Alam VIII, Kepala Daerah Jogjakarta untuk menandatangani daftar gaji dan daftar uang tunggu serta mendata para pegawai Istana Jogjakarta yang diperbantukan kepada kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.  
06 Januari 1951  
salinan  
1 lembar
- 604 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Sekertaris Jendral Kabinet Perdana Menteri kepada Dewan Menteri tentang Kesulitan penghidupan pegawai negeri di daerah Sumatera.  
06 Januari 1951  
salinan

- 1 sampul
- 605 Surat penetapan Perdana Menteri RI No. 57/P.M/1951 tentang pembentukan Perutusan tenaga-tenaga ahli bangsa asing di luar negeri dan mengadakan pemilihan dari pelamar-pelamar yang dapat diberi angkatan sementara oleh kepala urusan kepegawaian an.Mr. Marsoro, dkk.
- 11 Juni 1951  
tembusan  
6 lembar
- 606 Surat-surat Keputusan Gubernur Irian Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Riau, Sulawesi Selatan dan Maluku tentang peraturan istirahat, penunjukan, dan pengangkatan pegawai (bendaharawan).
- 12 Juni 1951, 30 Juni 1958 - 12 Mei 1965  
tembusan  
1 sampul
- 607 Berkas mengenai penunjukan rumah-rumah bagi pegawai negeri di lingkungan Kementerian Perekonomian.
- 28 Oktober 1951-19 November 1954  
asli  
1 sampul
- 608 Keterangan mengenai nama-nama pegawai dari Kementerian PP dan K, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.yang mendapatkan beasiswa ke Belanda.
- 1 Januari 1952-1 Oktober 1952  
asli  
1 sampul
- 609 Daftar alamat rumah, kantor dan No. telepon para Pejabat Kabinet Wilopo, Kabinet Juanda, Kabinet Ali Sastroamijoyo, Kabinet Kerja, Kabinet Dwikora, Pegawai Diplomatik / Konsuler, Konselir dan tata usaha RI di luar negeri, penguasa perang daerah, bendaharawan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi dan pegawai Sekretariat Negara.
- 3 April 1952 - 1 Maret 1965  
asli  
1 sampul
- 610 Surat-surat Keputusan dan Edaran dari Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri kepada Para Menteri mengenai pemberian istirahat, uang muka atas pensiun, pengkatan, tunjangan dan pemberian gaji pokok pegawai negeri
- 1 Juli 1952 - 12 Juli 1954  
asli  
1 sampul
- 611 Surat dari Menteri Keuangan mengenai pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli waris pegawai negeri yang telah tewas dalam menjalankan kewajibannya karena keganasan gerombolan, beserta lampiran.
- 18 Maret 1953  
fotokopi



- 2 lembar
- 612 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman mengenai kesempatan tenaga Indonesia untuk ditempatkan pada sekretariat PBB sebagai Junior Profesional  
 25 Juli 1953  
 tembusan  
 7 lembar
- 613 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri pada Gubernur Nusa Tenggara tentang Kedudukan dan gaji para pejabat gubernur/kepala daerah.  
 25 Agustus 1954-6 Desember 1954  
 asli  
 1 sampul
- 614 Surat-surat dari kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara kepada Kabinet Perdana Menteri tentang tunjangan anak angkat  
 04 Oktober 1954  
 asli  
 1 sampul
- 615 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Dalam Negeri tentang mutasi-mutasi dalam Pamong Praja dan Kementerian dalam negeri  
 04 Nopember 1954  
 asli  
 1 sampul
- 616 Surat-surat mengenai permintaan pertanggungjawaban uang harian penjagaan keamanan KAA dan tentang penunjukan Ruslan Abdulgani sebagai bendaharawan pemberi uang muka bagi seluruh urusan KAA.  
 21 Februari - 22 September 1955  
 asli, salinan  
 7 lembar
- 617 Surat dari Kementerian Keuangan Jawatan Perbendaharaan dan Kas - kas negara tentang Persekot kenaikan gaji P.G.P baru  
 22 Oktober 1955  
 asli  
 1 sampul
- 618 Daftar jabatan-jabatan dan pangkat menurut PGP 1948 Jo P.P No. 23 Tahun 1950 oleh Kementerian Pertahanan  
 1955  
 fotokopi  
 1 sampul
- 619 Surat dari Kementerian Perhubungan kepada Dewan Menteri tentang Susunan Anggota Dewan Urusan Pegawai  
 16 Mei 1956  
 asli  
 4 lembar

- 620 Surat dari Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia kepada para Menteri tentang sikap pemerintah terhadap pegawai negeri bangsa Belanda  
31 Januari 1958  
asli  
3 lembar
- 621 Nota-nota dari Kepala Kantor Urusan Pegawai mengenai perbaikan gaji pegawai  
Agustus-Oktober 1958  
asli  
1 sampul
- 622 Surat-surat tentang gaji Panitia untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak  
06 November 1958-24 April 1960  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 623 Surat-surat tentang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, pendidikan dan kenaikan gaji pegawai-pegawai Ex. Sekretariat Konstituante Bandung  
20 Juni 1959-28 Maret 1961  
asli  
1 sampul
- 624 Surat-surat Keputusan Menteri Pembangunan RI tentang penunjukan dan pengangkatan dalam beberapa tim kerja, seperti Panitia Pembinaan Industri Kendaraan Bermotor dan Tim Kerja Pelaksanaan Persetujuan RI-URSS  
20 Juli 1959 - 18 Januari 1961  
salinan  
1 sampul
- 625 Surat-surat mengenai penyelenggaraan latihan beberapa jabatan antara lain kearsipan, administrasi perkantoran, hubungan masyarakat dan pengawasan keuangan oleh Lembaga Administras Negara.  
1 Agustus 1959 - 30 Juli 1962  
asli  
1 sampul
- 626 Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penunjukan dan pengangkatan pegawai pada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara  
10 Agustus 1959 - 12 Juni 1962  
salinan  
1 sampul
- 627 Surat-surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1964 antara lain tentang pemberian tugas belajar, pemberhentian kepala daerah, Pendidikan Khusus Pegawai Irian Bara  
12 September 1959 - 1 Juli 1965  
salinan  
1 sampul
- 628 Surat-surat dari Kementerian Urusan Veteran RI kepada Menteri Pertama mengenai persoalan pegawai - pegawai dari tenaga veteran di beberapa instansi  
21 September 1959 - 21 Maret 1960

asli  
6 lembar

- 629 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Kepegawaian (penunjukan, pengangkatan, pembebasan tugas).  
11 Januari 1960 - 11 Maret 1963  
salinan  
1 sampul
- 630 Serah terima penggantian pimpinan Balai Harta Peninggalan Semarang dari Mr.Ko Kwat Tiong pada J. R. M Waas.  
30 Januari 1960  
asli  
1 sampul
- 631 Surat Keputusan Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI tentang pengangkatan pegawai an.Drs. Kabullah Wijaya Amiarsa di Fakultas ekonomi Universitas Pajajaran dengan pangkat sekertaris tingkat 1 serta pemberian kenaikan gaji berkala.  
01 Februari 1960  
asli  
1 sampul
- 632 Surat-surat Keputusan Menteri Penerangan RI tentang kepegawaian di lingkungan Kementerian Penerangan  
1 Februari - 19 Desember 1960  
salinan  
1 sampul
- 633 Surat-surat Keputusan Menteri Luar Negeri tentang penugasan pegawai Biro Ekonomi dan Keuangan untuk menghadiri sidang ke XVII *Comission Ecafe* di New Delhi, Bangkok, Tokyo dan tugas luar negeri lainnya  
5 Maret - 24 Oktober 1960  
salinan  
1 sampul
- 634 Surat-surat tentang kepegawaian Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak  
31 Maret 1960-11 Juli 1960  
asli  
1 sampul
- 635 Surat kepala kantor urusan pegawai dengan lampiran rancangan Peraturan Pemerintah beserta penjelasannya tentang Perbaikan penghasilan pegawai negeri bangsa asing kepada Menteri Pertama.  
31 Maret 1960  
asli  
1 sampul

- 636 Keputusan Menteri Pertama RI No.108/PM/1960 tentang penugasan perwira angkatan udara untuk mengikuti pendidikan tambahan pada *Royal Air Forcs staff College* di Andover.
- 14 April 1960  
salinan  
4 lembar
- 637 Surat dari Prawoto Mangkusosmito kepada Menteri Keuangan RI tentang penyelesaian dana pensiunannya.
- 10 Mei 1960  
asli  
2 lembar
- 638 Surat Berita Pejabat Pers Lembaga Administrasi Negara tentang penutupan Konferensi Kepegawaian.
- 23 Juni 1960  
asli  
1 sampul
- 639 Surat dari Kepala Bagian Tata Usaha Ahli-Ahli Bantuan Luar Negeri Biro Ekonomi dan Keuangan kepada Sekjen Departemen/Kepala Jawatan tentang mutasi tenaga - tenaga ahli dalam rangka bantuan organisasi-organisasi di luar negeri
- 01 Juli 1960  
asli  
1 sampul
- 640 Surat edaran No.1/Keu/DAGI tentang Honorium gaji pegawai dan uang sidang Dewan Asian Games Indonesia.
- 05 Juli 1960  
asli  
1 sampul
- 641 Surat Keputusan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat No.693/7/1960 tentang tugas perbantuan dari Staf Khusus Perdana Menteri ke Menteri/Jaksa Agung, an. Maogimon, J.E. Mr.
- 23 Juli 1960  
salinan  
4 lembar
- 642 Surat dari Menteri Keamanan Nasional Deputi II Penguasa Perang Tertinggi kepada semua Departemen tentang penempatan/kenaikan pangkat bagi pegawai golongan F di daerah.
- 29 Agustus 1960  
asli  
1 sampul
- 643 Surat keputusan Menteri atau Jaksa Agung No. U.P/15722/727 PeN tentang Penunjukkan Mr.R.Soehartono Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung sebagai Wakil Jaksa Agung.
- 01 September 1960

asli  
3 lembar

- 644 Daftar formasi pegawai badan-badan kekuasaan negara tertinggi, pegawai Biro Bantuan Luar Negeri, Biro Ekonomi dan Keuangan Kabinet Perdana Menteri  
07 September 1960 - 12 Juli 1961  
konsep, asli, fotokopi  
1 sampul
- 645 Surat-surat Keputusan Menteri/Jaksa Agung tentang pengangkatan dan penunjukan pejabat di lingkungan Kejaksaan  
23 September - 30 November 1960  
salinan  
5 lembar
- 646 Surat-surat Keputusan Presidium Kabinet dan Menteri Pertama tentang pemberian tunjangan pekerjaan rangkap bagi pegawai negeri sipil dan angkatan perang  
10 Oktober 1960, 15 Oktober 1963, 17 November 1964  
salinan  
1 sampul
- 647 Surat dari Kepala bagian kepegawaian Menteri Perhubungan Darat dan PTT kepada Menteri Pertama tentang Peraturan Komando Koperasi Merdeka di Manado mengenai pembayaran gaji pegawai.  
05 Oktober 1960  
asli  
3 lembar
- 648 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai Rencana Surat Keputusan Menteri Pertama terkait Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri .  
06 Oktober 1960  
asli  
8 lembar
- 649 Surat-surat dari Menteri Pertama dan Pejabat Kepala LPKB mengenai pengangkatan pegawai dan pejabat Kepala LPKB cabang Pontianak  
11 Oktober 1960 dan 4 November 1964  
asli  
3 lembar
- 650 Surat-surat dari Menteri Pertama dan Badan Kesejahteraan Pegawai Kabinet Perdana Menteri mengenai persekot dan bantuan hari raya berupa beras dan zakat fitrah untuk pegawai.  
21 November 1960 - 19 Desember 1963  
asli  
1 sampul

- 651 Surat keputusan Bupati Sukoharjo tentang pemberhentian tugas pegawai yang dipekerjakan pada Kantor Panitia Pemilihan Kabupaten  
25 Nopember 1960  
salinan  
3 lembar
- 652 Surat-surat keputusan dari kepala daerah mengenai pengangkatan, penunjukan, penempatan pegawai terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Barat, Sumbawa, Dompu  
15 Desember 1960 - 1 April 1965  
salinan  
1 sampul
- 653 Surat dari Menteri Keuangan No. BUPP 1-1-4 tentang usul pimpinan (direksi) Perusahaan Pegadaian Negara an. Soewardi, disertai lampiran riwayat hidup  
05 Januari 1961  
salinan  
1 sampul
- 654 Usul penetapan golongan dalam P.G.P.N untuk jabatan wakil Jaksa Agung dan Jaksa Tinggi pengganti.  
01 Maret 1961  
asli  
3 lembar
- 655 Peraturan-peraturan dan data statistik mengenai pengiriman pegawai ke luar negeri dalam rangka dinas dan tugas belajar.  
19 Maret 1961 - 12 Juli 1963  
tembusan  
1 sampul
- 656 Pengumuman-pengumuman peraturan Dinas Intern Dakota dari Perusahaan Negara Garuda Indonesia Airways  
16 Mei 1960-12 Desember 1961  
asli  
1 sampul
- 657 Surat Edaran Menteri Pertama kepada semua menteri tentang Pelaksanaan Penyesuaian dalam Peraturan Gaji, disertai lampiran  
9 Juni 1961  
salinan  
1 sampul
- 658 Surat keputusan Deputi Penguasa Perang Tertinggi No. K/D/021 Peperti/1961 tentang pengangkatan dinas sensor pusat an. PM. Hadi Harsono dkk  
05 Juli 1961  
asli  
2 lembar

- 659 Berita acara timbang terima jabatan Bendaharawan pada Biro Ekonomi dan Keuangan, Biro TUK, Yogyakarta dan Dewan Pertimbangan Agung, beserta surat pengantar.  
01 Agustus 1961, 29 Juni , 25 November 1962  
asli  
1 sampul
- 660 Surat-surat Keputusan Menteri Penghubung Organisasi-Organisasi Rakyat tentang kepegawaian.  
18 Agustus - 15 Desember 1961  
salinan  
1 sampul
- 661 Surat dari Sekretaris B.K - B.K.P BAPERTI kepada Badan Kesejahteraan Pegawai tentang pelaksanaan pengurusan pembagian rumah P.C.S kepada pegawai negeri  
05 September 1961  
salinan  
1 sampul
- 662 Surat-surat dari Biro Ekonomi dan Keuangan Kabinet Perdana Menteri tentang mutasi tenaga tenaga ahli dalam rangka bantuan organisasi-organisasi luar negeri  
14 September 1961  
asli  
1 sampul
- 663 Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Tenaga Atom No. U.P.6/8/12 tentang penunjukkan Ir. Kuntohadji (Major TNI) sebagai Wakil Direktur Jenderal Lembaga Tenaga Atom, dan Erman Nataadidjaja sebagai Sekretaris Umum  
27 September 1961  
fotokopi  
1 lembar
- 664 Surat Keputusan Menteri Keamanan tentang Pemberhentian/Pengangkatan Panitia Tetap Urusan Orang Asing Staf Keamanan Nasional  
03 Oktober 1961  
salinan  
4 lembar
- 665 Surat keputusan Kepala Staff Penguasa Perang Tertinggi tentang Pemberian tunjangan kepada Anggota ABRI dan Pegawai Negeri Sipil  
11 Oktober 1961  
salinan  
1 sampul
- 666 Surat edaran Menteri Pertama No.21/M.P/R.I/1961 tentang pemindahan pegawai ke Kepulauan Riau dalam rangka Operasi Hemat  
20 Oktober 1961  
asli  
1 sampul

- 667 Surat Edaran Menteri Pertama RI No.24/MP/RI/1961 kepada semua menteri tentang pembatasan pengiriman utusan keluar negeri sebagai penghematan devisa negara  
28 Nopember 1961  
fotokopi  
1 lembar
- 668 Surat Keputusan Perdana Menteri tentang Penunjukan pegawai-pegawai Kementerian Perekonomian untuk menuntut *fellowship* di England, Holand, Canada selama 6 bulan.  
26 Mei 1962  
asli  
3 lembar
- 669 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.88 dan 89/MP/1962 tentang pemberian honorarium pengajar dan penyusun diktat kursus-kursus dinas  
30 Juni dan 30 Juli 1962  
salinan  
6 lembar
- 670 Surat dari Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/Depernas kepada Menteri Pertama mengenai daftar pegawai penghubung dari departemen/biro pemerintah dengan DPR-GR.  
14 Juli 1962  
asli  
1 sampul
- 671 Keputusan penguasa tertinggi No.32/Poperti Tahun 1962 tentang Pengangkatan pejabat-pejabat R. Abdulrachman Soeriokoesoemo dan Mr Soetrisno Hamidjojo  
31 juli 1962 -10 September 1962  
asli  
2 lembar
- 672 Surat dari Kabinet Menteri kepada Menteri Luar Negeri tentang usul penempatan beberapa tenaga dari Nahdatul Ulama di luar negeri  
13 Agustus 1962  
asli  
2 lembar
- 673 Surat-surat mengenai penyetoran potongan simpanan wajib untuk tabungan dan asuransi Pegawai Negeri.  
1 September, 08 dan 19 Desember 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 674 Surat Edaran dan Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tentang penunjukkan pejabat Sekretaris Badan Pemeriksa Keuangan dan pemberian izin cuti  
03 September 1962 dan 29 Februari 1964  
salinan  
4 lembar



- 675 Surat dari Menteri Pertama kepada Semua Wakil Menteri Pertama mengenai beberapa petunjuk tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No.5 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Mempergiat Retooling Pegawai Sipil dan Angkatan Bersenjata  
15 September 1962  
salinan  
2 lembar
- 676 Surat dari Kepala I Biro Ekonomi dan Keuangan Kabinet Menteri Pertama kepada Menteri Urusan Bank Sentral mengenai tugas dan nama anggota Tim Kerja Modal Dasar Perusahaan.  
19 September 1962  
tembusan  
1 lembar
- 677 Surat Keterangan dari Departemen Perhubungan Laut tentang pemberian kuasa dari Kepala Jawatan Pelayaran kepada Syahbandar Makasar untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran dalam menyelenggarakan Pekerjaan pembangunan dan mengawasi pembayarannya.  
22 Oktober 1962  
asli  
1 lembar
- 678 Surat-surat Keputusan Direktur Lembaga Administrasi Negara tentang pengadaan Latihan Jabatan Kepemimpinan Kearsipan Negara, gaji dan penempatan pegawai.  
29 Oktober 1962 - 30 Oktober 1965  
salinan  
1 sampul
- 679 Surat dari Sekretaris Negara kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tentang Tunjangan Kemahalan Setempat, beserta lampiran  
24 November 1962  
asli  
2 lembar
- 680 Daftar perubahan/tambahan para pegawai penghubung dari departemen-departemen Angkatan Darat, Urusan Bank Sentral, Perindustrian Rakyat dan P.D.K  
19 Nopember 1962  
asli  
1 sampul
- 681 Daftar susunan pegawai bagian VII A Departemen Pertanian  
1962  
fotokopi  
1 sampul
- 682 Surat dari Kepala II Biro Ekonomi dan Keuangan Kabinet Menteri Pertama kepada Menteri Urusan Research Nasional mengenai penggantian Project Director "Development Projects Consulting Service" dari Iman Soedjahri kepada Ir. Sie Kwat Soen.

- 21 September 1962  
tembusan  
1 lembar
- 683 Surat-Surat Keputusan Menteri Pertama tentang pengangkatan dan penunjukan menjadi anggota tim atau jabatan tertentu Tahun 1963.  
5 Februari - 7 September 1963  
salinan  
1 sampul
- 684 Surat Edaran Menteri Pertama No. 3/MPRI/1963 tentang izin pengangkatan sebagai anggota Badan Pengawas Umum atau Direksi Perusahaan  
07 Februari 1963  
asli  
1 lembar
- 685 Surat dari Direktur Arsip Nasional kepada Sekretaris Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus tentang daftar dan penjelasan mengenai pegawai Arsip Nasional, disertai lampiran.  
18 Februari 1963  
asli  
1 sampul
- 686 Surat dari Kepala DAMRI kepada Kepala Staf Peperti/Koti G V mengenai penggantian pegawai DAMRI di Irian Barat  
6 Mei dan 10 April 1963  
salinan  
3 lembar
- 687 Surat-surat perjalanan dari berbagai instansi antara lain Dep. Pertanian dan Agraria, Dep. P,D dan K., Dep. Perhubungan Udara, Dep. Kehakiman, Dep. Olahragε  
8 Mei 1963 - Juni 1964  
asli  
1 sampul
- 688 Surat-surat dari Menteri Pertama kepada para menteri mengenai peraturan gaji, kedudukan hukum dan pensiun di Perusahaan Negara  
11 Mei - 8 Desember 1963  
asli  
3 lembar
- 689 Surat dari Menteri Pertama kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan mengenai izin bepergian ke luar negeri bagi pegawai negeri atau anggota angkatan bersenjata yang berada di Kepulauan Riau.  
24 Juni 1963  
tembusan  
2 lembar
- 690 Berita acara timbang terima No. 3164/IB/I/BPU dari R. Soedjono kepada R. Anda Ganda Hidajat tentang Serah terima pimpinan sementara atas BPU Perusahaan Kehutanan Negara d Jakarta.  
15 Juli 1963

- asli  
1 lembar
- 691 Surat dari Menteri Pertama RI kepada para Menteri mengenai anjuran untuk segera melaksanakan Peraturan Presiden No.10 Tahun 1963 tentang distribusi bahan keperluan hidup bagi pegawai negeri
- 17 Juli 1963  
fotokopi  
1 lembar
- 692 Surat dari Konjen RI di Hongkong kepada Menteri Luar Negeri mengenai peraturan penjemputan, pengantaran dan pembayaran bagi yang bertugas ke Hongkong
- 17 Juli 1963  
tembusan  
4 lembar
- 693 Berita acara timbang terima tugas/jabatan Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Operasi dari R. Srijono Prodjosukanto kepada Susatyo Mardhi
- 01 Agustus 1963  
salinan  
2 lembar
- 694 Surat Sekretaris Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/DEPERNAS tentang penyampaian daftar perubahan/tambahan para pegawai Penghubung dari beberapa Departemen, beserta lampiran.
- 9 Agustus 1963  
asli  
1 sampul
- 695 Surat dari Menteri Perburuhan kepada Menteri Pertama tentang permohonan pembatalan pemberhentian 14 pegawai Departemen Perburuhan akibat mengeluarkan resolusi pemecatan Menteri Perburuhan.
- 03 Oktober 1963  
asli  
1 lembar
- 696 Surat-Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartemen Perhubungan dengan Rakyat tentang pengangkatan anggota Dewan Pembantu Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi dan tentang pengangkatan Pembantu I Sekretaris Menko sebagai penghubung pada Komite Nasional FFAA.
- 18 November 1963 dan 17 Maret 1964  
tembusan  
4 lembar
- 697 Surat-surat Keputusan Pimpinan DPR-GR tentang Pengangkatan Kepegawaian Tahun 1964.
- 2 Januari - 27 Desember 1964  
salinan  
1 sampul

- 698 Surat-surat Keputusan Menteri Research Nasional tentang Pengangkatan Kepegawaian Tahun 1964.  
4 Januari - 30 November 1964  
salinan  
1 sampul
- 699 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pengangkatan para sarjana pertanian yang bertugas di Perusahaan Gula Negara Jawa Tengah sebagai Pembantu Deputi Komando Operai Makmur Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
14 Januari 1964  
tembusan  
2 lembar
- 700 Surat-surat Keputusan Presidium Kabinet Kerja Tahun 1964 tentang Kepegawaian, Alokasi Devisa, DPRD-GR Wilayah Jakarta.  
29 Januari - 9 Oktober 1964  
salinan  
1 sampul
- 701 Surat-surat Keputusan Menteri Sekretaris Jendral Front Nasional tentang kepegawaiar  
1 Februari 1964 - 07 Agustus 1965  
salinan  
1 sampul
- 702 Surat-surat Keputusan Menteri Koordinator Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kepegawaian.  
10 Februari 1964 - 3 Desember 1965  
salinan  
1 sampul
- 703 Surat-surat Keputusan Ketua MPRS RI tentang Kepegawaian  
11 Februari - 24 Desember 1964  
salinan  
8 lembar
- 704 Surat Keputusan Menteri Sosial RI tentang pengangkatan ketua dan anggota Badan Permufakatan Kesejahteraan Pegawai Negeri  
18 Februari 1964  
salinan  
1 lembar
- 705 Surat Kepala Biro Urusan Administrasi dan Organisasi kepada Para Wakil Perdana Menteri, Para Menteri Koordinator tentang peraturan khusus perjalanan dinas para juru kendaraan bermotor (sopir), beserta lampiran.  
25 Juni 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 706 Surat dari Wakil Perdana Menteri Pertama kepada Para Menteri Koordinator pemimpin lembaga-lembaga negara tertinggi pemerintah RI di Jakarta tentang Pembatasan perjalanan dinas dalam negeri.

- 20 Agustus 1965  
tembusan  
1 lembar
- 707 Surat dari Wakil Perdana Menteri I kepada para Menteri Koordinator tentang pengiriman pejabat negara, pegawai negeri, angkatan bersenjata dan mahasiswa/pelajar ke luar negeri.
- 16 September 1964  
tembusan  
1 lembar
- 708 Surat-surat Surat Keputusan Perdana Menteri RI tentang Kepegawaian
- Oktober 1964  
salinan  
1 sampul
- 709 Surat-surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Kehakiman 1964 - 1965
- 1964 -1965  
salinan  
1 sampul
- 710 Surat Keputusan Ketua Panitia Negara Urusan Kontrak-Kontrak Ekonomi Keuangan antara RI dengan Luar Negeri tentang pengangkatan tenaga ahli pembantu tetap
- 15 Februari 1965  
asli  
4 lembar
- 711 Surat-surat Keputusan Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi RI tentang pengangkatan, penunjukan dan penugasan pegawai
- 11 Juni - 23 November 1965  
salinan  
1 sampul
- 712 Surat-surat Keputusan Menteri Iuran Negara RI tentang Kepegawaian
- 27 Juli - 16 Desember 1965  
salinan, petikan  
1 sampul
- 713 Surat keputusan Menteri Koordinator Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang pemberhentian dari keanggotaan panitia negara Bappenas Urusan Statistik an. Ir. Dr.Sie Kwat Soen, Drs. Soegito dkk
- 20 Agustus 1965  
tembusan  
1 lembar
- 714 Surat dari Menteri Perdagangan Dalam Negeri kepada Wakil Perdana Menteri III mengenai Delegasi Menteri Perdagangan yang ke Rumania an.Harmiel Sondak
- 31 Agustus 1965

asli  
1 lembar

- 715 Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.U.18/10/21 -U tentang Panitia penempatan pegawai negeri ex Perwira Angkatan Laut RI dalam lingkungan Departemen Perhubungan Udara.  
07 Oktober 1965  
salinan  
2 lembar
- 716 Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik tentang Pengangkatan Kom.Bes. Drs. Legowo sebagai Sekretaris Urusan khusus Irian Barat dalam lingkungan Sekretariat Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik  
18 Mei 1966  
asli  
1 sampul
- 717 Indeks keputusan Presidium Kabinet dari April s/d Juni 1967 antara lain tentang pengangkatan Staf Pribadi dan pengiriman delegasi Indonesia pada IGGI  
10 Maret - 9 Juni 1967  
salinan  
1 sampul
- 718 Surat dari Asisten I Men./Pangad kepada Sekretaris Presidium Kabinet Ampera mengenai penugasan Letkol. T.W. Drs. Slamet masuk dalam Panitia Negara mengenai masalah Cina.  
19 Mei 1967  
asli  
1 lembar
- 719 Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Negeri Padang Panjang tentang Pengangkatan pegawai pada kejaksaan Negeri Padang Panjang Tahun 1968  
24 Juni 1968  
salinan  
4 lembar
- 720 Surat-surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Denpasar tentang Kepegawaian.  
28 November 1968 - 7 Juni 1969  
salinan  
7 lembar

#### **4. Hukum dan Perundang-undangan**

##### **a. Kerjasama Luar Negeri**

- 721 Op Weg Naar Een Nederlands - Indonesische Unie Stemmen Van Hier En Ginds door Mr.W.H.Van Helsdingen Deel II  
1947  
fotokopi  
1 sampul
- 722 Laporan rapat ke-8 Panitia Urusan Keuangan dan Perekonomian pada Konferensi Meja Bundar  
23 September 1949  
fotokopi

- 1 sampul
- 723 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai Goodwill Mission RI ke Birma.
- 24 Oktober 1951  
tembusan  
4 lembar
- 724 Surat-surat mengenai pengiriman delegasi istimewa ke Paris untuk menghadiri sidang biasa VI dari persidangan umum (General Assembly) PBB
- 26 November - 5 Desember 1951  
konsep, asli  
1 sampul
- 725 Surat-surat kawat dari duta besar RI di Amerika Serikat kepada Menteri Luar Negeri antara lain mengenai MSA.
- 12 Mei 1952  
salinan  
1 sampul
- 726 Nota dari Komisariat Agung Kanada di Kolombo mengenai *Canada's Colombo Plan Contribution for 1955-1956* .
- 13 Desember 1954  
salinan  
2 lembar
- 727 Berkas mengenai pengiriman delegasi ke Consultative Committee Meeting di Singapura dari tanggal 29 September- 17 Oktober 1955.
- Agustus 1955  
asli  
1 sampul
- 728 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Para Menteri tentang Penyelesaian pembatalan persetujuan KMB.
- 28 November 1957  
pertinggal  
8 lembar
- 729 Surat-surat mengenai pengiriman delegasi pemerintah RI ke Konferensi *Colombo Plan Council Policy Session*" pada 29 Juni 1959.
- 20 Juni 1959  
salinan  
1 sampul
- 730 *Request For Assistance To The United Nation Special Fund By The Government Of The Republik Of Indones, project: Research and Development Centre of the Central Bureau of Statistics.*
- 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 731 Press Release mengenai perjanjian kerja sama ekonomi, kebudayaan antara Indonesia dengan Uni Soviet. .

- 28 Februari 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 732 Surat-surat dari Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri mengenai undangan dan materi rapat pleno membahas bantuan dan program ICA Tahun 1961  
19 Desember - April 1961  
asli  
1 sampul
- 733 *General Contract Agreement For Construction Of Hospital in Jakarta Indonesia* antara Pemerintah Uni Soviet dengan Indonesia  
1961  
fotokopi  
1 sampul
- 734 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Kepala Biro Ekonomi dan Keuangan mengenai laporan pembicaraan antara *Resident Representative UN Technical Assistance Board* dan Kepala Direktorat PBB/Deparlu.  
29 Agustus 1962  
salinan  
4 lembar
- 735 Telegram-telegram dari Direktorat Penerangan Eropa di London kepada Kabinet Presiden tentang berita luar negeri, sikap politik Belanda dan Australia, serta situasi di PBB terkait Irian Barat.  
1 September 1961 - 31 April 1962  
asli  
1 sampul
- 736 Surat dari Ketua Delegasi Pemerintah RI kepada Menteri Pertama RI mengenai laporan perundingan dan persetujuan antara RI dan Republik Polandia  
06 Oktober 1961  
salinan  
1 sampul
- 737 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Pertama mengenai pembuatan perjanjian kerjasama antara RI dan Republik Hongaria  
24 Januari 1962  
salinan  
11 lembar
- 738 Surat dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta mengenai *West New Guinea, Statement by Australian Prime Minister* .  
12 Februari 1962  
asli  
2 lembar
- 739 Surat-surat dari Panitia Khusus Pelaksanaan Protokol RI-U.R.S.S kepada Komando Urusan Pembangunan Asian Games dan Biro Ekonomi dan Keuangan tentang ahli Soviet yang bekerja di kedutaannya USSR Embassy dan pembayaran para ahli Indonesia di Uni Soviet



- 16 April dan 1 Mei 1962  
asli  
1 sampul
- 740 Surat dari Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan-Bangunan kepada Biro Ekonomi dan Keuangan tentang hasil rapat dan perjanjian pendirian *Executive Committee for the Asian Regional Institute for School Building Research* (ARISBR).  
24 November 1962  
asli  
1 sampul
- 741 Surat Duta Besar RI di Warsawa kepada Menteri Luar Negeri mengenai partisipasi dalam CMEA (*Council For Mutual Economic Assistance*) / Comecon.  
1962  
fotokopi  
11 lembar
- 742 Memo dari Kepala Biro II Setneg kepada Menteri Pertama mengenai kunjungan kunjungan duta besar Hungaria di Jakarta untuk membicarakan kerja sama ekonomi  
21 Maret 1963  
tembusan  
1 lembar
- 743 Memo dari Kepala Biro II Setneg kepada Menteri Pertama mengenai Laporan sekitar Konferensi ECAFE Session ke 19 di Manila, Filipina  
11 April 1963  
asli  
1 sampul
- 744 Surat dari Departemen Luar Negeri RI kepada semua Departemen RI tentang prosedur mendatangkan tenaga ahli bangsa asing dan kontrak antara pemerintah RI dengan ICA terkait tenaga ahli yang diperkejakan pada Departemen Keuangan  
2 September 1963  
asli  
6 lembar
- 745 Surat dari Dirjen Lembaga Tenaga Atom kepada Waperdam III tentang persetujuan dan kontrak - kontrak antara Lembaga Tenaga Atom dengan organisasi-organisasi luar negeri.  
05 Februari 1964  
asli  
1 sampul
- 746 Surat dari Presiden RI kepada Ketua DPR-GR mengenai pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea  
21 April 1964  
tembusan  
1 sampul
- 747 Surat dari Dirjen Lembaga Tenaga Atom kepada Waperdam III RI mengenai Laporan Konferensi ke III di Jenewa tentang penggunaan tenaga atom untuk maksud-maksud damai pada 31 Agustus - 9 September 1964.

25 November 1964  
asli  
3 lembar

- 748 Surat dari Sekretaris Presidium Kabinet kepada Kepala Bagian Perundang-Undangan Setneg mengenai Peraturan-peraturan Negara tentang Perusahaan-perusahaan Asing di Indonesia yang ditempatkan di bawah penguasaan/pengurusan/pengawasan Pemerintah RI.

24 April 1965  
asli  
3 lembar

- 749 *Working Paper* tentang hubungan ekonomi Timur-Barat di beberapa kedutaan antara lain Bern, Warsawa, Beograd, Moskow, London, Roma dan Perwakilan Tetap RI di Jenewa.

1967  
asli  
1 sampul

- 750 Pedoman tentang ketentuan-ketentuan mengenai pengiriman petugas-petugas negara untuk pendidikan di luar negeri dalam rangka bantuan luar negeri

10 Juni 1967  
tembusan  
3 lembar

- 751 Surat dari Presiden RI kepada Ketua DPR-GR mengenai pengesahan persetujuan beserta protokol-protokol antara RI dan Republik Federasi Sosialis Yugoslavia

20 Agustus 1968  
salinan  
1 sampul

- 752 *Personel Roster United States of America Agency for International Development, Mission to Indonesia.*

tt  
fotokopi  
1 sampul

- 753 Pedoman tata cara penyaluran kerjasama teknik luar negeri oleh Presidium Kabinet Ampera.

tt  
asli  
1 sampul

#### **b. Grasi dan Kewarganegaraan**

- 754 Surat-surat dari para pedagang (warga negara asing) di Delanggu, Klaten kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai permohonan jaminan hidup dan pemulangan ke RRT dan Hadramaut akibat pelaksanaan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1959 tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran

11 - 13 April 1960  
tembusan  
1 sampul

- 755 Peraturan Peperti No. 1 Tahun 1960 tentang Pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Beberapa Hal mengenai Kewarganegaraan  
30 April 1960  
salinan  
2 lembar
- 756 Surat dari Ketua Delegasi RI dalam Panitia Bersama Dwikewarganegaraan RI - R.R.T kepada Menteri Produksi mengenai pegawai-pegawai P.T. Negara yang diberhentikan karena masalah kewarganegaraan  
28 Juni 1960  
tembusan  
1 lembar

#### **d. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**

##### **1) TAP MPR/S**

- 757 Ketetapan MPRS RI No.1/MPR/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara.  
19 Nopember 1960  
salinan  
3 lembar
- 758 Ketetapan MPRS RI No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.  
03 Desember 1960  
asli  
1 sampul

##### **2) Undang-Undang**

- 759 Berkas mengenai Undang-undang No.12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.  
8 Juni dan 22 Oktober 1946  
asli  
1 sampul
- 760 Himpunan Undang-Undang tentang Pengadilan Tentara  
1946  
konsep  
1 sampul
- 761 Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang dan Peraturan tentang Mahkamah Agung dan Pengacara.  
28 Oktober 1950- 12 April 1954  
asli, salinan, Fotofotokopi  
1 sampul
- 762 Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank dan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang menambah dan mengubah "Peraturan Cukai dan Bea Berat Barang sebagai UU.  
07 Maret 1951- 18 Desember 1953  
asli

- 9 lembar
- 763 Berkas mengenai rumusan Undang-Undang tentang pembentukan Dewan Perancangan Negara dan peraturannya.  
03 Maret 1951- 7 Januari 1952  
Fotofotokopi, salinan  
1 sampul
- 764 Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan peraturan tambahan perjalanan keluar negeri.  
1951  
salinan  
1 sampul
- 765 Rancangan Undang-Undang dan Keputusan tentang Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan.  
23 April 1952 - 5 Mei 1952  
fotokopi  
1 sampul
- 766 Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR.  
29 Juli 1952 - 23 Februari 1953  
salinan, fotokopi, asli  
1 sampul
- 767 Rancangan Undang-Undang dari Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank mengenai pokok Bank Sentral.  
19 Agustus 1952  
salinan  
1 sampul
- 768 Surat dari Menteri Kehakiman kepada DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang mengisi lowongan Anggota DPR RI  
12 Februari 1953  
asli  
2 lembar
- 769 Surat-surat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Perburuhan antara serikat buruh dan majikan.  
27 Maret 1953 - 29 Januari 1954  
asli  
1 sampul
- 770 Undang-Undang No.11 Tahun 1953 tentang Peraturan-Peraturan Pokok Bank Indonesia.  
19 Mei 1953  
salinan  
1 sampul

- 771 Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang dilampirkan pada Ordonansi yang mengatur biaya balik nama barang-barang tetap (Staatsblad 1949 No. 282).  
6 Agustus 1954-18 April 1955  
asli  
1 sampul
- 772 Rancangan Undang-Undang tentang kewajiban semua barisan sukarela yang menyerupai organisasi angkatan perang untuk membantu tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.  
19 Oktober 1954  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 773 Undang-Undang No.7 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.33 Tahun 1950 untuk mencabut kembali Undang-Undang Darurat RIS No.6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota sebagai Undang-Undang  
29 Maret 1955  
salinan  
5 lembar
- 774 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai tambahan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembatalan seluruh Perjanjian KMB secara Unilateral.  
Februari 1956  
salinan  
4 lembar
- 775 Rancangan Undang-Undang No.19/1955 tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri.  
08 Mei 1956  
salinan  
5 lembar
- 776 Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Kompensi No.98 mengenai Berlakunya Hak-Hak Dasar Untuk Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersama  
23 Mei 1956  
asli  
1 sampul
- 777 Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan-Peraturan yang Termuat Dalam Undang-Undang Darurat No.20 Tahun 1955 mengenai Kedudukan Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955  
30 Mei 1956  
asli  
4 lembar
- 778 Rancangan Undang-Undang Bintang Jasa Militer untuk Perjuangan Kemerdekaan R  
31 Mei 1965  
asli

- 1 sampul
- 779 Daftar dari Undang-Undang Darurat, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang dimuat dalam lembaran negara Tahun 1957 dan 1958  
 Januari 1958  
 asli  
 1 sampul
- 780 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 1959  
 salinan  
 12 lembar
- 781 Rancangan Undang-Undang tentang Undang-Undang Barang  
 26 Maret 1960  
 salinan  
 4 lembar
- 782 Rancangan Undang-Undang tentang Perusahaan negara dan Pedoman - Pedoman Pokok Pelaksanaan Pasal 6 dan Pasal 18 UU No.19 Prp.1960 tentang Perusahaan Negara.  
 04 April 1960 dan 17 Maret 1965  
 asli  
 1 sampul
- 783 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disertai berkas pendukung.  
 24 September 1960  
 salinan  
 1 sampul
- 784 Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Daerah, Tabungan pos, Bank Terpimpin dan Bank Swasta.  
 26 September 1960- 13 September 1961  
 asli, fotokopi, salinan  
 1 sampul
- 785 Berkas mengenai Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman.  
 20 Oktober 1960 - 27 September 1961  
 tembusan  
 1 sampul
- 786 Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang  
 26 Desember 1960 - 18 April 1961  
 asli  
 1 sampul
- 787 Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

- 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 788 Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang Pokok Kejaksaan dan Rancangan Undang-Undang Pokok Kepolisian  
15 Februari - 29 April 1961  
asli  
1 sampul
- 789 Rancangan Undang-Undang beserta penjelasannya mengenai Perubahan dan Penambahan atas Undang-undang No. 24 Tahun 1957 tentang Pemasukan dan berlakunya Anggaran Belanja Negara, beserta lampiran  
23 Maret 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 790 Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan Laut Indonesia  
23 Maret 1961  
asli  
1 sampul
- 791 Rancangan Undang-Undang ke DPR-GR tentang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan  
April 1961  
asli  
3 lembar
- 792 Berkas mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang Pokok Kepegawaian  
15 April - 23 Maret 1961  
salinan  
1 sampul
- 793 Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang Pokok tentang Pers  
18 April - 25 Agustus 1961  
asli  
1 sampul
- 794 Surat dari Pimpinan DPR-GR kepada Menteri Pertama mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Wajib Kerja Sarjana  
20 April 1961  
asli  
6 lembar
- 795 Rancangan Undang-Undang tentang Merek Pabrik dan Merek Perniagaan  
27 April 1961  
asli  
1 sampul

- 796 Surat dari Menteri Agraria kepada Ketua DPR-GR tentang rancangan Undang-Undang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, beserta lampiran  
15 Juni 1961-7 Juli 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 797 Rancangan Undang-Undang mengenai Dasar-Dasar Pokok Kekuasaan Kehakiman dan tentang Mahkamah Agung.  
28 Juni 1961  
salinan  
1 sampul
- 798 Rancangan Undang-Undang Mengenai tanda kehormatan Bintang Jasa  
28 Juni 1961  
salinan  
1 sampul
- 799 Rancangan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah dan Pokok-Pokok Perusahaan Daerah.  
28 Juni 1961 dan 1965  
salinan  
1 sampul
- 800 Rancangan Undang-Undang tentang Penyusunan DPR, MPR, DPRD I dan II oleh DPA dan Panitia Ad Hoc.  
23 Agustus 1961 dan 8 Februari 1962  
asli  
1 sampul
- 801 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.  
18 Oktober 1961  
asli  
1 sampul
- 802 Rumusan mengenai Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi oleh DPR-GF  
11 Nopember 1961  
salinan  
1 lembar
- 803 Rancangan Undang-Undang Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat  
09 Januari 1962  
asli  
1 sampul
- 804 Rancangan Undang-Undang Pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam  
13 Januari 1962  
asli  
1 sampul
- 805 Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Militer.



- 03 Februari 1962  
asli  
1 sampul
- 806 Surat Keputusan DPR-GR No.15/DPR-GR/III/1962 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi Umum
- 1962  
konsep  
4 lembar
- 807 Undang-Undang No.1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan menjadi Undang-Undang, disertai berkas pendukung
- 14 April 1961 - 20 Januari 1964  
salinan  
1 sampul
- 808 Undang-undang No . 35 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1962 (Undang-undang No. 9 Tahun 1963-Lembaran Negara Tahun 1963 No.91) dan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tambahan Tahun 1963.
- 17 Juni 1964-31 Desember 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 809 Undang-Undang No.19 Tahun 1964 tentang Pembentukan-pembentukan pokok kekuasaan kehakiman.
- 31 Oktober 1964  
salinan  
1 sampul
- 810 Surat dari Presiden RI kepada Ketua DPR-GR mengenai penyampaian RUU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Tandjung Djabung dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah; RUU tentang Kesehatan Jiwa; RUU tentang Hygiene; RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya; RUU tentang Pungutan Istimewa atas Impor untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera; RUU tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa
- 31 Desember 1964 - 13 Mei 1965  
pertinggal  
1 sampul
- 811 Memori Penjelasan tentang Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian.
- 01 Januari 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 812 Surat-surat mengenai rencana perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
- 25 Januari - 20 April 1965

- asli  
1 sampul
- 813 Surat dari Menteri Perburuhan kepada Presidium Kabinet Dwikora mengenai penyampaian RUU tentang Pokok Perburuhan, RUU tentang Penggunaan Tenaga Kerja, RUU tentang Latihan Kejuruan, dan RUU tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan bagi Buruh dan Keluarganya.
- 27 Maret 1965  
asli  
1 sampul
- 814 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
- 31 Maret 1965  
asli  
1 sampul
- 815 Berkas mengenai Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan
- 24 Juli 1965  
asli  
1 sampul
- 816 Undang-Undang No. 16 Tahun 1958 tentang Pencabutan Undang-Undang NO. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 15 Prp Tahun 1960.
- 23 Agustus 1965  
konsep  
3 lembar
- 817 Undang-undang No.19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Diseluruh Wilayah RI, disertai rancangannya.
- 01 September 1965  
konsep  
1 sampul
- 818 Surat dari Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengairan Nasional kepada Kepala Biro Sekretariat Negara mengenai Penyampaian Surat Keputusan Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengairan Nasional
- 16 Oktober - 1 November 1965  
asli  
1 sampul
- 819 Surat dari Presiden kepada Ketua DPR-GR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- 1965

- konsep  
1 sampul
- 820 Surat-surat mengenai pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Kepartaian, Keormasan, Kekaryaan, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu untuk Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan tentang Susunan MPR, DPR dan DPRD  
24 November 1966 - 20 Maret 1967  
konsep, fotokopi  
1 sampul
- 821 Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Presidium Kabinet Ampera tentang Penyelesaian RUU mengenai Ketentuan Pokok - Pokok Pendidikan  
13 Juli 1967  
asli  
2 lembar
- 822 Undang-Undang No.4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat  
29 Juni 1968  
fotokopi  
4 lembar
- 823 Undang-Undang No.7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 1962 tentang Wabah.  
16 Juli 1968  
salinan  
1 sampul
- 824 Surat Pengantar Sekretaris Kabinet RI kepada para Menteri mengenai penyampaian copy Undang-Undang No.9,10,11 Tahun 1968 antara lain tentang Charter of The Southeast Asian Ministers of Education Organization.  
26 Oktober 1968  
asli  
1 sampul
- 825 Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.  
17 Desember 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 826 Undang-Undang No.24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa.  
31 Desember 1968  
salinan  
1 sampul

### 3) Undang-Undang Darurat

- 827 Undang-undang Darurat No.14 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan d Negara Sumatera Selatan oleh RIS  
17 Maret 1950  
salinan  
2 lembar
- 828 Laporan Gabungan Bagian DPR RIS Sidang I Tahun 1950 tentang Undang-Undang Darurat No.3 mengenai Pajak Kekayaan dan Perseroan  
03 April 1950  
asli  
1 sampul
- 829 Surat Pengantar Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden tentang Undang-Undang Darurat untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan hukuman (Staatsblad untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141), beserta lampiran.  
9 Desember 1950  
fotokopi  
1 sampul
- 830 Berkas mengenai Penetapan Undang-undang Darurat No.19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan  
3 September 1951 - 19 Desember 1953  
asli  
1 sampul
- 831 Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1952 tentang Ketentuan Kedudukan Hukum kepada Bank Industri Negara.  
20 Februari 1952  
salinan  
1 sampul
- 832 Surat Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai Rancangan Undang-Undang Darurat tentang penetapan waktu berlakunya aturan-aturan yang termaksud dalam pasal 3 ayat 2 ordonansi  
18 Desember 1953  
asli  
1 sampul
- 833 Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang Darurat Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukum yang Termaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonasi (S.1948, No. 141)  
18 - 31 Desember 1953  
asli  
1 sampul
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**
- 834 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.  
26 September 1959  
salinan

- 5 lembar
- 835 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, nb.: tidak lengkap
- 1959  
salinan  
1 lembar
- 836 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia, dan tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden jika presiden mangkat, berhenti atau berhalangan sedang wakil presiden tidak ada atau berhalangan, beserta lampiran
- 4 dan 22 Maret 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 837 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Tarif Upah untuk Balai Harta Peninggalan, beserta lampiran
- 7 Maret 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 838 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 07 Maret 1960  
asli  
6 lembar
- 839 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang beserta penjelasannya tentang pembubaran Panitia untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak dan pencabutan peraturan-peraturan yang bersangkutan, beserta lampiran
- 17 Maret 1960  
fotokopi  
2 lembar
- 840 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang beserta penjelasannya mengenai Bank Dagang Negara, beserta lampiran
- 22 Maret 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 841 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang tentang Penetapan Anggaran Perusahaan-Perusahaan IBW dari anggaran RI untuk Tahun Dinas 1959.
- 23 Maret 1960  
salinan  
4 lembar

- 842 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1959 tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959, beserta lampiran.  
14 April 1960-29 April 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 843 Usulan Menteri Agama terkait Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Peraturan Uang Sumpah Penghulu (Juru Sumpah)  
22 April 1960  
asli  
6 lembar
- 844 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberian Kedudukan kepada Militer Wajib Darurat sebagai Militer Wajib Berdasarkan Undang-Undang Wajib Militer.  
27 April 1960  
asli  
1 sampul
- 845 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Pernikahan Ummat Islam.  
10 Mei 1960  
asli  
1 sampul
- 846 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan/Penambahan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1958 mengenai penyerahan urusan perumahan.  
17 Mei 1960  
asli  
4 lembar
- 847 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan pasal 43 ayat 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 mengenai kewajiban mengurus tempat berdiam untuk tawanan penguasa perang  
18 Mei 1960  
asli  
1 sampul
- 848 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang beserta Penjelasannya mengenai Rahasia Bank, beserta lampiran  
19 Mei 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 849 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perfilmar  
20 Mei 1960  
asli  
1 sampul

- 850 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1960 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Peralihan Yang Tersebut Pada Pasal 6, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya  
25 Mei 1960  
salinan  
1 sampul
- 851 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindakan Pidana Korupsi  
09 Juni 1960  
salinan  
5 lembar
- 852 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.26 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Darurat No.57 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1960.  
09 Juni 1960  
salinan  
6 lembar
- 853 Surat-surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden, Menteri Pertama, dkk., mengenai penyampaian rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Peleburan PT. Bank Tani dan Nelayan kedalam Bank Kooperasi, Tani dan Nelayan, serta tentang Pembubaran Bank Industri Negara dan Peleburannya kedalam Bank Pembangunan Indonesia.  
4 Agustus 1960-10 Oktober 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 854 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.29 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi  
12 Agustus 1960  
salinan  
1 sampul
- 855 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.  
04 Oktober 1960  
asli  
3 lembar
- 856 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.  
05 Oktober 1960  
asli  
1 sampul

- 857 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.
- 14 - 15 Oktober 1960  
salinan  
1 sampul
- 858 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.46 Tahun 1960 tentang Perubahan Nama dan Kedudukan Hukum serta Pemindahan Tempat Kedudukan N.V. Nederlandsch-Indische Aardolie MaatschaPeraturan Pemerintahahij menjadi Pertambangan Minyak Indonesia (Permindo).
- 03 Desember 1960  
asli  
4 lembar
- 859 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.53 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Pajak Deviden.
- 29 Desember 1960  
salinan  
2 lembar
- 860 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Hukuman Kurungan Pengganti dan Pemungutan Denda Dalam Perkara Pidana Ekonom
- 27 Februari 1961  
salinan  
4 lembar
- 861 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang beserta Penjelasannya mengenai Peraturan Pokok Tabungan Terpimpin (Yang diterima dari Bank Indonesia), beserta lampiran.
- 23 Maret 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 862 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi.
- 15 Juni 1963  
salinan  
1 Sampul
- 863 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 sebagai Undang-Undang.
- 06 Januari 1964  
salinan  
4 lembar
- 864 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.



- 13 Februari 1964  
salinan  
1 sampul
- 865 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang No.25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
- 13 Februari 1964  
salinan  
1 sampul
- 866 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
- 13 Februari 1964  
salinan  
1 sampul
- 867 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah dan Pembebanan Atas Impor.
- 27 Maret 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 868 Surat dari Wakil Sekretaris Negara kepada Wakil Perdana Menteri mengenai ralat atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 dan No.6 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah dan Impor-Ekspor serta tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- 4 Mei dan 4 Juni 1964  
salinan  
1 sampul
- 869 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang beserta Pendjelasannya mengenai Bank Pembangunan Indonesia, beserta lampiran
- 7 Mei 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 870 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1965 tentang Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966.
- Desember 1965  
konsep  
5 lembar

##### **5) Peraturan Pemerintah**

- 871 Peraturan Pemerintah No.S.4 Tahun 1948 tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Hakim, Jaksa serta Panitera pada Pengadilan Tentara yang bukan Opsir Tentara.

07 Februari 1948  
salinan  
5 lembar

- 872 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1948 tentang Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera.  
29 Mei 1948  
konsep  
6 lembar
- 873 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1948 tentang Kantor Urusan Pegawai Negari  
30 Mei 1948  
salinan  
9 lembar
- 874 Peraturan Pemerintah No.22 dan No.23 Tahun 1948 tentang Peraturan Penghargaan  
Pengalaman Bekerja dan Peraturan Penyesuaian (Inpassing)  
16 September 1948  
salinan  
1 sampul
- 875 Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan pegawai neger  
11 November 1949 - 2 Agustus 1951  
asli  
1 sampul
- 876 Berkas mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 1951 tentang Penetapan gaji dan  
pendapatan lain - lain anggota angkatan laut  
31 Desember 1951  
fotokopi  
1 sampul
- 877 Berkas mengenai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1952 tentang Perubahan Rayon  
Kemahalan.  
30 April 1952  
salinan  
9 lembar
- 878 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan-perubahan Reglemen Dewan-Dewan  
Perumahan.  
02 Maret 1953  
asli  
1 sampul
- 879 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dalam jabatan dan pemberhentian,  
pemberhentian sementara serta pernyataan non aktif dari jabatan dalam dinas ketenteraan.  
05 April 1954  
asli  
1 sampul
- 880 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Mendirikan Perusahaan.  
05-13 Mei 1954  
asli

- 1 sampul
- 881 Berkas rancangan perubahan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1954 mengenai Pendaftaran Orang Asing.  
20 Oktober 1954  
 asli  
 1 sampul
- 882 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1955 tentang Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat.  
06 Januari 1955  
 salinan  
 3 lembar
- 883 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-Kepala Staf  
11 Maret 1955  
 salinan  
 9 lembar
- 884 Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara  
06 Agustus 1957  
 salinan  
 2 lembar
- 885 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum mengenai Gaji, Uang Jalan, dan Uang Penginapan serta Penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah.  
28 Oktober 1957  
 fotokopi  
 2 lembar
- 886 Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1958 tentang Prosedur Pembelian Barang-Barang Pemerintah.  
11 April 1958  
 salinan  
 1 sampul
- 887 Berkas mengenai Rancangan Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang BAPEKAN  
26 September 1959 - 23 Februari 1960  
 asli  
 1 sampul
- 888 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak Atas Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda.  
23 Desember 1959  
 asli  
 1 sampul
- 889 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Bahan Makanan  
04 Januari 1960  
 asli  
 3 lembar

- 890 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambah Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1958 setelah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1959 mengenai pendaftaran penjarangan dan pengakuan veteran penjuang kemerdekaan RI.
- 14 Januari 1960  
asli  
6 lembar
- 891 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1960 tentang Organisasi Pembantu Penguasa Dalam Keadaan Bahaya di Pusat.
- 16 Januari 1960  
salinan  
2 lembar
- 892 Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Penyaluran Barang-barang dan Bahan-bahan Keperluan Rakyat.
- Januari 1960  
asli  
1 sampul
- 893 Rancangan peraturan pemerintah mengenai perubahan ganti kerugian bagi penyerahan emas kepada Bank Indonesia/.Dana Devisen, beserta lampiran
- 7 Maret 1960  
fotokopi  
3 lembar
- 894 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1960 tentang Organisasi Pembantu Penguasa dalam Keadaan Bahaya di Daerah
- 08 Maret 1960  
salinan  
5 lembar
- 895 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbaikan Penghasilan
- 14 Maret 1960  
asli  
1 sampul
- 896 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1959 tentang Porto-porto P.T.T, beserta lampiran.
- 21 Maret 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 897 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tanda Kehormatan Dharmad jasa Angkatan Laut.
- 07 April 1960  
asli  
3 lembar
- 898 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer.
- 11 April 1960

- salinan  
8 lembar
- 899 Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun seperti Dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.20 Tahun 1952 tentang Pensiun PNS.
- 13 April 1960  
salinan  
1 sampul
- 900 Berkas mengenai rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan pada Departemen, Perusahaan Negara dan pada instansi serta badan yang menyelenggarakan tata usaha pembukuan pengurusan uang, surat-surat berharga dan barang milik negara
- 29 April - 10 Mei 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 901 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lafal Sumpah Dokter.
- 29 April 1960  
asli  
6 lembar
- 902 Berkas mengenai rancangan Peraturan Pemerintah beserta rinciannya tentang pemberian pensiun kepada janda dan anak yatim anggota T.N.I yang gugur/meninggal sebelum Tahun 1950.
- 30 April - 2 Agustus 1960  
asli, salinan  
1 sampul
- 903 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Maritim
- 18 Mei 1960  
asli  
4 lembar
- 904 Surat dari Menteri Perhubungan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Militer Sukarela yang Menjalankan Tugas Di Luar Bidang Militer atau Memangku Suatu Jabatan Bukan Militer
- 23 Mei 1960  
asli  
2 lembar
- 905 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Hadiah (Premi) Kepada Orang-Orang Yang Telah Memberikan Jasanya Dalam Penyusutan Beberapa Tindak Pidana
- 27 Mei 1960  
asli  
1 sampul
- 906 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknya dan Kuasanya serta tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-Tanaman Tertentu.
- 30 Mei 1960  
asli  
1 sampul

- 907 Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Dewan Perusahaan  
03 Oktober 1960  
asli  
1 sampul
- 908 Surat dari Menteri Perhubungan Udara kepada Menteri Pertama mengenai usulan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara  
06 Oktober 1960  
asli  
3 lembar
- 909 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1960 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPRS.  
26 Oktober 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 910 Ralat atas naskah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-GR.  
13 Januari 1961  
asli  
1 sampul
- 911 Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penetapan Perincian Pos-pos Pengeluaran Rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Dinas 1961, beserta lampiran.  
23 Maret 1961  
fotokopi  
5 lembar
- 912 Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Peraturan Pokok Tabungan Terpimpin dalam Bidang Pembelian Valuta Asing, beserta lampiran  
23 Maret 1961  
fotokopi  
3 lembar
- 913 Perubahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Aspal Negara oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga  
07 Maret 1960  
asli  
1 sampul
- 914 Rancangan Peraturan Pemerintah beserta penjelasannya tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah kepada Bank Tabungan Pos, beserta lampiran  
06 April 1961  
fotokopi  
3 lembar
- 915 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Darat, Laut dan Udara  
26 Mei - 23 Juni 1961  
asli

- 1 sampul
- 916 Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Gabungan Perusahaan Sedjenis, beserta lampiran.  
30 Mei 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 917 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Satyalancana Keamanan  
02 Juni 1961  
asli  
10 lembar
- 918 Peraturan Pemerintah No.200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negara Sipil RI  
09 Juni 1961  
salinan  
1 sampul
- 919 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rumah-Rumah Kediaman Pemerintah Sipil  
12 Juni 1961  
asli  
1 sampul
- 920 Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-GR.  
30 Juni 1961  
salinan  
5 lembar
- 921 Peraturan Pemerintah No.212 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jendral/Sekretaris Dewan Perancang Nasional  
30 Juni 1961  
salinan  
6 lembar
- 922 Peraturan Pemerintah No.225 Tahun 1961 tentang Perbaikan Tambahan Penghasilan bagi Bekas PNS dan Anggota Kepolisian Negara dan Janda atau Anak Yatim Piatunya yang Menerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun  
01 Juli 1961  
salinan  
2 lembar
- 923 Terbitan Berita Negara RI No.58 mengenai Peraturan Pemerintah No. 90 - 255 antara lain tentang pendirian perusahaan-perusahaan negara  
21 Juli 1961  
asli  
9 lembar
- 924 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.  
10 Agustus 1961  
asli

- 1 sampul
- 925 Peraturan Pemerintah No.226 Tahun 1961 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Presiden dan Wakil Presiden serta Janda dan atau Anak Yatim Piatunya yang Menerima Tunjangan yang Bersifat Pensiun
- 21 September 1961  
fotokopi  
1 lembar
- 926 Peraturan Pemerintah No.227 Tahun 1961 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Menteri Negara RI dan Bekas Ketua/Anggota DPR serta Janda atau Anak Yatim Piatunya.
- 21 September 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 927 Peraturan Pemerintah No.228 Tahun 1961 tentang Perbaikan Tambahan Penghasilan kepada Bekas Anggota Tentara, Janda atau Yatim Piatu yang Menerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun.
- 21 September 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 928 Perubahan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri
- 21 Oktober 1961  
asli  
8 lembar
- 929 Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan "Peraturan Premi Jawatan Pajak", beserta lampiran.
- 26 Oktober 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 930 Rancangan lampiran Peraturan Pemerintah Tahun 1961 tentang rancangan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan biasa dari Badan-badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi.
- 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 931 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standard-Industri
- 12 Januari 1961  
asli  
8 lembar
- 932 Catatan-catatan dari Menteri Perhubungan Laut mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang kebutuhan-kebutuhan pokok gaji pegawai Perusahaan Negara
- 05 Juli 1962  
asli



1 lembar

- 933 Surat dari Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi mengenai penyampaian Peraturan Pemerintah No.10, 11, 12 dan 19 Tahun 1962 tentang Pengendalian Harga, Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Peraturan Perusahaan Muatan Kapal Laut, Pendirian PN "Merpati Nusantara".
- 22 September 1962  
salinan  
1 sampul
- 934 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1963 tentang Pendirian BPU Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni
- 28 Januari 1963  
salinan  
1 sampul
- 935 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1963 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Penasehat Pertambangan.
- 05 Februari 1963  
salinan  
1 Sampul
- 936 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1961, No. 211 Tahun 1961, dan No. 212 Tahun 1961, yakni mengenai pemberian uang kehormatan kepada para Anggota MPRS, DPA dan DEPERNAS yang memiliki jabatan rangkap
- 05 Februari 1963  
salinan  
1 Sampul
- 937 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1963 tentang Perubahan "Spoorweg-Verordening" (Staatsblaad 1928 No. 200) yakni mengenai pencabutan larangan penggunaan traksi ganda untuk lokomotif kereta api.
- 05 Februari 1963  
salinan  
1 sampul
- 938 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1963 tentang Pindjaman Obligasi oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah maupun Swasta
- 13 Februari 1963  
salinan  
1 sampul
- 939 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1963 tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud pada Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblaad 1937 No. 604) untuk Tahun 1963, yakni mengenai kenaikan pajak ekspor tembakau Indonesia
- 22 Februari 1963  
salinan  
1 sampul

- 940 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan Tugas Pembantuan dalam Pelaksanaan Penjaluran Bahan-bahan serta Barang-barang Pokok Keperluan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
- 22 Februari 1963  
salinan  
1 Sampul
- 941 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1963 tentang Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh Perusahaan- perusahaan Bukar Perusahaan Negara.
- 26 April 1963  
salinan  
1 sampul
- 942 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1963 tentang Pendirian BPU Perusahaan Perkebunan Karet Negara.
- 07 Mei 1963  
salinan  
1 sampul
- 943 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api.
- 25 Mei 1963  
salinan  
1 sampul
- 944 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri yang telah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 Tahun 1961, yakni mengenai kenaikan tarif penggunaan jasa pos di dalam negeri
- 25 Mei 1963  
salinan  
1 Sampul
- 945 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1963 tentang Pendirian BPU Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman.
- 22 Mei 1963  
salinan  
1 Sampul
- 946 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
- 22 Mei 1963  
salinan  
1 Sampu
- 947 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara.
- 22 Mei 1963  
salinan  
1 Sampul

- 948 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara.  
22 Mei 1963  
salinan  
1 Sampul
- 949 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Djanji Dokter Gigi  
22 Mei 1963  
salinan  
1 Sampul
- 950 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara  
03 Juni 1963  
salinan  
1 Sampul
- 951 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penundjukan Badan-badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.  
19 Juni 1963  
salinan  
1 Sampul
- 952 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1963 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951, yakni mengenai biaya yang harus dibayar pemilik film dan uang imbalan untuk anggota Panitia Sensor Film.  
19 Juni 1963  
salinan  
1 sampul
- 953 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku.  
27 Juni 1963  
salinan  
1 sampul
- 954 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia.  
27 Juni 1963  
salinan  
1 sampul
- 955 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian 1963.  
05 Agustus 1963  
salinan  
1 Sampul

- 956 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1963 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sedjenis Asuransi Kerugian  
05 Agustus 1963  
salinan  
1 sampul
- 957 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1963 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sedjenis Asuransi Djiwa  
05 Agustus 1963  
salinan  
1 sampul
- 958 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menjewa Perumahan.  
03 Agustus 1963  
salinan  
1 sampul
- 959 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1963 tentang Pernyataan Mulai Berlakunya dan Pelaksanaan Undang-Undang Penyerahan Pemerintahan Umur  
25 September 1963  
salinan  
1 Sampul
- 960 Surat Sekretaris Negara kepada Menteri Pertama, Para Wakil Menteri Pertama, dan Para Menteri tentang ralat atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1963 tentang Pendirian BPU Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara, beserta lampiran  
11 Oktober 1963  
salinan  
1 Sampul
- 961 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasional, yakni mengenai keanggotaan militer dalam Dinas Cadangan Nasional dalam rangka pertahanan negara.  
30 Nopember 1963  
salinan  
1 sampul
- 962 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.198 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (Permina)  
30 Nopember 1963  
salinan  
1 lembar
- 963 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Lalu Lintas Jalan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1954.  
03 Februari 1964  
salinan

- 3 lembar
- 964 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambah Peraturan Pemerintah No. 212 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional  
18 Februari 1964  
salinan  
4 lembar
- 965 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.  
13 Maret 1964  
salinan  
1 sampul
- 966 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1964 tentang Tarif Uang Tera  
13 Maret 1964  
salinan  
10 lembar
- 967 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka Menggerakkan Dana, Daya dan Tenaga Masyarakat.  
26 Maret 1964  
salinan  
1 sampul
- 968 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1964 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1960 bagi Anggota Militer Sukarela untuk menentukan pensiun  
26 Maret 1964  
salinan  
2 lembar
- 969 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri  
26 Maret 1964  
salinan  
3 lembar
- 970 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1964 tentang Penetapan Persentasi dari beberapa Penerimaan Negara untuk Daerah dalam Tahun 1962  
26 Maret 1964  
salinan  
7 lembar
- 971 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1964 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-Tanah untuk Lintas-Lintas Kereta Api dalam Wilayah Jakarta Raya  
08 April 1964  
salinan  
4 lembar

- 972 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Retribusi untuk Izin Ekspor Kapok untuk Tahun Lisensi 1961/1962.  
20 April 1964  
salinan  
2 lembar
- 973 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Retribusi untuk Izin Ekspor Kapok untuk Tahun Lisensi 1962/1963.  
20 April 1964  
salinan  
2 lembar
- 974 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1964 tentang Pemberian Kenaikan Tunjangan dan Pemberian Tambahan serta Perbaikan Penghasilan kepada Janda dan Anak Yatim Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Mneurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1960.  
20 April 1964  
salinan  
8 lembar
- 975 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Sensus Perindustrian.  
25 April 1964  
salinan  
2 lembar
- 976 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1964 tentang Satya-Lantjana Wira Dharma  
30 April 1964  
salinan  
3 lembar
- 977 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar  
30 April 1964  
salinan  
6 lembar
- 978 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit.  
02 Mei 1964  
salinan  
7 lembar
- 979 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwijaya.  
11 Mei 1964  
salinan  
6 lembar
- 980 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1964 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar.

- 11 Mei 1964  
salinan  
6 lembar
- 981 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1964 tentang Pemberian Ganti Rugi kepada pegawai negeri untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas.
- 25 Mei 1964  
salinan  
3 lembar
- 982 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
- 01 Juni 1964  
salinan  
6 lembar
- 983 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1964 tentang Kekayaan Modal Perusahaan Negara.
- 12 Juni 1964  
salinan  
1 sampul
- 984 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur.
- 04 Agustus 1964  
salinan  
2 lembar
- 985 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia.
- 24 Agustus 1964  
salinan  
1 sampul
- 986 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1964 tentang Penanggungan Iuran-Iuran Pensiun Pegawai Negeri/Janda-Yatim Piatu oleh Negara
- 27 Agustus 1964  
salinan  
4 lembar
- 987 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
- 08 September 1964  
salinan  
3 lembar
- 988 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Lauk-Pauk kepada Pegawai Negeri.
- 08 September 1964  
salinan

- 3 lembar
- 989 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan Tertentu
- 08 September 1964  
salinan  
3 lembar
- 990 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang Melakukan Kewajibannya secara Luar Biasa
- 08 September 1964  
salinan  
3 lembar
- 991 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1964 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1962 tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I
- 31 Oktober 1964  
salinan  
1 lembar
- 992 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Kodja"
- 04 Nopember 1964  
salinan  
6 lembar
- 993 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Arta Yasa.
- 27 Januari 1965  
salinan  
6 lembar
- 994 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara.
- 27 Januari 1965  
salinan  
5 lembar
- 995 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1965 tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1938 No. 604) untuk Tahun 1964.
- 27 Januari 1965  
salinan  
2 lembar
- 996 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1965 tentang Nilai Lawan Valuta Asing Dalam Rupiah.
- 30 Januari 1965  
salinan  
2 lembar
- 997 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1965 tentang Cara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa yang Tidak Diharuskan untuk Diserahkan kepada Dana Devis (Devisa Pelengkap).



- 30 Januari 1965  
salinan  
5 lembar
- 998 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- 06 Februari 1965  
salinan  
6 lembar
- 999 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra.
- 06 Februari 1965  
salinan  
6 lembar
- 1000 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negera Asuransi Kerugian Jasa Aneka.
- 06 Februari 1965  
salinan  
6 lembar
- 1001 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1965 tentang Satya Lancana Yuda Tama Angkatan Laut RI.
- 06 Februari 1965  
salinan  
2 lembar
- 1002 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1965 tentang Satya Lancana Yuda Korps Komando Angkatan Laut RI.
- 06 Februari 1965  
salinan  
2 lembar
- 1003 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1965 tentang Dewan Permusyawaratan Pegawai
- 17 Februari 1965  
salinan  
8 lembar
- 1004 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana terhadap beberapa Tindak Pidana termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.
- 01 April 1965  
salinan  
2 lembar
- 1005 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
- 10 April 1965  
salinan  
10 lembar

- 1006 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.  
10 April 1965  
salinan  
1 sampul
- 1007 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara".  
17 Mei 1965  
salinan  
1 lembar
- 1008 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambah Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura "Kemayoran".  
17 Mei 1965  
salinan  
2 lembar
- 1009 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1965 tentang Perubahan Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa.  
17 Mei 1965  
salinan  
1 lembar
- 1010 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1965 tentang Pemberian Wewenang kepada Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri di Bidang Perdagangan Luar Negeri  
17 Mei 1965  
salinan  
3 lembar
- 1011 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer.  
24 Mei 1965  
salinan  
5 lembar
- 1012 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik.  
29 Mei 1965  
salinan  
3 lembar
- 1013 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro.  
06 Juli 1965  
salinan  
6 lembar
- 1014 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi.  
06 Juli 1965

- salinan  
1 sampul
- 1015 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara Sapta Motor, Karya Tjotas, Fadjar Ternak, Mega Electro (Mesin dan Gaja Electro), Pengolahan Tjat dan Pernis Pabrit Tjat "Utama" dan Permata Nusantara  
20 September 1965  
salinan  
1 sampul
- 1016 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1964 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-Tanah untuk Lintas-Lintas Kereta Api dalam Wilayah Jakarta Raya.  
14 Oktober 1965  
salinan  
2 lembar
- 1017 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok mengenai Kebijakan dalam Bidang Telekomunikasi.  
20 Nopember 1965  
salinan  
6 lembar
- 1018 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1965 tentang Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "Krosok Ordonantie 1937" untuk Tahun 1965  
20 Nopember 1965  
salinan  
6 lembar
- 1019 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan-BPU Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri  
24 Desember 1965  
salinan  
4 lembar
- 1020 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Djiwasraja.  
24 Desember 1965  
salinan  
7 lembar
- 1021 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Bendasraja.  
24 Desember 1965  
salinan  
1 sampul
- 1022 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia (Gaja Baru)  
24 Desember 1965  
salinan  
6 lembar

1023 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1965 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Perindustrian Maritim.  
28 Desember 1965  
salinan  
9 lembar

1024 Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1968 tentang Pembubaran Perusahaan Peternakan Negara.  
27 Agustus 1968  
salinan  
4 lembar

#### **6) Peraturan Presiden**

1025 Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.  
27 Juli 1959  
salinan  
7 lembar

1026 Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia  
27 Juli 1959  
salinan  
2 lembar

1027 Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 1959 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 1959.  
26 September 1959  
salinan  
2 lembar

1028 Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat Pendidikan, Kecakapan dan Pengalaman dalam Pemerintahan bagi Kepala Daerah  
26 September 1959  
salinan  
2 lembar

1029 Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 1959 tentang Nama, Jabatan, gelar, Kedudukan dan Penghasilan Kepala Daerah serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.  
26 September 1959  
salinan  
4 lembar

1030 Peraturan Presiden RI No. 6 Tahun 1959 tentang Dewan Urusan Rakyat  
29 September 1959  
salinan  
2 lembar

1031 Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 1959 tentang Wajib Latihan bagi Pejabat Negeri Warga Negara RI.

- 29 Oktober 1959  
salinan  
2 lembar
- 1032 Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 1959 tentang Badan Pusat Intelligence  
10 Nopember 1959  
salinan  
2 lembar
- 1033 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 1959 tentang Kenaikan Gaji Pokok Menurut PGM -  
1956 serta Perubahan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Anggota Tentara dan Penghapusan  
Pemberian Tambahan Penghasilan  
13 Nopember 1959  
salinan  
3 lembar
- 1034 Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil  
dan Eceran yang Bersifat Asing Di Luar Ibukota Daerah Swatantra Ringkat I dan II serta  
Karesidenan.  
16 Nopember 1959  
salinan  
2 lembar
- 1035 Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dar  
Anggota Angkatan Perang.  
29 Desember 1959  
salinan  
7 lembar
- 1036 Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 1959 tentang Susunan MPRS  
31 Desember 1959  
salinan  
6 lembar
- 1037 Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 1959 tentang Front Nasional  
31 Desember 1959  
salinan  
9 lembar
- 1038 Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 1959 tentang Dewan Angkatan Laut  
31 Desember 1959  
salinan  
1 sampul
- 1039 Tambahan Lembaran Negara RI No. 1916 Penjelasan atas Penetapan Presiden No.7 Tahun  
1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian; No. 1917 Penjelasan atas  
Peraturan Presiden No.12 Tahun 1959 tentang Susunan MPRS; dan No. 1918 penjelasan  
atas Peraturan Presiden No.13 tentang Front Nasional  
1959  
fotokopi  
3 lembar

- 1040 Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1960 tentang Pemberian Uang Jasa kepada Bekas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante  
19 Januari 1960  
salinan  
7 lembar
- 1041 Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 1960 tentang Nama Jabatan dan Gelar, Kedudukan, Penghasilan dan Larangan Keanggotaan Partai Politik Wakil Kepala Daerah Tingkat I.  
29 Januari 1960  
salinan  
6 lembar
- 1042 Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji  
09 Februari 1960  
salinan  
8 lembar
- 1043 Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 1960 tentang Kekayaan yang Dilola oleh Panitia untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak  
23 Maret 1960  
salinan  
1 sampul
- 1044 Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Provinsi Administrasi Sulawesi Utara dan Provinsi Administratif Sulawesi Selatan  
31 Maret 1960  
salinan  
4 lembar
- 1045 Peraturan Presiden RI No. 6 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Angkutan Darat  
07 April 1960  
salinan  
5 lembar
- 1046 Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 1960 tentang Tata-Susunan Kepangkatan Kepolisian Negara.  
11 April 1960  
salinan  
2 lembar
- 1047 Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 1960 tentang Dewan Bahan Makanan  
29 April 1960  
salinan  
2 lembar
- 1048 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 1960 tentang Pengganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan Pelaut, disertai rancangannya  
29 April 1960  
salinan  
1 sampul

- 1049 Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1960 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Pangkat Kepala-Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I  
30 April 1960  
salinan  
4 lembar
- 1050 Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 1960 tentang Pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Beberapa Hal Mengenai Kewarganegaraan  
30 April 1960  
salinan  
1 lembar
- 1051 Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 1960 tentang Dewan Pertekstilan  
02 Juni 1960  
salinan  
3 lembar
- 1052 Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubarar Partai-Partai, disertai rancangannya.  
05 Juli 1960  
salinan  
1 sampul
- 1053 Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-GR RI  
12 Juli 1960  
salinan  
1 sampul
- 1054 Rancangan Peraturan Presiden tentang Darmasiswa dan Darmatamu bagi Mahasiswa, Cendekiawan dan Pejabat Negara Asing  
02 Mei 1960  
asli  
1 sampul
- 1055 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Premi kepada Orang-orang yang telah Memberikan Jasanya dalam Pengusutan Beberapa Tindak Pidana, beserta lampiran  
21 Juli 1960  
fotokopi  
2 lembar
- 1056 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penertiban Administratif Pelabuhan Tanjung Priok.  
23 Juli 1960  
asli  
1 sampul
- 1057 Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa.  
28 Juli 1960  
salinan  
5 lembar

- 1058 Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahannya Peraturan Presiden No. 14 Tahun 1959 tentang Dewan Angkatan Laut  
01 Agustus 1960  
salinan  
2 lembar
- 1059 Peraturan Presiden No. 21 Tahun 1960 tentang Tambahannya Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang  
17 September 1960  
salinan  
1 lembar
- 1060 Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1955 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil RI  
30 September 1960  
salinan  
6 lembar
- 1061 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahannya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1960 tentang Dewan Angkatan Darat.  
30 September 1960  
salinan  
2 lembar
- 1062 Peraturan Presiden No. 24 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahannya Peraturan Presiden No. 15 Tahun 1959 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan  
01 Oktober 1960  
salinan  
2 lembar
- 1063 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai  
24 Nopember 1960  
salinan  
1 lembar
- 1064 Peraturan Presiden No. 26 Tahun 1960 tentang Pemberian Hadiah Seni, disertai rancangan.  
28 Nopember 1960  
salinan  
1 sampul
- 1065 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1960 tentang Pemberian Hadiah Ilmiah  
28 Nopember 1960  
salinan  
1 sampul
- 1066 Peraturan Presiden No. 28 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-GR.  
29 Desember 1960  
salinan  
1 sampul



- 1067 Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1961 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Menteri RI Dahulu dan Bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, serta Janda atau Anak Yatim Piatunya.
- 11 Februari 1961  
salinan  
2 lembar
- 1068 Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 1961 tentang Berlakunya Beberapa Peraturan dan Tindakan Penguasa Perang Tertinggi di Daerah-Daerah Tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah Berhubung dengan Penghapusan Keadaan Bahaya
- 23 Maret 1961  
salinan  
6 lembar
- 1069 Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 1961 tentang Panca Satia. (Pedoman hidup bagi pegawai negeri)
- 04 April 1961  
salinan  
1 sampul
- 1070 Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 1961 tentang Penetapan Tafsiran Resmi dari Ketetapan-Ketetapan MPRS.
- 11 April 1961  
salinan  
3 lembar
- 1071 Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 1961 tentang Segi-Segi Protokuler Dalam Tindakan Kepolisian terhadap Anggota Pimpinan MPRS
- 11 April 1961  
salinan  
4 lembar
- 1072 Peraturan Presiden RI No. 6 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia.
- 20 April 1961  
salinan  
3 lembar
- 1073 Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 1961 tentang Pengiriman Uang antar Kas Negara
- 26 April 1961  
salinan  
9 lembar
- 1074 Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas-Dinas Sipil.
- 27 April 1961  
salinan  
1 sampul

- 1075 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Jawatan Akuntan Negara.
- 27 April 1961  
salinan  
10 lembar
- 1076 Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1961 tentang Pemberian Darmasarjana, Darmasiswa dan Darmatamu kepada Cendekiawan, Mahasiswa, Pelajar dan Pejabat Negara Asing.
- 27 April 1961  
salinan  
4 lembar
- 1077 Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa.
- 06 Mei 1961  
salinan  
2 lembar
- 1078 Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi Pustaka dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah
- 11 Juli 1961  
salinan  
1 sampul
- 1079 Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 1961 tentang Panitia Penyelesaian Masalah Pemberontak dan Gerombolan yang Menyerah
- 17 Agustus 1961  
salinan  
6 lembar
- 1080 Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
- 15 September 1961  
salinan  
2 lembar
- 1081 Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 1961 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1961 mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada bekas menteri RI dahulu dan bekas anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat serta janda-dan/ anak yatim piatunya.
- 21 September 1961  
salinan  
3 lembar
- 1082 Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 1961 tentang Kedudukan Hukum, Nama Jabatan, Gelar Penghasilan dan Keuntungan-Keuntungan Lainnya Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wakil Kepada Daerah Tingkat I
- 21 September 1961

- salinan  
6 lembar
- 1083 Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia.
- 28 Nopember 1961  
salinan  
8 lembar
- 1084 Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional
- 26 Desember 1961  
salinan  
4 lembar
- 1085 Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 1961 tentang Tugas-Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah
- 26 Desember 1961  
salinan  
1 sampul
- 1086 Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 1961 tentang Penetapan Priorita dan Prosedur Kredit Luar Negeri dalam Hubungan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana
- 30 Desember 1961  
salinan  
5 lembar
- 1087 Naskah Peraturan Presiden tentang Dewan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- 14 Mei 1963  
konsep  
1 sampul
- 1088 Peraturan Presiden RI No.6 Tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di Bidang Import
- 22 Mei 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1089 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perbaharuan Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- 27 Juni 1963  
asli  
2 lembar
- 1090 Surat dari Menteri Pertama kepada Presiden mengenai Pelaksanaan Peraturan Presiden No.4 dan No.5 Tahun 1962 tentang Pokok Organisasi dan Pedoman Kerja Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi.
- 11 Maret 1963  
salinan  
3 lembar

- 1091 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri  
31 Desember 1963  
asli  
1 sampul
- 1092 Peraturan Presiden RI No.2 Tahun 1964 tentang Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta.  
10 Februari 1964  
salinan  
1 sampul
- 1093 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1964 tentang Penyesuaian Tugas dan Organisasi Dewan Bahan Makanan.  
09 Maret 1964  
salinan  
1 sampul
- 1094 Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Dewan Produksi Nasional untuk Bahan Makanan dan Bahan-Bahan Ekspor Pertanian  
14 Maret 1964  
salinan  
6 lembar
- 1095 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah dan Perangsang Ekspor.  
27 Maret 1964  
salinan  
2 lembar
- 1096 Peraturan Presiden RI No.17 Tahun 1964 tentang Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera  
16 Mei 1964  
salinan  
1 sampul
- 1097 Peraturan Presiden RI No.20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri  
04 Juni 1964  
salinan  
6 lembar
- 1098 Peraturan Presiden RI No.33 Tahun 1964 tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.  
01 Nopember 1964  
salinan  
3 lembar
- 1099 Peraturan Presiden RI No.44 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan peraturan pemerintah No.211 Tahun 1961 tentang Kedudukan keuangan wakil ketua anggota dan sekretaris jenderal atau sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara RI  
31 Desember 1964

salinan  
4 lembar

1100 Peraturan Presiden RI No.47 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Aparatur Distribusi.

31 Desember 1964  
konsep  
10 lembar

1101 Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 1965 tentang Pengaturan Pokok Organisasi Perusahaan Sejenis.

27 Januari 1965  
salinan  
6 lembar

1102 Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem Kraton Jogjakarta.

30 Januari 1965  
salinan  
2 lembar

1103 Peraturan Presiden RI No. 6 Tahun 1965 tentang Pembajaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian Jang Kedudukannya Diatur oleh Peraturan Presiden No. 23 Tahun 1963 Jo. No. 39 Tahun 1964 dalam Hal Terjadi Kenaikan Pangkat

17 Mei 1965  
salinan  
4 lembar

1104 Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 1965 tentang Perubahan atau penambahan Peraturan Presiden No.17 Tahun 1964 tentang Otorita Jalan Raya Sumatera

07 Juli 1965  
salinan  
1 sampul

1105 Surat dari Biro V Sekretariat Negara kepada Letkol. Ali mengenai penyampaian Peraturan Presiden No. 4 dan No. 31 Tahun 1964 tentang Dewan Produksi Nasional untuk Bahan Makanan dan Bahan-bahan Ekspor Pertanian; serta tentang Badan Ekonomi dan Keuangan.

26 Agustus 1966  
asli  
1 sampul

#### **7) Keputusan Presiden**

1106 Surat Keputusan Presiden No.46/P.Mil./48 tentang penyerahan pimpinan tertinggi seluruh ALRI kepada Menteri Pertahanan ad interim

22 Maret 1948  
asli  
1 lembar

1107 Keputusan Presiden RI No.43/P.Mil/48 tentang pembubaran Panitia Pertimbangan Pucuk Pimpinan Tentara dan Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

- 13 April 1948  
salinan  
1 lembar
- 1108 Kutipan Surat Keputusan Presiden RI No. J/341/1948 tentang pengangkatan Letnan Kolone (Constructie Lama) R. Akoep Goelange sebagai Kepala Jawatan Tata Hukum Kementerian Pertahanan.
- 30 Juni 1948  
asli  
1 lembar
- 1109 Keputusan Presiden RI No.86 Tahun 1948 tentang pembentukan Dewan Kehormatan Militer.
- 27 Oktober 1948  
salinan  
2 lembar
- 1110 Surat Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1950 tentang Pengangkatan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan beberapa Menteri Republik Indonesia
- 06 September 1950  
salinan  
2 lembar
- 1111 Rancangan Surat Keputusan Presiden RI tentang Pemerintahan Agung dan Badan Pemerintahan Tinggi dari anggaran RI untuk Tahun dinas 1952 - 1953 atau pasal dan mata anggaran.
- 1 Januari 1952- Desember 1953  
fotokopi  
1 sampul
- 1112 Daftar Keputusan Presiden mengenai personalia Tahun 1952 dan Daftar Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajar dan Kebudayaan Tahun 1947
- 1952  
fotokopi  
1 sampul
- 1113 Keputusan Presiden RI No.105 Tahun 1955 tentang Pembentukan Panitia negara urusan protokol dan perayaan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945
- 07 Juli 1955  
asli  
1 sampul
- 1114 Keputusan Presiden RI No.113 dan No.281 Tahun 1959 yang akan dirubah tentang Badan-Badan Organisasi Penyelenggaraan Asian Games IV dan Pengangkatan Anggota Dewan Penasehat Asian Games.
- 30 April - 22 Desember 1959  
salinan  
1 sampul

- 1115 Keputusan Presiden RI No. 153 Tahun 1959 tentang pengangkatan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri.  
10 Juli 1959  
asli  
1 sampul
- 1116 Rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden No.103 Tahun 1957 mengenai Legiun Veteran RI  
04 Januari 1960  
asli  
1 sampul
- 1117 Keputusan Presiden RI No.114 Tahun 1960 tentang Presiden atau panglima tertinggi angkatan perang RI selaku Penguasa Perang Tertinggi  
19 Februari 1960  
asli  
1 sampul
- 1118 Keputusan Presiden RI No.78 Tahun 1960 tentang Pembentukan tanda-tanda Dewan Kehormatan Sementara.  
20 April 1960  
asli  
2 lembar
- 1119 Surat-surat Keputusan Presiden RI tentang pengangkatan anggota DPR-GR  
11 Juli 1960 - 29 Agustus 1961  
salinan  
9 lembar
- 1120 Keputusan Presiden RI No. 496 Tahun 1961 tentang pengangkatan Sudrajat sebagai Pembantu Utama Menteri Kehakiman.  
12 Agustus 1960  
fotokopi  
1 lembar
- 1121 Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1960 tentang Perubahan Susunan Badan-Badan Penyelenggaraan Asian Games ke IV di Jakarta pada Tahun 1962  
11 September 1960  
asli  
1 sampul
- 1122 Keputusan Presiden No. 260 Tahun 1960 tentang pelaksanaan proyek-proyek industri dasar oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan  
14 Oktober 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 1123 Keputusan Presiden RI No. 300 Tahun 1968 tentang pencabutan Keputusan Presiden No. 186 Tahun 1967 tentang penunjukan Menteri Tenaga Kerja untuk melanjutkan pelaksanaan penertiban aparatur negara.  
16 Oktober 1968

- fotokopi  
1 lembar
- 1124 Keputusan Presiden RI No. 28 Tahun 1961 tentang pengangkatan Gatot Mangkupradja dan Rahmaniari Rahman Surianatadjumena sebagai Anggota Dewan Perancang Nasional  
21 Januari 1961  
fotokopi  
1 lembar
- 1125 Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.  
01 Maret 1961  
asli  
3 lembar
- 1126 Keputusan Presiden No. 108 Tahun 1961 tentang Penetapan Perincian Pengeluaran Pembangunan Termasuk Anggaran Pembangunan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Dinas 1961, beserta surat pengantar  
28 Maret 1961  
salinan  
1 sampul
- 1127 Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR-GR tentang penyampaian Keputusan Presiden No. 107 Tahun 1961 tentang Penggolongan proyek-proyek Pembangunan Semesta Berentjana 1961-1969.  
28 Maret 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1128 Keputusan Presiden RI No. 236 Tahun 1961 tentang pengangkatan Tie King Tiat sebagai Direktur pada Direksi Sementara dari Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah II  
19 Mei 1961  
salinan  
2 lembar
- 1129 Keputusan Presiden RI No. 302 Tahun 1961 tentang Kedudukan dan Kepengurusan Panitia-panitia Kerjasama Menteri-Komisi DPR-GR. dan Badan Pimpinan Kerjasama Menteri DPR-GR  
9 Juni 1961  
salinan  
4 lembar
- 1130 Keputusan Presiden RI No. 304 Tahun 1961 tentang pemberhentian dengan hormat para anggota "Panitia Negara Perancang Undang-undang Perbendaharaan Baru"  
10 Juni 1961  
salinan  
2 lembar
- 1131 Keputusan Presiden RI No. 340 Tahun 1961 tentang Perwarganegaraan (Naturalisasi) Pastor Rijper Edestius Johannes, CS (4 Orang).  
29 Juni 1961



- fotokopi  
2 lembar
- 1132 Keputusan Presiden RI No. 385 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitia Penjusunan Sistem Perpadjakan.
- 3 Juli 1961  
salinan  
1 lembar
- 1133 Keputusan Presiden RI No. 457 Tahun 1961 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI No. 302 Tahun 1961 tentang pemberian tunjangan kepada Pengurus Panitia-panitia Kerjasama Menteri-Komisi DPR-GR. dan Badan Pimpinan Kerjasama Menteri DPR-GR.
- 19 Agustus 1961  
salinan  
2 lembar
- 1134 Keputusan Presiden RI No. 508 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitia Penjusun Undang-undang Induk Perbankan dan Undang-undang Pokok Bank Indonesia:
- 06 September 1961  
fotokopi  
6 lembar
- 1135 Keputusan Presiden RI No. 514 Tahun 1961 tentang pembentukan Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- 12 September 1961  
fotokopi  
6 lembar
- 1136 Keputusan Presiden RI No. 547 Tahun 1961 tentang penambahan Anggota Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah a.n. Kolonel A. Jusuf, dkk
- 23 September 1961  
fotokopi  
1 lembar
- 1137 Keputusan Presiden RI No. 581 Tahun 1961 tentang perubahan dan penambahan susunan Panitia Negara Penampungan Korban Kekatajauan
- 6 Nopember 1961  
fotokopi  
1 lembar
- 1138 Surat-surat Keputusan Presiden RI tentang pemberhentian jabatan Kepala Daerah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Irian Barat, Kalimantan Selatan dan Aceh
- 1 Januari 1962 - 16 Oktober 1963  
salinan  
8 lembar
- 1139 Surat-surat Keputusan Presiden RI tentang Pengesahan Pendirian Universitas Udayana, Universitas Brawidjaja, Universitas Negeri Mataram, Universitas Tjenderawasih.
- 31 Januari 1962 - 18 Desember 1963  
salinan  
5 lembar

- 1140 Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1962 tentang Pembubaran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.
- 5 Mei 1962  
salinan  
2 lembar
- 1141 Keputusan Presiden RI No. 347 Tahun 1962 tentang penunjukan Major Jenderal Dr. Azis Saleh sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi, a.i., Ahem Erningpradja sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, a.i., Ir. Abdul Muttalip Danuningrat sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, a.i., Sumarno, SH., sebagai Menteri Perdagangan, a.i., dan Rusiah Sardjono sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, a.i.
- 3 Nopember 1962  
salinan  
1 lembar
- 1142 Keputusan Presiden RI No. 377 Tahun 1962 tentang penunjukan Menteri/Wakil Ketua II dan III DPR-GR untuk menjalankan Pekerjaan Wampa/Ketua DPR-GR dan Menteri/Wakil Ketua I DPR-GR selama mereka dalam keadaan sakit
- 14 Desember 1962  
salinan  
1 lembar
- 1143 Keputusan Presiden RI No. 1/M Tahun 1963 tentang pengangkatan pegawai-pegawai dan perwira-perwira a.n. Surjotjondro, SH., dkk., sebagai Sekretaris Wakil Menteri Pertama, Pembantu Menteri atau Sekretaris Menteri
- 7 Januari 1963  
fotokopi  
3 lembar
- 1144 Keputusan Presiden RI No. 43/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Ir. Sugeng Sundjaswadi dan Drs. Abdulrachman sebagai Direktur pada Direksi Sementara BPU Industri Kimia.
- 23 Januari 1963  
salinan  
1 lembar
- 1145 Keputusan Presiden RI No. 47/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Gunung Iskandar sebagai Presiden Direktur pada Direksi Sementara BPU Perusahaan Pertanian Negara dan pengangkatan Ir. Gunung Iskandar sebagai Penasehat pada Direksi Sementara BPU Perusahaan Pertanian Negara
- 25 Januari 1963  
salinan  
2 lembar
- 1146 Keputusan Presiden RI No. 46/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Saksono Prawirohardjo sebagai Presiden Direktur pada Direksi Sementara BPU Perusahaan Perkebunan Negara dan penugasan Radjamin Lubis untuk menjalankan jabatan Presiden Direktur pada Direksi Sementara BPU Perusahaan Perkebunan Negara.

- 25 Januari 1963  
salinan  
1 lembar
- 1147 Keputusan Presiden RI No. 45/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Sunar Suraputra sebagai Direktur pada Direksi Sementara BPU Pelayaran Niaga, A. Kosasih sebagai Presiden Direktur pada Direksi Sementara Perusahaan Negara (P.N.) Pelayaran Nasional Indonesia, Masrin, SH., sebagai Presiden Direktur pada Direksi Sementara Perusahaan Negara (P.N.) Djakarta Llyod, dan pengangkatan A. Kosasih, dkk., dalam jabatan masing-masing.
- 25 Januari 1963  
salinan  
2 lembar
- 1148 Keputusan Presiden RI No. 44/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Ir. Hatmadi Pindoandojo sebagai Direktur pada Direksi Sementara Perusahaan Bangunan Negara "Bina Karya".
- 25 Januari 1963  
salinan  
1 lembar
- 1149 Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1963 tentang Memasukkan Pelabuhan Cilacap Ke Dalam Daerah Hukum Penguasa Perang Daerah Maritim Surabaya
- 31 Januari 1963  
salinan  
2 lembar
- 1150 Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1963 tentang Pedoman Tata-Kerja Sekretariat Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.
- 15 Februari 1963  
salinan  
2 lembar
- 1151 Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1963 tentang Penambahan Tugas Panitia Penyusun Undang-Undang Induk Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.
- 02 Maret 1963  
salinan  
1 lembar
- 1152 Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 1963 tentang pengangkatan Moerdyono Soemadyono sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia.
- 2 Maret 1963  
salinan  
1 lembar
- 1153 Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1963 tentang penetapan Mohamad Djoeana Koesoemahardja, SH., dan Hertantijanto, SH., sebagai Direktur Bank Indonesia
- 8 Maret 1963  
salinan  
1 lembar

- 1154 Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 1963 tentang pengangkatan Hutomo Supardan sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia  
13 Maret 1963  
salinan  
1 lembar
- 1155 Keputusan Presiden RI No. 48/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. J.M. Soewarto dan Kolonel Soenjoto sebagai Direktur pada Direksi Sementara B.P.U. Perusahaan Perkebunan Negara serta pengangkatan Ir. J.M. Soewarto, dkk., pada jabatan masing-masing dalam Direksi B.P.U. Perusahaan Perkebunan Gula Negara.  
18 Maret 1963  
salinan  
2 lembar
- 1156 Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1963 tentang pencabutan ijin kepada Sumanang, SH., untuk menjabat Alternate Governor International Bank for Reconstruction and Development dan pemberian ijin kepada Soetjipto Probosawitro, SH. (Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia), untuk menjabat Alternate Governor International Bank for Reconstruction and Development  
20 Maret 1963  
salinan  
1 lembar
- 1157 Keputusan Presiden RI No. 51/D.P.N./Tahun 1963 tentang pengangkatan R. Soekrasno sebagai Pejabat Presiden Direktur pada Perusahaan Bangunan Negara (P.N.) "Nabuka Karya".  
30 Maret 1963  
salinan  
1 lembar
- 1158 Keputusan Presiden RI No. 53/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Sawarno sebagai Pejabat Direktur pada Direksi Sementara Perusahaan Negara Badan Muatan Indonesia.  
18 April 1963  
salinan  
1 lembar
- 1159 Keputusan Presiden RI No. 54/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat K. I. Djajadiningrat, SH. sebagai Direktur pada Direksi P.N. Merpati Nusantara  
18 April 1963  
salinan  
1 lembar
- 1160 Keputusan Presiden RI No. 55/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Loewis Mohamad Idris sebagai Direktur pada Direksi Sementara P.N. Pelabuhan Daerah VI di Surabaya dan Sardjoe, SH., sebagai Direktur pada Direksi Sementara P.N. Pelabuhan Daerah V di Semarang, serta pengangkatan Sardjoe, SH., sebagai Pejabat Direktur pada Direksi Sementara P.N. Pelabuhan Daerah VI di Surabaya dan Ir. Soedjono Kramadibrata sebagai Pejabat Direktur pada Direksi Sementara P.N. Pelabuhan Daerah V di Semarang.  
18 April 1963  
salinan

2 lembar

- 1161 Keputusan Presiden RI No. 52/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan R. Anda Ganda Hidajat sebagai Pejabat Direktur I Perusahaan Kehutanan Negara Daerah Jawa Timur dan Soewondo Ranowidjojo, dkk., pada jabatan masing-masing  
18 April 1963  
salinan  
2 lembar
- 1162 Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1963 tentang pengangkatan Gaspé Saweri, dkk., sebagai Anggota DPRD-GR (DPR-GR) Provinsi Irian Barat  
24 April 1963  
fotokopi  
2 lembar
- 1163 Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 1963 tentang pengangkatan Alex Onim, dkk., sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian Provinsi Irian Barat  
24 April 1963  
fotokopi  
1 lembar
- 1164 Keputusan Presiden RI No. 84 Tahun 1963 tentang penunjukan Letnan Jenderal Hidajat sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata ad-interim (a.i.) dan Laksamana Muda R.E. Martadinata sebagai Menteri Urusan Veteran a.i.  
27 April 1963  
salinan  
1 lembar
- 1165 Keputusan Presiden RI No. 37/M Tahun 1963 tentang pengangkatan R.E.M. Suling sebagai Pegawai Tinggi Kedokteran pada Departemen Kesehatan  
27 Mei 1963  
salinan  
3 lembar
- 1166 Keputusan Presiden RI No. 56/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Drs. Harsono Reksoatmodjo sebagai Presiden Direktur pada Direksi BPU Perusahaan Dagang Negara.  
29 Mei 1963  
salinan  
1 lembar
- 1167 Keputusan Presiden RI No. 58/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Sofjan Aziz Burhanudin, SH., sebagai Direktur Komersial P.N. "Garuda Indonesian Airways" dan Capt. Soedarmo sebagai Direktur Operasi P.N. "Garuda Indonesian Airways".  
12 Juni 1963  
salinan  
2 lembar

- 1168 Keputusan Presiden RI No. 57/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Simandjatak sebagai Direktur pada Direksi Sementara B.P.U. Perusahaan Kehutanan Negara dan pengangkatan R.H. Tedjokoesoemo sebagai PejabatDirektur pada Direksi Sementara B.P.U. Perusahaan Kehutanan Negara
- 12 Juni 1963  
salinan  
1 lembar
- 1169 Keputusan Presiden RI No. 118 Tahun 1963 tentang Penambahan Wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (P.N.PERMINA)
- 21 Juni 1963  
salinan  
2 lembar
- 1170 Keputusan Presiden RI No. 123 Tahun 1963 tentang Perusahaan / Jawatan / Badan Vital.
- 25 Juni 1963  
salinan  
1 sampul
- 1171 Keputusan Presiden RI No. 124 Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Kolonel Infanteri Prijatna Padmadiwiria sebagai Sekretaris Wakil Menteri Koordinator Urusan Irian Barat.
- 25 Juni 1963  
salinan  
1 lembar
- 1172 Keputusan Presiden RI No. 125 Tahun 1963 tentang pengangkatan Kolonel CKH Sutjipto S.H., sebagai Sekretaris Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat.
- 25 Juni 1963  
salinan  
1 lembar
- 1173 Keputusan Presiden RI No. 102/M Tahun 1963 tentang pengangkatan Djoko Soemarjono, SH., sebagai Sekretaris Umum DPR-GR dan Islan sebagai Wakil Sekretaris Umum DPR-GR.
- 26 Juni 1963  
salinan  
3 lembar
- 1174 Keputusan Presiden RI No. 130 Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal TNIWilujo Puspojudo dan Kolonel Inf. A.J. Bustami, sebagai Anggota DPR-GR serta pengangkatan pengangkatan Kolonel Inf. Gani dan Kolonel C.A.D. Soebijono sebagai Anggota DPR-GR.
- 27 Juni 1963  
salinan  
1 lembar

- 1175 Keputusan Presiden RI No. 131 Tahun 1963 tentang pengangkatan Major Corps Perhubungan Angkatan Darat R. Koentjoro sebagai Sekretaris Sementara Dewan Telekomunikasi.  
27 Juni 1963  
salinan, fotokopi  
2 lembar
- 1176 Keputusan Presiden RI No. 136/M Tahun 1963 tentang pembebasan tugas Pekerjaan Mohamad Saubari, SH., sebagai pegawai Sekretariat Negara  
1 Juli 1963  
salinan  
3 lembar
- 1177 Keputusan Presiden RI No. 139/M Tahun 1963 tentang pembebasan tugas Pekerjaan Maria Ulfah Santoso, SH., sebagai Pegawai Utama Madya d/p Menteri Pertama  
1 Juli 1963  
salinan  
3 lembar
- 1178 Keputusan Presiden RI No. 140/M Tahun 1963 tentang pembebasan tugas Pekerjaan Ali Budiarjo, SH., sebagai Pegawai Tinggi d/p Menteri Pertama  
1 Juli 1963  
salinan  
3 lembar
- 1179 Keputusan Presiden RI No. 141/M Tahun 1963 tentang pembebasan Imam Soedjahri dari tugas Pekerjaannya sebagai Pegawai Tinggi d/p Menteri Pertama  
1 Juli 1963  
salinan  
3 lembar
- 1180 Keputusan Presiden RI No. 138/M Tahun 1963 tentang pembebasan R.I. Suri Atmadja dari tugas Pekerjaannya sebagai Pegawai Tinggi d/p Menteri Pertama  
1 Juli 1963  
salinan  
3 lembar
- 1181 Keputusan Presiden RI No. 136 Tahun 1963 tentang pengangkatan Endang Sulbi, SH., sebagai Sekretaris Umum Dewan Pertimbangan Agung  
5 Juli 1963  
salinan  
1 lembar
- 1182 Keputusan Presiden RI No. 141 Tahun 1963 tentang pengangkatan Letnan Hk. A.L. Sindhunata SH., sebagai Pd. Kepala Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa  
18 Juli 1963  
fotokopi  
1 lembar

- 1183 Keputusan Presiden RI No. 143 Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Letnan Jenderal Hidajat sebagai Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan dan Keamanan serta pengangkatan Letnan Jenderal Hidajat sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata
- 19 Juli 1963  
salinan  
2 lembar
- 1184 Keputusan Presiden RI No. 148 Tahun 1963 tentang pengangkatan penjabat-penjabat pada Staf Komando Operasi Tertinggi a.n. Major Jenderal TNI Achmad Jani, dkk
- 23 Juli 1963  
salinan  
2 lembar
- 1185 Keputusan Presiden RI No. 154 Tahun 1963 tentang Penganugerahan Keada Resimen Cakrabirawa Sebuah DUADJA.
- 27 Juli - 9 September 1963  
salinan  
6 lembar
- 1186 Keputusan Presiden RI No. 163 Tahun 1963 tentang penunjukan Menteri Pertama Djuanda untuk menjalani Pekerjaan djabatatan Presiden sehari-hari selama Presiden ke Manila (Philipina).
- 29 Juli 1963  
salinan  
1 lembar
- 1187 Keputusan Presiden RI No. 158 Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Rachmat Muljomiseno sebagai Direktur Bank Negara Indonesia
- 31 Juli 1963  
salinan  
2 lembar
- 1188 Keputusan Presiden RI No. 162 Tahun 1963 tentang pemberian kuasa kepada Ketua dan Para Wakil Ketua DPR-GR untuk bertindak atas nama Presiden Republik Indonesia dalam mengambil sumpah/janji Anggota-anggota DPR-GR baru
- 5 Agustus 1963  
salinan  
1 lembar
- 1189 Keputusan Presiden RI No. 60/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Letkol. SPL. Mohammad Sofjan Anrazad dan M.J.P. Hahijari sebagai PejabatDirektur pada Direksi Sementara Perusahaan Negara Djakarta LLOYD
- 8 Agustus 1963  
salinan  
1 lembar



- 1190 Keputusan Presiden RI No. 61/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Adnan Kusuma, Kol. Inf. R. Soejatmo, dan Amir Husin Siregar sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPU Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat, serta pengangkatan Ir. R. Soedomo Reksopoetro sebagai Ketua BPU Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat dan Soetedjo Kartowardojo, dkk., sebagai Anggota BPU Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat.
- 12 Agustus 1963  
salinan  
2 lembar
- 1191 Keputusan Presiden RI No. 63/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat R. Soenggono sebagai Direktur pada Direksi Sementara BPU Perusahaan Perkebunan Negara dan pengangkatan R. Soenggono dan Dr. Adjidarmo Tjokronegoro sebagai PejabatDirektur pada Direksi Sementara BPU Perusahaan Perkebunan Gula Negara.
- 16 Agustus 1963  
salinan  
1 lembar
- 1192 Keputusan Presiden RI No. 62/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Prodjosumitro dan Hadi Gondowardojo sebagai Direktur P.N. Permigan dan pengangkatan Ir. Nusjirwan ST. Asin, Ir. R. Sumbarjono, dan Drs. Soekotjo sebagai PejabatDirektur P.N. Permigan.
- 16 Agustus 1963  
salinan  
2 lembar
- 1193 Keputusan Presiden RI No. 66/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat D. Hadhiman sebagai Presiden Direktur Sementara P.N. Sabang Merauke dan pengangkatan D. Hadhiman sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan pada BPU Industri Mesin dan Alat Listrik, serta pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan Ir. Trihartono , dkk., pada jabatan masing-masing.
- 23 Agustus 1963  
salinan  
2 lembar
- 1194 Keputusan Presiden RI No. 65/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. J Sadiman sebagai Presiden Direktur Sementara P.N. Blabak dan pengangkatan Ir. J. Sadiman sebagai Presiden Direktur Sementara P.N. Garam, serta pemberhentian dengan hormat Tugio Karjowinangun sebagai Presiden Direktur Sementara P.N. Garam
- 26 Agustus 1963  
salinan  
2 lembar
- 1195 Keputusan Presiden RI No. 67/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Djajadi sebagai PejabatDirektur pada Direksi Sementara P.N. Indra
- 26 Agustus 1963  
salinan  
1 lembar

- 1196 Keputusan Presiden RI No. 64/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Kadirman sebagai Direktur pada Direksi Sementara P.N. Pelabuhan Daerah IV Tandjung Priok dan pengangkatan Ir., Kardiman sebagai Pejabat Presiden Direktur pada Direksi Sementara P.N. Pelabuhan Daerah IV Tandjung Priok, serta pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan Ir. Tan Tiang Gie, dkk., pada jabatannya masing-masing.
- 26 Agustus 1963  
salinan  
2 lembar
- 1197 Keputusan Presiden RI No. 175 Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat I.B.P. Manuaba sebagai Anggota DPA., dan pengangkatan Dr. M. Isa sebagai Anggota DPA.
- 30 Agustus 1963  
salinan  
1 lembar
- 1198 Keputusan Presiden RI No. 68/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan David Gee Cheng sebagai Presiden Direktur P.N. "Pembangunan Perumahan", Ir. Lim Tjin Tek dan Ir. Soeradi Wongsohartono, sebagai Direktur P.N. "Pembangunan Perumahan"
- 01 September 1963  
salinan  
1 lembar
- 1199 Keputusan Presiden RI No. 180 Tahun 1963 tentang penunjukan H. Achmad Sjaechu sebagai Anggota DPR-GR (Menteri/Wakil Ketua DPR-GR)
- 03 September 1963  
fotokopi  
3 lembar
- 1200 Keputusan Presiden RI No. 182 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1963 tentang Kedudukan, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pembantu Urusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- 05 September 1963  
salinan  
3 lembar
- 1201 Keputusan Presiden RI No. 19/M. Tahun 1963 tentang pengangkatan J. Tamara sebagai Pegawai Negeri Tetap dengan tugas Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 05 September 1963  
salinan  
1 lembar
- 1202 Keputusan Presiden RI No. 187 Tahun 1963 tentang pencabutan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1963 tentang pengangkatan Major Koentjoro sebagai Sekretaris Sementara Dewan Telekomunikasi serta pengangkatan Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan Telekomunikasi a.n. Brigadir Jenderal Dr. Rubiono Kertopati, dkk
- 06 September 1963  
salinan  
1 lembar

1203 Surat Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi mengenai penyampaian Keputusan Presiden No. 167 Tahun 1963 tentang pengangkatan Kolonel Pensiun Bambang Supeno sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, No. 174 Tahun 1963 tentang pemberhentian Noor Atmadibrata sebagai Pjs. Sekretaris Provinsi Irian Barat dan Pjs. Kepala Dinas Pemerintahan Provinsi Irian Barat dan pengangkatan Letkol. Inf. Marwoto dan Abd. Rasid Koesoemodiwirjo sebagai penggantinya, No. 176 Tahun 1963 tentang prosedur kerja sama khusus antara Sekretariat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi dan Departemen Pemerintahann Umum dan Otonomi Daerah.(Lampiran tidak lengkap)

14 September 1963  
salinan  
3 lembar

1204 Keputusan Presiden RI No. 200 Tahun 1963 tentang pengangkatan Soemarso Parmopranoto sebagai Direktur Bank Negara Indonesia

23 September 1963  
salinan  
1 lembar

1205 Keputusan Presiden RI No. 199/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Soeprastowo Kertopati sebagai Direktur Bank Negara Indonesia dan pengangkatan Soeprastowo Kertopati sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Negara Indonesia:

23 September 1963  
salinan  
1 lembar

1206 Keputusan Presiden RI No. 198 Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Suryo Winoto sebagai Direktur Bank Negara Indonesia

23 September 1963  
salinan  
1 lembar

1207 Keputusan Presiden RI No. 205 Tahun 1963 tentang penunjukan Dr. Subandrio (Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri, Wakil Panglima Besar ke II Komando Tertinggi Operasi Ekonomi) sebagai pemegang komando dalam pembangunan ekonomi di daerah-daerah perbatasan Republik Indonesia sebagai daerah-daerah terdepan dalam pelaksanaan politik konfrontasi.

26 September 1963  
salinan  
1 lembar

1208 Keputusan Presiden RI No. 230/M Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Dr. Arifin Abdulrachman sebagai Wakil Direktur Lembaga Administrasi Negara dan pengangkatan Dr. Arifin Abdulrachman sebagai Pembantu Menteri Perdagangan Urusan Umum.

27 September 1963  
salinan  
1 lembar

- 1209 Keputusan Presiden RI No. 204 Tahun 1963 tentang penunjukan Notohamiprodo (Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan) untuk bertindak selaku Menteri Urusan Bank Sentral ad-interim (a.i.)  
28 September 1963  
salinan  
1 lembar
- 1210 Surat Keputusan Presiden RI No. 208 Tahun 1963 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang Jangka Panjang antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Rumania Untuk Jangka Waktu 1963-1965.  
08 Oktober 1963  
pertinggal  
7 lembar
- 1211 Surat Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi tentang perubahan daftar distribusi "A" dan "B" produk-produk Sekretariat M.P.R., khususnya Keputusan Presiden No. 167 Tahun 1963 tentang pengangkatan Kolonel Supeno sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, beserta lampiran  
17 Oktober 1963.  
fotokopi  
2 lembar
- 1212 Keputusan Presiden RI No. 82/DFN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat R. Soekamto sebagai Presiden Direktur P.N. "Pembangunan Industri Rakjat" dan pengangkatan Soekamardi sebagai Presiden Direktur P.N. "Pembangunan Industri Rakjat", Soehartono Dipl. Ing., sebagai Direktur P.N. "Pembangunan Industri Rakjat", dan Soewasis Prawirosentono sebagai Direktur P.N. "Pembangunan Industri Rakjat"  
17 Oktober 1963  
salinan  
2 lembar
- 1213 Keputusan Presiden RI No. 81/DFN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Rochman Oesman sebagai Direktur P.N. "Urusan Mekanisasi" dan pengangkatan Ir. Rochman Oesman sebagai Presiden Direktur P.N. "Urusan Mekanisasi", Ir. Swasono Adi Sastrosoeparto sebagai Direktur P.N. "Urusan Mekanisasi", dan Ir. Soedinarto Kertoleksone sebagai Direktur P.N. "Urusan Mekanisasi".  
17 Oktober 1963  
salinan  
2 lembar
- 1214 Keputusan Presiden RI No. 80/DFN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Safioen sebagai Presiden Direktur P.N. "Urusan Penelitian, Pembinaan, dan Pendidikan" dan pengangkatan Ir. Soemantri sebagai Presiden Direktur P.N. "Urusan Penelitian, Pembinaan, dan Pendidikan", Ir. Soegito Moeljowijadi sebagai Direktur P.N. "Urusan Penelitian, Pembinaan, dan Pendidikan", Benito Kodiat, M.SE., sebagai Direktur P.N. "Urusan Penelitian, Pembinaan, dan Pendidikan"  
17 Oktober 1963  
salinan

2 lembar

- 1215 Keputusan Presiden RI No. 79/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Roesman sebagai Direktur P.N. "Industri Es" dan pengangkatan Roesman sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Es", R. Soetedjo Harjoko sebagai Direktur P.N. "Industri Es" dan R.E. Djaelani sebagai Direktur P.N. "Industri Es"
- 17 Oktober 1963  
salinan  
2 lembar
- 1216 Keputusan Presiden RI No. 78/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Isnaeni Mangunsuwargo sebagai Direktur P.N. "Industri Minjak Nabati" dan pengangkatan Drs. Jopie Arnold Turangan sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Minjak Nabati", R. Marjono sebagai Direktur P.N. "Industri Minjak Nabati", Achmad Hasan Kastubi sebagai Direktur P.N. "Industri Minjak Nabati"
- 17 Oktober 1963  
salinan  
2 lembar
- 1217 Keputusan Presiden RI No. 75/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan R. Soetamto sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Kimia", Ir. Soejatno dan Ir. C.B. Hardjowijono sebagai Direktur P.N. "Industri Kimia"
- 17 Oktober 1963  
salinan  
1 lembar
- 1218 Keputusan Presiden RI No. 74/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Zachrial sebagai Direktur P.N. "Industri Logam/Mesin" dan pengangkatan Jopie Bolang sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Logam/Mesin", J. Sianipar dan Ir. Chamroel Djaffri sebagai Direktur P.N. "Industri Logam/Mesin".
- 17 Oktober 1963  
salinan  
1 lembar
- 1219 Keputusan Presiden RI No. 76/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Handrito Gondodipoero sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Kaju, Bangunan, Sabut", Warga Kartadisastra B.Sc., dan Frans Hoetabarat sebagai Direktur P.N. "Industri Kaju, Bangunan, Sabut".
- 17 Oktober 1963  
salinan  
2 lembar
- 1220 Keputusan Presiden RI No. 77/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat R.M. Soeharso Wirjoredjo sebagai Direktur P.N. "Industri Karet" dan pengangkatan R.M. Soeharso Wirjoredjo sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Karet", E. Soekarna B. Ch. E., dan Ir. Sobandi Sachri sebagai Direktur P.N. "Industri Karet"
- 17 Oktober 1963  
salinan  
2 lembar

- 1221 Keputusan Presiden RI No. 73/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ateng Mochtar sebagai Direktur P.N. "Industri Keramik" dan pengangkatan Ateng Mochtar sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Keramik", Ir. Soemarjoto dan Drs. Soekarno sebagai Direktur P.N. "Industri Keramik"
- 17 Oktober 1963  
salinan  
1 lembar
- 1222 Keputusan Presiden RI No. 72/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Soesman Notoprodjo sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Makanan dan Minuman", Kamaroedin dan Drs. Soewarno sebagai Direktur P.N. "Industri Makanan dan Minuman".
- 17 Oktober 1963  
salinan  
1 lembar
- 1223 Keputusan Presiden RI No. 71/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Sufsidi sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Pertenunan dan Peradjutan" dan pengangkatan Salmoen Wargadinata sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Pertenunan dan Peradjutan", Siswanto Muttamat dan Ir. Didi Soebroto B. Sc. sebagai Direktur P.N. "Industri Pertenunan dan Peradjutan"
- 17 Oktober 1963  
salinan  
1 lembar
- 1224 Keputusan Presiden RI No. 70/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat R. Soeradibrata sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Pemintalan" dan pengangkatan Mathohir Tex, Ing., sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Pemintalan", Zainal Moerad, SH., dan Letnan Kolonel Abdul Kadir sebagai Direktur P.N. "Industri Pemintalan".
- 17 Oktober 1963  
salinan  
1 lembar
- 1225 Keputusan Presiden RI No. 69/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Ir. Cottan Anwar Batubara sebagai Presiden Direktur P.N. "Industri Kulit", Soerjadi dan Hadi Soenarno B. Sc. sebagai Direktur P.N. "Industri Kulit"
- 17 Oktober 1963  
salinan  
1 lembar
- 1226 Keputusan Presiden RI No. 214 Tahun 1963 tentang pengangkatan Potan Arif Harahap, SH., sebagai Direktur Bank Negara Indonesia
- 18 Oktober 1963  
salinan  
1 lembar
- 1227 Keputusan Presiden RI No. 217 Tahun 1963 tentang pengangkatan Anggota Direksi Yayasan Televisi Republik Indonesia a.n. M. Arief., dkk
- 20 Oktober 1963

salinan  
1 lembar

- 1228 Keputusan Presiden RI No. 216 Tahun 1963 tentang pembentukan Staf Urusan Yayasan Televisi Republik Indonesia dengan Kepala Dr. H. Roeslan Abdulgani, Sekretaris M. Arief, dan anggota Major Jenderal D. Soeprajogi, dkk

20 Oktober 1963  
salinan  
1 lembar

- 1229 Keputusan Presiden RI No. 252 Tahun 1963 tentang pemberhentian Wirjono Prodjodikoro, SH., sebagai Menteri Kehakiman dan pengangkatan Astrawinata, SH., sebagai Menteri Kehakiman dan Oei Tjoe Tat, SH., sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja.

9 Desember 1963  
fotokopi  
1 lembar

- 1230 Keputusan Presiden RI No. 347/M Tahun 1963 tentang pengangkatan Drs. Soewarno Hadiatmodjo, M.PA., sebagai Pegawai Utama Muda pada Departemen Dalam Neger

10 Desember 1963  
salinan  
2 lembar

- 1231 Keputusan Presiden RI No. 254 Tahun 1963 tentang pengangkatan H. Moh. Djambek sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Front Nasional

11 Desember 1963  
salinan  
1 lembar

- 1232 Keputusan Presiden RI No. 256 Tahun 1963 tentang penunjukan Brigadir Jenderal Santoso, SH., sebagai wakil Menteri/Sekretaris Negara

13 Desember 1963  
salinan  
1 lembar

- 1233 Keputusan Presiden RI No. 255 Tahun 1963 tentang pengangkatan Mohammad Ichsan, SH., sebagai Sekretaris Negara yang bertugas memimpin Sekretariat Negara dan Abdulwahab Suryoadiningrat, SH., sebagai Sekretaris Negara pada Presidium Kabinet Kerja yang bertugas membantu Presidium.

13 Desember 1963  
salinan  
3 lembar

- 1234 Keputusan Presiden RI No. 265 Tahun 1963 tentang pengangkatan anggota-anggota baru Direksi Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno a.n. Osman, SE., dkk

18 Desember 1963  
salinan  
1 lembar

- 1235 Keputusan Presiden RI No. 258 Tahun 1963 tentang pencabutan Keputusan Presiden RI No. 356 Tahun 1960 tentang pemberian kuasa pada Menteri Pertama untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi/Anggota BPU dan Direksi Perusahaan Negara dan pemberian kuasa kepada Wakil Perdana Menteri III pemberian kuasa pada Menteri Pertama untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi/Anggota BPU dan Direksi Perusahaan Negara.
- 18 Desember 1963  
salinan  
1 lembar
- 1236 Keputusan Presiden RI No. 270 Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Kusnoroto, SH., dkk., dari jabatannya masing-masing
- 26 Desember 1963  
salinan  
2 lembar
- 1237 Keputusan Presiden RI No. 269 Tahun 1963 tentang pengangkatan Sudiarmo sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Khusus Perusahaan-perusahaan Negara
- 26 Desember 1963  
salinan  
1 lembar
- 1238 Keputusan Presiden RI No. 361/M Tahun 1963 tentang pembentukan Sekretariat Presidium Kabinet Kerja dan pengangkatan Abdul Wahab Surjodiningrat, SH., sebagai Sekretaris Presidium Kabinet Kerja
- 27 Desember 1963  
salinan  
1 lembar
- 1239 Keputusan Presiden RI No. 83/DFN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat Nur Sulaiman Effendi sebagai Presiden Direktur Sementara Perusahaan Negara (P.N.) "Perkapalan Alir Mendjaja".
- 31 Desember 1963  
salinan  
2 lembar
- 1240 Keputusan Presiden RI No. 84/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Soemarno sebagai PejabatDirektur pada Direksi Sementara Perusahaan Negara (P.N.) "PERMINA".
- 31 Desember 1963  
salinan  
1 lembar
- 1241 Keputusan Presiden RI No. 85/DPN/Tahun 1963 tentang pemberhentian dengan hormat R. Hartawan Wirjodiprodo sebagai Direktur pada Direksi Sementara BPU. Perusahaan Bangunan Negara dan pengangkatan R. NG. Arsono sebagai Direktur pada Direksi Sementara BPU. Perusahaan Bangunan Negara
- 31 Desember 1963  
salinan  
2 lembar



- 1242 Keputusan Presiden RI No. 86/DPN/Tahun 1963 tentang pengangkatan Safaat dan Ir. Sajidi Pringgodarsono sebagai Pd. Direktur P.N. "Kumala Karya"  
31 Desember 1963  
salinan  
1 lembar
- 1243 Keputusan Presiden RI. No. 4 Tahun 1964 tentang penyerahan komando BAPENYF  
04 Januari 1964  
asli  
1 sampul
- 1244 Keputusan Presiden RI No. 6/M Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal Polisi S. Sutarto, dkk., dari jabatannya masing-masing dan pengangkatan Komisaris Besar Polisi Drs. Sukahar, dkk., dalam jabatan baru masing-masing.  
6 Januari 1964  
salinan  
1 lembar
- 1245 Keputusan Presiden RI No. 52 Tahun 1964 tentang perubahan jumlah anggota DPR-GR Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur  
7 Maret 1964  
fotokopi  
1 lembar
- 1246 Surat-surat Keputusan dan Instruksi Presiden yang berkaitan dengan organisasi, dan kegiatan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE)  
02 April 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 1247 Keputusan Presiden RI No. 70 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat A.M. Datuk sebagai Anggota DPR-GR dan Achmad M.P. sebagai Anggota MPRS serta pengangkatan Drs. Sudjendro, dkk., sebagai Anggota DPR-GR  
02 April 1964  
fotokopi  
2 lembar
- 1248 Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Perubahan dan Lintas-lintas Kereta Api serta Pembangunan Lintas-lintas Kereta Api di Bawah Tanah.  
08 April 1964  
tembusan  
5 lembar
- 1249 Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1964 tentang pengangkatan D. Walandouw sebagai Anggota DPR-GR/MPRS mewakili Golongan Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) sebagai pengganti H. Senduk (Alm.)  
08 April 1964  
fotokopi  
2 lembar

1250 Keputusan Presiden RI No. 114 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Kolonel Dch. R.O. Soenardi sebagai Anggota DPR-GR/MPRS wakil Golongan Karyawan Angkatan Laut dan pengangkatan Kolonel Hk. Soejoso Poegoeh sebagai Anggota DPR-GR/MPRS

7 Mei 1964  
fotokopi  
1 lembar

1251 Keputusan Presiden RI No. 118 Tahun 1964 tentang penugasan Wakil Perdana Menteri III untuk pergi ke Eropa setelah menyelesaikan kunjungannya di New York, guna memimpin Missi Ekonomi Republik Indonesia

12 Mei 1964  
salinan  
1 lembar

1252 Keputusan Presiden RI No. 133 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Toeloes Soebroto sebagai anggota DPR-GR Provinsi Irian Barat dan pengangkatan Clemens Rumaweri sebagai anggota DPR-GR Provinsi Irian Barat mewakili golongan Pemuda.

25 Mei 1964  
fotokopi  
1 lembar

1253 Keputusan Presiden RI No. 136 Tahun 1964 tentang pengangkatan Pangrengrengi Tanri dan Achmad Soekarmadidjaja sebagai Anggota DPR-GR wakil golongan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI)

27 Mei 1964  
fotokopi  
3 lembar

1254 Keputusan Presiden RI No. 151/M. Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Philippe Jules Sigar, S.H., sebagai Pegawai Tinggi pada Kantor Pusat Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata

9 Juni 1964  
salinan  
2 lembar

1255 Keputusan Presiden RI No. 156/M Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Wirjono Koesono, SH., sebagai Hakim Anggota Mahkamah Agung

18 Juni 1964  
salinan  
2 lembar

1256 Keputusan Presiden RI No. 162/M. Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Soewirjo sebagai Pegawai Tinggi Departemen Agama

23 Juni 1964  
salinan  
2 lembar

- 1257 Keputusan Presiden RI No. 165/PLM.T Tahun 1964 tentang pembentukan Panitia Negara Urusan Kontrak-kontrak Ekonomi-Keluangan antara Republik Indonesia dengan Luar Negeri.
- 27 Juni 1964  
salinan  
1 sampul
- 1258 Keputusan Presiden RI No. 172 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Manase Bernabas Ramandey dan Clement Kiriwaeb sebagai anggota DPR-GR, wakil Daerah Provinsi Irian Barat.
- 16 Juli 1964  
fotokopi  
1 lembar
- 1259 Keputusan Presiden RI No. 182 Tahun 1964 tentang Pembetulan/Perubahan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 1964 mengenai pengangkatan Drs. Sudjendro dkk., sebagai Anggota DPR-GR
- 27 Juli 1964  
fotokopi  
1 lembar
- 1260 Keputusan Presiden RI No. 183 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Setiati Surasto, dkk., sebagai Anggota DPR-GR dan pengangkatan Ir. Sakirman., dkk., sebagai Anggota DPR-GR
- 28 Juli 1964  
fotokopi  
2 lembar
- 1261 Keputusan Presiden RI No. 212 Tahun 1964 tentang pencabutan Keputusan Presiedn No. 153 Tahun 1964 dan pengangkatan Kepala Staf dan Anggota-anggota Staf Presiden Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera.
- 24 Agutsus 1964  
fotokopi  
2 lembar
- 1262 Keputusan Presiden RI No. 205 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Gajus Siagian sebagai Anggota DPR-GR/MPRS, wakil dari Golongan Karya Seniman dan pengangkatan Usep Ranawidjaja sebagai Anggota DPR-GR/MPRS
- 24 Agustus 1964  
fotokopi  
1 lembar
- 1263 Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1964 tentang Perobahan/Tambahan Peraturan Presider RI No. 10 Tahun 1963 tentang Distribusi Bahan/Barang Pokok Keperluan Hidup bagi Pegawai Negeri .
- 24 Agustus 1964  
fotokopi  
3 lembar

- 1264 Keputusan Presiden RI No. 215 Tahun 1964 tentang Pembubaran Kabinet Kerja dan Pembentukan Susunan Kabinet Dwikora  
27 Agustus 1964  
salinan  
4 lembar
- 1265 Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Ekonomi dan Keuangan.  
12 September 1964  
fotokopi  
3 lembar
- 1266 Keputusan Presiden RI No. 241 Tahun 1964 tentang pengangkatan Husein Kartasasmita (Anggota DPR-GR) sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri III Khusus untuk Urusan Perusahaan-perusahaan Negara.  
16 September 1964  
fotokopi  
1 lembar
- 1267 Keputusan Presiden RI No. 243 Tahun 1964 tentang pengangkatan A.K.B. POL. Dr. Awaludin Djamin, Drs., M.P.A., dan A.K.B. POL. Domopranoto sebagai Anggota DPR-GR mewakili Golongan Karya Angkatan Kepolisian  
19 September 1964  
fotokopi  
2 lembar
- 1268 Keputusan Presiden RI No. Aa/C/124 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat A.K.B.P. Drs. Soetomo sebagai Anggota DPRD-GR Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya dan pengangkatan K.P. Tk. I. R.A. Wiratno Poespoatmodjo S.H. sebagai Anggota DPRD-GR Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya.  
9 Oktober 1964  
fotokopi  
1 lembar
- 1269 Keputusan Presiden RI No. 243/M Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat M. Endrawan Antariksa sebagai pegawai tinggi pada Departemen Urusan Pendapatan  
9 Oktober 1964  
salinan  
2 lembar
- 1270 Keputusan Presiden RI No. 244/M. Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat L. Kan., SH., sebagai Pegawai Tinggi Keuangan Tingkat I pada Departemen Urusan Pendapatan.  
9 Oktober 1964  
salinan  
2 lembar
- 1271 Keputusan Presiden RI No. 266 Tahun 1964 tentang perintah kepada Dr. J. Leimana (Wakil Perdana Menteri II), Drs. F.R. Almatsier, dan Jusuf Natanegara, untuk pergi ke Bangkok memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia  
21 Oktober 1964

- salinan  
1 lembar
- 1272 Keputusan Presiden RI No. 270 Tahun 1964 tentang pendirian Akademi Ilmu  
Pemasyarakatan Departemen Kehakiman di Djakarta
- 24 Oktober 1964  
fotokopi  
1 lembar
- 1273 Keputusan Presiden RI No. 273 Tahun 1964 tentang perintah kepada Hidajat (Letnan  
Jenderal TNI Menteri Perhubungan Darat, Pos, dan Telekomunikasi dan Pariwisata) untuk  
pergi ke Tokyo dan Pyongyang guna bergabung dengan rombongan Presiden Republik  
Indonesia.
- 27 Oktober 1964  
salinan  
1 lembar
- 1274 Keputusan Presiden RI No. 278 Tahun 1964 tentang pengangkatan A. Nawawi Saleh sebaga  
Anggota DPR-GR dari Golongan Partai Nasional Indonesia sebagai pengganti Moh. Isa.
- 31 Oktober 1964  
fotokopi  
1 lembar
- 1275 Keputusan Presiden RI No. 281 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Manai  
Sophian sebagai Anggota DPR-GR wakil golongan PNI dan pengangkatan A. Siala sebagai  
Anggota DPR-GR wakil golongan PNI
- 31 Oktober 1964  
fotokopi  
2 lembar
- 1276 Keputusan Presiden RI No. 296 Tahun 1964 tentang penugasan Frans Seda (Menteri  
Perkebunan) untuk menghadiri Kongres Kerasulan Awam Katolik, Kongres Eucharistie  
International dan Kongres Tjendekiawan Katolik Sedunia di Bombay
- 18 Nopember 1964  
salinan  
1 lembar
- 1277 Keputusan Presiden RI No. 312 Tahun 1964 tentang penunjukan Ketua, Hakim-hakim  
Anggota, Oditur/Oditur Pengganti, dan Panitera/Panitera Pengganti pada Mahkamah Militer  
Luar Biasa dalam memeriksa dan mengadili perkara Ibnu Hadjar
- 7 Desember 1964  
salinan  
2 lembar
- 1278 Keputusan Presiden RI No. 311/M. Tahun 1964 tentang pemberian tunjangan kematian  
kepada Sri Harjati, janda dari Santoso., SH
- 7 Desember 1964  
salinan  
1 lembar

- 1279 Keputusan Presiden RI No. 320 Tahun 1964 tentang pengangkatan Sri Paku Alam VIII (Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta) sebagai Anggota Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS), menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
- 14 Desember 1964  
salinan  
2 lembar
- 1280 Keputusan Presiden RI No. 323 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat R.M. Soeprastowo Kertopati sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Negara Indonesia:
- 14 Desember 1964  
salinan  
2 lembar
- 1281 Keputusan Presiden RI No. 295/M Tahun 1964 tentang pengangkatan Husein Kartasasmita (Anggota DPR-GR) sebagai Pegawai Bulanan pada Sekretariat Negara
- 14 Desember 1964  
salinan  
4 lembar
- 1282 Keputusan Presiden RI No. 327 Tahun 1964 tentang pembebasan Sumanang sebagai Penasehat Bank Pembangunan Indonesia
- 28 Desember 1964  
salinan  
2 lembar
- 1283 Keputusan Presiden RI No. 326 Tahun 1964 tentang perpanjangan waktu kerja Panitia Negara Perancang Peraturan Tindak Pidana Ekonomi dan penetapan honorarium untuk Ketua, Anggota dan Sekretaris Panitia Negara Perancang Peraturan Tindak Pidana Ekonomi.
- 28 Desember 1964  
salinan  
2 lembar
- 1284 Keputusan Presiden RI No. 337 Tahun 1964 tentang pengangkatan Sdr. H. Mohammad Hasan (Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan) sebagai Governor pada International Bank for Reconstruction and Development dan pengangkatan Moh. Bermawi Alwi (Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia) sebagai Alternate Governor pada International Bank for Reconstruction and Development
- 30 Desember 1964  
salinan  
2 lembar
- 1285 Keputusan Presiden RI No. 334 Tahun 1964 tentang pemberhentian dengan hormat Drs. Frans Seda sebagai Anggota DPR-GR (wakil dari Golongan Partai Katolik) dan pengangkatan Drs. B. Mang Reng Say sebagai Anggota DPR-GR (wakil dari Golongan Partai Katolik).
- 31 Desember 1964  
salinan  
2 lembar

- 1286 Keputusan Presiden RI No. 35 Tahun 1965 tentang penambahan/pengubahan keanggotaan Staf Presiden Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera  
16 Februari 1965  
fotokopi  
2 lembar
- 1287 Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 1965 tentang penyempurnaan susunan keanggotaan Musjawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS).  
19 Maret 1965  
fotokopi  
3 lembar
- 1288 Keputusan Presiden RI No. 141 Tahun 1965 tentang pengeluaran Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dari Lingkungan Kompartimen Pembangunan dan peningkatannya menjadi Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga serta pembentukan Departemen Pengairan Rakyat dalam Lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria.  
25 Mei 1965  
fotokopi  
2 lembar
- 1289 Keputusan Presiden RI No. 193 Tahun 1965 tentang penunjukan Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimana untuk menjalankan Pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari selama Presiden berada di luar negeri.  
26 Juni 1965  
fotokopi  
1 lembar
- 1290 Keputusan Presiden RI No.2/DPN/Tahun 1966 tentang Pemberhentian Komodor Udara Sutopo dan pengangkatan Kolonel Udara Slamet Tjokroadiredjo sebagai Direktur Utama Perusahaan Negara (PN) AERIAL SURVEY  
15 Februari 1966  
turunan  
1 lembar
- 1291 Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1966 tentang Pembentukan Komando Ganjang Malaysia (KOGAM) dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi  
22 Februari 1966  
salinan  
1 sampul
- 1292 Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 1966 tentang Susunan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Lagi.  
27 Maret 1966  
salinan  
1 sampul
- 1293 Keputusan Presiden RI No. 78 Tahun 1966 tentang Susunan Baru Pengurus Panitia Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional  
13 April 1966  
salinan

- 1 lembar
- 1294 Keputusan Presiden RI No. 112 Tahun 1966 tentang Pengesahan Susunan Pimpinan DPR-GR.
- 23 Mei 1966  
salinan  
1 lembar
- 1295 Keputusan Presiden RI No. 259 Tahun 1966 tentang pengangkatan Major Jenderal TNI Achmad Jusuf sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Thailand berkedudukan di Bangkok
- 30 September 1966  
salinan  
1 lembar
- 1296 Keputusan Presiden RI No. 251 Tahun 1966 tentang pengangkatan Ir. Abu Prajitno sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Kerajaan Belgia berkedudukan di Brussel
- 30 Nopember 1966  
salinan  
1 lembar
- 1297 Keputusan Presiden RI No. 252 Tahun 1966 tentang penetapan Raden Dewi Sartika (Almarhumah) sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional
- 1 Desember 1966  
salinan  
1 lembar
- 1298 Keputusan Presiden RI No. 254 Tahun 1966 tentang pernyataan bencana alam peletusan Gunung Awu di Tahuna Kabupaten Sangir/Talaud Sulawesi Utara pada tanggal 12 Agustus 1966 sebagai "Bencana Alam Luar Biasa/Nasional"
- 6 Desember 1966  
salinan  
2 lembar
- 1299 Keputusan Presiden RI No. 253 Tahun 1966 tentang pengangkatan Soedjono sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Ghana berkedudukan di ACCRA merangkap pada Pemerintah Republik Liberia.
- 6 Desember 1966  
salinan  
1 lembar
- 1300 Keputusan Presiden RI No. 255 Tahun 1966 tentang pemberhentian dengan hormat Dr. Soeharto sebagai Wakil Komisaris Utama P.T. Departemen Store Indonesia "Sarinah".
- 8 Desember 1966  
salinan  
1 lembar



- 1301 Keputusan Presiden RI No. 256 Tahun 1966 tentang pencabutan Keputusan Presiden No. 312 Tahun 1965 dan pemberhentian dengan hormat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam serta pembentukan dan pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam.
- 14 Desember 1966  
salinan  
2 lembar
- 1302 Keputusan Presiden RI No. 257 Tahun 1966 tentang Pembubaran Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas Dasar Production Sharing
- 19 Desember 1966  
salinan  
1 lembar
- 1303 Keputusan Presiden RI No. 258 Tahun 1966 tentang penentuan gaji dan penghasilan lainnya untuk care-taker Wakil Ketua I dan II DPA
- 21 Desember 1966  
salinan  
1 lembar
- 1304 Keputusan Presiden RI No. 261 Tahun 1966 tentang pengangkatan Laksamana Muda Laut Sjamsul Bachri Tjiptosuhardjo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Pakistan berkedudukan di Karach
- 30 Desember 1966  
salinan  
1 lembar
- 1305 Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1966 tentang pengangkatan R. Roesman Djajakoesoemo, S.H., sebagai Duta Besar Luar Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Mexico Serikat berkedudukan di Mexico City
- 30 Desember 1966  
salinan  
2 lembar
- 1306 Keputusan Presiden RI No. 264 Tahun 1966 tentang pembubaran Panitia Negara Urusan Kontrak-kontrak Ekonomi-Kuangan antara Republik Indonesia dengan Luar Negeri.
- 30 Desember 1966  
salinan  
1 lembar
- 1307 Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1967 tentang pengangkatan Laksamana Muda Udara Wiriadinata (Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta) sebagai Direktur Eksekutif Gedung Pola.
- 16 Januari 1967  
fotokopi  
1 lembar

- 1308 Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1967 tentang pemberian ijin Drs. Moh. Barmawie Alwi (Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia) untuk diangkat sebagai Alternate Executive Director Dana Moneter International (IMF) di Washington D.C. selama 2 Tahun.
- 16 Januari 1967  
fotokopi  
1 lembar
- 1309 Keputusan Presiden RI Tahun 1967 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Mohamad Effendi Saleh sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan dan pengangkatan S.H. Simatupang Bc. A.P. sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan.
- Juni 1967  
konsep  
3 lembar
- 1310 Keputusan Presiden RI No.77 Tahun 1967 tentang Pemberhentian dengan hormat Ir. Mohamad Efendi Saleh sebagai Sekretaris Jendral Departemen Perhubungan dan mengangkat Sdr. S.H Simatupang Bc. AP sebagai Sekretaris Jendral Departemen Perhubungan.
- 6 Juni 1967  
tembusan  
4 lembar
- 1311 Keputusan Presiden RI No. 82 Tahun 1967 tentang penunjukan Major Jenderal TNI Moch. Jusuf (Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga) sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat ad-interim
- 13 Juni 1967  
fotokopi  
1 lembar
- 1312 Surat-surat Keputusan Presiden RI tentang Pengangkatan Menteri-Menteri dan Penyempurnaan Pemerintahan
- 1 Januari -31 Mei 1968  
asli  
1 sampul
- 1313 Keputusan Presiden RI No. 182 Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Drs. Barmawie Alwie sebagai Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia:
- 1 Juni 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1314 Keputusan Presiden RI No. 188 Tahun 1968 tentang pemberlakuan Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia
- 10 Juni 1968  
fotokopi  
5 lembar
- 1315 Keputusan Presiden RI No. 189 Tahun 1968 tentang pengesahan susunan Pimpinan Pusat Markas Besar Legiun Veteran RI
- 10 Juni 1968

- fotokopi  
5 lembar
- 1316 Keputusan Presiden RI No. 190 Tahun 1968 tentang pembebasan dengan hormat Daranin sebagai Anggota DPR-GR/MPRS dan pengangkatan Nazar Moenek Datuk Bando Putih sebagai Anggota DPR-GR/MPRS.
- 10 Juni 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1317 Keputusan Presiden RI No. 191 Tahun 1968 tentang pembentukan Panitia Penerimaan Tamu Negara Perdana Menteri Australia.
- 10 Juni 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1318 Keputusan Presiden RI No. 192 Tahun 1968 tentang penugasan Gubernur Bank Sentral, Radius Prawiro, SE., untuk berangkat ke Eropa Barat dalam rangka tugas djabatan.
- 1 Juni 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 1319 Keputusan Presiden RI No. 199 Tahun 1968 tentang proyek-proyek Pemerintah
- 18 Juni 1968  
fotokopi  
1 Sampul
- 1320 Keputusan Presiden RI No. 215 Tahun 1968 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Sekretariat Negara.
- 02 Juli 1968  
fotokopi  
1 sampul
- 1321 Keputusan Presiden RI No. 217 Tahun 1968 tentang Pembentukan Panitia Nasional Perbaikan Candi Borobudur.
- 04 Juli 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1322 Keputusan Presiden RI No. 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganja
- 15 Juli 1968  
fotokopi  
1 Sampul
- 1323 Keputusan Presiden RI No. 258 Tahun 1968 tentang Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing.
- 3 Agustus 1968  
fotokopi  
5 lembar

- 1324 Keputusan Presiden RI No. 259 Tahun 1968 tentang penugasan Adam Malik (Menteri Luar Negeri) sebagai pemimpin delegasi RI dalam Sidang para Menteri Luar negeri ASEAN tanggal 6-7 Agustus 1968.
- 05 Agustus 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1325 Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1968 perubahan dan penambahan Keputusan Presiden No. 235 Tahun 1968 berkenaan dengan pembagian beban biaya penginapan, uang representasi, dan uang harian, antara Pemerintah Jerman Barat dengan Pemerintah Indonesia (Departemen Sosial).
- 05 Agustus 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1326 Keputusan Presiden RI No. 265 Tahun 1968 tentang Peraturan Tata-Tempat bagi Pedjabat-pejdabat Negara Sipil/Militer pada Upatjara-upatjara Kenegaraan/Pertemuan Resmi.
- 12 Agustus 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1327 Keputusan Presiden RI No. 267 Tahun 1968 tentang Susunan dan Tugas Deputi-Deputi Perencanaan Bappenas.
- 13 Agustus 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1328 Keputusan Presiden RI No. 268 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara.
- 13 Agustus 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1329 Keputusan Presiden RI No. 12/M.Tahun 1968 tentang pengangkatan R.Soerjono Sastrohadikoesoemo sebagai Direktur Utama Bank Negara Indonesia Unit II
- 21 Agustus 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1330 Surat Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Semua Departemen dan tentang ralat atas kekeliruan penyebutan No. Keputusan Presiden yang semestinya No.241/Tahun 1968 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Dana Penyeritaan Modal Pemerintah pada Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pokok-pokok Kebijakan mengenai Penggunaan Dana Penyeritaan Modal Pemerintah
- 21 Agustus 1968  
asli, fotokopi  
1 sampul

- 1331 Keputusan Presiden RI No. 272 Tahun 1968 tentang penghapusan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan serta pemberhentian dengan hormat J.B. Titiheruw sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Brig.Djen. TNI. Abdurrachman Prawirakusumah sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan penyatuan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menjadi Direktorat Jenderal Perdagangan Departemen Perdagangan
- 21 Agustus 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1332 Surat Ketua Team Inti Harian TP3 kepada Semua Departemen/Lembaga/Badan Pemerintah Non Departemental dan Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia tentang penyampaian Keputusan Presiden RI No. 261 Tahun 1968 tentang Penambahan Anggota Team Penertiban Personil Pusat.
- 28 Agustus 1968  
salinan, fotokopi  
4 lembar
- 1333 Keputusan Presiden RI No. 19/M.Tahun 1968 tentang pengangkatan Ir. Notosuwarso sebagai anggota Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing mewakili Departemen Perindustrian.
- 07 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1334 Keputusan Presiden RI No. 20/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal TNI Poniman sebagai Ketua Muspida Tingkat I Provinsi Sumatera Barat dan pengangkatannya sebagai Ketua Muspida Tingkat I Provinsi Maluku, pengangkatan Brigadir Jenderal TNI Widodo sebagai Ketua Muspida Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, dan pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal TNI Djohari sebagai Ketua Muspida Tingkat I Provinsi Maluku.
- 07 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1335 Keputusan Presiden RI No. 21 /M/Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Komodor Laut Murtamadji sebagai Pejabat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan berhubung dengan pengangkatannya sebagai anggota DPR-GR
- 10 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1336 Keputusan Presiden RI No. 22 /M.Tahun 1968 tentang pengangkatan Kolonel Inf. Achmad Lamo sebagai Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan
- 11 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1337 Keputusan Presiden RI No. 279 Tahun 1968 tentang penunjukan Let. Djen. TNI. Basuki Rachmat (Menteri Dalam Negeri) sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim

- 13 September 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1338 Keputusan Presiden RI No. 280 Tahun 1968 tentang penambahan keanggotaan Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing.
- 16 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1339 Keputusan Presiden RI No. 23/M/Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal TNI A. Manan sebagai Sekretariat Jenderal Departemen Agama dan pengangkatan Brigadir Jenderal TNI A. Hafiluddin sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
- 17 September 1968  
fotokopi  
4 lembar
- 1340 Keputusan Presiden RI No. 24/M.Tahun 1968 pemberhentian dengan hormat Soehendro Hendarsin, SH., sebagai Sekretaris Proyek Penerbitan dan Ketertiban Hukum dan pengangkatan Kadarusman, SH., sebagai SekretarisPproyek Penerbitan dan Ketertiban Hukum.
- 17 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1341 Keputusan Presiden RI No. 25/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo sebagai Ketua Muspida Tingkat I Provinsi Sumatera Utara dan pengangkatan Brigadir Jenderal TNI Leo Lopulisa sebagai Pejabat Sementara Ketua Muspida Tingkat I Provinsi Sumatera Utara
- 17 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1342 Keputusan Presiden RI No. 277 Tahun 1968 tentang penunjukan Prof. Dr. Ali Wardhana (Menteri Keuangan) sebagai Menteri Perdagangan ad-interim
- 17 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1343 Keputusan Presiden RI No. 15/LN/Tahun 1968 tentang penugasan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro (Ketua Bappenas) sebagai pemimpin delegasi R.I. ke Amerika Serikat untuk mengadakan perundingan dengan pihak *International Monetary Fund* (IMF) dan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dalam rangka persiapan International Governmental Group for Indonesia (IGGI) Meeting.
- 18 September 1968  
fotokopi  
2 lembar

- 1344 Keputusan Presiden RI No. 281 Tahun 1968 tentang penunjukan Ir. Sutami (Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) sebagai Menteri Pertambangan ad-interim  
18 September 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 1345 Keputusan Presiden RI No. 282 Tahun 1968 tentang penambahan anggota proyek Irian Bara dan proyek Transmigrasi yang mewakili Departemen Kesehatar  
18 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1346 Keputusan Presiden RI No. 286 Tahun 1968 tentang pembentukan Panitia Tehnis Penanaman Modal.  
26 September 1968  
fotokopi  
6 lembar
- 1347 Keputusan Presiden RI No. 287 Tahun 1968 tentang pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Tehnis Penanaman Modal  
26 September 1968  
fotokopi  
4 lembar
- 1348 Keputusan Presiden RI No. 32/M.Tahun 1968 tentang pengangkatan Komodor Udara Subambang sebagai Direktur Jenderal Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional  
01 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1349 Keputusan Presiden RI No. 289 Tahun 1968 tentang penunjukan Dr. Sumitro Djojohadikusumo (Menteri Perdagangan) sebagai Menteri Keuangan ad-interin  
2 Oktober 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 1350 Keputusan Presiden RI No. 291 Tahun 1968 tentang Partisipasi Indonesia dalam Eksposisi Dunia 1970 di Osaka Djepang.  
07 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1351 Keputusan Presiden RI No. 292 Tahun 1968 tentang Pembentukan Komite Nasional Food and Agricultural Organization (FAO).  
7 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar

- 1352 Keputusan Presiden RI No. 33/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Let.Kol. Pens. Imam Sutrisno sebagai Pejabat Sementara Kepala Biro Khusus Hubungan dengan Lembaga-lembaga pada Sekretariat Kabinet dan pengangkatan Waroto, SH., sebagai Kepala Brio Hubungan dengan Lembaga-lembaga pada Sekretariat Kabinet.
- 09 Oktober 1968  
fotokopi  
4 lembar
- 1353 Keputusan Presiden RI No. 34/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Komodor Udara J. Salatun sebagai Sekretaris Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) dan pengangkatan Komodor Udara Sudarjo Adisaputro sebagai Sekretaris Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia (DEPANRI).
- 10 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1354 Keputusan Presiden RI No. 294 Tahun 1968 tentang pengangkatan Panglima-panglima Daerah Militer sebagai Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
- 15 Oktober 1968  
fotokopi  
4 lembar
- 1355 Keputusan Presiden RI No. 295 Tahun 1968 tentang pencabutan Instruksi Presiden/Pangti ABRI/KOTI No.22/KOTI/1965 dan Instruksi Presiden/Pangti ABRI/Pangsar KOGAM No.09/KOGAM/5/66 tentang Pedoman Pelaksanaan Penertiban/Pembersihan Personil Aparatur Pemerintah/Negara.
- 15 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1356 Keputusan Presiden RI No. 298 Tahun 1968 tentang Pembentukan Dewan Tenaga Atom.
- 16 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1357 Keputusan Presiden RI No. 299 Tahun 1968 tentang Struktur Organisasi Badan Tenaga Atom Nasional.
- 16 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1358 Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia No. 21/SETKAB/10/1968 tentang penunjukan Kolonel Inf. Ali Affandi (Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Kabinet) untuk mewakili Sekretaris Kabinet selama Sekretaris Kabinet melakukan kunjungan ke daerah-daerah bersama rombongan Presiden
- 16 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar



- 1359 Keputusan Presiden RI No. 35/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Maj. Djen. TNI. Dr. Ibnu Sutowo sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bum  
25 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1360 Keputusan Presiden RI No. 36/M Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Ds. N.J. Sumual sebagai anggota DPRD-GR Provinsi Irian Barat  
26 Oktober 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 1361 Keputusan Presiden RI No. 37/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat H. Aberani Sulaiman sebagai Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan penunjukkan M. Jamani bin Hadji Antemas sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Selatar  
29 Oktober 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 1362 Keputusan Presiden RI No. 305 Tahun 1968 tentang perubahan Keputusan Presiden No. 197 Tahun 1967 dan pengalihan wewenang pengangkatan dan pemberhentian PNS Gol. IV/a PGPS 1968 ke bawah di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) kepada Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional)  
31 Oktober 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1363 Keputusan Presiden RI No. 40/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat H.A. Pandelaki sebagai Anggota Team Penertiban Keuangan Negara dan pengangkatan Drs. Gandhi sebagai Anggota Team Penertiban Keuangan Negara  
02 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1364 Keputusan Presiden RI No. 41/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal TNI A. Hafiluddin D. sebagai Anggota Team Penertiban Keuangan Negara dan pengangkatan CPM. S. Soedarman sebagai Anggota Team Penertiban Keuangan Negara.  
02 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1365 Keputusan Presiden RI No. 42/M.Tahun 1968 tentang pengangkatan Achmad Nasuhi sebagai Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat  
02 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1366 Keputusan Presiden RI No.43 /M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat M.Ali Amin, SH., sebagai wakil gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pengangkatan M.Ali Amin, SH., sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Bengkulu

- 04 Nopember 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 1367 Keputusan Presiden RI No. 306 Tahun 1968 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Lembaga Administrasi Negara
- 6 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1368 Keputusan Presiden RI No. 308 Tahun 1968 tentang Penambahan Anggota Panitia Kerja Urusan Repatriasi Suku Maluku.
- 6 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1369 Keputusan Presiden RI No. 44/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro sebagai Rektor Universitas Indonesia dan pengangkatan kembali Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro sebagai Rektor Universitas Indonesia.
- 07 Nopember 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1370 Keputusan Presiden RI No. 49 /M Tahun 1968 tentang pengangkatan Brigadir Jenderal TNI A. Kadir Prawira Atdmaja sebagai Sekretaris Menteri Negara Urusan Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.
- 11 Nopember 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1371 Keputusan Presiden RI No. 50/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Achmad Affandi sebagai Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian dan pengangkatan Prof. Dr. D. A. Lubis sebagai Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian.
- 16 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1372 Keputusan Presiden RI No. 51/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Brigadir Jenderal Abdurrachman Prawirakusumah sebagai Sekretaris Proyek Perdagangan Luar Negeri dan pengangkatan Darry Salim sebagai Sekretaris Proyek Perdagangan Luar Negeri.
- 16 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1373 Keputusan Presiden RI No. 52/M.Tahun 1968 tentang pengangkatan Drs. Thomas Sujatno sebagai Direktur Keuangan, Bank dan Asuransi Perseroan Terbatas Perusahaan Pilot proyek Berdikari.
- 18 Nopember 1968  
fotokopi

2 lembar

- 1374 Keputusan Presiden RI No. 53/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Komisaris Besar Polisi Drs. Soejono Soentahir sebagai Anggota DPR-GR/MPRS dan pengangkatan Komisaris Besar Polisi Abdullah Kadir sebagai Anggota DPR-GR/MPRS.  
20 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1375 Keputusan Presiden RI No. 54 /M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Laksmana Muda (L) Mursalin sebagai anggota DPR-GR dan pengangkatan Kolonel (Tit) Laut Drs. Bachrum Rangkuti sebagai anggota DPR-GR  
20 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1376 Keputusan Presiden RI No. 309 Tahun 1968 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 1968/1969 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan Para Penerima Pensiun  
20 Nopember 1968  
fotokopi  
6 lembar
- 1377 Keputusan Presiden RI No. 310 Tahun 1968 tentang pemberian tunjangan hari raya untuk pegawai perusahaan negara dan bank pemerintah  
20 Nopember 1968  
fotokopi  
8 lembar
- 1378 Keputusan Presiden RI No. 55/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Mayor Jenderal TNI Soedirgo sebagai Kepala Badan Koordinasi Intellidjen Negara dan pengangkatan Brigadir Jenderal TNI Joga Soegama sebagai Pejabat Sementara Kepala Badan Koordinasi Intellidjen Negara  
21 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1379 Keputusan Presiden RI No. 56/M.Tahun 1968 tentang pengangkatan Drs. Soeroso H. Prawirohardjo M.A. sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada  
23 Nopember 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1380 Keputusan Presiden RI No. 311 Tahun 1968 tentang penambahan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai anggota Panitia Kebinjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan perubahan susunan anggota Panitia Kebinjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri  
25 Nopember 1968  
fotokopi  
1 lembar

- 1381 Keputusan Presiden RI No. 57/M.Tahun 1968 tentang pengangkatan Brigadir Jenderal TNI R. Rusli sebagai Perwira Tinggi diperbantukan di Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat.
- 28 Nopember 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1382 Keputusan Presiden RI No. 58/M.Tahun 1968 tentang penyerahan kembali Major Soedirgo ke Angkatan Darat.
- 28 Nopember 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1383 Keputusan Presiden RI No. 312 Tahun 1968 tentang pembentukan Panitia Penelitian Barang-barang/Alat-alat ABRI.
- 28 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1384 Keputusan Presiden RI No. 313 Tahun 1968 tentang Penggunaan Wewenang Penyerahan Perkara dan Wewenang Pemeriksaan Pendahuluan di Lingkungan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
- 28 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1385 Keputusan Presiden RI No. 60 /M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. J.J. Pitoy MA., dan Drs. M. Panggabean sebagai anggota Team Tehnis Kredit Luar Negeri dan pengangkatan Abubakar Gaffar sebagai anggota Team Tehnis Kredit Luar Negeri.
- 5 Desember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1386 Keputusan Presiden RI No. 314 Tahun 1968 tentang Pembentukan Panitia Pembina Tugu Nasional.
- 5 Desember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1387 Keputusan Presiden RI No. 61/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Djokosuroto, M.A. sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Tenaga Asing dan pengangkatan Drs. Hinu Sutihardjo sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Tenaga Asing, mewakili Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 7 Desember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1388 Keputusan Presiden RI No. 68/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Ir. Maskan Abdullah sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi R.I. dan mengangkat Prof. Ir. Ing. Iskandar Alisyahbana sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi R.I., mewakili Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi

- 16 Desember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1389 Keputusan Presiden RI No. 316 Tahun 1968 tentang penyerahan kewenangan pengangkatan/pemberhentian para Pejabat dibawah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dari Departemen, kepada Menteri Departemen yang bersangkutan.
- 16 Desember 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1390 Keputusan Presiden RI No. 317 Tahun 1968 tentang penunjukan Ir. Sutami (Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) sebagai Menteri Pertambangan ad-interim
- 16 Desember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1391 Keputusan Presiden RI No. 318 Tahun 1968 tentang penunjukan Let. Djen. TNI Basuki Rachmat (Menteri Dalam Negeri) sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim
- 16 Desember 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1392 Keputusan Presiden RI No. 70/M.Tahun 1968 tentang pengangkatan Drs. Kamarsjah dan Drs. Barlianta Harahap sebagai Asisten Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.
- 18 Desember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1393 Keputusan Presiden RI No. 71 M./Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Drs. M. Chodri Alamsjah Boer sebagai Anggota Dewan Pers dan pengangkatan M. Kadarusman, SH., sebagai anggota Dewan Pers, mewakili Kementerian Kehakiman
- 18 Desember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1394 Keputusan Presiden RI No.73/M.Tahun 1968 tentang penempatan C. Boediman dan S. Hidayat sebagai Direktur Bank Ekspor Impor Indonesia dan R. Soerjono Sastrohadikoesoemo sebagai Direktur Utama BNI Unit II
- 27 Desember 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 1395 Keputusan Presiden RI No. 74/M.Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Surungan Nasution sebagai Direktur P.N. "Sari Husada"
- 27 Desember 1968  
fotokopi  
1 lembar

- 1396 Keputusan Presiden RI No.319 Tahun 1968 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969-1973.  
30 Desember 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1397 Keputusan Presiden RI No. 79/M. Tahun 1968 tentang pemberhentian dengan hormat Laksmana Muda Laut Machmud Subarkah sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.  
31 Desember 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1398 Keputusan Presiden RI No. 284 Tahun 1968 tentang pencabutan Instruksi Presidium Kabinet No.14/U/IN/3/1967 dan pemberian instruksi kepada Lembaga Pertahanan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Urusan Pegawai, dan Biro Pusat Statistik untuk membantu Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara dalam penertiban dan penyempurnaan aparatur negara/administrasi pemerintahan  
20 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 8) Instruksi Presiden**
- 1399 Instruksi Presiden RI No.4 Tahun 1961 tentang Indoktrinasi Manifesto Politik di luar team Indoktrinasi yang telah ada  
01 Agustus 1961  
salinan  
1 lembar
- 1400 Instruksi Presiden No.11 Tahun 1961 tentang Gerakan Gotong Royong Pengumpulan Padi dan Surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi tentang pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut  
13 Desember 1961 dan 16 Agustus 1962  
asli, salinan  
1 sampul
- 1401 Instruksi Presidium Kabinet No.4/EK/IN/8/1966 kepada Semua menteri dan pimpinan lembaga pemerintah lainnya tentang hubungan langsung dengan pihak Jepang mengenai pelaksanaan kredit dari Jepang.  
20 Agustus 1966  
salinan  
1 lembar
- 1402 Instruksi Presiden Kabinet No.27/U/IN/5/1967 tentang Larangan Pemungutan uang atau benda terhadap calon haji.  
10 Mei 1967  
salinan  
2 lembar
- 1403 Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun 1968 tentang Instruksi kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas untuk menyusun RAPBN Tahun 1969  
03 Mei 1968

- fotokopi  
1 lembar
- 1404 Instruksi Presiden RI No. 18 Tahun 1968 tentang Penetapan Kelonggaran-Kelonggaran Perpajakan untuk Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan
- 18 Juni 1968  
fotokopi  
6 lembar
- 1405 Instruksi Presiden RI No. 21 Tahun 1968 kepada Menteri Keuangan untuk tidak memberikar keringanan terhadap pembayaran pungutan bea masuk dan atau impor yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif.
- 28 Juni 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 1406 Instruksi Presiden RI No. 22 Tahun 1968 kepada Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri untuk meneliti kembali segi pemilikan perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi.
- 02 Juli 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1407 Instruksi Presiden RI No. 23 Tahun 1968 tentang Petunjuk-Petunjuk Umum Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-23
- 08 Juli 1968  
fotokopi  
3 lembar
- 1408 Instruksi Presiden RI No. 24 Tahun 1968 tentang pembentukan Panitia pembuat Rancangan Undang-Undang tentang Bank dan Lumbung Desa
- 12 Agustus 1968  
fotokopi  
1 lembar
- 1409 Instruksi Presiden RI No. 25 Tahun 1968 tentang Instruksi kepada Menteri Pertanian untuk menyelenggarakan kursus kilat pengetahuan pembangunan pertanian
- 19 Agustus 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1410 Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1968 tentang Instruksi kepada Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat untuk mengkoordinir, memberikan bimbingan serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang keluarga berencana
- 07 September 1968  
fotokopi  
2 lembar
- 1411 Instruksi Presiden RI No. 27 Tahun 1968 kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri Sidang ke XXIII Madjelis Umum PBE
- 12 September 1968

fotokopi  
2 lembar

1412 Instruksi Presiden RI No. 28 Tahun 1968 tentang Instruksi kepada Bank Negara Indonesia (Bank Sentral) untuk meninjau terhadap suku bunga perkreditan Bank-Bank Pemerintah.

19 September 1968  
fotokopi  
1 lembar

1413 Instruksi Presiden RI No. 31 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Padi INMAS Gotong-Royong (CIBA).

17 Oktober 1968  
fotokopi  
2 lembar

1414 Instruksi Presiden RI No. 32 Tahun 1968 tentang Instruksi kepada Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Gubernur Bank Sentral dan Kepala Staf Hankam untuk mengambil langkah persiapan pembukaan *bonded warehouses* guna menjamin kelancaran pemasukan barang-barang ke Indonesia

28 Oktober 1968  
fotokopi  
1 lembar

1431 Instruksi Presiden RI No. 33 Tahun 1968 tentang Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pampasan Perang Jepang

09 Nopember 1968  
fotokopi  
2 lembar

1432 Instruksi Presiden RI No. 34 Tahun 1968 tentang Penyempurnaan Pemerintahan Daerah Provinsi Irian Barat.

30 Nopember 1968  
fotokopi  
1 lembar

1433 Surat dari DPR kepada Perdana Menteri RI tentang Pengangkatan sumpah Presiden disertai lampiran SK rapat Pleno DPR.

20 September -21 Oktober 1950  
salinan  
3 lembar

## **5. Perlengkapan**

1415 Surat permintaan uang biaya kendaraan bermotor (beban tetap) Direktoratium P3 Kabinet Perdana Menteri bagian pengukuran dan pengembangan peta Tahun 1962

17 Mei 1959  
asli  
4 lembar

1416 Surat-surat tentang penertiban pembelian dan penjualan kendaraan bermotor instansi dan badan pemerintah.



- 16 Januari 1960 - 8 Desember 1959  
asli, tembusan  
1 sampul
- 1417 Surat keputusan Menteri Muda Sosial RI No.V.5-1-44/121 tentang Balai Peristirahatan Pegawai Negeri beserta tarifnya
- 20 Januari 1960  
salinan  
3 lembar
- 1418 Notulen dan undangan rapat Panitia Pembangunan Rumah-rumah Pegawai Badan-badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi untuk Proyek Cempaka Putih
- 08 Agustus dan 22 September 1960  
asli, salinan  
2 lembar
- 1419 Surat Direktur Lembaga Administrasi Negara kepada Fa Tamansari Trading Coy tentang pesanan mesin tulis Hermes, beserta lampiran
- 22 Oktober 1960  
asli  
1 sampul
- 1420 Surat-surat tentang permintaan kendaraan dinas untuk kepala-kepala instansi pemerintahan.
- 9 November 1960-30 Oktober 1961  
asli  
1 sampul
- 1421 Faktur - faktur biaya perbaikan kendaraan dari Perusahaan Mobil Fn. Pantjawarna bulan Mei s.d Juli 1961, beserta lampiran Surat Perintah Perbaikan dari Bagian Perawatan Kendaraan, Komando Urusan Pembangunan, Dewan Asian Games Indonesia.
- 04 Mei - 05 Juli 1961  
tembusan  
1 sampul
- 1422 Surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan kepada Ketua Dewan Asian Games Indonesia mengenai pembelian kendaraan bermotor usang milik Kedutaan Besar Rusia, beserta lampiran.
- 08 Mei 1961  
tembusan  
7 lembar
- 1423 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Ketua Umum Dewan Asian Games di Indonesia tentang penampungan perumahan pegawai
- 26 Mei 1961  
asli  
1 sampul
- 1424 Surat Kuasa Menteri Pertama RI kepada Pekerjaan umum Tenaga RI tentang perbaikan gedung pendidikan sentral pengukuran gambar peta di Solc
- 25 Juli 1961  
salinan

- 1425 Berkas mengenai pembangunan gedung Kantor Sensus di Jakarta (Jl. Dr. Sutomo dan Jl. Bidara Cina) dan menara air di rumah Ketua Depernas  
25 Juli - 21 November 1961  
salinan  
1 sampul
- 1426 Surat-surat kuasa dari Menteri Pertama kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai pembangunan rumah jaga pada Kantor Biro Ekonomi dan Keuangan, perbaikan rumah kediaman Menteri Produksi dan pembangunan gedung BPK di Bogo  
28 Agustus 1961 dan 23 Maret 1962  
salinan  
1 sampul
- 1427 Surat Ketua Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri tentang Permohonan Kendaraan Bermotor, beserta lampiran  
28 Agustus 1961  
asli  
1 sampul
- 1428 Surat Kepala Biro I kepada Kepala Bagian Rumah Tangga pada Dewan Film Indonesia tentang pengiriman daftar-daftar inventaris, daftar gedung dan kendaraan bermotor periode 31 Desember 1963.  
31 Desember 1963  
asli  
1 sampul
- 1429 Surat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariswisata kepada Panitia Negara Urusan Kontrak-Kontrak Ekonomi Keuangan Antara RI dengan Luar Negeri tentang pembelian perlengkapan telepon Semarang dan Jogjakarta, beserta lampiran  
5 Januari 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 1430 Surat Keputusan Sekretaris Umum Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi tentang Ketentuan menjual kendaraan bermotor sedan milik KOTRAR kepada umum  
08 Februari 1966  
salinan  
3 lembar

### **C. Persidangan dan Rapat-rapat**

- 1434 Usul Mosi DPR RI tentang Tuntutan masuknya Irian Barat ke dalam wilayah RI, penghapusan Uni Indonesia-Belanda, peninjauan kembali hasil dari KME  
03 Januari 1951  
asli  
1 sampul

- 1435 Surat-surat Pengantar dari Kepala Urusan Arsip/Ekspedisi dan Penerbitan Sekretariat DPR kepada Penghubung dan Sekdjen Kementerian Kehakiman tentang penyampaian risalah rapat pleno terbuka ke 25 dan ke 26 Tahun 1952, beserta lampiran  
5 Mei 1952-9 Mei 1952  
asli  
1 sampul
- 1436 Risalah rapat pleno terbuka ke-38 DPR RI.  
26 Mei 1952  
fotokopi  
1 sampul
- 1437 Keputusan-keputusan rapat Kabinet Ali Sastroamidjojo  
15 Agustus 1953 - 11 November 1955  
asli  
1 sampul
- 1438 Risalah Rapat Panitia Koordinasi Transmigrasi tanggal 5 Desember 1953 yang dibuat oleh Ir. Sie Kwat Soen  
7 Desember 1953  
asli  
1 sampul
- 1439 Jadwal rapat DPR Tahun 1954 dan pemandangan umum DPR mengenai anggaran RI Tahun 1952 dan 1953.  
18 Januari 1954  
fotokopi  
1 sampul
- 1440 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai usul resolusi Hadjarati dkk tentang Pemberian persetujuan atas tindakan pemerintah mengenai pembatalan Uni Indonesia-Belanda.  
24 Februari 1956  
tembusan  
4 lembar
- 1441 Risalah Rapat Tertutup DPR tentang Laporan Seksi Pertahanan mengenai Penyelundupan.  
11 Agustus 1956  
asli  
1 sampul
- 1442 Undangan upacara penyempahan anggota Konstituante di Bandung  
09 Nopember 1956  
fotokopi  
6 lembar
- 1443 Naskah Keterangan Pemerintah tentang Usaha-usaha normalisasi keadaan negara diucapkan oleh Perdana Menetri Ir.H.Juanda dalam Rapat Pleno DPR  
04 September 1957  
asli

- 1 sampul
- 1444 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua DPR mengenai pertanyaan anggota DPR J.R. Koot tentang kewarganegaraan Sdr. E.F. Wens, disertai lampiran  
08 Nopember 1957  
tembusan  
1 sampul
- 1445 Rapat terbuka ke-140 dan ke -141 tentang Rancangan Anggaran Belanja Negara (RABN) Tahun 1957.  
9 Desember-10 Desember 1957  
asli  
1 sampul
- 1446 Risalah sementara rapat DPR mengenai Rancangan Anggaran Negara Tahun 1958  
15 Agustus 1958  
asli  
1 sampul
- 1447 Risalah rapat pembahasan rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Penerangan, dan Bagian I Pemerintahan Agung dan Badana-badan Pemerintah Tertinggi Tahun 1959.  
Januari 1959  
asli  
1 sampul
- 1448 Keterangan pemerintah mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 diucapkan oleh Perdana Menteri H. Juanda dalam Rapat Pleno DPR Tahun 1959.  
02 Maret 1959  
fotokopi  
1 sampul
- 1449 Notulen Sidang Pleno Panitia Perumahan Kabinet Perdana Menteri tanggal 13 Nopember 1959 yang dibuat oleh Sekretaris I Panitia Perumahan Kabinet Perdana Menteri, beserta lampiran.  
14 Nopember 1959  
asli  
1 sampul
- 1450 Undangan dan materi rapat Dewan Tenaga Atom antara lain Laporan Keuangan Lembaga Tenaga Atom dan Laporan Gubernur IAEA  
23 Desember 1959  
asli  
1 sampul
- 1451 Berkas mengenai jawaban pemerintah RI terhadap pertanyaan DPR mengenai RAB Dewan Asia Games Indonesia dan anggaran tambahan Asian Games, disertai undang-undangan rapat.  
Januari - 15 November 1960  
asli, fotokopi  
1 sampul

- 1452 Naskah jawaban pemerintah (Departemen Luar Negeri) kepada pertanyaan anggota DPR antara lain tentang dwi kewarganegaraan, Irian Barat dan hubungan dengan Persekutuan Tanah Melayu.
- 1960  
fotokopi  
6 lembar
- 1453 Jawaban atas pertanyaan anggota DPR dalam sidang DPR mengenai penerimaan resmi istana dan biaya perjalanan presiden
- 12 Januari 1960  
asli  
2 lembar
- 1454 Surat menyurat antara Kabag. Keuangan Kabinet Perdana Menteri dengan Kepala Biro Statistik dan Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur mengenai mengenai pengajuan pertanyaan dari anggota DPR terkait anggaran kegiatan Sensus Penduduk serta hasil kerja Badan Pengawas Kegiatan Aparatur
- 16 - 23 Januari 1960  
asli  
1 sampul
- 1455 Berkas mengenai pertanyaan-pertanyaan dan pemandangan umum anggota DPR pada Rapat Pleno Terbuka DPR tentang RUU Anggaran Belanja 1960
- 10 Desember 1959 - 18 Januari 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 1456 Surat Wakil Ketua Biro Pembangunan Masyarakat Desa kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri tentang jawaban pertanyaan anggota DPR mengenai pembelian kendaraan, beserta lampiran.
- 22 Januari 1960  
asli  
3 lembar
- 1457 Notulen-notulen rapat DPR-GR dan surat-surat antara lain mengenai susunan dan golongan serta badan perlengkapan dalam DPR-GR.
- 5 Maret - 22 Agustus 1960  
asli, salinan  
1 sampul
- 1458 Risalah Rapat Panitia Ad Hoc Kabinet untuk Asian Games di Ruang Menteri Departemen P.P dan K tanggal 4 Mei 1960.
- 7 Mei 1960  
asli  
1 sampul
- 1459 Undangan-undangan dan jadwal acara rapat DPR-GR
- 8 Agustus 1960 - 23 Maret 1964  
fotokopi  
1 sampul

- 1460 Risalah resmi DPR-GR RI Tahun sidang 1960 (25 Juni - 14 Agustus 1960).  
14 Agustus 1960  
asli  
1 sampul
- 1461 Surat-surat mengenai usaha-usaha persiapan untuk sidang MPRS di Bandung  
1-17 Oktober 1960  
asli  
1 sampul
- 1462 Laporan kesimpulan/keputusan-keputusan rapat Badan Pekerja O.C dengan urusan-urusan yang diundang mengenai persiapan Asian Games, beserta lampiran  
29 Desember 1960  
asli  
1 sampul
- 1463 Jawaban atas pertanyaan DPR pada sidang Pleno babak I mengenai bidang Kemanan/Pertahanan.  
1960  
fotokopi  
1 sampul
- 1464 Naskah jawaban dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas pertanyaan-pertanyaan anggota DPR antara lain terkait desentralisasi dan otonomi  
1960  
fotokopi  
1 sampul
- 1465 Surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden dan Para Menteri tentang undangan musyawarah ke-60 Inti Kabinet Kerja  
5 Januari 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1466 Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan amanat keuangan Presiden pada rapat pleno DPR-GR 1961 - 1964.  
30 Januari 1961 - 25 Juni 1963  
asli, fotokopi  
7 lembar
- 1467 Surat dari Ketua DPR-GR kepada Menteri dalam negeri dan otonomi tentang hasil Rapat Kerja dengan Komisi H DPR-GR  
24 April 1961  
salinan  
1 sampul
- 1468 Surat-surat Bagian Hukum Biro Ekonomi dan Keuangan mengenai perumusan hasil rapat pleno pengolahan progress report.

- 7 Oktober 1961-18 Juli 1962  
asli  
1 sampul
- 1469 Keputusan-keputusan Sidang Inti Kabinet Kerja No. 51-95 (Oktober 1960 - Februari 1962) oleh Sekretariat Dewan Menteri Bagian Musyawarah  
24 Mei 1962  
asli  
1 sampul
- 1470 Risalah Persidangan DPR-GR tentang Penjelasan tambahan pemerintah mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri  
22 Agustus 1962  
salinan  
1 sampul
- 1471 Naskah sambutan pemerintah atas pernyataan pendapat DPR-GR tentang persetujuan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat yang ditandatangani di NewYork tanggal 15 Agustus 1962 diucapkan oleh Menteri Utama Juanda dalam Rapat Pleno DPR-GR  
01 September 1962  
salinan  
5 lembar
- 1472 Naskah pidato Pimpinan DPR-GR dan sambutan Menteri Pertama dalam rangka pelantikan Panitia Pembantu Anggaran, beserta surat pengantar  
15 September 1962  
asli  
1 sampul
- 1473 Naskah keterangan pemerintah mengenai Malaysia yang diucapkan oleh Menteri Pertama Djuanda pada Rapat Paripurna Tertutup DPR-GR.  
18 Oktober 1963  
fotokopi  
17 lembar
- 1474 Laporan-laporan harian distribusi bahan-bahan musyawarah dalam masa sidang umum ke III MPRS RI Tahun 1964. nb.: tidak disertai hasil musyawarah  
13-15 April 1964  
asli  
1 sampul
- 1475 Risalah Sidang Dewan Pembangunan tentang pengesahan putusan rapat Dewan Pembangunan mengenai persoalan kredit dan implementasi pembiayaan/anggaran pembangunan Tahun 1964 .  
24 Juli 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 1476 Surat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerja kepada Wakil Perdana Menteri III tentang catatan ringkas Rapat Kerja Kabinet membahas soal upah, gaji, harga dan pajak, beserta lampiran.

- 27 Agustus 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 1477 Pertanyaan-pertanyaan Panitia Khusus DPR-GR mengenai Keterangan Pemerintah (Wakil Perdana Menteri I) tentang Situasi Politik Internasional dan Nasional Dewasa In  
15 Januari 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 1478 Surat-surat mengenai hasil rapat Panitia Negara Urusan Kontrak-Kontrak Ekonomi Keuangan Antara Republik Indonesia dengan Luar Negeri, No.24 - 28, 42  
15 Februari -19 Agustus 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 1479 Laporan Sidang Umum ke III MPRS tentang Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Untuk Mufakat.  
14 April 1965  
asli  
1 sampul
- 1480 Naskah keterangan Waperdam Bidang Lembaga-Lembaga Politik di Depan Sidang DPR-GR  
04 Mei 1966  
salinan  
11 lembar
- 1481 Naskah keterangan pemerintah tentang Kebijakan-stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi serta Risalah DPR-GR mengenai program Kabinet Ampera  
16 Agustus dan 3 November 1966  
salinan  
1 sampul
- 1482 Risalah sidang paripurna Kabinet Ampera mengenai perubahan laporan dan rencana kerja departemen-departemen dalam rangka penyusunan program kerja pemerintah Tahun 1967 (tahap rehabilitasi dan koordinasi).  
14 Oktober 1966-18 September 1967  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 1483 Berkas mengenai Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967, antara lain mengenai Pidato Laporan Pangkoptib tentang hubungan Soekarno dengan peristiwa G 30 S, pokok-pokok berita pers, hasil observasi dan lobbying serta analisa intelejen (beberapa cara mengatasi dualisme kekuasaan).  
4 Februari - 7 Maret 1967  
asli, konsep  
1 sampul



- 1484 Naskah Keterangan Pemerintah pada Sidang DPR-GR tentang Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera  
04 Maret 1967  
salinan  
1 sampul
- 1485 Laporan dan penjelasan Bidang Keuangan dalam Rapat Kabinet Paripurna Departemen Keuangan RI Tahun 1967.  
19 April 1967  
fotokopi  
1 sampul
- 1486 Laporan Ketua Presidium Kabinet Ampera pada Sidang Paripurna Kabinet Ampera tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Kabinet Ampera selanjutnya setelah Sidang Istimewa MPRS/1967 dan Rencana Pembangunan Selanjutnya  
19 April 1967  
fotokopi  
1 sampul
- 1487 Instruksi Presidium Kabinet No.26/U/IN/5/1967 tentang hasil - hasil Sidang Kabinet Ampera tanggal 19 April 1967 tentang realisasi pelaksanaan program departemen tahap rehabilitasi Triwulan II Tahun 1967.  
09 Mei 1967  
salinan  
1 sampul
- 1488 Laporan mengenai persetujuan antara Pimpinan DPR-GR, Panitia Khusus dan Pemerintah tentang pemilu.  
26 Juli 1967  
asli  
2 lembar
- 1489 Amanat Pengantar Nota Keuangan RAPBN Tahun 1968 oleh Presiden RI  
16 Oktober 1967  
salinan  
1 sampul
- 1490 Pidato Menteri Hankam atau Pangab Jenderal Soeharto pada Pembukaan Rapat Kerja Hankam Tahun 1967 di Jakarta.  
17 Nopember 1967  
salinan  
9 lembar
- 1491 Bahan dasar - dasar landasan kebijaksanaan Ketetapan MPRS Sidang Umum IV dalam Kebijaksanaan APBN Tahun 1967.  
1967  
fotokopi  
1 sampul

1492 Berkas penjelasan pemerintah (Menteri Dalam Negeri) dalam Sidang Pleno terbuka DPR-GI mengenai RUU tentang Kedudukan dan Hubungan Pemerintah dengan Pemerintahan di Daerah dan RUU tentang Daerah Swatantra

09 Mei 1968  
fotokopi  
1 sampul

1493 Naskah jawaban pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan tertulis Rapat Gabungan Komisi IV dan VI DPR-GR mengenai perbankan, devisa, perdagangan dsb

24 Juni 1968  
fotokopi  
5 lembar

1494 Risalah laporan Panitia Anggaran DPR-GR mengenai pembahasan RUU tentang perubahan dan tambahan atas APBN Tahun 1967 dan risalah pleno mengenai Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.

05 Juli 1968  
fotokopi  
1 sampul

1495 Surat dari Sub Panitia Siaran Kementerian Penerangan kepada semua kepala bagian DKN mengenai Upacara Peringatan 3 Tahun Merdeka di Jogjakarta

04 Agustus 1948  
salinan  
3 lembar

1496 Surat Direktur Lembaga Administrasi Negara kepada Kabinet Perdana Menteri No. tentang permohonan bahan-bahan untuk naskah Almanak Organisasi, beserta lampiran

11 Juli 1960  
asli  
1 sampul

#### **D. Penghubung Pemerintah**

##### **1. Lembaga Negara**

1497 Surat dari Direktur Kabinet Menteri Pertama kepada semua instansi dalam Badan-badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi mengenai penerbitan majalah oleh instansi-instansi pemerintah, beserta lampiran.

25 Juli 1962  
fotokopi  
2 lembar

1498 Memo dari Kepala Biro II Sekretariat Negara kepada Sekretaris Negara mengenai usulan kerja sama dalam lingkungan instansi/badan-badan di bawah pimpinan Kepala Negara.

12 Desember 1960  
asli  
2 lembar

- 1499 Siaran-siaran Pemerintah oleh Depertemen Penerangan antara lain mengenai dukungan terhadap perjuangan Rakyat Kalimantan Utara
- 4 Februari - 3 April 1963  
salinan  
1 lembar
- 1500 Resolusi-resolusi DPRD-GR Tulungagung antarlain tentang dukungan terhadap perbaikan nasib pekerja, pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dan penegerian Universitas Kahuripan.
- 08 Juli 1963  
tembusan  
4 lembar
- 1501 Resolusi-resolusi DPRD-GR DI Aceh antara lain tentang penetapan hari libur pada 1 Ramadhan dan 10 Muharram, dukungan terhadap Soekarno menjadi presiden seumur hidup dan pelaksanaan deklarasi ekonomi
- 22 - 28 Juni 1963  
asli  
1 sampul
- 1502 Surat-surat pernyataan dari DPRD-GR antara lain Aceh Timur, Jambi, Bogor, Bantul, Tasikmalaya, Minahasa, Ogan dan Komering Ulu tentang kutukan intervensi Amerika, harga kebutuhan bahan pokok, pemberian bantuan bagi keluarga pahlawan, penolakan rangkap jabatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD-GR, pemberantasan buta huruf, pengangkatan K.H. Zainal Mustofa sebagai Pahlawan Nasiona
- 15 April 1964 - 23 Juni 1965  
asli  
1 sampul
- 1503 Surat dari Ketua MPR kepada KOTI mengenai pernyataan dari delegasi MPR yang berada di RRT dan di Republik Rakyat Demokrasi Korea terkait situasi politik di Indonesia.
- 09 Oktober 1965  
tembusan  
11 lembar
- 1504 Surat dari Menteri/Sekretaris Presidium kepada para Menteri Kabinet Dwikora tentang statement kepada pers tentang segi-segi internasional dalam kebijaksanaan ekonom
- 07 April 1966  
asli  
1 sampul
- 1505 Surat-surat pernyataan dari DPRD-GR di beberapa daerah antara lain tentang dukungan terhadap Presiden Soeharto, pengangkatan Amir Machmud menjadi warga kota utama DKI Jakarta dan Dukungan keputusan Raker Komandi Musyawrah Pembangunan Wilayah Indonesia Timur.
- 3 Oktober 1968 - 5 November 1969  
salinan  
1 sampul

1506 Surat pernyataan DPRD-GR Kabupaten Ponorogo No.15/DPRD-GR /69 tentang desakan kepada pemerintah pusat untuk segera meninjau kembali P.G.P.S Tahun 1968 serta menyempurnakan segenap kelemahannya

01 Nopember 1968

tembusan

1 lembar

## 2. Masyarakat

1507 Daftar dan pernyataan sikap partai-partai dan organisasi-organisasi terhadap naskah persetujuan Indonesia-Belanda

1946

asli

1 sampul

1508 Surat-surat mengenai rencana usaha cepat dari bagian gerakan DPPB "Masjumi" dalam rangka memperkuat kabinet, rencana kampanye Front Demokrasi Rakyat, dan berita-berita Front Nasional.

1947-1948

salinan

1 sampul

1509 Surat pribadi dari S. Tjokrohadidjojo kepada Presiden mengenai kritikan terhadap pemerintahan daerah Kediri

28 Juli 1948

asli

8 lembar

1510 Berita dari Indonesische Pers En Radio dan Chinese Pers oleh Regerings Voorlichtings Dienst, Nb.: berbahasa Belanda.

18 Oktober 1948

fotokopi

8 lembar

1511 Surat dari Acting Sekretaris Negara kepada Perdana Menteri mengenai pernyataan-pernyataan masuk ke Republik Indonesia

06 April 1950

asli

6 lembar

1512 Statement Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor mengenai terbentuknya Kabinet Wilopo.

02 April 1952

asli

2 lembar

1513 Surat dari Sekretariat Sentral Biro Sobsi kepada Pengadilan Negeri Surabaya mengenai protes dan tuntutan terhadap Pengadilan Negeri Surabaya tentang dituntutnya DPP SBIM.

27 April 1953

tembusan

- 2 lembar
- 1514 Notulen Rapat Pemilihan Pengurus Pra Juwana Pusat di Selecta tanggal 27 Juli 1954 dibuat oleh Sekretaris Pra Juwana Pusat, beserta lampiran
- 11 Agustus 1954  
asli  
1 sampul
- 1515 Surat Panitia Aksi Perumahan Rakyat Palembang kepada Perdana Menteri tentang permohonan harga perumahan rakyat dapat ditinjau kembali, beserta lampiran
- 18 November 1954  
asli  
1 sampul
- 1516 Resolusi Pemimpin Sidang Konferensi Sumbawa Besar tentang penyelesaian tuntutan sawah adat di daerah Swapraja Sumbawa.
- 04 Desember 1954  
asli  
2 lembar
- 1517 Surat dari Sekretariat CC PKI kepada Perdana Menteri mengenai Pernyataan Sekretaris CC PKI yang berjudul "PKI melaksanakan putusan Panitia Pemilihan Indonesia (Peraturan PemerintahI)" terkait dengan pemasangan tanda gambar
- 09 Februari 1955  
asli  
2 lembar
- 1518 Pernyataan Konfrensi Besar Pemuda Demokrat Indonesia Dewan Cabang Klaten tentang dukungan terhadap hasil keputusan Konferensi Asia Afrika
- 30 Mei 1955  
asli  
1 lembar
- 1519 Surat Pernyataan dari Corps Demobilisan Indonesia Bagian Timur (CORDBIT) kepada Presiden RI tentang desakan untuk mengangkat 3 tokoh sebagai Gubernur Sulawesi, yaitu Andi Burhanuddin, Mohd. Saleh Lahade, Andi Pangerang
- 30 Nopember 1955  
asli  
2 lembar
- 1520 Surat-surat perjanjian dibawah tangan an.M.Sirlan Sutawijaja Ketua Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Serang dengan berbagai pihak mengenai peminjaman uang untuk pembibitan tanah.
- 18 September 1958  
asli  
1 sampul
- 1521 Surat dari Panitia Perbaikan Makam Dr. Cipto Mangunkusumo kepada tokoh-tokoh nasional/Daerah tentang permohonan biaya perbaikan fasilitas penunjang makan
- 20 Mei 1959  
asli  
1 lembar

- 1522 Surat dari Presidium Liga Demokrasi kepada Presiden Soekarno mengenai pendapat terkait kegagalan KTT, ancaman kaum komunis, dan usulan peninjauan kembali pelantikan DPR-GR.
- 25 Mei 1960  
asli  
6 lembar
- 1523 Laporan umum mengenai P3RI Daerah Jakarta Raya Selama Masa Jabatan 1958-1960
- 30 Maret 1961  
asli  
2 lembar
- 1524 Press release No.1 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia mengenai perumusan cara kerja partai dalam rangka penyelesaian Revolusi Indonesia berlandaskan Manipol - Usdek dan Resopim serta pembentukan dan pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Partai IP-KI
- 21 September 1962  
fotokopi  
3 lembar
- 1525 Surat dari Sekretaris Dewan Partai Murba kepada Menteri W.J.Rumambi tentang Putusan - putusan Pleno dari Dewan Partai Murba tanggal 22 - 25 Desember 1962
- 04 Januari 1963  
asli  
1 sampul
- 1526 Surat-surat pernyataan dukungan terhadap Pemerintah Soekarno, Manipol-Usdek dan Dwikora, Pembentukan Kabinet berporos nasakom, perbaikan ekonomi dari DPRD, organisasi masyarakat dan politik serta dukungan kerluarnya RI dari PBB
- 20 Januari 1963 - 20 Januari 1965  
asli  
1 sampul
- 1527 Surat pribadi dari Jan Charles Jacob Sahertian dari Medan kepada Dr. J. Leimena mengenai permohonan memperoleh Pekerjaan untuk memperbaiki nasit
- 17 Februari 1963  
asli  
4 lembar
- 1528 Surat dari F. Effendy mengenai kepada Pejabat Presiden RI Ir. H. Djuanda tentang masalah-masalah moneter dan investasi pembangunan negara
- 23 Mei 1963-10 Juni 1963  
asli  
3 lembar
- 1529 Pedoman Dasar Badan Musyawarah Angkatan '45
- Desember 1963  
salinan  
1 sampul

- 1530 Surat T.T Sangen dan R. Margono kepada Wakil Perdana Menteri Dr. Chairul Saleh tentang rencana pengumpulan emas di Kalimantan, disertai lampiran  
27 Juni 1964  
asli  
1 sampul
- 1531 Surat D. Suhardjono kepada Perdana Menteri tentang permohonan pinjaman modal kepada presiden untuk mengelola hasil tembakau di desa Sukarejo Kab. Jember, beserta lampiran.  
05 Nopember 1964  
asli  
4 lembar
- 1532 Surat-surat pribadi mengenai usulan dan ide untuk memperbaiki perekonomian  
27 Desember 1964 dan 1 Februari 1965  
asli  
1 sampul
- 1533 Surat-surat pribadi kepada Waperdam III, Chaerul Saleh antara lain mengenai permohonan bantuan dana.  
1964-1965  
asli  
1 sampul
- 1534 Surat dari Ketua PB HMI kepada Presiden mengenai laporan insiden dalam rapat umum di Jogjakarta dan Malang serta pernyataan kebulatan tekad ummat Islam Surabaya tentang HMI.  
09 Maret 1965  
asli  
1 sampul
- 1535 Instruksi Wakil Perdana Menteri III kepada para Pimpinan BPKPN mengenai bantuan kendaraan dalam rangka ulang Tahun ke 45 PKI dan biaya perayaan 1 Mei 1965  
3 dan 6 Mei 1965  
salinan  
5 lembar
- 1536 Berkas dari Kotrar mengenai organisasi Persatuan Buruh Kereta Api  
September - Oktober 1965  
asli  
1 sampul
- 1537 Berkas mengenai kecaman terhadap Gerakan 30 September dari organisasi-organisasi sosial dan politik di Indonesia  
4 Oktober - 27 Desember 1965  
asli  
1 sampul
- 1538 Surat-surat mengenai tuntutan Taks Force Ekonomi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dalam kebijaksanaan bidang sandang Tahun 1966

- 16 Juli-12 Agustus 1966  
asli  
1 sampul
- 1539 Surat dari DPP Partai IPKI tentang ketetapan Pancasila sebagai ideologi partai IPKI, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai IPKI  
01 Februari 1967  
asli  
1 sampul
- 1540 Surat tentang utusan M.Jusuf Banuali Tungkal Jambi untuk bertemu dengan Bapak Adam Malik.  
20 Maret 1967  
tembusan  
2 lembar
- 1541 Surat dari Pengurus Besar PGRI kepada Presiden mengenai usulan M.E. Subiadinata sebagai calon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
26 April 1967  
asli  
1 sampul
- 1542 Naskah sambutan Presiden RI pada sidang musyawarah PNI. (nb. Tidak lengkap)  
23 Juli 1967  
fotokopi  
1 sampul
- 1543 Surat-surat pernyataan dari DPRD-GR berbagai daerah tentang dukungan terhadap Irian Barat untuk bergabung dengan RI melalui Penentuan pendapat rakyat (Pepera)  
17 Juli - 27 Agustus 1969  
fotokopi  
1 sampul
- 3. Khusus**
- 1544 Peraturan-peraturan tentang Dewan Perancang Nasional, antara lain Undang-Undang No.80 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah No.1 dan No. 58 Tahun 1959 , Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1959, disertai Amanat Presiden Soekarno pada Sidang Pleno Pertama Dewan Perancang Nasional.  
23 Oktober 1958 - 9 Desember 1959  
salinan  
1 sampul
- 1545 Surat-surat dari Menteri Muda Urusan Veteran tentang Keanggotaan Veteran dalam MPRS  
10-16 Desember 1959  
asli  
4 lembar



- 1546 Surat dari Menteri Pertama kepada para menteri mengenai permohonan nama untuk menjadi calon anggota MPRS.  
20 Januari 1960  
asli  
2 lembar
- 1547 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Pertama mengenai Pengumuman Presiden RI tentang DPR-GR.  
31 Maret 1960  
asli  
1 sampul
- 1548 Surat dari Pimpinan DPR-GR kepada para anggota DPR-GR mengenai penyampaian Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No.1-8, antara lain tentang penetapan jumlah dan susunan komisi-komisi.  
24 Januari 1961  
tembusan  
1 sampul
- 1549 Surat dari Presiden kepada Panitia Pembina Jiwa Revolusi mengenai Penetapan bahan-bahan indoktrinasi.  
22 Februari 1961  
salinan  
1 lembar
- 1550 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai Salinan Surat dari Ketua MPR tentang Ketentuan Tata Urutan Perundang-undangan RI  
22 Juli 1961  
asli  
1 sampul
- 1551 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai Sambutan Badan Kerja Depernas terhadap Amanat Proklamasi PJM Presiden RI 17 Agustus 1961  
28 Agustus 1961  
asli  
1 sampul
- 1552 Surat Keputusan Menteri Pehubung DPR/MPR RI No.2/DPR/MPR/1962 tentang Penunjukan pimpinan Sekretariat dan Seksi-seksi serta pembagian tugasnya  
02 Januari 1962  
asli  
4 lembar
- 1553 Pengumuman Pengurus Besar Front Nasional No.2/Peng/PBFN/II/1962 tentang Hasil Keanggotaan Front Nasional dari Golongan Karya dan Golongan Politik  
30 Januari 1962  
asli  
2 lembar

- 1554 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai salinan surat Ketua DPR-GI tentang usulan DPR-GR sebagai penutup pembicaraan Rencana Anggaran Tambahan 1960 dan Pidato Menteri Keuangan pada Rapat Pleno DPR-GR  
02 Februari 1962  
asli  
1 sampul
- 1555 Rumusan Pimpinan DPR-GR mengenai peninjauan DPR-GR ke DKI Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta dan Jawa Timur  
18 Oktober 1962  
fotokopi  
7 lembar
- 1556 Sambutan Menteri/Sekjen Front Nasional pada Hari Sumpah Pemuda ke-34 (28 Oktober 1962) di Jakarta antara lain mengenai masalah Irian Barat  
30 Oktober 1962  
asli  
1 lembar
- 1557 Surat-surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus tentang pembentukan dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Pembantu Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi.  
22 Januari 1963  
salinan  
1 sampul
- 1558 Surat dari Sekjen Pengurus Besar Front Nasional kepada Sekretariat Penghubung MPR/DPR/DPA/DAPERNAS mengenai undangan pembukaan Sidang Bersama Front Nasional seluruh Indonesia  
25 Januari 1963  
asli  
2 lembar
- 1559 Surat-surat Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/DEPERNAS mengenai daftar nama untuk menghadiri upacara penutupan Ganefo I, penyerahan barang inventaris kantor, undangan kunjungan dari Parlemen Hungaria, undangan sidang MPRS dan permohonan sumbangan-sumbangan.  
7 Februari - 19 November 1963  
tembusan  
1 sampul
- 1560 Surat dari Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/Depernas kepada Menteri Sekretaris Negara mengenai ketentuan pegawai yang mengunjungi musyawarah MPRS di Bandung  
20 April 1963  
asli  
1 sampul
- 1561 Surat dari Dewan Pimpinan Sentral KBKI kepada Wampa/Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/DAPERNAS mengenai permohonan memberikan sambutan tertulis pada Sidang Paripurna Dewan Sentral KBKI  
26 April 1963  
asli

- 1 lembar
- 1562 Sumbangan pemikiran untuk *Nation Building* dan *Character Building* menuju Indonesia  
Jaya oleh team ALRI di MPRS
- 15 Mei 1963  
asli  
1 sampul
- 1563 Terbitan "WARTA-C.A.F.I antara lain mengenai keuangan dan Program Front Nasional.
- 12 Juni, 11 Juli 1963 dan 16 Desember 1965  
asli  
1 sampul
- 1564 Surat Menteri Pertama Bidang Khusus kepada Menteri Penghubung tentang penunjukan  
tugas *coaching* kepada kader inti.
- 26 Juni - 3 Juli 1963  
asli  
1 lembar
- 1565 Surat dari Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri penghubung  
DPR/MPR/DPA/DEPERNAS tentang Pembentukan Back-Up Office dari Development  
Project Consulting Service Indonesia
- 26 Agustus 1963  
tembusan  
2 lembar
- 1566 Surat dari Ketua APPI kepada Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/DEPERNAS mengenai  
permintaan sumbangan untuk Kongres Nasional ke III APPI 25-27 Oktober 1963.
- 13 Agustus 1963  
asli  
2 lembar
- 1567 Surat dari Menteri Penghubung Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata kepada Pimpinan  
Hotel Duta Indonesia mengenai akomodasi untuk Ketua DPR-GR selama rumahnya  
diperbaiki.
- 01 Oktober 1963  
tembusan  
1 lembar
- 1568 Surat dari Ketua Umum Yayasan kepada Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA mengenai  
pemberitahuan pembentukan Yayasan Kesejahteraan Pelajar Islam Nias di Medan.
- 19 Nopember 1963  
asli  
4 lembar

1569 Surat-surat dari Menteri Negara Penghubung Pemerintah dengan MPRS, DPR-GR, DPA antara lain mengenai ucapan belasingkawa, undangan rapat, kunjungan ke daerah, pergantian anggota DPR-GR, permohonan bantuan dana dan tenaga, serta pembahasan RUU.

1963 dan 1968  
asli  
1 sampul

1570 Surat Keputusan Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional No. 101/Kpts/PBFN/X/1964 tentang Tata Kerja dan Susunan Bagian-bagian dalam Sekretariat Pengurus Besar Front Nasional dan surat-surat mengenai kerja sama Front Nasional dengan Pemerintah.

14 Maret - 16 Oktober 1964  
asli, salinan  
8 lembar

1571 Surat dari Pimpinan DPR-GR kepada Wakil Perdana Menteri mengenai penyampaian salinan Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR tentang Pembentukan Panitia Kerja DPR-GR.

11 April 1964  
asli  
4 lembar

1572 Surat dari Menteri/Sekjen Front Nasional kepada semua pengurus daerah Front Nasional mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden No. 52/KOTI Tahun 1964 tentang Pengerahan daya dan kegiatan angkatan bersenjata serta alat negara lainnya untuk meningkatkan pelaksanaan Dwikora diseluruh wilayah Indonesia

14 - 16 September 1964  
salinan  
5 lembar

1573 Surat dari Sekjen Pengurus Besar Front Nasional kepada Pimpinan Partai Politik mengenai kampanye melaksanakan proyek-proyek pangan dan usaha menaikkan produksi pangan.

14 Oktober 1964  
tembusan  
7 lembar

1574 Pidato Ketua Periodik Pengurus Besar Font Nasional Dr. Chairul Saleh dalam Pertemuan dengan Menko/Menteri, Golongan Politik, Organaisasi Massa dan Golongan Karya di Bank Pembangunan Indonesia Jakarta mengenai program-program Front Nasional.

16 Oktober 1964  
asli  
5 lembar

1575 Laporan mengenai prinsip-prinsip perbaikan dan peningkatan Front Nasional

1965  
konsep  
2 lembar

1576 Surat dari Pimpinan DPR-GR kepada Wakil Perdana Menteri mengenai penyampaian salinan Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR tentang Penunjukan Pimpinan Komisi-Komisi DPR-GR.

11 Januari 1966  
asli  
3 lembar

1577 Daftar iktisar perbandingan kursi keanggotaan DPR-GR dan daftar rekapitulasi anggota DPR-GR golongan politik dan golongan karya.

01 Desember 1966  
asli  
1 sampul

1578 Surat Berita "South Vietnam News" No. 105 untuk J.M. Menteri Negara Hubungan antara Pemerintah dan MPRS, DPR-GR, DPA tentang Sidang Ke-17 Konferensi Paris mengenai Vietnam.

10 Juni 1969  
asli  
3 lembar

1579 Surat-surat dari Pimpinan DPR-GR antara lain tentang pembentukan tim kerja, laporan peninjauan ke daerah-daerah, hasil rapat kerja dan usulan pertanyaan ke pemerintah

Agustus - Desember 1969  
salinan  
1 sampul

#### **E. Pemberian Tanda Kehormatan**

1580 Surat Kepala Biro Urusan Keuangan Departemen Keuangan kepada Bank Indonesia tentang pemindahan pembukuan rekening Thesauri Negara ke rekening Dewan Tanda-tanda Kehormatan Sementara untuk pembuatan bintang styalencana, beserta lampiran.

24 Mei 1960  
asli  
1 sampul

1581 Surat dari Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/Depernas kepada Kepala Biro VI Setneg mengenai permohonan pengangkatan Ratu Zalecha sebagai pahlawan Wanita Indonesia dari Kalimantan Selatan.

09 Januari 1963  
asli, fotokopi, tembusan  
1 sampul

1582 Surat Direktur Pabrik Logam Nasional Cordesius kepada Kepala Staf KOTI Gabungan III tentang penawaran membuat tanda-tanda kehormatan (satya lancana), beserta lampiran.

16 Februari 1967  
asli  
1 sampul

#### **F. Analisis Urusan Pemerintahan**

##### **1. Sosial Politik**

##### **a. Otonomi Daerah**

- 1583 Laporan Komisaris Negara Mr.Pringgodigdo dan Mr. Lukman Hakim mengenai otonomi daerah di Sumatera.  
1 dan 12 Agustus 1958  
asli  
1 sampul
- 1584 Surat-surat mengenai pencatatan dan perhitungan penduduk di ibukota Jogjakarta  
4-15 Juli 1949  
asli  
1 sampul
- 1585 Surat dari Sekretaris Negara kepada Yusuf Soerjoprajitno mengenai surat terkait laporan keadaan di Lombok yang mendapat perhatian presiden  
19 November 1949  
pertinggal  
4 lembar
- 1586 Surat dari Kementerian Perdagangan/Perindustrian kepada Sekretariat Dewan Menteri mengenai peraturan tentang penggabungan daerah-daerah bagian kepada Republik Indonesia.  
20 Mei 1950  
asli  
1 sampul
- 1587 Resolusi-resolusi DPRDS beberapa daerah tentang tuntutan untuk segera menyerahkan hak-hak dan kewajiban ke daerah  
30 Oktober 1950 - 29 April 1951  
asli  
1 sampul
- 1588 Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. BPU/80/758 dan BPU/80/756 tentang perubahan kedudukan Kepala Daerah Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi dan Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan  
06 Maret 1951  
salinan  
6 lembar
- 1589 Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang Pajak-Jalan untuk onderafd Ambon, Saparua dan Ceram Barat dan Daerah Maluku Selatan  
24 Mei 1951  
asli  
1 lembar
- 1590 Berkas tentang rencana pembangunan di wilayah Kalimantan  
2 Juni 1952-22 Juni 1953  
fotokopi  
1 sampul
- 1591 Laporan mengenai Rencana 5 Tahun (atau rencana 1957 - 1958 ) daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan  
1957

- asli  
4 lembar
- 1592 Surat Keputusan Residen Semarang tentang perubahan pada Panitia Pembelian Tanah untuk tiap-tiap kabupaten dan kotapraja dalam Karesidenan Semarang
- 03 Februari 1959  
salinan  
2 lembar
- 1593 Surat dari Gubernur Kalimantan Barat kepada semua Bupati/Walikota di Kalimantan Barat mengenai pelaksanaan surat keputusan DPRD Ketapang untuk dapat efisien dalam pembangunan sejumlah proyek
- 11 Agustus 1959  
tembusan  
1 lembar
- 1594 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai Rancangan Penetapan Presiden tentang Wakil Kepala Daerah Tingkat I
- 28 Januari 1960  
asli  
3 lembar
- 1595 Surat dari Sekretaris Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah kepada Semua Kepala Daerah mengenai Peraturan Presiden No.5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Provinsi Administratif Sulawesi Utara dan Provinsi Administratif Sulawesi Selatan Tahun 1960.
- 07 April 1960  
tembusan  
3 lembar
- 1596 Petikan Daftar Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapraja Medan tentang Penetapan pemakaian sebidang tanah Kotapraja Medan oleh Harun Arrasyid, Alisati Nasution, dkk..
- 24 Agustus 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 1597 Laporan Panitia Nasional Pusat untuk Gerakan Kebersihan terhadap penilaian beberapa daerah.
- 15 Oktober 1960  
salinan  
1 sampul
- 1598 Surat dari Walikota Madiun kepada Ketua DPRD Kotapraja Madiun mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kotapraja Madiun tentang Pemungutan dan Penagihan Pajak Kendaraan.
- 31 Oktober 1960  
fotokopi  
1 sampul

- 1599 Surat Penetapan Presiden RI No.2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya.
- 28 Agustus 1961  
salinan  
3 lembar
- 1600 Surat-surat tentang pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah di beberapa daerah seperti Jakarta, Maluku, Aceh, dll.
- 27 Oktober 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1601 Surat dari Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi kepada Menteri/Panglima Angkatan Laut dan seterusnya mengenai daerah Aceh dan hukum syariat agama Islam
- 27 September 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1602 Surat dari Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Maluku kepada Presiden mengenai Rencana Pembangunan Daerah Maluku
- 21 Nopember 1962  
salinan  
5 lembar
- 1603 Surat Keputusan Gubernur NTT tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah NTT.
- 01 Mei 1963  
salinan  
2 lembar
- 1604 Surat dari Bupati Kepala Daerah Minahasa mengenai susunan/keanggotaan Panitia Landreform tingkat Kecamatan Tondano Daerah Tingkat II Minahasa
- 08 Agustus 1963  
asli  
1 lembar
- 1605 Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Raya tentang perpanjangan peraturan-peraturan mengenai penyakit anjing gila, khusus daerah Jakarta Raya
- 13 Agustus 1963  
salinan  
1 sampul
- 1606 Penetapan Presiden RI No.14 1963 tentang Kebijakanaksanaan Pembangunan Provinsi Irian Barat.
- 15 Nopember 1963  
salinan  
2 lembar
- 1607 Laporan mengenai Pelaksanaan Crash-Program Ekonomi Perjuangan Daswati I Maluku



1963  
fotokopi  
1 sampul

- 1608 Berkas mengenai Konferensi Catur Tunggal Seluruh Indonesia membahas masalah kekurangan pangan di berbagai daerah dan progress report proyek-proyek pembangunan (pidato-pidato menteri, laporan Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur)

20 Januari - 10 Agustus 1964  
asli, fotokopi  
1 sampul

- 1609 Surat dari Kepala Daerah DI Jogjakarta kepada Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan mengenai permohonan penetapan Susunan Badan Produksi Bahan Makanan dan Bahan Ekspor Pertanian Daerah Tingkat I. DI Jogjakarta.

1 April 1964  
asli  
2 lembar

- 1610 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat Bagian Pemerintahan tentang Pembagian 3 Wilayah Kecamatan (Ketungau Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah

1 - 7 Agustus 1964  
salinan  
1 sampul

- 1611 Memorandum dari Bagian Penilaian/Penelitian kepada Kepala Biro II tentang Anggaran Belanja Tambahan untuk Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

03 Agustus 1964  
asli  
1 lembar

- 1612 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang pembentukan Panitia Peneliti Kekayaan Yayasan Badan Pembeli Padi Daerah Tk. I Sumatera Utara

02 September 1964  
salinan  
3 lembar

- 1613 Surat-surat Keputusan Gubernur kepala daerah Kalimantan Tengah tentang Pemisahan dan Pembentukan wilayah Kecamatan dalam Daerah Tingkat II Barito Utara, Barito Selatan, Katingan , Kahajan Hulu

1 Oktober 1964 - 1 Mei 1965  
salinan  
1 sampul

- 1614 Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perusahaan negara dan proyek pemerintah (proyek Ekonomi/pembangunan) yang dapat diserahkan kepada daerah/koperasi/swasta.

11 Desember 1964  
tembusan

- 1 lembar
- 1615 Buku berjudul Pembangunan Irian Barat dalam Hubungan Pembangunan Nasional Tahun 1964 terbitan Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat
- 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 1616 Surat dari Presiden kepada Ketua DPR-GR mengenai pengesahan Peraturan Daerah Tk. II Jombang tentang pemungutan pajak anjing.
- 09 Februari 1965  
pertinggal  
6 lembar
- 1617 Intruksi Perdana Menteri RI No.6/B/Instr/1965 tentang Pedoman Pokok Pelaksanaan Musyawarah Panca Tunggal Daerah Irian Barat
- 15 Februari 1965  
salinan  
3 lembar
- 1618 Surat dari Gubernur DKI Jakarta kepada Menteri Urusan Veteran mengenai penggantian nama Jalan Segara menjadi Jalan Veteran
- 23 Maret 1965  
salinan  
1 lembar
- 1619 Surat dari Gubernur Lampung kepada Waperdam I mengenai risalah dasar pembangunan Lampung.
- 30 Maret 1965  
asli  
1 sampul
- 1620 Surat-surat Keputusan DPRD-GR Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Kepegawaian, Pembentukan Badan Pembina Pendidikan dalam Hukum NTT, UU Perkawinan.
- 19 Juni 1965  
salinan  
7 lembar
- 1621 Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotapradja Bogor tentang Pembentukan Sub Panitia Pembantu Pelaksana Perselisihan Sumbangan Izin Usaha Daerah Kotapradja Bogor.
- 13 Juli-11 November 1965  
asli  
2 lembar
- 1622 Surat-surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tentang pengangkatan staf Operasi Pembangunan dan Rehabilitasi Daerah Sulawesi Tengah (SOPREDA).
- 23 Juli - 20 Agustus 1965

tenbusan  
6 lembar

- 1623 Telegram tentang pengalihan fungsi beberapa gedung/bangunan di Sigli dan Pidie, Aceh berkaitan dengan jalannya revolusi dan ampera di Aceh Tahun 1965  
26 Juli 1965  
asli  
2 lembar
- 1624 Berkas Pelaksanaan Pertemuan Segitiga Bappenas-Baperdep-Bakopda tanggal 8-20 September 1965 dalam rangka penyusunan Rencana Ekonomi Perjuangan berdasarkan Rencana Pola Pembangunan Daerah  
07 Agustus - 20 September 1965  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 1625 Surat-surat Pengumuman Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah Bali tentang penguasaan senjata api, pelaksanaan jam malam dan menjaga ketertiban pasca Gerakan 30 September.  
03 Nopember 1965  
salinan  
6 lembar
- 1626 Keputusan Bupati Kepala Daerah Bangkalan Tentang Pembentukan Panitia Pengairan Daerah Tingkat II Bangkalan  
16 Nopember 1965  
salinan  
1 lembar
- 1627 Surat putusan DPRD-GR Kotapraja Bandung tentang Pemberian nama Jalan Pahlawan kepada jalan baru yang menghubungkan Taman Pahlawan Cikutra Bandung dengan pusat kota.  
20 November 1965  
salinan  
3 lembar
- 1628 Pernyataan bersama Partai Politik Daerah Tingkat II Kep. Sangihe-Talaud tentang permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik Sdr. Majoor Inf. Harry Soetojo menjadi Bupati Kep. Sangihe Talaud.  
09 Desember 1965  
asli  
2 lembar
- 1629 Laporan dari Komando Antar Daerah Pertahanan Sumatera Koordinasi Operasi Harapan tentang rencana pembangunan Sumatera atau yang disebut Operasi Harapan (Plan Mokoginta).  
06 Juli 1966  
asli  
1 sampul

- 1630 Pernyataan Kebulatan Tekad dari Kepala-Kepala Suku/Adat dari Provinsi Irian Barat untuk mendapat otonomi yang luas dari Pemerintah RI pada Tahun 1969  
20 Nopember 1968  
fotokopi  
9 lembar
- 1631 Petisi DPRD-GR Kabupaten Kepulauan Riau tentang penetapan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau kembali menjadi daerah diluar pabean Indonesia  
07 Juli 1969  
salinan  
1 lembar
- 1632 Resolusi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan No.2/DPRD/Res/1969 tentang Proyek (Pengembangan Wilayah) Sungai Barito  
05 Agustus 1969  
asli  
2 lembar
- 1633 Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pelaporan Perkembangan Fisik dan Keuangan atas Proyek Pelita Se-Provinsi Sulawesi Utara  
04 September 1969  
salinan  
1 lembar
- 1634 Laporan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Presiden RI di Samarinda.  
22 Januari 1973  
asli  
1 sampul
- b. Kehakiman**
- 1635 Surat edaran Kejaksaan Agung kepada semua Gubernur tentang larangan menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia di muka umum  
Juli 1953  
tembusan  
1 lembar
- 1636 Surat dari Menteri Kehakiman kepada semua gubernur mengenai Wakil notaris sebagai Vendumeester dan sumpah wakil notaris serta notaris pengganti  
15 September 1955  
fotokopi  
2 lembar
- 1637 Risalah pleno terbuka ke-118 tentang pengangkatan calon hakim anggota MA  
18 November 1957  
asli  
1 sampul

1638 Surat Menteri Muda Kehakiman kepada Mahkamah Agung, Semua Pengadilan Tinggi tentang penetapan sisa berjenis-jenis uang yang berada dalam kas bendaharawan berkaitan dengan penurunan nilai uang kertas Rp. 500,- dan Rp.1000,-, beserta lampiran.

14 Desember 1959

asli

1 sampul

1639 Surat-surat tentang peninjauan mengenai penilaian jumlah-jumlah yang diancamkan sebagai hukuman denda dalam ketentuan pidana diluar KUHP yang diundangkan sesudah tanggal 17 Agustus 1945.

7 April 1960 - 28 Januari 1964

asli

1 sampul

1640 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai penyampaian Surat Staf Penguasa Perang Tertinggi tentang Pemandangan Pemberantasan Korupsi

25 Mei 1960

asli

1 sampul

1641 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai Pemandangan Departemen Kehakiman atas Rencana Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun 1961 - 1969 khusus dalam bidang Hukum

10 Oktober 1960

asli

5 lembar

1642 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai laporan hasil kerja sama antara Departemen Kehakiman dan Departemen Perindustrian Rakyat dalam rangka tugas badan perencanaan rehabilitasi para narapidana Tahun 1961.

30 Maret 1961

asli

1 sampul

1643 Surat kawat dari ST.Noija di Makasar kepada Menteri Dalam Negeri tentang permohonan penyelesaian kasus penganiayaan terhadap dirinya

10 Februari 1964

asli

2 lembar

1644 Surat-surat Penetapan Presiden RI tentang Hukum Peradilan

27 Januari - 15 Maret 1965

salinan

1 sampul

1645 Surat dari Sekretaris Presidium Kabinet Ampera kepada Menteri Kehakiman mengenai permohonan peninjauan keadilan an.F.Talahutu pegawai Direktorat Pemasarakatar

08 Maret 1967

pertinggal

- 6 lembar
- 1646 Rancangan Anggaran Dasar Partai Muslimin Indonesia
- tt  
konsep  
1 sampul
- 1647 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Program Perjuangan Partai-partai Politik/Golongan Karya yang Ikut Pemilihan Umum 1971 yang dihimpun oleh Lembaga Pemilihan Umum.
- tt  
fotokopi  
1 sampul
- c. Keagamaan**
- 1648 Maklumat menteri Agama RIS tentang Hari raya Katolik
- 07 Juni 1950  
salinan  
1 lembar
- 1649 Surat-surat Keputusan Menteri Agama antara lain tentang Status Hukum Masjid Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak, Pembentukan Panitia Pendirian Sekolah Islam dan badan keagamaan, Penyelenggaraan Haji serta Kepegawaiar
- 13 Agustus 1959 - 28 Mei 1962  
salinan  
1 sampul
- 1650 Surat-surat mengenai urusan haji antara lain pembukaan kantor urusan haji dan dokter di Mekkah.
- 20 Agustus - 24 Desember 1959  
tembusan  
1 sampul
- 1651 Surat dari Menteri Muda Penghubung Kabinet/Alim Ulama kepada Menteri Muda Agama mengenai laporan pelanggaran memeluk agama Budha Djawi Wisni
- 06 Oktober 1959  
asli  
2 lembar
- 1652 Surat Edaran Menteri Agama tentang Perkawinan yang Sah dan syarat-syarat sebagai seorang calon guru agama tetap.
- 3 dan 19 Maret 1960  
asli  
2 lembar
- 1653 Teks dari Departemen Agama untuk dibacakan dalam peringatan Isra' Miradj dengan judul "Tuntunan Isra' Miradj Nabi Muhammad bagi Pelaksanaan Usdek-Manipol"
- 30 Desember 1960  
kopi  
2 lembar

- 1654 Surat dari Ketua Panitia Penyelenggara Pembentukan Badan Kerja-Sama Gereja Aliran Pantakosta seluruh Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri untuk dapat hadir dalam pembukaan konferensi nasional tersebut
- 06 April 1964  
asli  
2 lembar
- 1655 Surat pemberitahuan mengenai alamat *Organizing Committee Africa Asia Islamic Conference* .
- 07 Oktober 1964  
salinan  
1 lembar
- 1656 Keputusan Bersama Menteri Urusan Haji Dan Menteri dalam Negeri No.I Tahun 1965 tentang Koordinasi Urusan Haji di Daerah
- 30 Juli 1965  
asli  
1 lembar
- 1657 Naskah sambutan Ketua Presidium Kabinet Ampera pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di rumah Menteri Utama K.H.Idham Cholic
- 08 Juni 1967  
asli  
6 lembar
- 1658 Rosulasi DPRD-GR Kabupaten Pasuruan tentang desakan kepada pemerintah untuk membatalkan rencana pencabutan subsidi haji
- 26 Maret 1969  
asli  
1 lembar
- 1659 Pedoman dari Kementerian Sosial mengenai pemberian subsidi bagi orang, badan-badan dan lembaga yang menyelenggarakan usaha -usaha sosial partikelir
- 07 Juli 1951  
fotokopi  
5 lembar
- d. Bantuan Sosial**
- 1660 Surat dari Kepala Jawatan Pekerjaan Sosial kepada Kepala Biro Keamanan mengenai bantuan biaya bagi korban Permesta.
- 20 April 1960  
tembusan  
1 lembar
- 1661 Surat-surat mengenai bantuan bahan makanan bagi pengungsi dari Kalimantan Utara dan laporan bencana Banjir di Kalimantan Barat
- 29-30 Mei 1963  
asli  
6 lembar
- 1662 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.89/MP/1963 tentang tidak berlakunya lagi Instruksi Ketua Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam Gunung Agung tanggal 18 Mei 1963 No.1/Instruksi/Peraturan Pemerintah PBA/1963.

- 08 Agustus 1963  
salinan  
2 lembar
- 1663 Surat dari Menteri Utama kepada Wakil Menteri Peratam Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai status Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam
- 02 September 1963  
salinan  
1 lembar
- 1664 Buku "penyuluhan sosial" dari Departemen Sosial RI
- Desember 1963  
asli  
1 sampul
- 1665 Surat-surat permohonan bantuan dana kegiatan sosial dan kesejahteraan yang ditujukan kepada Sekretariat Negara.
- 14 Januari - 8 Juli 1964  
asli  
1 sampul
- e. Kesehatan**
- 1666 Laporan pelaksanaan tugas-tugas Departemen Sosial dalam tahap rehabilitasi (Januari-Juni 1967) dibacakan oleh Menteri Sosial dalam Sidang Paripurna Kabinet Ampera
- 11 Juli 1967  
asli  
1 sampul
- 1667 Surat-surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang perawatan di dalam rumah sakit negara bagi orang-orang sakit jiwa dan rohani
- 4 Juli 1951 dan 23 Januari 1952  
salinan  
1 sampul
- 1668 Surat dari Kepala Planning Board Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan mengenai rencana usaha kesejahteraan ibu dan anak
- 03 April 1954  
tembusan  
8 lembar
- 1669 Surat dari Menteri Muda Kesehatan kepada Menteri Pertama mengenai campur tangan penguasa perang daerah Maluku, Irian Barat dalam kesehatan departemen
- 17 Oktober 1959  
asli  
1 sampul
- 1670 Surat Edaran dari Menteri Muda Kesehatan tentang laporan bulanan pelabuhan atau daerah di Indonesia dan luar Indonesia yang terjangkiti penyakit menula
- 01 Desember 1959  
fotokopi  
1 lembar



- 1671 Surat Keputusan Menteri Muda Kesehatan No. E.K.1240/2. tentang keputusan bahwa tanggal 30 November 1959 Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dinyatakan terjangkiti penyakit cacar.
- 02 Desember 1959  
salinan  
1 lembar
- 1672 Surat dari Menteri Kesehatan kepada semua Departemen mengenai pengiriman Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.62983/Pend. tentang Peraturan Pendidikan dan Ujian Asisten Apoteker.
- 31 Agustus 1960  
asli  
7 lembar
- 1673 Surat Edaran Departemen Kesehatan RI tentang Pelabuhan-pelabuhan dan daerah Indonesia maupun di luar Indonesia yang pada tanggal 1 September 1963 Indonesia ditetapkan terjangkit penyakit menular
- 12 Agustus 1963  
fotokopi  
5 lembar
- 1674 Surat Kepala Bagian Teknik Umum kepada Pemimpin Lembaga Pusat Penyelidikan Pemberantasan Penyakit Kelamin tentang pengiriman progress report proyek pembangunan "Non Selfliquidating Project" Departemen Kesehatan
- 27 Juni 1964  
asli  
1 lembar
- 1675 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penetapan tanggal 12 Nopember sebagai Hari Kesehatan Nasional dan Pembentukan Badan Perencanaan dan Penelitian Departemen Kesehatan (BAPERDEPKES)
- 30 Juni dan 30 Desember 1964  
salinan  
5 lembar
- 1676 Surat dari kepala Rumah Sakit Jiwa Medan kepada Bank Pembangunan Indonesia tentang Physical dan Financial Progress Report
- 18 Agustus 1964  
asli  
5 lembar
- 1677 Daftar mengenai rencana alat-alat dan obat-obat kimia untuk laboratorium kimia analitis umum non radioaktif dan radioaktif oleh Oey Giok Lian
- 19 Januari - 20 Januari 1966  
asli  
1 sampul

**f. Pendidikan dan Kebudayaan**

- 1678 Anggaran dasar Yayasan Akademi Teknik Nasional Tahun 1952 dan rencana pemberitahuan dalam / tambahan lembaran negara RI tentang Akademi Teknik Nasional

- 1952 dan 1957  
asli  
1 sampul
- 1679 Surat Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Dewan Menteri mengenai  
Pendirian Universitas Hasanuddin Makasar  
9 Agustus 1956  
asli  
5 lembar
- 1680 Surat-surat mengenai Panitia Pembentukan, Panitia Kenaikan Tingkat, Pidato Menteri  
Pertama pada upacara pemberian ijazah, rencana Pelayaran, dan Buku Saku Akademi Ilmu  
Statistik.  
Oktober 1957 - 19 Oktober 1963  
asli  
1 sampul
- 1681 Surat edaran Pemimpin Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas (KPAA) dan Surat  
Keputusan Menteri PP dan K mengenai Peraturan KPAA  
9 Agustus dan 1 Oktober 1958  
salinan  
2 lembar
- 1682 Laporan mengenai pendidikan kejujuran oleh Seksi Planning, Angket dan Hubungan Luar,  
Dep. PP dan K.  
1959  
fotokopi  
1 sampul
- 1683 Surat-surat mengenai pembentukan Panitia Ujian Masuk dan Penghabisan pada sekolah  
lanjutan.  
19 September 1959  
asli  
1 sampul
- 1684 Peraturan Peperti No.3 Tahun 1960 tentang Pembatasan terhadap Percetakan, Penerbitan,  
Pengumuman, Penyampaian, Penyebaran, Perdagangan dan atau Penempatan Surat Kabar  
atau Majalah yang Menggunakan Huruf Latin, Arab dan huruf daerah Indonesia.  
27 Mei 1960  
salinan  
2 lembar
- 1685 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI tentang Peraturan  
Kursus Analis pada Institut Teknologi  
02 Agustus 1960  
salinan  
4 lembar

- 1686 Surat-surat tentang perguruan tinggi, a.l: persetujuan pengangkatan visiting Prof. Dr. John Maurice McKain ke Univ. Airlangga, izin kuliah Health Physics Dr. R.E. Alexander mengajar di Univ. Gajahmada, berakhirnya masa ikatan dinas Dr. Moh Halim Khan sebagai guru besar pada Fak. Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan Mr. C.G. New di Univ. Gajah Mada sebagai Lektor, Surat-surat pertanggungangan Jawab dalam rangka Counterpart Program.
- 30 September 1960 - 28 Oktober 1961  
asli  
1 sampul
- 1687 Surat dari Menteri Pertama kepada para Menteri mengenai perintah kepada mahasiswa atau pelajar di Nderland untuk segera keluar dari Nderland akibat dari pemutusan hubungan diplomatik.
- 13 Oktober 1960  
asli  
6 lembar
- 1688 Surat-surat undangan dari Sekretaris Fakultas Ekonomi UI kepada Biro Ekonomi untuk menghadiri ceramah dan rapat di UI
- 7-11 November 1960  
asli  
7 lembar
- 1689 Surat-surat Keputusan Menteri P,PdanK antara lain tentang pembentukan Panitia Persiapan Jurusan Publisistik, Pusat Latihan Kepemudaan, 4 fakultas di UI dan kantor inpeksi pengajaran di beberapa daerah.
- 2 - 28 Desember 1960  
salinan  
7 lembar
- 1690 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No. 578/M.P./1960 tentang pendirian Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara
- 24 Desember 1960  
salinan  
4 lembar
- 1691 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai persetujuan kerja sama kebudayaan RI dengan Republik Demokrasi Vietnam
- 20 April 1961  
asli  
6 lembar
- 1692 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai naskah persetujuan kebudayaan antara RI dan Republik Irak pada 5 April 1960
- 18 Mei 1961  
salinan  
7 lembar
- 1693 Naskah Persetujuan Kebudayaan dan Perjanjian persahabatan antara RI dengan Iraq dan Republik Rakyat Tiongkok.
- 18 Mei dan 6 Juni 1961  
salinan  
1 sampul

- 1694 Surat Keputusan Kepala Jawatan Pendidikan Departemen Pertanian tentang Pendirian Akademi Usaha Perikanan di Jakarta  
30 Nopember 1961  
salinan  
1 lembar
- 1695 Surat-surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI No. 1-3, 10, 14 antara lain tentang penghapusan bagian bahasa Jawatan Kebudayaan dan Penyerahan Museum dari Lembaga Kebudayaan Indonesia  
3 Januari - 10 Februari 1962  
salinan  
6 lembar
- 1696 Surat-surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan antara lain tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri di Malang, Pendirian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UGM  
22 Januari - 26 November 1962  
salinan  
1 sampul
- 1697 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai Memorandum Pembahasan tentang Pembaharuan ejaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu  
24 Januari 1962  
asli  
8 lembar
- 1698 Surat dari Kepala Bagian Mahasiswa ITB kepada Menteri Penghubung Kabinet DPR-MPR mengenai pengiriman daftar lulusan sarjana ITB Semester I Tahun 1961/1962  
30 April 1962  
asli  
4 lembar
- 1699 Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.28/S.K/1962 tentang Susunan Panitia Colloquium Doctum untuk penerimaan mahasiswa Akademi Penerangan Angkatan ke IV Tahun 1962/1963.  
12 September 1962  
salinan  
1 lembar
- 1700 Surat dari Pimpinan DPR-GR kepada Wampa Kesejahteraan Rakyat mengenai permintaan penjelasan terhadap perpeloncoaan yang meminta korban di Fakultas Kedokteran Universita Padjajaran.  
22 Oktober 1962  
tembusan  
2 lembar
- 1701 Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional II di Jogjakarta, 22-29 Oktober 1962  
29 Oktober 1962  
fotokopi  
6 lembar

- 1702 Surat dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan kepada para Menteri tentang Penyelenggaraan perguruan tinggi kedinasan  
17 Nopember 1962  
asli  
1 lembar
- 1703 Surat dari Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengenai laporan Rapat Kerja dari Team Koordinator P.D dan K tentang pelajar-pelajar Irian Barat  
15 Juni 1963  
asli  
3 lembar
- 1704 Pegumuman Pemerintah oleh Menteri Penerangan mengenai hasil musyawarah kabinet tentang pemberian bantuan kepada mahasiswa  
15 Juni 1963  
fotokopi  
1 lembar
- 1705 Surat Direktur Yayasan Lektur kepada Menteri Pertama tentang penyampaian risalah mengenai masalah kekurangan buku, beserta lampiran  
4 Juli 1963  
asli  
1 sampul
- 1706 Surat Keputusan DPRD-GR Pekalongan tentang desakan kepada Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan agar menghapus buku Pelayaran yang berbau Kolonial dan diganti dengan buku - buka dengan yang sesuai dengan dasar dan haluan Negara RI.  
09 Oktober 1963  
salinan  
2 lembar
- 1707 Surat dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Waperdam III mengenai kerjasama dengan luar negeri antara lain dengan The Ford Foundation, Unesco, Unicef, Swedia dan Rumania.  
17 Februari 1964  
asli  
1 sampul
- 1708 Surat dari Pimpinan Yayasan Studio Film Medan kepada Wakil Perdana Menteri III mengenai permohonan pembelian kendaraan untuk mendukung pembuatan film dokumenter epos perjuangan rakyat Sumatera Utara.  
31 Maret 1964  
asli  
1 sampul
- 1709 Surat dari Kepala Jawatan PP dan K DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta mengenai *progress report* Jawatan PP dan K, daftar pembangunan gedung sekolah selama 1961-1964 dan statistik SD pada Agustus 1964.  
17 November 1964  
tembusan

7 lembar

- 1710 Laporan hasil perjalanan ke Republik Demokrasi Jerman dalam rangka pembangunan Planetarium Jakarta.  
12 Maret dan 10 Juni 1965  
asli  
8 lembar
- 1711 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI No. 38/1965 tentang Peraturan Dasar Akademi Pendidikan Teknologi Negeri  
31 Maret 1965  
salinan  
10 lembar
- 1712 Berkas surat-surat pengangkatan bapak Dr. Chairul Saleh Menko pembangunan RI menjadi Ketua Kehormatan Dewan Kurator Institut Teknologi Sumatera (ITS) Medar  
7 Januari 1966  
asli  
1 sampul
- 1713 Surat dari Presiden RI kepada Ketua DPR-GR mengenai pengesahan persetujuan kerjasama kebudayaan antar RI dan Kerajaan Nederland  
21 September 1968  
salinan  
8 lembar

**g. Olahraga**

- 1714 Surat-surat mengenai penyelenggaraan Pekan Olahraga antar Departemen (PORAK) dan beberapa ajang olahraga antar pegawai negeri lainnya.  
26 Agustus 1959 - 27 April 1965  
asli  
1 sampul
- 1715 Surat Biro III Lapangan/Bangunan Dewan Asian Games Indonesia kepada Ketua Dewan Asian Games Indonesia tentang penyampaian laporan ke-12 bulan Mei 1960, beserta lampiran.  
15 Juni - 6 Juli 1960  
asli  
1 sampul
- 1716 Surat-surat mengenai persiapan-persiapan Asian Games IV antara lain permohonan memperbaiki peraturan dan fasilitas bagi pengunjung, peralatan latihan, akomodasi, perubahan organisasi DAGI, kontrak proyek telekomunikasi  
16 Juli - 17 November 1960  
asli  
1 sampul
- 1717 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.115/M.P/1962 tentang pembentukan badan pembantu Wakil Menteri Pertama untuk mengawasi persiapan dan penyelenggaraan Asian Games IV.  
05 September 1962

salinan  
2 lembar

1718 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.123 dan 133/M.P./1962 tentang perubahan nama Pusat Olah Raga Bung Karno menjadi Gelora Bung Karno dan penunjukan anggota Team Pengamanan dan Pengawasan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno dan International Political Venues

15 September, 13 Oktober 1962 dan 29 Oktober 1965  
salinan  
5 lembar

1719 Surat dari Sekretaris Komite Nasional Ganefo kepada Menteri Pertama mengenai *Progress Report II* persiapan Ganefo I.

17 Juli 1963  
asli  
1 sampul

1720 Naskah sambutan Ketua Presidium Kabinet Ampera dalam pembukaan Pekan Olah Raga dan Kesenian Mahasiswa Universitas "Tjokroaminoto" seluruh Indonesia di Tegal Jawa Tengah.

25 Oktober 1966  
asli  
3 lembar

1721 Resolusi Ketua DPRD Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan PON IX Tahun 1977 di Banjarmasin Kalimantan Selatan

23 September 1969  
asli  
1 lembar

## **2. Ekonomi dan Keuangan Negara**

### **a. Produksi**

#### **1) Pertanian/Agraria**

1722 Surat-surat tentang Pembebasan Perusahaan Perkebunan yang bernama "Marihat Sumatra Plantagon Co. G.m.b.H." oleh Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

25 Februari 1949-31 Maret 1959  
asli  
1 sampul

1723 Surat Keputusan Menteri Pertanian No.7/1951 tentang Penetapan Peraturan Dewan Pengawas Pusat Perkebunan Negara

25 September 1951  
salinan  
4 lembar

1724 Surat-surat tentang Penyewaan Kebun "Karang Inoue" oleh N.V. Daroo

15 Mei 1952-31 Oktober 1957  
fotokopi  
1 sampul

- 1725 Sinopsis Perjanjian Penjualan Kelebihan Komoditas Pertanian antara Pemerintah Amerika dengan Pemerintah Indonesia  
08 Agustus 1952  
fotokopi  
1 sampul
- 1726 Surat-surat tentang risalah penyelenggara pembelian tanah di Kabupaten Bandung  
8-30 Desember 1952  
fotokopi  
1 sampul
- 1727 Surat dari Pusat Perkebunan Negara kepada Panitia penyelesaian pemulihan hak tentang laporan Tahunan N.V. Cultuur Mij. Tjindali (Onderneming Tjimulang) Tahun 1941-1949.  
16 September 1955  
tembusan  
1 sampul
- 1728 Surat dari Panitia untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak kepada Menteri Agraria tentang Permohonan saudara H.P.Sidauruk untuk mohon mendapatkan kembali sebidang tanah di Danau Toba yang disebut Pulau Tao.  
11 Juni 1956  
asli  
2 lembar
- 1729 Berkas mengenai sengketa hak atas tanah *Orderneming* Kundur di Riau.  
30 Januari 1957 - 15 Agustus 1959  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 1730 Surat dari Menteri Muda Agraria kepada semua Kepala Daerah Swatantra Tk. I mengenai penyampaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1960, Surat Keputusan Menteri Muda Agraria, Pedoman dan Pengumuman terkait dengan Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda  
17 Februari 1960  
tembusan  
1 sampul
- 1731 Surat Menteri Luar Negeri mengenai pembelian bahan surplus pertanian Amerika Serikat untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, beserta lampiran  
23 Maret - 2 April 1960  
fotokopi  
3 lembar
- 1732 Surat Pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden tentang pengiriman Usul Dewan Pertimbangan Agung mengenai Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah, beserta lampiran.  
07 April 1960  
fotokopi  
1 sampul



- 1733 Usul perubahan garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan I periode 1961-1969 bidang kehutanan dan bidang agraria, dilengkapi Undang-Undang Pokok Agraria, Rencana Pendaftaran Tanah, Pokok-Pokok Kebijakan Landreform.
- 1961 - 1969  
fotokopi  
1 sampul
- 1734 Terbitan dari Seksi Statistik Upah-upah Biro Pusat Statistik tentang Upah Pada Perkebunan (Wages Paid on Estates) 1961.
- Januari 1961  
asli  
1 sampul
- 1735 Laporan singkat hasil peninjauan Wakil Komisi D dengan J. M Menteri Produksi 24 - 25 September 1961 dan 28 September - 3 Oktober 1961 tentang masalah pertanian di sejumlah daerah.
- 3 Oktober 1961  
tembusan  
1 sampul
- 1736 Surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Produksi tentang pencatatan pelaksanaan program sandang dan pembentukan Badan Pertimbangan Produksi atau Pembangunan Sandang, beserta lampiran.
- 14 Februari 1962  
asli  
1 sampul
- 1737 Surat Keputusan Residen Pekalongan No. P.U.R. 56/1962 tentang Pengesahan penetapan luas tanah yang harus disediakan dan disewakan untuk tanaman tebu musim Tahun 1962/1963.
- 15 Mei 1962  
fotokopi  
1 lembar
- 1738 Formulir berita kawat dari Staf Penguasa Perang Tertinggi kepada Kepala Biro Minyak dan Gas Bumi mengenai status penyelesaian masalah kekurangan beras di Plaju
- 01 Oktober 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1739 Surat-surat tentang laporan perkembangan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan agraria, dan perikanan serta berkaitan dengan pembiayaan pelaksanaan penelitian/sensus bidang pertanian.
- 13 Desember 1962-28 Desember 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 1740 Laporan dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai Dana dan Tenaga Dep. P.U.T untuk Rencana Produksi Padi Tahun 1964 dari Dep. Pertanian/Agraria
- 01 Januari 1963

fotokopi  
1 sampul

- 1741 Surat dari Kepala Jawatan Kehutanan Departemen Pertanian dan Agraria kepada Bank Pembangunan Indonesia tentang Physical Progres Report Triwulan III dan IV Tahun 1962, beserta lampiran.  
2 Januari - 6 April 1963  
asli  
1 sampul
- 1742 Surat Kepala Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tk I Sumatera Selatan kepada Bank Pembangunan Indonesia tentang penyampaian laporan tentang kemajuan Pekerjaan dari usaha/objek yang dilaksanakan dari keuangan intensifikasi massal Tahun 1962, beserta lampiran.  
20 April 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1743 Laporan perjalanan dinas J.M Menteri ke Sulawesi Utara tentang Fakta-fakta potensi ekonomi persoalan Kopra serta kesimpulannya  
19 - 26 Juli 1964  
tembusan  
1 sampul
- 1744 Surat Instruksi Ketua Badan Produksi Daerah Tingkat II Tasikmalaya tentang penggunaan "LUMRITUL" untuk mengatasi serangan tikus di seluruh desa di Tasikmalaya.  
22 Agustus 1964  
asli  
2 lembar
- 1745 Surat Kepala Biro Pusat Statistik Kepada Wakil Perdana Menteri III tentang pengiriman daftar alamat kebun-kebun yang belum memasukkan daftar sensusnya, beserta lampiran  
27 Agustus - 1 September 1964  
asli  
1 sampul
- 1746 Instruksi Panca Menteri tentang Peringatan dan Perayaan Hari Tani Tahun 1964  
16 September 1964  
asli  
1 lembar
- 1747 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Riau Selaku Pembantu Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Daerah Tk.I Riau Tentang Pembentukan Team Penyelesaian Pembayaran Karet di daerah Tk.I Riau.  
12 Oktober 1964  
turunan  
5 lembar

- 1748 Surat Kepala Biro Pusat Statistik kepada Wakil Perdana Menteri I tentang penyampaian laporan bulanan mengenai pertanian rakyat di Jawa dan Madura Bulan Desember 1962, beserta lampiran.
- 4 Desember 1964  
asli  
1 sampul
- 1749 Laporan Bidang Pangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Maluku
- 1964  
fotokopi  
5 lembar
- 1750 Surat Kepala Bagian Statistik Pertanian Biro Pusat Statistik No. tentang berita ringkas bulan Februari dan Maret 1964, beserta lampiran.
- 05 Januari 1965  
asli  
1 sampul
- 1751 Surat Biro Pusat Statistik kepada Wakil Perdana Menteri I tentang berita ringkas panen dan penanaman beberapa tanaman yang berumur pendek di Jawa dan Madura bulan Juni 1964, beserta lampiran.
- 15 Februari 1965  
asli  
5 lembar
- 1752 Laporan mengenai Penyusunan Dasar Kebidjaksanaan Kerja Departemen Kehutanan sesuai dengan semangat Dwikora dan Ampera berdasarkan hasil Musjawarah Kerja Departemen Kehutanan tanggal 5-12 Desember 1964.
- 22 Maret 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 1753 Laporan Rencana Pembangunan Departemen Pertanian Tahun 1965-1968: Re-adjustment PNSB Bidang Deperta 1965-1968.
- 27 Maret 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 1754 Instruksi Wakil Perdana I/Menteri Luar Negeri No.21/B/Instrr/1965 tentang Kegiatan- Kegiatan di Dalam Bidang Kehutanan Dalam Rangka Kerjasama dengan Luar Negeri
- 05 April 1965  
salinan  
1 lembar
- 1755 Surat-surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Panitia Progress Pembangunan Pertanian.
- 1 Juni - 9 September 1965  
salinan  
5 lembar
- 1756 Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria No.90 a/Kompag/1964 mengenai Panitia Operasi Karya pada Kompartimen Pertanian dan Agraria, beserta lampiran.

- 26 Agustus 1965  
fotokopi  
1 sampul
- 1757 Laporan mengenai Pokok Kebijaksanaan Departemen Perkebunan Tahun 1966  
25 Januari -1 September 1966  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 1758 Surat Kepala Biro Statistik kepada Presiden RI dan Menteri Pertanian tentang sensus pertanian.  
28 Desember 1967  
asli  
5 lembar
- 1759 Rencana Departemen Kehutanan mengenai proyek-proyek kayu sehubungan dengan pembiayaan Trans Sumatera Highway  
tt  
fotokopi  
1 sampul
- 1760 Daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Seksi Pertanian dalam rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tentang Pengairan beserta jawabannya  
tt  
fotokopi  
2 lembar
- 2) Perburuhan**
- 1761 Laporan peninjauan ke Jawa Timur mengenai usaha sosial dan perburuhan  
9 - 30 Maret 1946  
asli  
6 lembar
- 1762 Nota Menteri Perburuhan kepada Perdana Menteri tentang pemogokan kerja para buruh di perusahaan-perusahaan BPM di Balikpapan, beserta lampiran  
23 Desember 1950-7 Februari 1951  
asli  
3 lembar
- 1763 Surat Pengantar Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai Instruksi Sekretariat Sobsi tentang pengiriman buruh muda ke Perayaan Perdamaian Pemuda dan Pelajar Sedunia di Berlin  
07 Juli 1951  
asli  
3 lembar
- 1764 Surat dari Gabungan Serikat Buruh PT Garuda Mas Veem kepada Menteri Perburuhan mengenai permohonan untuk mencegah adanya usaha yang mengakibatkan kaum buruh menjadi pengangguran  
11 Mei 1960  
tembusan

- 1 lembar
- 1765 Surat-surat tentang tuntutan-tuntutan serikat buruh salah satunya mengenai desakan pembentukan Dewan Perusahaan  
18 Desember 1961-25 November 1962  
asli  
1 sampul
- 1766 Nota dan kawat dari Direksi Yayasan Urusan Bahan Makanan Pusat kepada Wakil Perdana Menteri Bidang Distribusi mengenai permohonan Persatuan Buruh Kereta Api Surabaya untuk memperoleh jatah beras bulan Agustus 1962  
20 September 1962  
asli  
3 lembar
- 1767 Pernyataan bersama pimpinan organisasi-organisasi buruh, seperti KBKI, SOBSI, KBSI, GASBIINDO di wilayah Jawa Barat tentang desakan dan harapan mereka terhadap presiden untuk meningkatkan kesejahteraan buruh  
01 Februari 1963  
fotokopi  
2 lembar
- 1768 Surat dari Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Buruh Pancasila kepada Menteri Pertama mengenai ucapan terima kasih atas dikeluarkannya Keputusan Pemerintah tentang tunjangan hari raya.  
05 Februari 1963  
asli  
1 lembar
- 1769 Laporan hasil penyelidikan biaya hidup keluarga di Jakarta oleh Departemen Perburuhan RI Tahun 1963, beserta surat pengantar.  
22 Januari 1964  
asli  
1 sampul
- 1770 Surat Keputusan Menteri Perburuhan tentang pembentukan Team Penyelidik Pelaksanaan Undang-Undang Kerja  
12 September 1965  
salinan  
2 lembar
- 1771 Surat dan laporan perkembangan penduduk dan pengaruhnya pada kesempatan kerja oleh Departemen Tenaga Kerja RI  
12 Juli 1967  
tembusan  
1 sampul
- 1772 Rincian penjelasan dari Kepala Kantor Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat mengenai perselisihan buruh di Tanjung Uban dan Pulau Sambu, Riau  
tt  
asli

1 lembar

### 3) Pekerjaan Umum

- 1773 Berkas dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai perluasan dan perbaikan gedung DPR.  
11 Februari 1959 - 2 November 1962  
tembusan  
1 sampul
- 1774 Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tentang pembelian semua bahan-bahan dari Pemborong N.V.The United Builders  
31 Oktober 1960  
salinan  
6 lembar
- 1775 Surat-surat kuasa kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga RI untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan gedung pemerintah  
3 Mei - 30 November 1961  
tembusan  
1 sampul
- 1776 Surat-surat mengenai eksposisi proyek-proyek dan maket-maket pembangunar  
13 Juli - 9 Oktober 1961  
tembusan  
1 sampul
- 1777 Laporan berjudul *Design of General Specification: The list of questions on necessary initial data for the preparation of general specifications* .  
Desember 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1778 Keputusan Menteri Pertama RI No.10/M.P./1962 tentang Penyerahan Pelaksanaan Rehabilitasi/Perbaikan Jalan Negara Pangkalan Brandan-Lhokseumawe kepada Permina.  
17 Januari 1962  
salinan  
2 lembar
- 1779 Surat dari Kepala Pusat Jawatan Gedung-gedung Negara kepada Menteri Pertama mengenai daftar rencana pembangunan urgent Pekerjaan yang perlu diselesaikan Tahun 1962.  
06 Februari 1962  
asli  
5 lembar
- 1780 Berkas mengenai pendirian menara air pada rumah Menteri Prof. Mr. Moh.Yamin di Jl.Diponegoro Jakarta.  
08 Juli 1962  
asli, salinan  
4 lembar

- 1781 Physical Progress Report mengenai proyek-proyek pembangunan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga (bidang jalan dan jembatan) Triwulan ke IV Tahun 1962  
31 Desember 1962  
asli  
1 sampul
- 1782 Surat dari Tim Progress Pembangunan kepada Menteri Pertama mengenai konsep *progress report* Proyek-proyek Pembangunan Semesta  
18 April 1963  
asli  
1 sampul
- 1783 Laporan dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai Pelaksanaan Proyek Jalan Kalimantan Tahun 1963.  
24 Februari 1964  
asli  
1 sampul
- 1784 Surat-surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga tentang BAPERDEP Pekerjaan Umum dan Tenaga  
13 - 17 September 1965  
salinan  
3 lembar
- 1785 Surat Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai permohonan perubahan status/pembelian rumah pegawai negeri a.n. Indra Wharrman Siregar  
23 September 1965-27 April 1966  
asli  
1 sampul
- 1786 Berkas dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Boyolali mengenai pembangunan penyaringan air minum, jalan dan jembatan di Boyolali. Nb.: disertai peta  
13 - 18 Januari 1966  
asli  
1 sampul

#### **4) Perindustrian dan Pertambangan**

- 1787 Surat dari Industry officer United states of America Operations Mission to Indonesia International Cooperation Administration kepada Biro Perancang Negara mengenai Industry Division's programs.  
28 Juni 1957  
asli  
1 sampul
- 1788 Buku terbitan Biro Pusat Statistik tentang Perusahaan-perusahaan Industri (Manufacturing Industries) dan Perusahaan-perusahaan Listrik Umum dan Gas) 1957  
18 Agustus 1959

- fotokopi  
1 sampul
- 1789 Surat-surat dari Kementerian Luar Negeri mengenai *Ecafe Committee on Industry and Natural Resources, Thirteenth Session at Bangkok*.  
24 Juni - 17 September 1960  
asli  
1 sampul
- 1790 Rencana pembangunan perusahaan Tambang Aspal Buton /Butas Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Tahun 1961.  
01 Januari 1961  
asli  
1 sampul
- 1791 Surat-surat dari Sie Kwat Soen Kepala Biro Ekonomi dan Keuangan mengenai penempatan pegawai, undangan rapat dan pertanyaan terkait pengawetan bahan bangunan organik dan New Paper Mill Project  
24 Januari 1961 - 16 Maret 1962  
tembusan  
1 sampul
- 1792 Surat-surat dari para menteri mengenai progress report bulanan Proyek-proyek B antara lain minyak bumi, kayu, perikanan laut, kopra, karet, timah dan turisme  
22 Juni 1961-08 Februari 1963  
tembusan  
1 sampul
- 1793 *Progress Report* dari Perusahaan Negara Aerial Survey, September-Desember 1962 dan Surat mengenai penggunaan tenaga ahli asing pada proyek Aerial Survey dalam rangka explorasi sumber-sumber kekayaan alam Indonesia  
27 September 1961 dan Desember 1962  
asli  
6 lembar
- 1794 Surat Kepala Biro Industri Tekstil kepada Menteri Perindustrian Rakyat tentang penyampaian laporan kwartal II, beserta lampiran  
10 Oktober 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1795 Surat dari Departemen Perindustrian Rakyat Biro Industri Textil beserta lampiran-lampirannya mengenai Daftar Perijinan Perusahaan-Perusahaan Pertekstilan periode 1 Januari s.d. 1 Oktober 1961, beserta lampiran.  
14 Nopember 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1796 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian Rakyat tentang Pembentukan Panitia Pusat Latihan Pengulitan dan Pengawetan Kulit Mental



- 31 Januari 1962  
salinan  
3 lembar
- 1797 Surat Kepala Biro Industrialisasi Badan Penyelenggara Pelaksanaan Proyek-Proyek Industri kepada Menteri PERDATAM (Perindustrian Dasar/Pertambangan) tentang penyampaian Laporan Triwulan I dan II, beserta lampiran
- 27 Juli 1962  
asli  
1 sampul
- 1798 Daftar Perusahaan-Perusahaan Industri dan Perusahaan-Perusahaan Listrik Umum dan Gas (Manufacturing Industries and Public Electric Light and Power Plants and Town Gas Works) terbitan Biro Pusat Statistik. NB : dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- 31 Agustus 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 1799 Surat dari Menteri Urusan Veteran RI kepada Menteri Pertama mengenai *Progress Report* Proyek Pabrik Kertas di Martapura dan Pematang Siantar, Proyek Galangan Kapal di Surabaya, Makassar dan Padang, Proyek Angkutan Pantai dan Sungai
- 03 September 1962  
asli  
1 sampul
- 1800 Surat-surat tentang penyelenggaraan ceramah yang diadakan di P.N. Metrika Pengawetan Kayu Surabaya pada tanggal 20 Nopember 1962.
- 10 Oktober - 21 November 1962  
asli  
1 sampul
- 1801 Surat-surat tentang penyelenggaraan sensus perindustrian hasil kerja sama Biro Pusat Statistik dengan Departemen Perburuhan dan laporan-laporan perkembangan perusahaan-perusahaan negara (industri), beserta lampiran
- Maret 1963-9 September 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 1802 Surat dari Menteri Perindustrian Rakyat kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Keamanan dan Pertahanan tentang pengawasan dan pengamanan benang tenun
- 01 April 1963  
asli  
4 lembar
- 1803 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan No. 14/M/Perdatam/64 tentang Penggantian Anggota Dewan Perusahaan P.N. Blabak
- 08 Januari 1964  
salinan  
2 lembar

- 1804 Surat Wakil Perdana Menteri III kepada Para Menteri No. tentang Perusahaan minyak PT. Shell.  
31 Januari - 5 Maret 1964  
fotokopi  
2 lembar
- 1805 Surat dari Direksi BPU Perusahaan Tambang Timah Negara kepada Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan tentang keberatan direksi terhadap Instruksi Menteri Perburuhan No.2/Instr./64. yang memberlakukan Undang-undang No.22/1957 bagi perusahaan-perusahaan negara.  
01 April 1964  
asli  
2 lembar
- 1806 Daftar angka-angka bulanan timah dalam longton nilai timah (Tin Inhoud) oleh Bagian Penjualan BPU Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara  
15 April 1964  
fotokopi  
3 lembar
- 1807 Surat dari Direktur PT. Sridjanda kepada Wakil Perdana Menteri III tentang pendirian pabrik kertas koran dengan kredit swasta luar negeri  
02 Mei 1964  
asli  
1 lembar
- 1808 Surat dari Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan kepada Waperdam III mengenai kontrak, perjanjian, minutes dengan berbagai negara, antara lain Bulgaria, Cekoslovakia dan Rumania.  
04 Mei 1964  
asli  
1 sampul
- 1809 Laporan Sub Panitia Nasionalisasi mengenai pengambilan alih perusahaan-perusahaan Belanda.  
15 Juli 1964  
asli  
1 sampul
- 1810 Bahan Publikasi Departemen Perindustrian Rakyat tentang Ekonomi Industri Kabupaten Banyumas yang disusun oleh M.R. Adisendjaja No.I Tahun 1964  
1964  
fotokopi  
1 sampul
- 1811 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 62/Keu/Perindra tentang Pembubaran Panitia Pembelian Departemen Perindustrian Rakyat  
27 September 1965  
salinan

- 1 lembar
- 1812 Surat Keputusan Ketua Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Daerah No. 65/SK/Pers/3 - 51 tentang Pengangkatan Ketua Team Materiil Departemen Dalam Negeri dan Penunjukan petugas untuk *State / Industrial / Commercial Fairs* .  
30 September - 14 Oktobver 1965  
salinan  
3 lembar
- 1813 Daftar lampiran tentang data Deperdas, Depering, dan Depermar Tahun 1966 (perusahaan industri swasta, perusahaan galangan kapal)  
01 Januari 1966  
fotokopi  
1 sampul
- 1814 Surat Pembantu Wakil Perdana Menteri II Urusan Khusus kepada Menteri Iuran Negara tentang PT Rajawali untuk menjadi Perusahaan Negara, beserta lampiran  
8 Maret 1966  
asli  
1 sampul
- 1815 Surat Menteri Pertambangan kepada Menutama/Ketua Presidium tentang Kebijaksanaan dan Program Produksi, beserta lampiran.  
10 Oktober 1966  
fotokopi  
1 sampul
- 1816 Surat dari Kepala BPS kepada Presiden mengenai Laporan Konferensi Statistik yang diselenggarakan oleh ECAFE di Sydney  
26 Desember 1966  
asli  
1 sampul
- 1817 Jawaban atas pertanyaan DPR-GR mengenai persoalan kenaikan harga minyak bumi dan persoalan yang berhubungan dengan perminyakan pada umumnya (nb: tidak lengkap).  
1966  
konsep  
1 sampul
- 1818 Rancangan Keputusan Presidium Kabinet Ampera tentang Penanaman Modal Asing untuk Industri Logam antara A.H.Moeis dan Issue Ltd  
27 Januari - Maret 1967  
fotokopi  
1 sampul
- 1819 Surat Ketua Team Pelaksana Pemeriksaan Pekuneg Bidang Timah kepada Ketua Team Pekuneg tentang Laporan Progress Hasil Pemeriksaan Kantor EOMIN London dan Antwerpen, beserta lampiran.  
12 Mei 1967  
asli  
1 sampul

1820 Surat dari Sekretaris Presidium Kabinet Ampera kepada Direksi PT. Departemen Store Sarinah mengenai langkah-langkah mengefektifkan kegiatan PT. Departemen Store Sarinah.

24 Mei 1967  
pertinggal  
5 lembar

1821 Laporan Kemajuan Fase Rehabilitasi Tahun 1967 Semester Pertama Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga

10 Juli 1967  
fotokopi  
1 sampul

1822 Bahan untuk Musyawarah Kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pejabat daerah dari Departemen Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga

26 Juli 1967  
fotokopi  
1 sampul

1823 Daftar Hak - hak pertambangan di seluruh daerah Republik Indonesia

tt  
asli  
1 sampul

1824 Daftar nama-nama pengusaha/partikulier - Maatschappijen

tt  
tembusan  
8 lembar

##### 5) Research Nasional

1825 Kliping koran tentang berita-berita terkait Indonesia di Meksiko milik Pers Kedutaan Besar RI di Meksiko Tahun 1959.

Januari 1959  
asli  
1 sampul

1826 Laporan dari Kedutaan Besar RI di Peking mengenai pemberitaan RRT tentang *Technical Innovation dan Revolution*

18 Juni 1960  
fotokopi  
1 sampul

1827 Surat-surat Edaran yang dikeluarkan oleh Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI) di bidang ekonomi dan pembangunan di Indonesia Tahun 1960-1961, beserta lampiran.

21 November 1960-3 Mei 1961  
asli  
1 sampul

- 1828 Statistik Konjunktur (*Monthly Survey*) periode Maret-April 1961 dan Mei-Juni 1962 oleh Biro Pusat Statistik.  
 April 1961 dan Juni 1962  
 fotokopi  
 1 sampul
- 1829 Surat Menteri Pertanian dan Agraria kepada Menteri Research Nasional tentang penguasaan bersama Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian di Bogor, beserta lampiran.  
 26 Juni 1962  
 fotokopi  
 2 lembar
- 1830 Laporan dan Rekomendasi "Atlas of Indonesian Resources oleh Margery D. Howarth, Geography-Cartography Consultant USAID, Indonesia  
 28 September 1962  
 asli  
 1 sampul
- 1831 Berkas mengenai Penyusunan Atlas Sumber-sumber Kemakmuran Indonesi:  
 17 Oktober 1962 - 23 Oktober 1963  
 asli  
 1 sampul
- 1832 Memo Biro III Kabinet Perdana Menteri kepada Biro II Kabinet Perdana Menteri tentang pengiriman kutipan mengenai review berita ekonomi mingguan Austria, beserta lampiran.  
 30 Nopember 1962  
 asli  
 1 sampul
- 1833 Surat Kepala Biro Pusat Statistik kepada Menteri Pertama tentang penjelasan mengenai *Statistical Research and Development Centre* di Biro Pusat Statistik, beserta lampiran.  
 6 Desember - 10 Desember 1962  
 asli  
 2 lembar
- 1834 Terbitan 'Business New' dan salinan artikel dari Financial dan Economi Report mengenai kondisi ekonomi dalam dan luar negeri  
 1962-1963  
 asli  
 1 sampul
- 1835 Berita-berita ekonomi dan keuangan dari luar negeri, seperti Roma, Bombay, dll., Tahun 1963.  
 22 Februari-10 April 1963  
 fotokopi  
 1 sampul
- 1836 Berita surat kabar dan majalah mengenai perekonomian Amerika Serikat periode Februari dan April 1963 oleh Konsulat Jenderal RI Bagian Ekonomi di New York dan California.

- 28 Februari - 29 Mei 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1837 Surat tentang hasil Panitia 13 mengenai strategi dasar ekonomi Indonesia dan kebijaksanaan jangka pendek Tahun 1963.  
11 Maret 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1838 Surat Pengantar Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden tentang pengiriman Pertimbangan Musyawarah Pimpinan Negara kepada Presiden mengenai Strategi Dasar Ekonomi Indonesia dan Kebijakan Jangka Pendek, beserta lampiran  
14 Maret 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1839 Surat Pengumuman Pemerintah oleh Wakil Menteri Pertama tentang pembentukan Panitia 7 oleh Presiden Soekarno untuk menanggulangi permasalahan ekonomi nasional  
19 Maret 1963  
fotokopi  
1 lembar
- 1840 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.128/M.P/1963 tentang Penugasan kepada Biro Pusat Statistik untuk melakukan sampel survey nasional tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.  
22 Oktober 1963  
salinan  
2 lembar
- 1841 Surat Statistical Research dan Development Centre Biro Pusat Statistik tentang penyampaian progres report pertanggungjawaban triwulan II 1963 proyek Statistical Research dan Development Centre Biro Pusat Statistik, beserta lampiran  
23 Oktober 1963  
asli  
1 sampul
- 1842 Terbitan 'Business New' mengenai Hasil Sensus Tahun 1961  
23 November 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1843 Berita-berita ekonomi dan keuangan di luar negeri dari Duta Besar Indonesia di New Delhi, Bangkok, dan Roma.  
28 Juni 1963-30 April 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 1844 Berkas mengenai Usaha Pemerintah untuk mempertinggi tingkat produktivitas dan efficiency Perusahaan - Perusahaan Negara.  
11 Agustus - 23 November 1964  
asli, tembusan  
1 sampul

- 1845 Daftar Publikasi Bidang Ekonomi Biro Pusat Statistik Tahun 1964  
06 Nopember 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 1846 Surat kabar dalam negeri dan luar negeri yang memuat berita-berita penting tentang masalah ekonomi dan keuangan  
1 Januari 1965 - 9 Juli 1968  
asli  
1 sampul
- 1847 Surat Bendaharawan Pusat Penelitian dan Perkembangan Statistik kepada Team Progress Pembangunan tentang penyampaian progress report semester II Tahun 1964, beserta lampiran.  
5 Maret 1965  
asli  
1 sampul
- 1848 Risalah-risalah rapat Bagian Penelitian dan Pembangunan (Biro Finek) dan Team Research Berdikari..  
27 Juli -23 November 1965  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 1849 Surat Keputusan Menteri / Sekretaris Negara RI No. F/117/1965 tentang Pembentukan Team Reserch Berdikari.  
18 Oktober 1965  
salinan  
3 lembar
- 1850 Laporan dan berita ekonomi dari Kedutaan Indonesia di Rangoon, Bangkok dan Rom:  
17 Januari - 20 Juni 1966  
tembusan  
1 sampul
- 1851 Laporan dari Sekretaris Presidium Kabinet tentang pencapaian bidang ekonomi oleh Kabinet Ampera.  
1967  
fotokopi  
1 sampul
- 1852 Terbitan Warta Berita dari Antara mengenai kondisi dalam dan luar negeri:  
6 - 9 Juli 1968  
asli  
1 sampul
- 1853 Terbitan Warta Berita oleh Lembaga Kantor Berita Antara mengenai kondisi dalam dan luar negeri.  
11 Juli 1968  
asli

1 sampul

**b. Distribusi**

**1) Perdagangan**

- 1854 Surat dari Moh. Roem kepada Menteri Luar Negeri RIS mengenai perundingan mengenai hubungan dagang dengan Swedia, Belanda Inggris dan Irlandia Utara:  
27 Februari dan 29 Maret 1950  
asli  
1 sampul
- 1855 Surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Sekretaris Negara tentang Laporan perundingan dagang antara pemerintah RI dan Australia Tahun 1954  
28 Desember 1954  
salinan  
1 sampul
- 1856 Surat-surat Keputusan Menteri Perdagangan Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan tentang Golongan - Golongan Barang Impor dengan Surat Pendorong Produksi (SPP)  
9 Desember 1957 - 24 November 1965  
salinan  
1 sampul
- 1857 Laporan Delegasi Ekonomi dan Perdagangan Pemerintah RI tentang hasil perundingan dengan Republik Turki, Saudi Arabia dan Republik Persatuan Arab  
01 Desember 1959  
salinan  
7 lembar
- 1858 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Pertama RI mengenai *Trade Agreement Between the Republic of Indonesian and the Republic of Turkey* .  
21 Januari 1960  
salinan  
12 lembar
- 1859 Surat Kepala Muda Jawatan Bea dan Tjukai kepada Semua Kepala Daerah Jawatan Bea dan Tjukai tentang prosedur import barang-barang.  
06 Mei 1960  
fotokopi  
2 lembar
- 1860 Surat Edaran Wakil Menteri Pertama kepada Menteri Perdagangan mengenai usaha melancarkan penyediaan alat-alat keperluan sensus penduduk Tahun 1961  
12 Juli 1960  
fotokopi  
1 lembar
- 1861 Surat-surat mengenai impor kendaraan bermotor  
24 Agustus 1960 - 3 Januari 1964  
asli, salinan  
1 sampul



1862 Surat Edaran Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri Bank Indonesia tentang pelaksanaan ketentuan di bidang impor sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 32/1960 dan Peraturan Pemerintah No.31/1960, beserta lampiran.

29 Agustus 1960  
fotokopi  
1 sampul

1863 Surat-surat dari Kepala Jawatan Perdagangan Dalam Negeri dan Direksi BPU Perusahaan Dagang Negara tentang keadaan barang-barang impor penting, beserta lampiran.

5 September 1960 dan 16 Maret 1962  
fotokopi  
1 sampul

1864 Surat-surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Perdagangan dan Jaksa Agung tentang pemungutan bea keluar, pengimporan barang dan retribusi

11 dan 22 Oktober 1960  
salinan  
9 lembar

1865 Berita Pers Pengumuman Departemen Perdagangan, London Press Service, The German Tribune mengenai berita niaga

1 November 1960 - 6 Februari 1963  
asli  
1 sampul

1866 Laporan mingguan harga eceran beras di pasar bebas seluruh Indonesia Tahun 1961 dari Seksi Research/Documentatie Yayasan Urusan Bahan Makanan Pusat Jakarta kepada Menteri Distribusi.

16 November - 4 Desember 1961  
asli  
1 sampul

1867 Memo dan Surat Keputusan Pemimpin Komando Urusan Pembangunan Asian Games tentang pengiriman Prof. Ir. Rooseno ke Moskow, USSR untuk melancarkan pengiriman barang-barang untuk keperluan Asian Games

1 dan 9 Februari 1961  
salinan  
3 lembar

1868 Surat dari Menteri Perdagangan kepada Menteri Distribusi mengenai pendapat terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyaluran barang-barang pokok

27 Maret 1961  
asli  
2 lembar

1869 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai salinan surat Persetujuan Dagang RI dengan Republik Demokrasi Jerman

10 Mei 1961  
asli

- 12 lembar
- 1870 Surat Pengantar Sekretaris Pribadi Menteri Keamanan Nasional kepada Menteri Distribusi tentang penimbunan beras tanpa ijin, beserta lampiran
- 26 Februari 1962  
asli  
1 sampul
- 1871 Memo FR. Almatsier kepada Djoemanto mengenai komentar atas surat yang dikirimkan oleh M.S. Chotib kepada Presiden tentang laporan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran sandang pangan.
- 06 Maret 1962  
asli  
2 lembar
- 1872 Laporan Yayasan Urusan Bahan Makanan Pusat kepada Menteri Distribusi tentang Perhitungan taksiran persediaan beras bulan Mei dan Juli 1962
- 31 Mei - 31 Juli 1962  
asli  
1 sampul
- 1873 Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Maluku No: KEP-023/PEPERDA MALUKU/8/1962 tentang Distribusi dan Penyaluran Minyak Tanah
- 15 Agustus 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1874 Surat dari Menteri Perdagangan kepada Wakil Menteri Pertama mengenai neraca bulanan Mandala Bhakti di Makassar untuk Juni dan Juli 1962, beserta lampiran
- 27 Agustus 1962  
tembusan  
1 sampul
- 1875 Surat dari Direksi BPU Perusahaan Dagang Negara kepada Menteri Perdagangan mengenai penyelesaian tekstil ex-indentors Sumatera Utara (Medan), beserta lampiran
- 15 September 1962  
tembusan  
4 lembar
- 1876 Surat dari Menteri Perdagangan kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi mengenai usul-usul Sdr. Tjilik Riwut, Gubernur Kepala Daswati Kalimantan Tengah, tentang devisa dan pembukaan perwakilan Kantor Urusan Ekspor Sampit di Palang Pisau.
- 19 September 1962  
asli  
1 lembar
- 1877 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi mengenai permintaan pembelian 250.000 ton beras dalam rangka ACA, beserta lampiran.
- 19 September 1962  
asli

3 lembar

- 1878 Surat dari Menteri Perdagangan kepada Menteri/Panglima Angkatan Laut mengenai penggunaan Kapal Motor Djadayat untuk kunjungan ke Nusa Tenggara  
19 September 1962  
tembusan  
2 lembar
- 1879 Surat dari Menteri Perdagangan kepada Presiden mengenai penugasan Prof. Dr .Mr. Prajudi dalam proyek Departemen Store PT. Sarinah  
22 September 1962  
tembusan  
2 lembar
- 1880 Pernyataaan DPR-GR Daerah Tk.II Langkat, Sumatera Utara agar Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi segera menambah alokasi beras untuk daerah Sumatera Utara c.q. Kebutuhan distribusi semua karyawan negara  
01 Oktober 1962  
asli  
1 lembar
- 1881 Surat dari Biro Pusat Statistik mengenai penyampaian daftar harga eceran rata-rata dari beberapa macam barang terutama barang dalam negeri di pasar bebas (dalam negeri) di Jakarta 1955-1965.  
30 Oktober 1962 - 25 Februari 1965  
asli, salinan  
1 sampul
- 1882 Surat dari Ketua Gerwani Anak Cabang Kalipasir kepada Menteri Perekonomian/Perdagangan tentang pernyataan kesulitan sandang pangar  
05 Desember 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1883 Surat resolusi dari Dewan Mahasiswa Universitas Gajah Mada tentang usulan kepada pemerintah untuk menurunkan harga buku sesuai kemampuan daya beli mahasiswa, pemberian jatah beras.  
02 Februari 1963  
tembusan  
1 lembar
- 1884 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.28/M.P/1963 tentang Perdagangan Ban-Ban Produksi Dalam Negeri dan Ban-Ban yang Diimpor dengan Devisa Negara  
06 Maret 1963  
salinan  
7 lembar
- 1885 Surat Konsulat Republik Indonesia di Bombay kepada Biro Menteri Pertama Bagian Finek dan Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Pusat tentang harga dan pasaran hasil perkebunan di Bombay.  
30 April 1963

fotokopi  
1 sampul

1886 Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral No. 08/63 kep/MUBS/G tentang pengimporan barang-barang dengan devisa atas dasar Peraturan Presiden No.6 Tahun 1963 dapat dilakukan oleh eksportir/importir-produsen sendiri.

27 Mei 1963  
salinan  
1 lembar

1887 Surat dari Koperasi Pusat GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) kepada Menteri Pertama tentang Pelaksanaan Import Cambrics dan Cat batik, beserta lampiran

12 Juni 1963  
fotokopi  
1 sampul

1888 Surat dari Kepala Bagian Produksi kepada Kepala Biro II Setneg mengenai usulan menghapus Keputusan Peperti No.41/Peperti Tahun 1962 tentang Pengawasan Terhadap Pembagian atau Penggunaan Bahan-Bahan Baku Bangunan dan supaya membentuk pengawas barang-barang impor.

24 April 1963  
asli  
3 lembar

1889 Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi/Ketua Dewan Bahan Makanan No.015/S.K./DBM./63 tentang Tim Survey Pembelian Padi atau Beras di Daerah Lampung.

08 Juli 1963  
salinan  
1 lembar

1890 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.72 Tahun 1963 tentang Pemberian Subsidi kepada Impor Beberapa Barang Tertentu.

17 Juli 1963  
salinan  
2 lembar

1891 Surat-surat laporan Team Pembantu Menteri Perdagangan kepada Menteri Perdagangan tentang daftar harga pasar bebas untuk barang impor di Jakarta Raya, beserta lampiran

31 Juli - 21 Agustus 1963  
asli  
1 sampul

1892 Pokok-pokok Kesimpulan Musyawarah Ekonomi Kongres Wanita Indonesia dan Ikhtisar Progress Report Triwulan I/1963 Proyek-Proyek di bawah Lingkungan Biro Industrialisasi Dep. Perdatamb.

19 Agustus 1963  
asli  
6 lembar

- 1893 Surat dari Presiden kepada Ketua DPR-GR mengenai pemberitahuan tentang pengesahan persetujuan dagang jangka panjang antara RI dengan Republik Rakyat Rumania pada 8 Oktober 1963.
- 22 Oktober 1963  
tembusan  
1 lembar
- 1894 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.140/M.P/1963 tentang Peraturan Penggunaan Home Office Account dan Resident Account Kepunyaan Perusahaan Dagang Negara dari Hasil Perdagangan Luar Negeri
- 26 Oktober 1963  
salinan  
2 lembar
- 1895 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.143/MP/1963 tentang Penambahan alokasi devisa otomatis kepada eksportir dan eksportir produsen di daerah Counter Impor Consignasi (C.I.C).
- 02 Nopember 1963  
salinan  
2 lembar
- 1896 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No.158/P.M/1963 tentang Penggunaan Retensi Hasil Ekspor.
- 12 Desember 1963  
salinan  
1 lembar
- 1897 Laporan Biro Pusat Statistik Sub Bagian Statistik Konjunktur tentang Harga Beras dan Jagung di Daerah Perkebunan di Jawa Triwulan ke III dan IV 1963
- 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1898 Surat-surat PT. Asosiasi Perantaraan Dagang Indonesia (PT. APERDI) tentang Catatan Harga Hasil Bumi Jakarta Bulan Maret-Mei 1964
- 2 Maret - 4 Mei 1964  
asli  
1 sampul
- 1899 Surat Menteri Negara DPBK Presidium Kabinet Kerja tentang keterangan pemerintah mengenai peraturan-peraturan pokok di bidang-bidang ekspor impor dan harga
- 16 April 1964  
fotokopi  
4 lembar
- 1900 Surat Edaran dari Kepala Direktorat Bea dan Cukai kepada Kepala Daerah Direktorat Bea dan Cukai tentang Peraturan baru dibidang Impor dan Ekspor, beserta lampiran
- 30 April 1964  
fotokopi  
1 sampul

1901 Berkas mengenai Tugas-Tugas Kantor Kopra, Prinsip dan pelaksanaan teknis ekspor kopra dan Peraturan Presiden RI mengenai Perdagangan Kopra antar pulau dan ekspor.

1964  
salinan  
1 sampul

1902 Daftar Ichtisar Pers Impor Indonesia Selama Bulan Mei 1964 dari Biro Pusat Statistik.

09 Januari 1965  
tembusan  
8 lembar

1903 Duta Besar RI di Bangkok kepada Menteri Kehutanan tentang statistik dan catatan-catatan harga hasil-hasil hutan Thailand, beserta lampiran

21 Januari 1965  
fotokopi  
1 sampul

1904 Surat-surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI tentang ekspor.

30 Desember 1965 dan 24 Mei 1966  
salinan  
4 lembar

1905 Kertas karya tentang Pola Perdagangan di Indonesia yang disusun oleh Departemen Perdagangan.

27 Juni 1967  
fotokopi  
1 sampul

1906 Laporan Menteri Perdagangan pada Sidang Paripurna Kabinet Ampera Tahun 1967 tentang Progress Report Departemen Perdagangan Tahap (II) Rehabilitasi Januari-Juni 1967.

13 Juli 1967  
fotokopi  
1 sampul

## **2) Perhubungan, Pos dan Telekomunikas**

1907 Penetapan Pemerintah No.4 Tahun 1947 tentang Penunjukan lapangan terbang, dimana dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Pejabatan Bea dan Cukai

05 Nopember 1947  
salinan  
5 lembar

1908 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Para Menteri mengenai penyerahan kekuasaan dan kewajiban Kementerian Perhubungan kepada daerah otonom

24 Februari 1951  
tembusan  
1 sampul

- 1909 Surat Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan kepada Kementerian-Kementerian tentang pencabutan peraturan tentang pemakaian kendaraan bermotor milik pemerintah untuk keperluan partikelir.
- 01 Oktober 1952  
fotokopi  
1 sampul
- 1910 Daftar laporan-laporan experts dalam bidang pengangkutan dan perhubungan di Indonesia Tahun 1953 - 1961.
- 1953 - 1961  
asli, fotokopi  
1 sampul
- 1911 Berkas mengenai neraca pembukuan dan rancangan peraturan-peraturan dalam Pendirian DAMRI sebagai perusahaan negara.
- 11 Februari 1958 - 27 Januari 1961  
asli  
1 sampul
- 1912 Laporan mengenai *International Conference on Safety of Life at Sea, 1960* .
- 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 1913 Pengumuman Departemen Perhubungan Darat dan PTT No. 4/II/60 mengenai anjuran bagi pegawai instansi-instansi untuk membatasi diri bepergian pada saat cuti lebaran dengan kereta api.
- 29 Februari 1960  
fotokopi  
1 lembar
- 1914 Surat-surat mengenai Perhubungan Udara dan G.I.A
- 10 Mei 1960- 07 September 1961  
asli, tembusan  
1 sampul
- 1915 Surat dari Direktur Jenderal Pos, Telegrap, dan Telepon kepada Menteri Pertama mengenai Dinas Rekening Pos, beserta lampiran
- 26 Oktober 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 1916 Surat Pengantar Direktorat Ekonomi Antar Negara Subsidi ECAFE kepada Biro Finek tentang penyampaian risalah rapat seksi "Inland Transport and Communication" Panitia interdepartamental Ecafe, beserta lampiran
- 28 Januari 1961  
asli  
2 lembar

- 1917 Surat dari Kedutaan RI di Bangkok kepada Direktorat Ekonomi Antar Negara Departemen Luar Negeri mengenai *second study week on traffic Engineering dan highway safety in Manila* .
- 21 Februari 1961  
tembusan  
2 lembar
- 1918 Surat-surat dari Duta Besar RI di Bangkok kepada Biro Ekonomi dan Keuangan tentang Seminar Pariwisata dan Perhubungan/Transportasi
- 23 Februari - 5 April 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1919 Surat-surat dari Subsidi ECAFE Direktorat Ekonomi Antar Negara kepada Biro Ekonomi dan Keuangan tentang Provisional Agenda dan Report on The Third Series of Sessions of The Expert Working Group on International Highways for Zone 1, 2, dan 3
- 5 April - 24 April 1961  
asli  
1 sampul
- 1920 Surat persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Inggris tentang Dinas-Dinas Penerbangan antara dan di luar wilayah masing-masing
- 17 April 1961  
salinan  
14 lembar
- 1921 Surat-surat dari Menteri Perhubungan Laut mengenai tunggakan sewa kapal dan biaya pengangkutan jamaah haji oleh PN. Djakarta Lloyd dan PN. Peln
- 11,15 dan 20 September 1962  
asli, tembusan  
4 lembar
- 1922 Surat dari Menteri Perhubungan Laut kepada Sesjend. Dewan Perancang Nasional mengenai prioritas proyek pembangunan pelabuhan di Tanjung Priok dan Semarang oleh Pemborong Perancis Citra.
- 17 September 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1923 Surat dari Menteri Perhubungan Laut kepada Sesjend. Dewan Perancang Nasional mengenai prioritas pemesanan kapal keruk timba 700 liter dari Orenstein Koppel und Luebecker Maschinernbau A.G. Luebeck
- 17 September 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1924 Surat dari NV. Stuvex kepada Menteri Perhubungan Laut mengenai permohonan perpanjangan ijin kerja (lisensi) bongkar muat dan bersedia mengambil bagian dalam pelaksanaan Trikora.



- 18 September 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1925 Surat dari Panitia Menteri untuk Dewan-dewan Perusahaan kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata mengenai pembentukan Dewan Perusahaan.
- 18 September 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1926 Surat dari Menteri Perhubungan Laut kepada Wakil Menteri Pertama Urusan Irian Barat mengenai penerapan peraturan dan izin kapal-kapal berbendera Belanda dalam hubungan *free traffic*.
- 19 September 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1927 Surat dari Menteri Perhubungan Laut kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan mengenai tuntutan terhadap Pemerintah RI perihal persoalan Kapal Giorgio Cini II dari Italia, beserta lampiran.
- 20 September 1962  
tembusan  
9 lembar
- 1928 Surat dari Menteri Perhubungan Laut kepada Wakil Menteri Pertama Urusan Irian Barat mengenai penyertaan pejabat-pejabat untuk administrasi PBB di Irian Barat, beserta lampiran.
- 20 September 1962  
tembusan  
2 lembar
- 1929 Surat tentang penyaluran dan pengeluaran benang tenun untuk Angkatan Darat dari Dewan Pertekstilan.
- 06 November - 06 Desember 1962  
tembusan  
2 lembar
- 1930 Surat dari Jawatan Pelayaran Departemen Perhubungan Laut kepada Bagian kredit Bank Pembangunan Indonesia tentang Persediaan uang sejumlah Rp.437.500 untuk biaya lanjutan pembagunan bengkel kapal di Teluk Bayur Tahun 1962
- 12 Nopember 1962  
tembusan  
1 lembar
- 1931 Surat dari Menteri perhubungan udara kepada para Menteri tentang pemberitahuan percobaan penerbangan Lockheed Electra
- 14 Januari - 16 Maret 1963  
asli  
3 lembar

- 1932 Surat Keputusan Menteri Pertama RI No.80/M.P/1963 tentang Pembentukan Badan  
Persiapan Pelaksanaan Proyek Jalan Raya Lintas Sumatera  
24 Juli 1963  
salinan  
3 lembar
- 1933 Surat Peraturan Dinas Kepala Bagian Perancang/Peraturan Lalu Lintas PN. GIA tentang  
*GIA Internal Timetable* No.02A/63 yang efektif per 1 Oktober 1963.  
16 September 1963  
fotokopi  
5 lembar
- 1934 Bahan Publikasi Seksi Statistik Pengangkutan Biro Pusat Statistik tentang Seri Statistik  
Pengangkutan Arsi (*Water Transport Statistics Series*) tanggal 1 Oktober 1963.  
01 Oktober 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1935 Laporan dari BPS mengenai Seri Statistik Pengangkutan Udara (*Air Transport Statistics  
Series*) dan Kereta Api (*Railway Transport Statistics Series*).  
1 Oktober dan 2 Desember 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1936 Surat Kepala Biro Pengawasan/Penyelenggaraan Departemen Perhubungan Udara kepada  
Sekretaris Negara tentang progress report proyek P.N. Garuda Indonesian Airways Tahun  
1963, beserta lampiran.  
21 November 1963  
asli  
1 sampul
- 1937 Surat Pengumuman dari Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata  
tentang peraturan pembatasan perusahaan tourisme.  
23 Desember 1963  
asli  
1 lembar
- 1938 Surat dari Menteri Perhubungan laut kepada Waperdam III mengenai daftar perjanjian terkait  
transportasi laut dengan luar negeri antara lain perusahaan dari Italia, Finlandia, Polandia,  
Inggris dan Jepang.  
26 Maret 1964  
asli  
3 lembar
- 1939 Surat PT. Pelayaran Sinar Segara Djaja kepada Menteri Perhubungan Laut tentang izin-izin  
pemakaian Credit-Fund luar negeri dan pembelian dari 9 Coaster Motor Vesse.  
23 April 1964  
asli  
4 lembar

- 1940 Surat Menteri Perhubungan kepada Presidium Kabinet Dwikora mengenai tawaran kredit Spanyol dan Jerman Barat, beserta lampiran  
25 Januari 1965  
fotokopi  
6 lembar
- 1941 Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Kab.4/9/7 tentang Peraturan tentang Penguasaan Pelabuhan dengan Fasilitas-Fasilitas Terbatas serta Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan Perhubungan Laut di Daerah  
03 Mei 1965  
salinan  
2 lembar
- 1942 Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tentang perluasan panitia yang disertai tugas merumuskan dan menyusun peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya  
02 September 1965  
salinan  
3 lembar
- 1943 Surat dari Persatuan Karyawan Jakarta Lloyd kepada Menteri Perhubungan Laut tentang permohonan penunjukan Direktur Usaha sebagai Direktur Utama P.N. Jakarta Lloyd yang baru.  
25 Oktober 1965  
asli  
1 lembar
- 1944 Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata tentang Pembentukan Panitia *Opening Ceremonies* Ambarukmo Palace Hotel dan Samudera Beach Hotel.  
18 Nopember 1965  
salinan  
1 lembar
- 1945 Makalah berjudul "An Economic Analysis of Philipina Domestic Transportation Vol III Domestic Water Transportation and Ports" prepare for The National Economic Council of The Republic of The Philippines  
tt  
fotokopi  
1 sampul

### 3) Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa

- 1946 Memo dari Wijoyo Nitisastro kepada Menteri Negara Urusan Perencanaan tentang Questionnaire Rencana Pembangunan Deaerah (Regional Planning)  
20 Maret 1957  
fotokopi  
1 sampul

1947 Surat dari Pengurus Koperasi Wanita "Wargi Saluju" Bandung kepada Panitia Musyawarah Wanita Koperasi Seluruh Indonesia tentang pengiriman orang dan usulan keputusan pada muyarawah tersebut.

12 Februari 1962  
tembusan  
2 lembar

1948 Surat Keputusan Menteri Transmigrasi / Koperasi No.0065 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Penelitian dan Perencanaan Departemen Transmigrasi/Koperasi (BAPPERDEP TRANSKOP).

20 September 1965  
salinan  
2 lembar

1949 Surat keputusan Deputi Menteri Pembangunan Masyarakat Desa No.18 Tahun 1966 tanggal 18 Juni 1966 tentang Penyempurnaan SK No.14 Tahun 1966 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Departemen Pembangunan Masyarakat Desa

12 Mei 1966  
salinan  
4 lembar

### **c. Fiskal dan Moneter**

#### **1) Pendapatan dan Pembiayaan**

1950 Surat kawat dari Kementerian Keuangan tentang Tarif-tarif baru pajak peralihan dan pajak upah dari semua pendapatan bersih.

06 Januari 1951  
tembusan  
5 lembar

1951 Surat-surat mengenai daftar saham, obligasi, keadaan kas dan pembukuan rekening, daftar efek-efek milik Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak yang tersimpan di Bank Indonesia.

31 Desember 1956 - 24 Februari 1960  
asli  
1 sampul

1952 Daftar Regularisasi Biro Ekonomi dan Keuangan Jakarta tentang pembiayaan beberapa departemen seperti Departemen Penerangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan Udara, Departemen Umum, dll. Januari - Oktober 1960

Januari - Oktober 1960  
asli  
1 sampul

1953 Surat Edaran Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri Bank Indonesia No. 965 tanggal 13 April 1960 tentang penyelenggaraan pemungutan retribusi ekspor dan impor.

13 April 1960  
fotokopi  
1 sampul

- 1954 Surat-surat tentang penyediaan devisa untuk penyelenggaraan Asian Games ke IV untuk Tahun 1962 dari Organizing Committee Asian Games IV Tahun 1960  
20 Juli 1960 dan 3 Februari 1962  
tembusan  
1 sampul
- 1955 Surat-surat dari Bank Indonesia tentang ikhtisar posisi dan perubahan dalam posisi emas dan devisa 1960-1962.  
29 Agustus 1960 - 27 Januari 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 1956 Daftar hasil Anggaran Sementara Bab II (penerimaan) Tahun dinas 1959 Kabinet Perdana Menteri.  
01 September 1960  
asli  
1 sampul
- 1957 Surat-surat dari Ka. Biro Ekonomi dan Keuangan mengenai akomodasi dan transportasi khusus bagi para expert PBB dan URSS.  
26 Oktober 1960 - 20 Desember 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 1958 Naskah mengenai cara penghitungan pajak pendapatan disusun oleh R.Rachmat Soemita (Pengawas Keuangan)  
22 Nopember 1960  
asli  
1 sampul
- 1959 Laporan tentang Peninjauan Sistem Keuangan Negara di Polandia, Rusia dan RRT oleh R.B. Sentanu dari Departemen Keuangan  
Agustus 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1960 Surat edaran dari Menteri Pertama kepada para menteri tentang alokasi pampasan perang ke-5 Tahun 1962/1963.  
20 Maret 1962  
asli  
4 lembar
- 1961 Surat dari Bank Pembangunan Indonesia kepada Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Sidang Keuangan tentang Perkiraan Keuntungan (profit estimate) Hotel Indonesia, beserta lampiran.  
13 Juli 1962  
asli  
1 sampul
- 1962 Surat-surat Panglima Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengenai Pinjaman atau Kredit atas Dasar Production Sharing.  
3 Agustus 1962 - 27 April 1963

- fotokopi  
1 sampul
- 1963 Ikhtisar pembiayaan devisa dalam rangka kredit/cash devisa yang disusun oleh Deparlu,  
Bank Pembangunan Indonesia  
07 November 1962 - 23 Juli 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 1964 Surat dari Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan kepada Menteri  
Pertama RI tentang pembaharuan peraturan perjalanan dinas luar negeri  
19 Januari 1963  
salinan  
1 sampul
- 1965 Daftar penerimaan progress report pembangunan Tahun 1962 dari departemen-  
departemen/BPU2 dan penerimaan laporan penyeteroran 55% laba bersih perusahaan-  
perusahaan negara pada dana pembangunan semesta  
22 Mei 1963  
fotokopi  
1 sampul
- 1966 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No.149/P.M Tahun 1963 tentang Peraturan  
Penggunaan Devisen.  
05 Desember 1963  
salinan  
1 lembar
- 1967 Surat-surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan antara lain  
tentang Tata Cara Pengimporan Barang Penumpang dan Kiriman; Nilai Transaksi Rupiah;  
Daerah Pembayaran Poso dan Luwuk / Bangai di Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di  
Manado; dan penunjukan Pegawai pada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta,  
Pontianak, Padang, Surabaya.  
16 April 1962 - 1 Februari 1965  
salinan  
1 sampul
- 1968 Peraturan-peraturan tentang pengaturan lalu lintas devisa, valuta asing, dan tindak pidana  
devisa tertentu.  
28 Desember 1964 - 30 Januari 1965  
salinan  
1 sampul
- 1969 Surat dari Menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan kepada para menteri  
mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung-  
Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No.34 Tahun 1964 tentang Dana  
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan  
23 April 1965  
salinan  
1 sampul

- 1970 Surat-surat Panitia Pendjualan Rumah Perusahaan Negara tentang harga-harga rumah perusahaan negara.  
30 November - 3 Desember 1965  
fotokopi  
5 lembar
- 1971 Surat Sekretariat Negara Biro Urusan Perusahaan Negara/Sekretariat Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara kepada Semua Direksi BPU-PN/PN tentang Iuran wajib bagi BPU/PN yang belum melunasi iuran wajib  
28 Mei 1966  
tembusan  
2 lembar
- 1972 Surat Direksi Bank Negara Indonesia kepada Presidium Kabinet Ampera tentang devisa dari dana devisa untuk impor barang-barang dan pembayaran jasa-jasa  
05 Oktober 1966  
asli  
4 lembar
- 1973 Surat-surat dari PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera mengenai pembayaran pajak dimuka, Dana Revolusi, pembiayaan Proyek Pramuka, penarikan uang ex PT.Aslam, donasi beras dari Republik Palau dan lain-lain  
02 Desember 1966 - 20 Januari 1967  
asli  
1 sampul
- 1974 Instruksi Presidium Kabinet tentang Penanaman Modal Asing dan Pembayaran Hutang Luar Negeri Tahun 1967.  
10 Mei 1967-3 Juni 1967  
salinan  
1 sampul
- 1975 Surat dari Presiden RI kepada Menteri Dalam Negeri mengenai kebijaksanaan pemerintah terhadap usaha-usaha penambahan penerimaan daerah melalui usaha-usaha yang tergolong perjudian.  
21 Juni 1968  
salinan  
2 lembar

## **2) Anggaran Negara**

- 1976 Nota Keuangan Negara (Nota Betreffende De Toestand Van Lands Financien) Anggaran Indonesia Tahun Dinas 1950/1951 (Begroting Van Indonesie Voor De Dienstjaren 1950/1951) Kementerian Keuangan (Ministerie Van Financien) Januari 1951.  
01 Januari 1951  
asli  
1 sampul
- 1977 Surat-surat edaran mengenai administrasi keuangan dan perbendaharaan negara Tahun 1952.  
01 Januari 1952

- fotokopi  
1 sampul
- 1978 Berkas mengenai laporan Kementerian Keuangan tentang anggaran belanja negara:  
13 Januari-7 Desember 1953  
salinan, fotokopi  
1 sampul
- 1979 Berkas mengenai nota penjelasan Anggaran Belanja Tahun 1954  
1954  
fotokopi  
1 sampul
- 1980 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai keterangan pemerintah  
tentang anggaran negara 1953/1955.  
09 Agustus 1956  
salinan  
1 sampul
- 1981 Nota Keuangan Negara 1958 Kementerian Keuangan dan rancangan penyesuaian anggaran  
Tahun 1958 yang telah diajukan DPR dari Kepala Inspeksi Thesauri Negara kepada Para  
Inspektur Thesauri Negara  
Agustus dan 4 Desember 1957  
asli  
1 sampul
- 1982 Laporan Panitia Anggaran mengenai Nota Keuangan Negara 1960  
27 November-3 Desember 1959  
asli  
1 sampul
- 1983 Berkas Ralat Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Anggaran Belanja dan  
Anggaran Pendapatan RI Tahun 1960 oleh Departemen Keuangan  
11 Februari - 2 Februari 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 1984 Laporan mengenai pandangan atas rencana pembangunan nasional semesta berencana  
windu pertama dari Menteri Distribusi  
11 Oktober 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 1985 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang Pengesahan Anggaran Belanja Induk  
Tahun 1961 dan kuasa kepada Biro Urusan Moneter pada Thesauri Negara atau Departemen  
Keuangan RI Jakarta Tahun 1961.  
30 November 1960 - 20 Februari 1961  
tembusan  
1 sampul



- 1986 Laporan mengenai pembahasan dan usul Menteri Keuangan tentang rencana pembangunan tahap I hasil karya Depernas Tahun 1960.
- 1960  
asli  
1 sampul
- 1987 Surat tentang Pemberitahuan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 1960 dari Sub Bagian I A (Badan-badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi) yang belum disetujui oleh DPR-GR, beserta lampiran.
- 20 Januari 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1988 Berkas mengenai Perincian Pos-pos Pengeluaran Rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Dinas 1961.
- 16 Februari - 4 April 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1989 Surat Edaran Presiden RI No.3 Tahun 1961 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai Dasar Kerja.
- 24 Mei 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 1990 Surat dari Menteri Urusan Anggaran Negara kepada Menteri Pertama, Para Wakil Menteri Pertama, dan Para Menteri mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tambahan Tahun 1961, beserta lampiran.
- 26 April 1962  
tembusan  
1 sampul
- 1991 Surat Menteri Urusan Anggaran Negara kepada Menteri Pertama, tentang Penyusunan Kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1962 sesuai dengan regrouping Kabinet Kerja, beserta lampiran.
- 16 Juni 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 1992 Bahan dasar penyusunan Anggaran Belanja Tahun 1963 dari Menteri Urusan Anggaran Negara.
- 18 Desember 1962  
asli  
1 sampul
- 1993 Nota Penjelasan Departemen Anggaran Negara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965.
- Januari 1965  
fotokopi  
1 sampul

- 1994 Surat-surat mengenai rencana Penpres Tahun 1965 tentang Turut Sertanya Dana dan Daya Swasta Dalam Pembangunan.  
15 Juni 1965  
asli  
1 sampul
- 1995 Surat-surat Keputusan Ketua Presidium Kabinet Ampera RI tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 dan Nota dan Ikhtsar Perhitungan Anggaran Tahun 1967.  
26 Januari 1967 - 5 Agustus 1968  
asli  
1 sampul
- 1996 Rancangan Urgensi Program dalam bidang Politik, Ekonomi dan Keuangan, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertahanan Nasional.  
tt  
asli  
3 lembar
- 3. Perbankan**
- 1997 Surat-menyurat antara Panitia untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak dengan Bank Indonesia mengenai ijin datang ke Bank Indonesia bagi akuntan Dr. Teng Sioe Tjhan guna mencocokkan *administrasi effecten* dengan *stock effecten* di Bank Indonesia.  
19 Februari - 16 April 1958  
asli  
1 sampul
- 1998 Surat dari Bank Perneragaan Indonesia kepada Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak tentang penyampaian rekening giro, beserta lampiran  
30 Juni 1959  
fotokopi  
1 sampul
- 1999 Surat Menteri Muda Keuangan kepada Menteri Keamanan/KASAD No. 1050/U.M.I tentang tugas-tugas yang dibebankan kepada bank-bank, beserta lampiran  
10 Agustus - 13 Oktober 1959  
asli  
1 sampul
- 2000 Daftar Rekening Koran Pemerintah Tahun 1960 oleh Kementerian Keuangan Sub. Bagian Bank Indonesia.  
Januari - Desember 1960  
asli  
1 sampul
- 2001 Surat-surat yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan pengeluaran proses perbendaharaan, kewajiban badan kredit dan perusahaan negara yang tidak membayar kewajiban kepada bank negar  
30 Juni - 15 Oktober 1960  
fotokopi

- 1 sampul
- 2002 Surat Gubernur dan Direktur-Direktur Bank Indonesia No. 8/19-Dewan Moneter Rahasia tentang permohonan Nigeria untuk menjadi anggota IMF, beserta lampiran  
28 Juli 1960  
asli  
1 sampul
- 2003 Surat dari Sekretaris Panitia Kerja kepada Menteri Pertama tentang Tindakan-Tindakan Pemerintah di bidang Moneter, beserta lampiran  
25 Agustus 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 2004 Surat Kepala Bagian Umum/Pegawai Kabinet Menteri Pertama tentang himbauan kepada pegawai PT Bank Buruh untuk menabung berdasarkan Pedoman Membuka Rekening dan Menabung di PT Bank Buruh, beserta lampiran  
17 Nopember 1961  
fotokopi  
3 lembar
- 2005 Surat-surat Bank Pembangunan Indonesia tentang penerimaan progress report proyek-proyek pemerintah dan permohonan untuk diikutsertakan dalam "Asian Institute of Economic Development".  
23 Agustus 1962-22 Januari 1963  
asli  
1 sampul
- 2006 Surat-surat tentang pelaksanaan peraturan lalu lintas pembayaran uang negara secara giral.  
28 September - 4 Desember 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 2007 Surat Direktur Bank Pembangunan Indonesia kepada Menteri Urusan Research Nasional tentang penyampaian ikhtisar research/survey tentang proyek-proyek yang akan didirikan oleh Bank Pembangunan Indonesia pasca peleburan Bank Industri Negara ke dalam Bank Pembangunan Indonesia, beserta lampiran  
01 Oktober 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 2008 Laporan Team Kotoe Fesop II tentang Pengrupiahan Riau Tahun 1964, beserta lampiran.  
7 Oktober 1963 - 6 Juli 1964  
fotokopi  
1 sampul

2009 Surat Menteri Perdagangan kepada Menteri Urusan Bank Sentral mengenai Pengumuman Pimpinan LAAPLN (Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri) No. 45 tentang pemberian wewenang kepada Bank Indonesia untuk memperjuak-belikan Surat Pendorong Produksi.

12 Mei - 1 Juni 1964  
fotokopi  
3 lembar

2010 Surat dari Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Wakil Perdana Menteri III tentang pandangan mengenai usulan fungsi Bank Pembangunan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Pembangunan Swasta

20 Mei 1964  
fotokopi  
6 lembar

2011 Surat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerja kepada Para Wakil Perdana Menteri tentang putusan rapat ke I Dewan Pembangunan dan Direksi Bank Pembangunan Indonesia, beserta lampiran.

23 Mei 1964  
fotokopi  
1 sampul

2012 Surat Keputusan Perdana Menteri No.129/P.M/1964 tentang ketentuan-ketentuan mengenai pengeluaran pinjaman obligasi oleh Bank Indonesia

14 Agustus 1964  
fotokopi  
2 lembar

2013 Ichtisar Physical Progress Bank Pembangunan Indonesia Tahun 1964

1964  
fotokopi  
1 sampul

### **3. Administrasi-Organisasi**

2014 Surat-surat mengenai Panitia Penyelenggara Perubahan Tatanegara Negara Indonesia Timur.

1 Agustus - 30 November 1950  
salinan, fotokopi  
1 sampul

2015 Pengumuman bersama tentang Perundingan antara Panitia Urusan Umum Pegawai dengan delegasi Panitia Interdepartemental Jogjakarta mengenai penggabungan kementerian-kementerian.

16 Oktober 1950  
fotokopi  
1 sampul

2016 Daftar Hadir Rapat Anggota/Sekretaris Panitia Negara untuk Menyelediki Organisasi Kementerian Tahun 1952.

8 September - 27 November 1952  
asli

- 1 sampul
- 2017 Berkas mengenai perumusan tugas dan lapangan kerja serta susunan kementerian-kementerian.  
Agustus - November 1959  
salinan  
1 sampul
- 2018 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai saran-saran Kepala Staf Angkatan Udara atas Organisasi Pemerintahan.  
28 Januari 1960  
asli  
3 lembar
- 2019 Surat kabar Berita Indonesia dan naskah penjelasan mengenai Manipol-Udesk  
14 dan 25 Oktober 1960  
fotokopi  
1 sampul
- 2020 Laporan Progress Report ke II Panitia Ad Hoc Kabinet Urusan Penyusunan MPR, DPR dan DPRD.  
11 April 1961  
asli  
1 sampul
- 2021 Surat-surat dari Panitia Retooling Aparatur Negara kepada Presiden, Para Menteri mengenai retooling aparatur negara di bidang organisasi dan prosedur tata kerja, beserta lampiran.  
05 Mei dan dan Juni 1961  
salinan  
1 sampul
- 2022 Naskah perumusan hasil-hasil rapat staf inti BPU mengenai penyempurnaan organisasi  
13 Oktober 1961  
fotokopi  
1 sampul
- 2023 Surat-surat Keputusan Menteri Pertama RI tentang ralat biaya sidang dan penggolongan PN ke dalam Departemen.  
1 Maret - 15 September 1962  
salinan  
1 sampul
- 2024 Government Statement Respecting the Regrouping of the Kerja Cabinet, Delivered by H.E. First Minister Djuanda at the Opening Session of The DPR-GR  
19 Maret 1962  
fotokopi  
15 lembar
- 2025 Surat dari Menteri Urusan Anggaran Negara kepada Para Wakil Perdana Menteri, Para Menteri Koordinator Kompartemen, dan Para Menteri mengenai susunan baru dan regrouping Kabinet Kerja, beserta lampiran  
16 Desember 1963  
tembusan

- 4 lembar
- 2026 Surat Presidium Kabinet Kerja kepada Para Menteri Koordinator Kompartemen dan Para Menteri/Anggota Kabinet tentang pembentukan jawatan/dinas tingkat I provinsi/daerah tingkat I, beserta lampiran.
- 18 Agustus 1964  
fotokopi  
1 sampul
- 2027 Surat dari Waperdam Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan kepada Para Menteri Kabinet Dwikora mengenai kuesioner tentang organisasi dan administrasi, beserta lampiran.
- 21 Mei 1966  
asli, pertinggal, fotokopi  
9 lembar
- 2028 Bagan strategi pembinaan Orde Baru untuk mencapai masyarakat yang aman-tentram mulai dari tahap konsolidasi hingga tahap pembangunan
- 05 Juli 1966  
fotokopi  
4 lembar
- 2029 Buku Petunjuk Panitia Penyelenggara Raker antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain berisi tentang susunan acara, daftar peserta dan akomodasi
- 24 Juli 1967  
fotokopi  
1 sampul
- 2030 Naskah tanggapan terhadap hasil karya Panitia Ad Hoc II MPRS mengenai Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistem UUD 45
- 1967  
asli  
1 sampul
- 2031 Struktur pimpinan dan pengendalian KISS 17 proyek antara lain: pangan, penanaman modal asing, prasarana, pemilihan umum, Irian Barat, dan hubungan luar negeri
- 01 Januari 1968  
asli  
1 lembar
- 2032 Surat Keputusan Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara No. 2/Menpan/1968 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.
- 25 Juli 1968  
asli  
4 lembar

#### **4. Pertahanan dan Keamanan**

2033 Moeso Spreekst op Massa Bijeenkomst te Madioen

13 September 1945  
asli  
2 lembar

- 2034 Surat dari Pimpinan harian PMI kepada Menteri Pertahanan mengenai keadaan Dr.Th. Pigeaud.  
21 Maret 1946  
asli  
4 lembar
- 2035 Surat Pengaduan dari Soekarsono T.R.I (Prajurit) tentang perampasan senjata api yang dilakukan oleh Polisi ALRI Madiun.  
06 September 1948  
asli  
1 lembar
- 2036 Mosi dari TRI dan Laskar Perjuangan di Tegal kepada Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Laut dan Udara RI tentang desakan untuk mengangkat Soegirwo sebagai Panglima ALRI Pangkalan IV Tegal dan pimpinan militer lainnya di wilayah Tega  
14 Oktober 1946  
asli  
2 lembar
- 2037 Surat dari Kepala Sekretariat Markas Besar Tentara kepada Kementerian Pertahanan Bagian Penerangan mengenai penyampaian berita antara terkait perjalanan Panglima Besar ke Jakarta yang dihentikan oleh pasukan Inggris  
23 Oktober 1946  
asli  
4 lembar
- 2038 Siaran Kilat: Suara Rakyat Revolusioner mengenai tuntutan Merdeka 100%  
20 Nopember 1946  
salinan  
2 lembar
- 2039 Surat dari Kepala Staf Kementerian Pertahanan kepada Menteri Pertahanan mengenai suara-suara disekitar persetujuan Indonesia - Belanda  
30 November 1946  
salinan  
8 lembar
- 2040 Surat dari Kemeterian Pertahanan kepada Presiden mengenai kejadian-kejadian setelah Jepang menyerah di Ambon dan surat-surat mengenai masalah tahanan di Tasikmalaya;  
4 Februari - 22 Maret 1947  
asli  
1 sampul
- 2041 Surat dari Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara kepada Sekretariat Kementerian Pertahanan mengenai daftar korban kyahi dan Hizboellah yang gugur pada pertempuran di Jawa Tengah.  
20 Mei 1947  
asli  
7 lembar

- 2042 Verslag singkat rapat informatorisch antara I.F.I.S.E.J/K.P.V/ masing-masing S.O.I angkatar perang tentang pembentukan suatu badan intelejen di Jawa Timur  
10 Oktober 1947  
asli  
3 lembar
- 2043 Teks pidato dari Komisi Tiga Negara mengenai anjuran perdamaian  
16 November 1947  
konsep  
3 lembar
- 2044 Surat dari Menteri Pertahanan kepada Kepala Markas Tentara Laut mengenai perbantuan beberapa opsir tinggi ALRI ke Kementerian Pertahanan Bagian V, disertai lampiran.  
06 Desember 1947  
asli  
5 lembar
- 2045 Surat-surat keterangan tentang tawanan politik di Nusa Kambangan Tahun 1947 oleh Delegasi RI, Panitia Tawanan Politik  
1947  
asli  
1 sampul
- 2046 Surat Staf Umum Tentara Laut RI tentang pertempuran yang terjadi di Front Karang Anyar.  
10 Januari 1948  
salinan  
2 lembar
- 2047 Surat perintah dari Presiden RI Panglima Tertinggi Angkatan Perang No.2/P.T/48 tentang Pengadaan Panitia Hidjrah yang bertugas melaksanakan persetujuan genjatan senjata.  
20 Januari 1948  
asli  
1 lembar
- 2048 Surat dari Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara (MBT) kepada Menteri Pertahanan tentang nama-nama opsir yang diperbantukan kepada BMT dalam rangka pelaksanaan gencatan senjata dan kedatangan Komisi Tiga Negara  
21 Februari 1948  
asli  
1 lembar
- 2049 Surat ketetapan Commandant Territoriaal Komando Jawa Timur tentang No. 0037/P/T.C.D.T/Bg.III Pers/48 tentang penetapan Soetomo Chasandoerjat sebagai Wakil Kepala Staf merangkap Kepala Staf II  
24 April 1948  
tembusan  
2 lembar



- 2050 Security Council Committee of Good Offices on the Indonesian Question, Conference with The Delegations of the Netherlands and the Republic of Indonesia, Steering Committee: Extract from the New York Times of 30 April Submitted by the Netherlands Delegation at the Eighteenth Meeting
- 06 Mei 1948  
fotokopi  
1 sampul
- 2051 Penetapan Wakil Presiden, Menteri Pertahanan RI No.A/242/1948 tentang Tanda Angkatan (Insigne) anggota Angkatan Darat TNI
- 21 Mei 1948  
salinan  
2 lembar
- 2052 Surat keputusan Menteri Pertahanan RI No.J/255/1948 tentang penetapan anggota - anggota angkatan laut antara lain R.Sumarno dkk. dalam pangkat dan jabatan
- 03 Juni 1948  
salinan  
2 lembar
- 2053 Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. SK/8/ksal tentang pengangkatan Kolonel R.Soebijakto sebagai Kepala Pusat Pendidikan Angkatan Laut
- 07 Juni 1948  
tembusan  
1 lembar
- 2054 Surat perintah Kepala Jawatan Keuangan, Kementerian Pertahanan No.62/DI/UM tentang perintah kepada Mayor R. Soerjo (Pembantu Inspektur Jawa Tengah) untuk mengurus dan menyelenggarakan Tactisce Fondsen buat Pertahanan Jawa Tengah
- 14 Juni 1948  
tembusan  
2 lembar
- 2055 Surat Kepala Perlengkapan C.A.I. kepada Perwakilan ALRI Corps Armada I tentang kekurangan perlengkapan di C.A.I. (Corps Armada I
- 28 Juni 1948  
asli  
1 sampul
- 2056 Surat dari Kepala bagian Intendance Kementerian Pertahanan kepada KSAD tentang usulan inspeksi dalam rangka penyempurnaan Pekerjaan intendance dalam satuan angkatan darat.
- 07 Juli 1948  
asli  
1 lembar
- 2057 Surat perintah harian Bagian Intendance Kementerian Pertahanan kepada Kepala Gudang Daerah IV Urusan Hasil Minyak Angkatan Perang untuk mengatur pengeluaran pengiriman minyak tanah pada DPR di Jogjakarta, Kedu dan Madiun
- 09 Juli 1948

fotokopi  
1 lembar

- 2058 Surat-surat Perintah dari Kepala Intendance Kementerian Pertahanan antara lain mengenai perundingan mempercepat penjualan gula untuk biaya reformasi angkatan perang, menyelenggarakan pendaftaran senjata yang ada dibagian Kementerian Pertahanan, menentukan urgantie program sesuai Instructie K.S.A.P dan pengangkutan barang -barang kepunyaan Intendance Kementerian Pertahanan dari Pacitan ke Jakarta  
16 Juni - 21 September 1948  
asli  
1 sampul
- 2059 Surat dari Kepala Staf Teritorial Komando Jawa tentang daftar nama yang mendapat pengangkutan sebagai perwira menengah dan perwira pertama an.Suprpto, Sungkono dkk., dalam rangka melancarkan jalannya Rasionalisasi dan Rekonstruksi Angkatan Perang.  
30 Juli 1948  
asli  
2 lembar
- 2060 Surat Perintah Kepala Jawatan Perlengkapan kepada Kepala Perlengkapan Sub teritorial Malang/Basuki dan Kediri tentang penyerahan tugas jaminan TLRI dll kesatuan diluar S.T.C Malang/Basuki kepada Kepala Perlengkapan Sub teritorial Kediri  
04 September 1948  
tembusan  
1 lembar
- 2061 Surat-surat dari Kepala bagian kendaraan Batalyon 151 tentang Permintaan kendaraan dinas, SIM, dan gerobak Tahun 1948.  
7 Oktober - 15 November 1948  
asli  
7 lembar
- 2062 Penetapan Menteri Pertahanan tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dari Kementerian Pertahanan dan Anggota Angkatan Perang yang tidak termasuk dalam sesuatu kesatuan.  
11 Oktober 1948  
asli  
1 sampul
- 2063 Regerings Voorlichting Dienst : Redo Van de Hoge Vertegenwoordiger bij de Installitie van de wali Negara Van Sumatera Selatan op 28 Desember  
27 Desember 1948  
fotokopi  
7 lembar
- 2064 Surat-surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nasional RI tentang Kepegawaian (AD,AL, Badan Puat Intelligence dan Veteran), Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata.  
1948 -1966  
salinan

- 1 sampul
- 2065 Laporan mengenai hasil pertemuan segi tiga RIS, RI dan NIT membahas tentang kondisi politik-keamanan di NIT.
- 9-10 April 1950  
salinan  
1 sampul
- 2066 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri RIS kepada Menteri Pertahanan mengenai salinan kawat dari Menteri Penerangan tentang kedatangan tentara KNIL beserta keluarganya di Minahasa.
- 10 Agustus 1950  
asli  
3 lembar
- 2067 Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tentang kesempatan kepada organisasi perjuangan dan orang yang mempunyai senjata untuk diterima dalam APRI atau Polis
- 14 Nopember 1950  
fotokopi  
1 lembar
- 2068 Surat dari Jaksa Agung kepada Wakil Perdana Menteri mengenai Laporan Gubernur Jawa Tengah tentang pamflet TII di daerah Brebes
- 24 Februari 1951  
asli  
3 lembar
- 2069 Surat dari Ketua Staf "K" Pusat kepada semua Staf "K" Provinsi mengenai anjuran untuk berhubungan dengan Jawatan Agama dalam rangka mengembalikan keamanan, khususnya di Jawa Barat yang masih terdapat Darul Islam
- 18 April 1951  
kopi  
2 lembar
- 2070 Surat-surat mengenai penghapusan SOB di beberapa daerah yang sudah aman antara lain Sumatera Selatan.
- 3 Juni 1952 - 26 April 1955  
asli  
1 sampul
- 2071 Surat Keputusan Kekuasaan Militer Pusat dan Instruksi Menteri Pertahanan tentang Peraturan Pembatasan Penerbangan di Atas Daerah Jawa Barat
- 10-25 Juni 1952  
tembusan  
7 lembar
- 2072 Laporan Jawatan Kepolisian Jakarta Dinas Reserse Kriminil tentang catatan keamanan Perkebunan.
- Juli - September 1952  
fotokopi  
1 sampul



- 2073 Surat dari Kepala Staf Angkatan Perang kepada Menteri Pertahanan mengenai nota bantuan militer dan keamanan di laut dan nota penggantian kerugian berdasarkan pengambilan untuk dipakai oleh pemerintah militer.
- 28 Juli 1952  
salinan  
1 sampul
- 2074 Laporan gangguan keamanan di wilayah Jawa Tengah pada waktu terjadi kekacauan (peristiwa Pemberontakan DI/TII)
- 11 September - 28 November 1952  
tembusan  
1 sampul
- 2076 Surat dari Kepala Bagian Keamanan kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai penyampaian surat "Tanda Anggota Setuju" dari Masjumi dalam usahanya di pemilihan umum.
- 14 Januari 1954  
asli  
3 lembar
- 2077 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai organisasi ilegal bernama PRT (Pembebasan Rakyat Tertindas) di daerah Lombok.
- 21 Nopember 1956  
asli  
2 lembar
- 2078 Laporan Panitia Interdepartemental urusan penataran Angkatan Laut
- 01 Maret 1957  
asli  
1 sampul
- 2079 Surat-surat tentang pengajuan permintaan kebutuhan-kebutuhan P.PU.V Suad - I Kementerian Pertahanan staf AD seperti kendaraan, persenjataan, ATK, dll., Tahun 1959.
- 15 Maret 1959  
asli  
3 lembar
- 2080 Surat-surat mengenai Musyawarah Nasional Perdamaian untuk Perlucutan Senjata, Memperkokoh Prinsip2 Bandung dan Pelaksanaan Manifesto RI
- 16 Oktober 1959 - 21 Januari 1960  
asli  
1 sampul

- 2081 Surat Keputusan Menteri Muda Kepolisian tentang Peraturan Laboratorium Departemen  
Kepolisian.  
20 Januari 1960  
salinan  
2 lembar
- 2082 Peraturan Menteri Muda Kepolisian tentang Lembaga Pengawasan Kulturil/Sosial  
Departemen Kepolisian  
12 Februari 1960  
asli  
2 lembar
- 2083 Surat-surat Keputusan Menteri / Kepala Kepolisian Negara tentang penunjukan pejabat dan  
penetapan tanda pengenal di Kepolisian  
19 Maret - 28 Desember 1960  
asli  
1 sampul
- 2084 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No.2 Tahun 1960 tentang Mahkamah Angkatan Darat,  
Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam Keadaan Perang  
09 Mei 1960  
salinan  
9 lembar
- 2085 Peraturan Peperti No.4 Tahun 1960 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan  
(Lock-Out) di Perusahaan-perusahaan, Jawatan-jawatan dan Badan-badan yang vital.  
17 Juni 1960  
salinan  
6 lembar
- 2086 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Menteri Pertama mengenai peristiwa  
tertembaknya dua wanita Tionghoa oleh Tentara akibat pembangkangan pemulangan Hoa  
Kiau di Cimahi.  
04 Juli 1960  
asli  
2 lembar
- 2087 Surat-surat dari Peperti mengenai penertiban surat kabar dan majalah  
12 Juli 1960 - 12 Februari 1961  
salinan  
1 sampul
- 2088 Surat dari Departemen Angkatan Darat Kepada Kabinet Perdana Menteri tentang permintaan  
daftar nama-nama para sarjana yang akan dibebaskan / ditanggihkan dari kewajiban militer  
darurat pada Angkatan Darat.  
24 Agustus 1960  
asli  
1 sampul

- 2089 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No.6-8 Tahun 1960 tentang Penghentian Sementara Segala Kegiatan-Kegiatan Politik dan Pencabutan Peraturan tentang Larangan Organisasi Masyumi, Parkindo, PSI, IPKI di daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara dan Tengah.  
13 September - 1 Oktober 1960  
salinan  
4 lembar
- 2090 Peraturan Menteri/Kepala Kepolisian Negara No.7/Prt-/M.K/1960 tentang Pembentukan Kepolisian komisariat-komisariat Bali, NTB, NTT  
23 Nopember 1960  
salinan  
2 lembar
- 2091 Peraturan-peraturan Penguasa Perang Tertinggi No.11-21 Tahun 1960 antara lain tentang Penutupan Daerah dan pelayaran di Perairan Sumatera, Kalimantan Barat, Pantai Selatan Jawa Barat, Sulawesi Utara, Teluk Halong dan Teluk Ambon, Kewajiban melaporkan keterangan gerak-gerik kapal, Militerisasi Kepolisian Negara  
29 November - 19 Desember 1960  
salinan  
1 sampul
- 2092 Surat dari Kepala Staf Peperti kepada Pedarsipda mengenai penyampaian Undang-Undang No.75 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1960 tentang Veteran.  
05 Desember 1960  
tembusan  
1 sampul
- 2093 Resume Progress Report Assisten 5 M/Pangad di Bidang Civic Mission  
1960  
asli  
1 sampul
- 2094 Peraturan-peraturan Peperti No.1, 5, 9-15 Tahun 1961, antara lain tentang Kegiatan Politik dalam Keadaan Bahaya, Penyebaran Majalah Time dan Life, Instalasi Radio untuk Kepentingan Komunikasi, Lembaga Persahabatan antar Bangsa  
11 Januari - 18 Juli 1961  
salinan  
1 sampul
- 2095 Surat-surat dari Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi mengenai Pelaksana Kuasa Keadaan Bahaya, latihan militer bagi pamong praja dan surat izin masuk bagi orang asing.  
13 Februari - 22 Juli 1961  
tembusan  
1 sampul
- 2096 Surat dari ketua Dewan pimpinan harian B.K3.N kepada Dewan Pimpinan Yayasan B.K3.N tentang Peninjauan ke Jawa Timur dan Nusa Tenggara  
14 Februari 1961  
tembusan

- 1 sampul
- 2097 Surat dari Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi mengenai dekrit presiden, pidato radio Kepala Staf dan peraturan-peraturan tentang penurunan tingkat keadaan bahaya  
30 Maret 1961 - 29 Desember 1962  
fotokopi  
1 sampul
- 2098 Surat dari Wakil Menteri Pertama I kepada para Menteri mengenai pernyataan pendapat DPR-GR tentang perlucutan senjata dan percobaan senjata nuklir.  
24 Oktober 1961  
kopi  
6 lembar
- 2099 Terbitan "Dokumenta Informasia" dari Departemen Penerangan antara lain mengenai Irian Barat, disertai Peta Pulau Salawati, Kaibus dan sekitarnya  
6 Januari - 21 September 1962  
asli  
1 sampul
- 2100 Surat dari Menteri Pertama RI kepada Seluruh pegawai Kabinet Menteri Pertama tentang pendaftaran menjadi sukarelawan Trikora  
19 Januari 1962  
asli  
2 lembar
- 2101 Surat dari Managing Director Keck Seng dan Co.Ltd. Kepada Panglima Palembang mengenai shipment of 2000 Bags China white rice from Singapore to Hongkong via Palembang.  
06 Maret 1962  
tembusan  
4 lembar
- 2102 Surat ralat dari Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi terhadap Intruksi Penguasa Perang Tertinggi No.3/Pepertri Tahun 1962 tentang Operasi Ekonomi bagi Daerah-Daerah Perbatasan Irian Barat.  
05 Mei 1962  
asli  
5 lembar
- 2103 Surat Kepala Urusan Tata Usaha Staf Penguasa Perang Tertinggi tentang penyampaian brosur "Mengenal Sebagian Dari Tanah Air Kita, Irian Barat", beserta lampiran  
25 Agustus 1962  
asli  
1 sampul
- 2104 Brosur Situasi Pembangunan Khusus Angkatan Kepolisian Negara dari Departemen Kepolisian Tahun 1962, beserta surat pengantar.  
September 1962  
asli  
2 lembar



- 2105 Surat dari Staf Penguasa Perang Tertinggi/Ketua Gabungan V Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat kepada semua Menteri mengenai status Komponen Sipil Tim Koterpra, I, II, dan II yang telah dikembalikan ke Jakarta oleh Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
- 22 September 1962  
asli  
1 lembar
- 2106 Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tentang Indoktrinasi Pejabat-pejabat Departemen Pertanian dan Agraria dalam rangka Penyelesaian Irian Barat
- 03 Desember 1962  
salinan  
1 lembar
- 2107 Terbitan "Berita-Berita Penting Sepekan: Pembebasan Irian Barat No.4 dan 23 oleh Seksi Penerangan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat
- 1962  
asli  
1 sampul
- 2108 Surat-surat dari Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat kepada para menteri mengenai pendataan dan kondisi petugas komponen sipil di Irian Barat
- 16 Januari - 23 Februari 1963  
asli  
8 lembar
- 2109 Surat Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi No. 0890/Peperti/1963 tanggal 8 April 1963 tentang penyampaian Surat Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 1963 tentang pengangkatan Arudji Kartawinata sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.
- 21 Maret 1963  
salinan  
2 lembar
- 2110 Surat dari Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat kepada seluruh Departemen Urusan Irian Barat tentang pelancaran pengangkutan logistik ke Irian Barat
- 10 Juni 1963  
salinan  
1 lembar
- 2111 Surat Edaran Menteri Pertama RI kepada para menteri tentang pembentukan *task force* untuk pemutusan hubungan ekonomi dengan Malaysia, dedolarisasi Kepulauan Riau dan pengamanan.
- 07 Oktober 1963  
fotokopi  
5 lembar

- 2112 Surat Sekretaris Umum Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi No. 0473/MPPR/1963 tanggal 4 Nopember 1963 tentang penyampaian Keputusan Presiden No. 213 Tahun 1963 tentang pengangkatan Dirk Samuel Ajamiseba (Anggota DPRD-GR Provinsi Papua Barat), sebagai Wakil Ketua II DPRD-GR Provinsi Papua Barat serta surat Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan tentang perubahan istilah-istilah Civic Mission dan Civic Action menjadi "Operasi Karya Angkatan Bersendjata" (lampiran tidak lengkap).
- 4 Nopember 1963  
salinan  
2 lembar
- 2113 Surat dari Wk. Ketua G-4/Logistik KOTI kepada Waperdam I mengenai pembangunan insfranstruktur jaringan-jaringan logistik di Kalimantan Barat
- 28 Desember 1963  
asli  
1 sampul
- 2114 Pernyataan Badan Musyawarah Angkatan 45 Wilayah Kecamatan Cikampek tentang keadaan situasi Daerah Tk. II Karawang
- 27 Januari 1964  
asli  
2 lembar
- 2115 Formulir pendaftaran Gerakan Sukarela untuk Konfrontasi Total terhadap Malaysia
- 11 April 1964  
asli  
4 lembar
- 2116 Instruksi Kepala Staf KOTI kepada semua Departemen, Instansi dan Perusahaan Negara untuk mencegah terjadinya usaha-usaha subversif
- 06 Mei 1964  
salinan  
1 lembar
- 2117 Surat dari BW.Lapian kepada Presiden RI mengenai pendapat bahwa kegagalan pemerintahan di Sulawesi Utara Khususnya Minahasa karena disebabkan pemberontakan Kawilarang, Sumual dkk
- 22 Mei 1964  
asli  
6 lembar
- 2118 Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No. 15/KOTI/Tahun 1964 tentang Kebijakan Pengerahan/Penggunaan Sukarelawan/Sukarelawati untuk Tugas-Tugas di Bidang Pendidikan Indoktrinasi di Daerah-Daerah Perbatasan
- 25 Mei 1964  
salinan  
3 lembar
- 2119 Intruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi No.18 / KOTI /1964 tentang Petunjuk-petunjuk pelaksanaan intruksi KOTI untuk melakukan pengamanan dokumen, program pemerintah, personil dan peralatan

- 29 Juni 1964  
salinan  
2 lembar
- 2120 Instruksi Presidium Kabinet Republik Indonesia No.11/D/Instr/Tahun 1965 tentang Pengamanan Pendaftaran dan Gerakan Tanda Kebaktian Pengusaha Swasta terhadap Revolusi dan Mengkoordinir Kerjasama antara BAMUNAS dengan Instansi - Instansi Lain.
- 27 Februari 1965  
salinan  
2 lembar
- 2121 Surat-surat kepada Kotrar antara lain mengenai kasus penghinaan terhadap Muhamadiyah oleh Komandan Resort Kepolisian kota Malang, tuntutan pembubaran SOKSI oleh SBTI dan pemukulan penduduk oleh Lettu Koramil Subang
- 28 Agustus, 5 dan 27 September 1965  
asli  
4 lembar
- 2122 Terbitan "Masalah2 Dunia" No.7/II mengenai Afrika oleh Penerangan Komando Operasi tertinggi.
- 01 September 1965  
asli  
1 sampul
- 2123 Pernyataan keputusan Ormas, Parpol, Sarekat Buruh, Front Nasional, Ikatan/paguyuban se Indonesia tentang desakan Kepada Presiden untuk membubarkan PKI serta organisasi pendukungnya dan menindak tegas terhadap pelaku dari G 30 S/PKI.
- 20 September - 06 Desember 1965  
asli, fotokopi, tembusan  
1 sampul
- 2124 Berkas mengenai pembentukan Tim Task Force Siap Siaga di Departemen Perkebunan dalam rangka pengamanan pasca Gerakan 30 September (G. 30/S)
- 02 Oktober - 26 November 1965.  
salinan, fotokopi  
1 sampul
- 2125 Surat-surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya tentang Penghentian Sementara Kegiatan-Kegiatan Organisasi Politik dan Organisasi Massa yang Terlibat Dalam Peristiwa "Gerakan 30 September" dan Penghentian Sementara Kegiatan - Kegiatan "SOBSI" Beserta Organisasi - Organisasi yang Tergabung / Bernaung di Dalamnya.
- 18 dan 27 oktober 1965  
salinan  
2 lembar
- 2126 Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Instruksi dari Menteri Iuran Negara tentang pembersihan dan larangan bekerja bagi pegawai yang terlibat Gerakan 30 September.
- 26 Oktober dan 1 November 1965

- fotokopi  
6 lembar
- 2127 Buku Catatan Latihan Operasi Gabungan antar Sesko Tahun 1965.
- 1965  
asli  
1 sampul
- 2128 Denah perjalanan Presiden Soekarno, Omar Dani, Supardjo, D.N. Aidit pada 30 September - 1 Oktober 1965 dan catatan tentang implementasi paham politik Bung Karno.
- 1965  
asli  
2 lembar
- 2129 Surat Keputusan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds and Forces tentang Pelarangan dan pembubaran organisasi swasta B.K.S.E., BAKUNA, MAGUNA, KENSI dan organisasi - organisasi swasta yang mempunyai nada, gerak dan usaha yang sama dengan O.P.S.
- 05 Februari 1966  
salinan  
3 lembar
- 2130 Risalah Laporan Intelijen tentang politik luar negeri periode I Februari 1966 - 15 November 1966 oleh Komando Intelijen Negara
- 08 Desember 1966  
asli  
1 sampul
- 2131 Hasil-hasil Musyawarah PEPELRALA SUM dengan Para Gub/KDH dan DPRD-GR Tingkat I se-Sumatera di Medan oleh Komando Ganjang Malaysia Mandala Siaga Koandahan Sumatera, beserta lampiran
- 7 Februari 1967  
asli  
1 sampul
- 2132 Surat dari Sekretaris Presidium Kabinet Ampera kepada Menteri Panglima AL mengenai laporan Komando Intelejen Negara tentang laporan penyelundupan kapal-kapal dari Surabaya ke Singapura dan Hongkong
- 29 Mei 1967  
pertinggal  
1 sampul
- 2133 Laporan mengenai masalah-masalah khusus bidang ekonomi dan hankam di berbagai daerah.
- 1967  
fotokopi  
1 sampul

## INDEKS NAMA ORANG

### A

Abdulgani, Roeslan (Dr. H.)	: 172, 616, 1228
Abdullah, Maskan (Ir.)	: 1388
Abdulrachman (Drs.)	: 1144
Abdulrachman, Arifin (Dr.)	: 1208
Achmad M.P.	: 1247
Adisaputro, Sudarjo (Komodor Udara)	: 1353
Adisendjaja, M.R.	: 1810
Affandi, Achmad (Ir.)	: 1371
Affandi, Ali (Kolonel Inf.)	: 1358
Aidit, D.N.	: 2128
Ajamiseba, Dirk Samuel	: 2112
Alisyahbana, Iskandar (Prof. Ir. Ing.)	: 1388
Almatsier, F.R. (Drs.)	: 1271, 1871
Alwie, Barmawie (Drs.)	: 1308, 1313
Amin, M. Ali	: 1366
Anrazad, Mohammad Sofjan (Letkol. SPL.)	: 1189
Arief, M.	: 1228
Arsono, R. NG.	: 1241
Astrawinata (SH.)	: 1229
Atdmaja, A. Kadir Prawira (Brigadir Jenderal TNI)	: 1370
Atmadibrata, Noor	: 1203
Atmadja, R.I. Suri	: 1180
Awaludin, Djamin (A.K.B. POL. Dr.)	: 1267

### B

B. Mang Reng Say (Drs.)	: 1285
Batubara, Cottan Anwar (Ir.)	: 1225
Boediman, C.	: 1394
Boer, M. Chodri Alamsjah (Drs.)	: 1393
Bolang, Jopie	: 1218
Brodjonegoro, Soemantri (Prof. Dr. Ir.)	: 1369
Budiarjo, Ali (SH)	: 1178
Burhanudin, Sofjan Aziz (SH)	: 1167
Bustami, A.J. (Kolonel Inf.)	: 1174

### C

Cholid, Idham	: 1657
---------------	--------

**D**

Dani, Omar	: 2128
Danuningrat, Abdul Muttalip	: 1141
Daranin	: 1316
Datuk, A.M.	: 1247
David Gee Cheng	: 1198
Djaelani, R.E.	: 1215
Djaffri, Chamroel (Ir.)	: 1218
Djajadi	: 1195
Djajadiningrat, K.I. (SH.)	: 1159
Djakoesoemo, R. Roesman (S.H.)	: 1305
Djambek, H. Moh.	: 1231
Djarmika, Sastra	: 42
Djohari (Brigadir Jenderal TNI)	: 1334
Djojohadikusumo, Sumitro (Dr.)	: 1349
Djokosuroto, M.A.	: 1387
Domopranoto (Drs., M.P.A., A.K.B. POL.)	: 1267

**E**

Effendi, Nur Sulaiman	: 1239
Effendy, F.	: 1528
Endrawan, M.	: 1269
Erningpradja, Ahem	: 1141

**G**

Gandhi (Drs.)	: 1363
Gani (Kolonel Inf.)	: 1174
Goelangge, R. Akoep	: 1108
Gondodipoero, Handrito	: 1219
Gondowardojo, Hadi	: 1192

**H**

Hadhiman, D.	: 1193
Hadiatmodjo, Soewarno (Drs., M.P.A.)	: 1230
Hadjar, Ibnu	: 1277
Hafiluddin D, A. (Brigadir Jenderal TNI)	: 1339, 1364
Harahap, Barlianta (Drs.)	: 1392
Harahap, Potan Arif (SH.)	: 1226
Hardjowijono, C.B. (Ir.)	: 1217
Harjoko, R. Soetedjo	: 1215
Harjono (Kapten)	: 593
Hasan, H. Mohammad	: 1284
Hendarsin, Soehendro (SH.)	: 1340

Hertantijanto, SH.	: 1153
Hidajat (Letnan Jenderal)	: 1164, 1183, 1273
Hidajat, R. Anda	: 690, 1161
Hidayat, S.	: 1394
Hoetabarat, Frans	: 1219
Howarth, Margery D.	: 1830

**I**

Ichsan, Mohammad (SH.)	: 151, 1233
Idris, Loewis Mohamad	: 1160
Ilyas, M.	: 36, 44
Isa, Moh.	: 1274
Iskandar, Gunung (Ir.)	: 1145

**J**

Jamani bin Hadji Antemas	: 1361
Jani, Achmad (Major Jenderal TNI)	: 1184
Johannes, Rijper Edestius (Pastor)	: 1131
Jusuf, A. (Kolonel)	: 1136
Jusuf, Achmad (Major Jenderal TNI)	: 1295
Jusuf, Moch. (Major Jenderal TNI)	: 1311

**K**

Kadariusman (SH.)	: 1340, 1393
Kadir, Abdullah (Kom.Bes)	: 1374
Kamaroedin	: 1222
Kamarsjah (Drs. )	: 1392
Kardiman (Ir.)	: 1196
Karjowinangun, Tugio	: 1194
Kartasasmita, Husein	: 1266, 1281
Kartawinata, Arudji	: 2109
Kartowardojo, Soetedjo	: 1190
Kastubi, Achmad Hasan	: 1216
Kawilarang	: 2117
Kertoleksono, Soedinarto (Ir.)	: 1213
Kertopati, R.M. Soeprastowo	: 1205, 1280
Kertopati, Rubiono (Brigadir Jenderal Dr.)	: 1202
Khan, Ajub	: 17
Khruschov, Nikita	: 160
Kodiat, Benito (M.SE)	: 1214
Koentjoro (Major)	: 1202, 1175
Koesoemahardja, Mohamad Djoeana (SH.)	: 1153
Koesoemodiwirjo, Abd. Rasid	: 1203

Koesono, Wirjono	: 1255
Kosasih, A.	: 1147
Kramadibrata, Soedjono (Ir.)	: 1160
Kusnoroto (SH.)	: 1236
Kusuma, Adnan (Ir. )	: 1190

**L**

Lamo, Achmad (Kolonel Inf.)	: 1336
Legowo (Kom.Bes. Drs.)	: 716
Lim Tjin Tek (Ir.)	: 1198
Lopulisa, Leo (Brigadir Jenderal TNI)	: 1341
Lubis, D. A. (Prof. Dr.)	: 1371
Lubis, Radjamin	: 1146

**M**

Malik, Adam	: 1324, 1540
Manan, A. (Brigadir Jenderal TNI)	: 1339
Mangkupradja, Gatot	: 1124
Manuaba, I.B.P.	: 1197
Maogimon, J.E	: 641
Margono, R.	: 1530
Marjono, R.	: 1216
Martadinata, R.E. (Laksamana Muda)	: 1164
Marwoto (Letkol. Inf.)	: 1203
Masrin (SH.)	: 1147
Mochtar, Ateng	: 1221
Moeljowijadi, Soegito (Ir.)	: 1214
Moerad, Zainal (SH.)	: 1224
Moeso	: 2033
Muljomiseno, Rachmat	: 1187
Mursalin (Laksamana Muda)	: 1375
Murtamadji (Komodor Laut)	: 1335
Mustofa, Zainal (K.H.)	: 1502
Muttamat, Siswanto	: 1223

**N**

Nasuhi, Achmad	: 1365
Nasution, Alisati	: 1596
Nasution, Surungan	: 1395
Natanegara, Jusuf	: 1271
Nitisastro, Widjojo	: 1343
Notohamiprodjo	: 1209
Notoprodjo, Soesman	: 1222
Notosuwarso	: 1333
Nusjirwan (Ir.)	: 1192



Nyoliap, Mathias Lyen (Letda) : 353

## O

Oei Tjoe Tat (SH.) : 1229

Oesman, Rochman (Ir.) : 1213

Oey Giok Lian : 1677

Onim, Alex : 1163

Osman (SE.) : 1234

## P

Padmadiwiria, Prijatna (Kolonel Inf.) : 1171

Pandelaki, H.A. : 1363

Panggabean, M. (Drs.) : 1385

Parmopranoto, Soemarso : 1204

Pindandojo, Hatmadi (Ir.) : 1148

Pitoy, J.J. (Ir., MA.) : 1385

Poegoeh, Soejoso (Kolonel Hk.) : 1250

Poespoatmodjo, Wiratno (SH) : 1268

Poniman (Brigadir Jenderal TNI) : 1334

Prajitno, Abu (Ir.) : 1296

Prajudi (Prof. Dr. Mr.) : 1879

Prawirakusumah, Abdurrachman : 1331

(Brigadir Jenderal)

Prawirohardjo, Saksono (Ir.) : 1146

Prawirohardjo, Soeroso H. (Drs., M.A.) : 1379

Prawirosentono, Soewasis : 1212

Pringgodarsono, Sajidi (Ir.) : 1242

Probosawitro, Soetjipto (SH) : 1156

Prodjodikoro, Wirjono (SH.) : 1229

Prodjosumitro : 1192

Puspojudo, Wilujo (Brigadir Jenderal

TNI) : 1174

Putih, Nazar Moenek Datuk Bandoro : 1316

## R

Rachmat, Basuki (Let. Djen. TNI) : 1391

Ramandey, Manase Bernabas : 1258

Ranawidjaja, Usep : 1262

Rangkuti, Bachrum (Kolonel Laut,

Drs.) : 1375

Ranowidjojo, Soewondo : 1161

Reksoatmodjo, Harsono : 1166

Reksopoetro, R. Soedomo (Ir.) : 1190

Riwut, Tjilik : 1876

Roesman	: 1215
Rooseno (Prof. Ir.)	: 1867
Rusli, R. (Brigadir Jenderal TNI)	: 1381
<b>S</b>	
Sachri, Sobandi (Ir.)	: 1220
Sadiman, J. (Ir.)	: 1194
Saenun	: 169
Safaat	: 1242
Safioen (Ir.)	: 1214
Sahertian, Jan Charles Jacob	: 1527
Sakirman (Ir.)	: 1260
Salatun, J. (Komodor Udara)	: 1353
Saleh, A. Nawawi	: 1274
Saleh, Azis (Mayor Jenderal Dr.)	: 1141
Saleh, Chaerul	: 1533
Saleh, Mohamad Effendi (Ir.)	: 1309
Salim, Darry	: 1372
Sangen, T.T	: 1530
Santoso (Brigadir Jenderal, SH)	: 1232
Santoso, Maria Ulfah	: 42, 1177
Sardjoe, SH	: 1160
Sardjono, Rusiah	: 1141
Sartika, Raden Dewi (Pahlawan)	: 1297
Sastrohadikoesoemo, R. Soerjono	: 1329
Sastrosoeparto, Swasono Adi (Ir.)	: 1213
Saubari, Mohamad (SH.)	: 1176
Sawarno	: 1158
Saweri, Gaspe	: 1162
Seda, Frans (Drs.)	: 1276, 1285
Senduk, H.	: 1249
Sentanu, R.B.	: 1959
Siagian, Gajus	: 1262
Sianipar, J.	: 1218
Sie Kwat Soen (Ir., Msc)	: 36
Sigar, Philippe Jules	: 1254
Sindhunata (Letnan Hk. A.L. SH.)	: 1182
Siregar, Amir Husin	: 1190
Sjaechu, H. Achmad	: 1199
Soebekti, Moechamad (Ir.)	: 512
Soebijono (Kolonel C.A.D.)	: 1174
Soebroto, Didi (Ir.)	: 1223
Soebroto, Toeloes	: 1252
Soedarman, S (CPM)	: 1364
Soedarmo (Capt.)	: 1167

Soedirgo (Mayor Jenderal TNI)	: 1378, 1382
Soedjahri, Imam	: 682, 1179
Soedjono (Duta Besar)	: 1299
Soegama, Joga (Brigadir Jenderal TNI)	: 1378
Soeharto (Dr.)	: 1300
Soeharto (Mayjen, Presiden)	: 171, 184, 185, 1490, 1505
Soehartono	: 643, 1212
Soejatmo, R. (Kol. Inf.)	: 1990
Soejatno (Ir.)	: 1217
Soekamardi	: 1212
Soekamto, R.	: 1212
Soekarmadidjaja, Achmad	: 1253
Soekarna, B. Ch. E.	: 1220
Soekarno (Presiden)	: 157 - 160, 166, 1483, 1500, 1501, 1522, 1526, 1544, 1839, 2128
Soekotjo (Drs.)	: 1192
Soekrasno, R.	: 1157
Soemadyono, Moerdyono	: 1152
Soemantri (Ir.)	: 1214
Soemarjono, Djoko (SH.)	: 1173
Soemarjoto (Ir.)	: 1221
Soemarno	: 1240
Soenardi, R.O. (Kolonel Dch.)	: 1250
Soenarno, Hadi	: 1225
Soenggono, R.	: 1191
Soenjoto (Kolonel)	: 1155
Soentahir, Soejono (Kom.Bes. Drs.)	: 1374
Soeprajogi, D. (Major Jenderal)	: 1228
Soeradibrata, R.	: 1224
Soerjadi	: 1225
Soerjosoemarno, Soebowo	: 38
Soesilo Darmo, R.	: 37
Soetamto, R.	: 1217
Soetojo, Harry	: 1628
Soetomo (A.K.B.P. Drs.)	: 1268
Soewarto, J.M. (Ir.)	: 1155
Soewirjo	: 1256
Sophian, Manai	: 1275
Sri Paku Alam VIII	: 607, 1279
Sri Sultan Hamengku Buwono IX	: 1279
Subandrio (Dr.)	: 1207
Subarkah, Machmud (Laksmana Muda Laut)	: 1397
Subiadinata, M.E.	: 1541
Sudiarso	: 1237

Sudjendro (Drs.)	: 1259
Sudrajat	: 1120
Sufsidi (Ir.)	: 1223
Sugeng (Ir.) Sundjaswadi	: 1144
Suhardjono, D.	: 1531
Sujatno, Thomas (Drs.)	: 1373
Sulaiman, Aberani	: 1361
Sulbi, Endang (SH.)	: 1181
Suling, R.E.M.	: 1165
Sumanang, SH	: 1156, 1282
Sumarno, SH	: 1141
Sumbarjono, R. (Ir.)	: 1192
Sumual	: 2117
Sumual, Ds. N.J.	: 1360
Supardan, Hutomo	: 1154
Supardjo	: 2128
Supeno, Bambang	: 1203, 1211
Suraputra, Sunar	: 1147
Surasto, Setiati	: 1260
Surianatadjumena, Rahmaniar Rahman	: 1124
Surjotjondro	: 1143
Suryjoadingrat, Abdulwahab (SH.)	: 1233, 1238
Sutami (Ir.)	: 1344, 1390
Sutarto, S. (Brigadir Jenderal Polisi)	: 1244
Sutihardjo, Hinu (Drs.	: 1387
Sutjipto (Kolonel CKH, S.H.)	: 1172
Sutopo (Komodor Udara)	: 1290
Sutowo, Ibnu (Maj. Djen. TNI. Dr.)	: 1359
Sutrisno, Imam (Let.Kol. Pens.)	: 1352

**T**

Tamara, J.	: 1201
Tan Tiang Gie (Ir.)	: 1196
Tanri, Pangrengrengi	: 1253
Tedjokoesoemo, R.H.	: 1168
Tex, Mathohir	: 1224
Tie King Tiat	: 1128
Tjiptosuhardjo, Sjamsul Bachri (Laksamana Muda Laut)	: 1304
Tjokroadiredjo, Slamet	: 1290
Tjokronegoro, Adjidarmo (Dr.)	: 1191
Trihartono (Ir.)	: 1193
Turangan, Jopie Arnold (Drs.)	: 1216

**W**

Walandouw, D.	: 1249
Wardhana, Ali Prof. Dr.	: 1342
Wargadinata, Salmoen	: 1223
Waroto (SH.)	: 1352
Wibowo, Sarwo Edi (Brigadir Jenderal TNI)	: 1341
Widodo (Brigadir Jenderal TNI)	: 1334
Wiriadinata (Laksamana Muda Udara)	: 1307
Wirjodiprodjo, R. Hartawan	: 1241
Wirjoredjo, Soeharso	: 1220
Wongsohartono, Soeradi (Ir.)	: 1198

**Y**

Yamin, Moh.	: 36, 1780
-------------	------------

**Z**

Zachrial (Ir.)	: 1218
Zalecha, Ratu	: 1581

## INDEKS NAMA LEMBAGA

### A

Akademi Ilmu Pemasarakatan	: 1272
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	: 801
Akademi Ilmu Statistik	: 1680
Angkatan Bersendjata Republik Indonesia (ABRI)	: 1384, 173, 183, 665, 1355, 1383
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI)	: 517, 1106, 1562, 2035, 2036, 2044, 2055
Angkatan Pemuda Pembangunan Indonesia (APPI)	: 1566
Arsip Nasional RI	: 241, 270, 420, 685

### B

Badan Ekonomi dan Keuangan	: 1105, 1265
Badan Kerja Sama Interdepartemental Pelaksanaan Wajib Militer	: 424
Badan Koordinasi Badan-badan Kesejahteraan Pegawai Kabinet Perdana Menteri (Baperti)	: 390, 661
Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (Bakopda)	: 1600, 1602, 1603, 1624
Badan Musyawarah Angkatan 45	: 2114
Badan Musyawarah Pimpinan Revolusi	: 353
Badan Pemeriksa Keuangan	: 188, 285, 429, 510, 674, 815, 868, 1335, 1426
Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan)	: 270, 383, 423, 887, 1025, 1140
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	: 574, 713, 1327, 1330, 1343, 1380, 1387, 1403, 1624
Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam	: 1301
Badan Pusat Intellegence	: 401
Badan Tenaga Atom Nasional	: 1357, 1362
Bagian Hukum Biro Ekonomi dan Keuangan	: 1468
Balai Harta Peninggalan	: 379, 472, 477, 630, 837
Bank Daerah	: 784
Bank Ekspor Impor Indonesia	: 1394
Bank Indonesia	: 342, 345, 477, 770, 836, 861, 893, 1134, 1151, 1153, 1580, 1862, 1951, 1953, 1955, 1997, 2000, 2002, 2009, 2012
Bank Industri Negara	: 831, 853, 2007
Bank Negara Indonesia	: 1187, 1204, 1205, 1206, 1226, 1280, 1329, 1972

Bank Pembangunan Indonesia	: 266, 444, 448, 454, 455, 456, 853, 869, 1152, 1154, 1156, 1282, 1284, 1308, 1313, 1574, 1676, 1741, 1742, 1930, 1961, 1963, 2005, 2007, 2010, 2011, 2013
Bank Pertiagaan Indonesia	: 1998
Bank Tabungan Pos	: 914
Bank Timur N.V.	: 358
Baperdep	: 1624, 1675, 1784
Biro Ekonomi dan Keuangan	: 12, 28, 37, 40, 41, 54, 107, 234, 342, 436, 498, 633, 639, 644, 659, 662, 676, 682, 734, 739, 740, 1426, 1468, 1791, 1918, 1919, 1952, 1957
Biro Industri Tekstil	: 1794
Biro Pembangunan Masyarakat Desa	: 1456
Biro Rekonstruksi Nasional	: 197
<i>Business New</i>	: 1834, 1842
<b>C</b>	
Candi Borobudur	: 1321
Colombo Plan	: 202, 726, 729
<b>D</b>	
DAMRI	: 686, 1911
Darul Islam	: 2069
<i>De Javasche Bank</i>	: 767
Departemen Agama	: 1256, 1339, 1653
Departemen Badan Kekuasaan	: 236
Pemerintahan Tertinggi	
Departemen Kehakiman	: 413, 1272, 1641, 1642
Departemen Keuangan	: 219, 231, 261, 266, 268, 345, 372, 744, 1422, 1485, 1580, 1959, 1985
Departemen Luar Negeri	: 243, 744, 1452, 1917
Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga	: 150, 340, 400, 1288, 1426, 1740, 1773, 1775, 1781, 1790
Departemen Pengairan Rakyat	: 1288
Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat	: 217, 255
Departemen Perdagangan	: 368, 1331, 1865, 1905, 1906, 368
Departemen Perhubungan Udara	: 246, 452, 577, 715, 1936, 1952
Departemen Perindustrian Rakyat	: 277, 991, 1642, 1795, 1810, 1811
Departemen Perkebunan	: 1757, 2124
Departemen Pertanian	: 253, 374, 414, 576, 681, 1371, 1694, 1741, 1753, 1952, 2106
Departemen Sosial	: 1325, 1666, 1325

Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi	: 711
Departemen Pertanian dan Agraria	: 1741, 2106
Dewan Asian Games Indonesia (DAGI)	: 132, 137, 286, 369, 397, 408, 508, 538, 539, 640, 1421, 1422, 1715, 1716
Dewan Bahan Makanan	: 889, 1047, 1093, 1889
Dewan Film Indonesia	: 213, 329, 411, 1428
Dewan Moneter	: 520, 2002
Dewan Pembangunan	: 265, 1475, 2011
Dewan Pembantu Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi	: 696, 1557
Dewan Penasehat Pertambangan	: 935
Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia (DEPANRI)	: 1353
Dewan Penerbangan Nasional	: 433
Dewan Pengawas Keuangan	: 29, 239, 270, 395, 481, 497, 499, 520, 541
Dewan Perancang Nasional	: 291, 921, 964, 1124, 1544, 1922, 1923
Dewan Pers	: 1393
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	: 5, 143, 162, 215, 270, 383, 428, 450, 488, 565, 659, 670, 694, 800, 936, 1099, 1181, 1197, 1303, 1558, 1559, 1560, 1561, 1565, 1566, 1568, 1569, 1578, 1581, 1732
Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing	: 1333
Dewan Perusahaan	: 907, 1765, 1803, 1925



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	: 168, 205, 208, 241, 270, 287, 393, 449, 493, 533, 534, 535, 549, 589, 670, 694, 697, 746, 751, 766, 768, 774, 791, 794, 796, 800, 802, 806, 810, 819, 820, 828, 910, 920, 926, 1053, 1066, 1127, 1129, 1133, 1142, 1162, 1173, 1174, 1188, 1199, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1253, 1258, 1259, 1260, 1262, 1266, 1267, 1274, 1275, 1281, 1285, 1294, 1316, 1335, 1374, 1375, 1433, 1434, 1435, 1436, 1439, 1440, 1441, 1443, 1444, 1446, 1448, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460, 1463, 1464, 1466, 1467, 1470, 1471, 1472, 1473, 1477, 1480, 1481, 1484, 1488, 1492, 1493, 1500, 1522, 1547, 1548, 1552, 1554, 1558, 1565, 1568, 1569, 1571, 1576, 1577, 1578, 1581, 1616, 1700, 1713, 1773, 1817, 1893, 1981, 2020, 2024, 2057, 2098
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	: 533, 700, 800, 820, 1162, 1268, 1360, 1500, 1501, 1502, 1505, 1506, 1526, 1543, 1587, 1593, 1598, 1620, 1627, 1631, 1632, 1658, 1706, 1721, 2020, 2112, 2131
Dewan Tanda-tanda Kehormatan Sementera	: 232, 270, 331, 396, 1580
Dewan Telekomunikasi	: 460, 570, 1175, 1202, 1388
Dewan Tenaga Atom	: 1356, 1450
Dinas Cadangan Nasional	: 961
<b>E</b>	
Ecafe	: 633, 743, 1789, 1816, 1916, 1919
<b>F</b>	
FAO	: 414, 1351
Front Nasional	: 270, 410, 533, 701, 1037, 1039, 1231, 1508, 1553, 1556, 1558, 1563, 1570, 1572, 1573, 1574, 1575, 2123
<b>G</b>	
Ganefo	: 1559, 1719
Garuda Indonesia Airways	: 14, 505, 656
GASBIINDO	: 1767
Gelanggang Olah Raga Bung Karno	: 1234, 1718,

GP Ansor	: 1512
<b>H</b>	
Handelsbank N.V.	: 471
HMI	: 1534
Hotel Duta Indonesia	: 512, 1567
<b>I</b>	
IAEA	: 1450
IMF	: 2002, 1308, 1343
Industri Kimia	: 1144, 1217
Institut Teknologi Sumatera	: 1712
ITB	: 1698,
<b>J</b>	
Jawatan Fotogrametri Sentral	: 434
Jawatan Gedung-gedung Negeri	: 361, 404
Jawatan Kereta Api	: 246, 274, 484, 524
Jawatan Perjalanan	: 192, 202, 349
Jawatan Pos, Telegram dan Telepon	: 421
Jawatan Sandi	: 215, 270, 361, 430, 457
Jawatan Tentara dan Kepolisian Indonesia	: 466
<b>K</b>	
Kabinet Ali Sastroamidjojo	: 1437
Kabinet Ampera	: 27, 50, 174, 175, 280, 357, 515, 586, 587, 718, 753, 821, 1481, 1482, 1484, 1486, 1487, 1645, 1657, 1658, 1666, 1720, 1818, 1820, 1851, 1906, 1972, 1973, 1995, 2132
Kabinet Dwikora	: 813, 1264, 1292, 1504, 1904, 1940, 2027
Kabinet Kerja	: 538, 700, 1229, 1233, 1238, 1264, 1465, 1469, 1476, 1899, 1991, 2011, 2025, 2026
Kabinet Wilopo	: 609, 1512
Kantor Berita Antara	: 1853
Kapal Giorgio Cini II	: 1927
KBKI	: 1561, 1676
KBSI	: 1767
Kementerian Keamanan	: 242
Kementerian Kehakiman	: 201, 360, 601, 709, 1393, 1435
Kementerian Kesehatan	: 1447, 1668
Kementerian Luar Negeri	: 362, 1789
Kementerian Penerangan	: 632, 1447, 1495

Kementerian Perindustrian	: 218
Kementerian Pertahanan	: 119, 516, 592, 597, 608, 618, 1108, 2037, 2039, 2041, 2044, 2054, 2056, 2057, 2058, 2062, 2079
Kementerian Produksi	: 208
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia	: 1538
Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia	: 174
Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia	: 179
Komandan Resimen Sukarelawan Satya Negara	: 139
Komandemen Mobile Brigade	: 394
Komando Daerah Operasi Gerakan Makmur	: 447
Komando Ganjang Malaysia Mandala Siaga	: 2131
Komando Intelijen Negara	: 2130
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat	: 2105
Komando Operasi Tertinggi (Koti)	: 1184, 1503, 1582, 2113, 2116, 2118, 2119
Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe)	: 128, 558, 1246, 1747, 1962, 2008
Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat	: 1703, 2105, 2107, 2108, 2110
Komite Nasional Pusat	: 759, 1067, 1081
Konferensi Asia Afrika	: 395, 616, 1518
Konferensi Colombo	: 387
Konstituante	: 475, 589, 623, 766, 1040, 1442
<b>L</b>	
Legiun Veteran	: 1116, 1314, 1315
Lembaga Aerial Survey	: 265
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	: 281
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional	: 270, 409, 1125
Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa	: 1182
Lembaga Pemilihan Umum	: 1647
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	: 1348
Lembaga Pertahanan Nasional	: 1398
Lembaga Pusat Penyelidikan	: 1674
Pemberantasan Penyakit Kelamin	
Lembaga Tenaga Atom	: 207, 260, 270, 425, 455, 481, 548, 564, 663, 745, 747, 1450
<i>London Press Service</i>	: 1865
<b>M</b>	

Masjid Istiqlal	: 1293
Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan	: 354
Menteri Koordinator Kompartemen Perhubungan Rakyat	: 511
Menteri Muda Kehakiman	: 1638
Menteri Muda Kepolisian	: 289, 290, 2081, 2082
Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat	: 1381, 1410
Menteri Negara Urusan Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara	: 1370
Menteri Penghubung Alim Ulama	: 278
Menteri Penghubung DPR/MPR/DEPERNAS	: 126, 143, 265, 670, 694, 1560, 1561, 1565, 15
Menteri Perekonomian	: 282, 1882
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan	: 569, 1696, 1702, 2126
Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata	: 1937, 1942
Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional	: 575, 2010
Monumen Nasional	: 1293
Muhamadiyah	: 2121
Musjawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS).	: 1287
Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi	: 1203, 1211, 2109
<b>N</b>	
Nadhatul Ulama	: 181, 672
NV. Darooi	: 1724
NV. Stuvex	: 1924
NV. The United Builders.	: 1774
<b>O</b>	
Operasi Pembangunan dan Rehabilitasi Daerah Sulawesi Tengah	: 1622
Organisasi Buruh Pancasila	: 1768
<b>P</b>	
P.N. Aerial Survey	: 265, 1290, 1793
P.N. Badan Muatan Indonesia	: 1158
P.N. Blabak	: 1194, 1803
P.N. Djakarta Llyod	: 1147

P.N. Garam	: 1194
P.N. Gula Negara	: 584, 699, 934, 1155, 1191
P.N. Indra	: 1195, 1785, 1811
P.N. Industri Es	: 1215
P.N. Industri Kayu, Bangunan, Sabut	: 1219
P.N. Industri Karet	: 1220
P.N. Industri Keramik	: 1221
P.N. Industri Kimia	: 1217
P.N. Industri Kulit	: 1225
P.N. Industri Logam/Mesin	: 1218
P.N. Industri Makanan dan Minuman	: 1222
P.N. Industri Minjak Nabati	: 1216
P.N. Industri Pemintalan	: 1224
P.N. Industri Pertenunan dan Peradjudan	: 1223
P.N. Karung Goni	: 934
P.N. Kereta Api	: 943
P.N. Kumala Karya	: 1242
P.N. Merpati Nusantara	: 933, 1007, 1159
P.N. Metrika	: 1800
P.N. Nabuka Karya	: 1157
P.N. Pantja Niaga	: 514
P.N. Pasteur	: 210
P.N. Pelabuhan Daerah III	: 1128
P.N. Pelayaran Nasional Indonesia	: 1147
P.N. Pelni	: 1921
P.N. Pembangunan Industri Rakjat	: 1212
P.N. Pembangunan Perumahan	: 1198
P.N. Perindustrian Rakjat	: 1190
P.N. Perkapalan Alir Mendjaja	: 1239
P.N. Permigan	: 1192
P.N. Sabang Merauke	: 1193
P.N. Sari Husada	: 1395
P.N. Tambang Batubara Sebuk	: 953
P.N. Urusan Mekanisasi	: 1213
P.N. Urusan Penelitian, Pembinaan, dan Pendidikan	: 1214
Pabrik Pupuk Sriwidjaja	: 354
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib)	: 1354, 1483
Panitia Retooling Aparatur Negara	: 560, 2021
Panitia 13	: 1837
Panitia 7	: 1839

Panitia Aksi Perumahan Rakyat Palembang	: 1515
Panitia Interdepartmental Perumahan	: 543
Panitia Kebedjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri	: 1380
Panitia Kerdja Urusan Repatriasi Suku Maluku.	: 1368
Panitia Kerja Persiapan Pencacahan Jiwa	: 415
Panitia Koordinasi Penyusunan Atlas Sumber-sumber Kemakmuran Indonesia	: 1831
Panitia Koordinasi Transmigrasi	: 1438
Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri	: 1302
Panitia Nasional Pusat untuk Gerakan Kebersihan	: 1597
Panitia Negara Penampungan Korban Kekatjauan	: 1137
Panitia Negara Perantjang Peraturan Tindak Pidana Ekonomi	: 1283
Panitia Negara Perantjang Undang-undang Perbendaharaan Baru	: 1130
Panitia Negara untuk Menyelediki Organisasi Kementerian	: 2016
Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	: 1135, 1136
Panitia Negara Urusan Kontrak-kontrak Ekonomi-Kuangan antara Republik Indonesia dengan Luar Negeri	: 1257, 1306
Panitia Operasi Karya	: 1756
Panitia Pembina Tugu Nasional	: 1386
Panitia Pendjualan Rumah P.N.	: 1970
Panitia Penelitian Barang-barang/Alat-alat ABRI.	: 1383
Panitia Penerimaan Tamu Negara	: 1317
Panitia Pengawetan Bahan-Bahan Bangunan Organik	: 553
Panitia Penjusunan Sistem Perpadjakan	: 1132
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat	: 1772
Panitia Perumahan Kabinet Perdana Menteri	: 1449

Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam	: 1301, 1662, 1663
Panitia Retooling Aparatur Negara	: 560, 2021
Panitia Sensor Film	: 952
Panitia Tehnis Penanaman Modal	: 1346, 1347
Panitia Urusan Pemulihan Hak	: 215
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	: 1253, 1524
Partai Katolik	: 1285
Partai Komunis Indonesia (PKI)	: 1517, 1535, 1539, 2089, 2123
Partai Kristen Indonesia	: 1249
Partai Murba	: 1525
Partai Muslimin Indonesia	: 1646
Partai Nahdatul Ulama	: 181
Partai Nasional Indonesia (PNI)	: 1274, 1275, 1542
Penguasa Perang Tertinggi (Peperti)	: 445, 642, 658, 665, 686, 755, 1068, 1117, 1601, 1640, 1684, 1738, 1888, 2084, 2085, 2087, 2089, 2091, 2092, 2094, 2095, 2097,
Pengurus Pra Juwana	: 1514
Perkebunan Tembakau Negara	: 948, 960
Permina	: 146, 962, 1169, 1240, 1778
Persatuan Buruh Kereta Api	: 1536, 1766
Persatuan Olah Raga Sekretariat Negara	: 109
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	: 162, 176, 612, 735, 1928, 1957
Persit Kartika Chandra Kirana	: 177
Pertambangan Minyak Indonesia	: 858
Perusahaan Aspal Negara	: 913
Perusahaan Bangunan Negara "Bina Karya"	: 1148
Perusahaan Dagang Negara	: 1097, 1166, 1863, 1875, 1894
Perusahaan Kehutanan Negara	: 690, 950, 984, 1161, 1168
Perusahaan Listrik Negara	: 220
Perusahaan Perkebunan Gula Negara	: 934, 1155, 1191
Perusahaan Perkebunan Karet Negara	: 942
Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman	: 945, 946
Perusahaan Perkebunan Serat Negara	: 947
Perusahaan Pertanian Negara	: 453, 557, 1145
Perusahaan Tambang Timah Negara	: 1805, 1086
PGRI	: 1541
Planetarium	: 1710
PMI	: 2034
PT Aslam	: 1973

PT Asosiasi Perantaraan Dagang Indonesia	: 1898
PT Bank Buruh	: 2004
PT Pelayaran Sinar Segara Djaja	: 1939
PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari	: 1973
PT Sarinah	: 1300, 1820, 1879
PT Shell	: 1804
PT Sridjanda	: 1807
Pusat Perkebunan Negara	: 226, 1723, 1727
 <b>R</b>	
Rumah Sakit Jiwa Medan	: 1676
 <b>S</b>	
SBTI	: 2121
Sekretariat Kongres Wanita Indonesia	: 330
Serikat Sekerja	: 84, 90, 91, 95, 97, 102
SOBSI	: 1513, 1763, 1767, 2125
SOKSI	: 2121
 <b>T</b>	
Team Pekuneg	: 1819
Team Penertiban Keuangan Negara	: 1363, 1364
Team Penertiban Personil Pusat	: 1332
Team Research Berdikari	: 1848
Team Tehnis Kredit Luar Negeri	: 1385
Teritorial Komando	: 2059
The Ford Foundation	: 1707
The German Tribune	: 1865
 <b>U</b>	
Unesco	: 1707
Unicef	: 1707
Universitas Brawidjaja	: 1139
Universitas Gadjah Mada	: 1379, 1696
Universitas Hasanuddin	: 1679, 1688, 1689
Universitas Indonesia	: 41, 1369
Universitas Kahuripan	: 1500
Universitas Negeri Mataram	: 1139
Universitas Padjajaran	: 1700
Universitas Tjenderawasih	: 1139
Universitas Udayana	: 1139
 <b>W</b>	
Warta Koperasi	: 106



WARTA-C.A.F.I : 1563  
Wisma Marga Waluya : 138

**Y**

Yayasan Bunga Kamboja : 100  
Yayasan Hari Ibu : 399  
Yayasan Urusan Bahan Makanan Pusat : 1766

**INDEKS NAMA TEMPAT****A**

Accra	: 1299
Aceh	: 825, 1138, 1501, 1600, 1601, 1608, 1623
Aceh Timur	: 1502
Afrika	: 170, 395, 588, 1518, 2122
Amerika Serikat	: 588, 725, 1343, 1502, 1725, 1731, 1836
Andover	: 636
ASEAN	: 137, 214, 286, 369, 397, 408, 508, 538, 539, 640, 739, 740, 824, 1114, 1121, 1324, 1421, 1422, 1423, 1451, 1458, 1462, 1715, 1716, 1717, 1867, 1954, 2005
Asia Pasifik	: 588
Australia	: 165, 735, 738, 1317, 1855,

**B**

Bali	: 172, 338, 606, 652, 1068, 1625, 2090
Balikpapan	: 1762
Banda Aceh	: 825, 1138, 1501, 1502, 1600, 1601, 1608, 1623
Bandung	: 134, 138, 186, 240, 241, 349, 380, 418, 477, 530, 564, 623, 1442, 1461, 1560, 1627, 1726, 1947, 2080
Bangkalan	: 1626
Bangkok	: 237, 633, 1271, 1295, 1789, 1843, 1850, 1903, 1917, 1918
Banjarmasin	: 810, 1721
Banten	: 491
Bantul	: 1502
Barito Selatan	: 1613
Barito Utara	: 1613
Baturadja	: 426
Belanda, Holand	: 191, 196, 496, 523, 608, 620, 668, 721, 735, 858, 888, 1434, 1440, 1471, 1507, 1687, 1713, 1730, 1809, 1854, 1926, 2039
Belgia	: 165, 1296
Bengkulu	: 1366
Beograd	: 749
Bern	: 749
Birma/Burma	: 165, 723
Bogor	: 150, 239, 437, 1426, 1502, 1621, 1829
Bombay	: 1276, 1835, 1885
Brazil	: 157
Brussel	: 1296
Bulgaria	: 1808

**C**

Canada	: 668, 726
Cekoslovakia	: 1808
Cianjur	: 138, 437
Cimahi	: 2086
Cina	: 718, 2101
Cipanas	: 150
Ciumbuleuit	: 138

**D**

Den Haag	: 362
Desa Sukarejo	: 1531
DI Jogjakarta	: 55, 192, 476, 530, 564, 593, 603, 652, 659, 1029, 1082, 1102, 1279, 1429, 1495, 1534, 1555, 1584, 1609, 1686, 1701, 2015, 2057
Djambi	: 348, 349, 385, 467, 1502, 1540, 1671
Djerman Barat	: 478, 1325, 1710, 1869, 1940

**E**

England	: 668, 1854, 1920, 1938, 2037
Eropa	: 588, 735, 1251
Eropa Barat	: 1318

**F**

Filipina	: 743, 1186
Finlandia	: 1938

**G**

Garut	: 477, 489
Ghana	: 1299

**H**

Hindia Belanda	: 464
Hongaria	: 737
Hongkong	: 692, 2101, 2132
Hungaria	: 742, 1559

**I**

Inggris	: 1854, 1920, 1938, 2037
---------	--------------------------

Irian Barat	: 571, 606, 627, 686, 716, 735, 1138, 1162, 1163, 1171, 1172, 1203, 1252, 1258, 1345, 1360, 1432, 1434, 1452, 1471, 1543, 1606, 1615, 1617, 1630, 1669, 1703, 1926, 1928, 2031, 2099, 2102, 2103, 1556, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110
Italia	: 1927, 1938
<b>J</b>	
Jakarta	: 39, 60, 106, 134, 143, 150, 185, 192, 267, 283, 289, 361, 379, 400, 474, 495, 498, 602, 690, 700, 706, 733, 738, 742, 971, 1016, 1121, 1189, 1268, 1272, 1307, 1425, 1490, 1505, 1523, 1555, 1556, 1574, 1599, 1600, 1618, 1694, 1709, 1710, 1749, 1769, 1780, 1866, 1881, 1891, 1898, 1943, 1952, 1967, 1985, 2037, 2058, 2072, 2105, 2125
Jambi	: 348, 349, 385, 467, 1502, 1540, 1671
Jatiluhur	: 95, 183
Jawa	: 590, 1751, 1897, 2041, 2059
Jawa Barat	: 195, 335, 606, 822, 1138, 1365, 1555, 1767, 2069, 2071, 2091
Jawa Tengah	: 195, 335, 366, 560, 652, 699, 754, 1555, 1720, 2054, 2068, 2074
Jawa Timur	: 241, 335, 366, 606, 652, 1161, 1555, 1588, 2042, 2049, 2096
Jember	: 1531
Jenewa	: 176, 747, 749
Jepang	: 158, 159, 1350, 1401, 1431, 1938, 2040
Jerman	: 478, 1325, 1710, 1869, 1940
Jombang	: 1616
<b>K</b>	
Kabupaten Bandung	: 1726
Kahajan Hulu	: 1613
Kalimantan	: 1530, 1590, 1783
Kalimantan Barat	: 241, 335, 652, 1593, 1610, 1661, 2091, 2113
Kalimantan Selatan	: 199, 338, 447, 606, 1138, 1361, 1611, 1632, 1721
Kalimantan Tengah	: 462, 1068, 1581, 1591, 1613, 1614, 1876
Kalimantan Timur	: 335, 984, 1591, 1634
Kalimantan Utara	: 1499
Karachi	: 1304
Karawang	: 2114
Katingan	: 1613

Kepulauan Riau	: 666, 689, 1631, 2111
Ketapang	: 1593
Korea	: 746, 1503
Kuningan	: 489
<b>L</b>	
Lampung	: 467, 865, 1619, 1889,
Langkat	: 1880
Lebak	: 491
Lhokseumawe	: 1778
Liberia	: 1299
London	: 735, 749, 1819, 1865
<b>M</b>	
Madiun	: 1598, 2035, 2057
Makassar	: 1799, 1874
Malang	: 1534, 1696, 2060, 2121
Malaysia	: 1291, 1473, 2111, 2115, 2131
Maluku	: 606, 1334, 1368, 1589, 1600, 1602, 1607, 1669, 1749, 1873
Manila	: 743, 1186,
Martapura	: 1799
Medan	: 467, 825, 1527, 1568, 1596, 1676, 1708, 1712, 1875, 2131
Mekkah	: 378, 1650
Meksiko	: 1825
Melayu	: 165, 166, 1452, 1697
Mexico City	: 1305
Mexico Serikat	: 1305
Minahasa	: 1502, 1604, 2066, 2117
Moskow	: 749, 1867
Muaro	: 484
<b>N</b>	
Nederland/Belanda	: 191, 196, 496, 523, 608, 620, 668, 721, 735, 858, 888, 1434, 1440, 1471, 1507, 1687, 1713, 1730, 1809, 1854, 1926, 2039
Negara Indonesia Timur	: 602, 2014
New Delhi	: 633, 1843
New York	: 1251, 1836, 2050
Nias	: 1568
NTB	: 2090
NTT	: 335, 1245, 1608, 1620, 2090
Nusa Tenggara	: 613, 1878, 2096

**O**

Osaka : 1350

**P**

Padang : 1799, 1967  
 Padang Panjang : 719  
 Pakistan : 17, 1304  
 Palembang : 354, 1515, 2101  
 Pandeglang : 489  
 Pangkalan Brandan : 1778  
 Papua Barat : 2112  
 Pasuruan : 1658  
 Pekalongan : 1737  
 Pekanbaru : 231  
 Peking : 1826  
 Pelabuhan Tjilatjap : 1149  
 Pematang Siantar : 1799  
 Persekutuan Tanah Melayu : 165, 166, 1452  
 Philipina : 743, 1186  
 Pidie : 1623  
 Plaju : 1738  
 Polandia : 736, 1938, 1959  
 Pontianak : 388, 649, 1967  
 Puncak : 138  
 Purwakarta : 102, 822  
 Pyongyang : 1273

**R**

Rangkasbitung : 491  
 Rangoon : 1850  
 Republik Palau : 1973  
 Republik Rakyat Rumania : 1210, 1893  
 Riau : 231, 347, 439, 606, 1729, 1747, 1772, 2008, 2089

RIS : 773, 828, 1648, 1854, 2066  
 Roma : 749, 1835, 1843, 1850  
 RRT : 164, 754, 1503, 1826, 1959  
 Rumania : 714, 1210, 1707, 1808, 1893

**S**

Saigon : 202  
 Samarinda : 1634  
 Sangihe Talaud : 1628  
 Saudia Arabia : 1857  
 Selawesi Tenggara : 439, 462, 864

Semarang	: 394, 530, 630, 1160, 1429, 1592, 1649, 1922
Sigli	: 1623
Singapura	: 727, 2101, 2132
Subang	: 822, 2121
Sukoharjo	: 651
Sulawesi Selatan	: 439, 458, 606, 864, 1336, 1595
Sulawesi Tengah	: 381, 462, 864, 1044, 1622, 2089
Sulawesi Tenggara	: 439, 462, 864
Sulawesi Utara	: 338, 381, 864, 1044, 1298, 1595, 1633, 1743, 2089, 2091, 2117
Sumatera	: 604, 810, 872, 1096, 1104, 1261, 1286, 1583, 1629, 1712, 1759, 1932, 2091, 2131
Sumatera Barat	: 381, 439, 441, 1334, 2089
Sumatera Selatan	: 343, 382, 466, 827, 865, 1138, 1366, 1742, 2063, 2070
Sumatera Utara	: 560, 814, 866, 1138, 1341, 1608, 1612, 1708, 1875, 1880
Surabaya	: 379, 471, 473, 530, 810, 1149, 1160, 1513, 1534, 1766, 1799, 1800, 1967, 2132
Surakarta	: 432
Swedia	: 1707, 1854
<b>T</b>	
Tangerang	: 361, 400
Tanjung Priok	: 1056, 1922, 1056, 1922
Tanjung Pura	: 199
Tanjung Uban	: 1772
Tanjungpinang	: 231
Tasikmalaya	: 1502, 1744, 2040
Tegal	: 1720, 2036
Thailand	: 237, 1903, 1295
Tiongkok	: 1693
Tokyo	: 354, 468, 593, 633, 1273
Tondano	: 1604
Tulungagung	: 1500
Turki	: 158, 1857
<b>U</b>	
Uni Soviet	: 160, 731, 733, 739
USSR	: 176, 739, 1867
<b>V</b>	
Vietnam	: 158, 176, 1578, 1691
<b>W</b>	

Warsawa : 158, 741, 749  
Washington D.C. : 1308

**Y**  
Yugoslavia : 165, 751



## INDEKS MASALAH DAN PERISTIWA

### A

<i>Africa Asia Islamic Conference</i>	: 1655
Asian Games	: 137, 214, 286, 369, 397, 408, 508, 538, 539, 640, 739, 1114, 1121, 1421, 1422, 1423, 1451, 1458, 1462, 1715 - 1717, 1867, 1954
Asuransi	: 673, 956, 957, 994, 998 - 1000, 1019 - 1022, 1373

### B

Banjir	: 1661
Bencana Alam	: 1298, 1301, 1662, 1663
Berdikari	: 1373, 1848, 1849, 1973
Bintang Jasa	: 778, 798

### C

<i>Civic Mission</i>	: 2093, 2112
----------------------	--------------

### D

Dana Rahasia	: 357
Dana Revolusi	: 1973
Dedolarisasi	: 2111
Deklarasi Ekonomi	: 1088, 1501,
Dekrit Presiden	: 2097
Demokrasi Terpimpin	: 1448
Dualisme kekuasaan	: 1483
Dwi kewarganegaraan	: 1452
Dwikora	: 1526, 1572, 1625, 1752

### E

<i>Expert</i>	: 12, 234, 1910, 1957
---------------	-----------------------

### G

Ganefo	: 46, 1559, 1719
Gerakan 30 September	: 1483, 1537, 2123, 2124, 2125, 2126
Gerombolan	: 611, 1079

### H

Hari Kemerdekaan	: 155, 167, 1113
Hari Kesehatan Nasional	: 1675
Hari Sumpah Pemuda	: 94, 1556

### I

Indoktrinasi : 441, 1399, 2106, 2118

## **J**

Jalannya Revolusi Kita : 162

## **K**

Keluarga Berencana : 1410

Komunis : 1522

Konferensi Asia Afrika : 395, 616, 1518

Konferensi Meja Bundar : 722

Konfrontasi : 1207, 2115

Kongres Wanita Indonesia 330, 1892

Koperasi 73, 83, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 96, 103, 104, 105,  
106, 107, 247, 531, 647, 811, 1614, 1887, 1947,

Korupsi : 851, 1640

KUHP : 1639

## **L**

Landreform : 550, 1604, 1733

Liga Demokrasi : 1522

Lumbung Desa : 1408

## **M**

Mahkamah Militer Luar Biasa : 1277

Manipol-Usdek : 1524, 1526, 1653, 2019

Missi Ekonomi : 1251

MSA : 725

## **N**

Nasionalisasi : 767, 1809

*Nation Building, Character Building* : 1562

Naturalisasi : 1131

Nekolim : 171

## **O**

Obligasi : 842, 938, 1951, 2012

Olympic Games 237

Operasi Harapan : 1629

Orde Baru : 2028

## **P**

Pampasan Perang : 1431, 1960

Panca Satia : 1069

Panca Tunggal : 1617

Pancasila	: 178, 1539
Pelabuhan	: 249, 1056, 1128, 1149, 1160, 1196, 1670, 1673, 1922, 1941
Pembangunan Nasional Semesta Berencana	: 758, 1086, 1127, 1641, 1733, 1984
Pemberontakan	: 2074, 2117
Pemilihan Umum (Pemilu)	: 533, 820, 1488, 1647, 2031, 2076
Pemogokan	: 1762, 2085
Putusan Hubungan Diplomatik	: 1687
Pengadilan Tentara	: 760, 871
Penyelundupan	: 1441, 2132
Penyerahan Kekuasaan	: 173, 1484, 1908
Pepera	: 1543
Perjudian	: 1975
Permesta	: 1660
Plan Mokoginta	: 1629
PON	: 1721
Presiden seumur hidup	: 1500, 1501

**R**

Rasionalisasi dan Rekonstruksi Angkatan Perang	: 2059
Regrouping Kabinet	: 1991, 2024, 2025
Resopim	: 1524
Retooling	: 560, 675, 1430, 2021
Revolusi	: 1524, 1623

**S**

Sensus	: 238, 328, 336, 343, 402, 652, 955, 975, 1425, 1454, 1739, 1745, 1758, 1801, 1842, 1860
SOB	: 2070
Sukarelawan / Militer Sukarela	: 58, 139, 772, 904, 968, 2100, 2115, 2118

**T**

Tawanan Politik	: 2045
Tembakau	: 939, 948, 960, 1531
Transmigrasi	: 247, 531, 854, 1345, 1438, 1948
Trikora	: 58, 1924, 2100

**U**

Uni Indonesia-Belanda	: 196, 1434, 1440
-----------------------	-------------------

**V**

Valuta Asing	: 912, 996, 1968
--------------	------------------

**W**  
Wajib Militer : 424, 844, 1011, 2088

## DAFTAR SINGKATAN

a.i.	: ad-interim
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
AL	: Angkatan Laut
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indonesia
APPI	: Angkatan Pemuda Pembangunan Indonesia
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Bakopda	: Badan Koordinasi Pembangunan Daerah
BAPENYF	: Badan Penyelenggara New York World's Fair
Baperti	: Badan Koordinasi Badan-badan Kesejahteraan Pegawai Kabinet Perdana Menteri
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bapperdep	: Badan Penelitian dan Perencanaan Departemen
BATAN	: Badan Tenaga Nuklir Nasional
Berdikari	: Berdiri di atas kaki sendiri
BKP	: Badan Kesejahteraan Pegawai
BPM	: <i>Bataafsche Petroleum Maatschappij</i>
BPU	: Badan Pimpinan Umum
CAFI	: <i>Commercial Advisory Foundation in Indonesia</i>
DAGI	: Dewan Asian Games Indonesia
Damri	: Djawatan Angkutan Motor RI
Depanri	: Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia
Deparlu	: Departemen Luar Negeri
Deperta	: Departemen Pertanian
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRDS	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong
Dwikora	: Dwi Komando Rakyat
ECAFE	: <i>Economic Commission for Asia and the Far East</i>
FAO	: <i>Food and Agricultural Organization</i>
FFAA	: Festival Film Asia Afrika
FKIP	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
G 30 S	: Gerakan 30 September
Ganefo	: Games of the New Emerging Forces
Gasbiindo	: Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia
Gelora	: Gelanggang Olahraga
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
GKBI	: Gabungan Koperasi Batik Indonesia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
IAEA	: <i>International Atomic Energy Agency</i>

IBRD	: <i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IBW	: <i>Indische Bedrijven Wet</i>
ICA	: <i>International Cooperation Administration</i>
IGGI	: <i>International Governmental Group for Indonesia</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
Inmas	: Intensifikasi Massal
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
ITB	: Institut Teknologi Bandung
KAA	: Konferensi Asia Afrika
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
Kasad	: Kepala Staf Angkatan Darat
KBKI	: Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KBSI	: Kongres Buruh Seluruh Indonesia
Kementerian P, P dan K	: Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNIL	: <i>Koninklijke Nederlands Indische Leger</i>
Kogam	: Komando Ganyang Malaysia
Koti	: Komando Operasi Tertinggi
Kotoe	: Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
Kotrar	: Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi
KPAA	: Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas
KPPN	: Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAAPLN	: Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
MA	: Mahkamah Agung
Manipol	: Manifestasi Politik
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Mayjen	: Mayor Jenderal
MBT	: Markas Besar Tentara
Menlu	: Menteri Luar Negeri
Menutama	: Menteri Utama
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MSA	: Mutual Security Act
Muspida	: Musyawarah Pimpinan Daerah
N.V.	: <i>Naamlodze Vennotschap</i>
Nb.	: Nota bene
NIT	: Negara Indonesia Timur
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NU	: Nahdlatul Ulama
OC	: <i>Organizing Committee</i>

P3RI	: Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia
Pangad.	: Panglima Angkatan Darat
Pangkopkamtib	: Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pelni	: Pelayaran Nasional Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pepera	: Penentuan Pendapat Rakyat
Peperti	: Penguasa Perang Tertinggi
Perdatam	: Perindustrian Dasar/Pertambangan
Permesta	: Perjuangan Rakyat Semesta
Permina	: Pertambangan Minyak Nasional
PFN	: Perusahaan Film Negara
PGPN	: Peraturan Gaji Pegawai Negeri
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PJM	: Paduka Jang Mulia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMI	: Palang Merah Indonesia
PN	: Perusahaan Negara
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PON	: Pekan Olahraga Nasional
POR Lenati	: Persatuan Olah Raga Lembaga-lembaga Negara Tertinggi
Porak	: Pekan Olahraga Antar Kementerian
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
PTT	: Pos Telekomunikasi dan Telegraf
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
RAPBN	: Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Negara
Resopim	: Revolusi, Sosialisme, Pimpinan Nasional
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RPLT	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
SBTI	: Serikat Buruh Tambang Indonesia
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
SK	: Surat Keputusan
SOB	: <i>Staat van Oorlog en van Beleg</i>
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	: Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia
SPMU	: Surat Perintah Membayar Uang
Spri	: Staf Pribadi
TII	: Tentara Islam Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TP3	: Team Penertiban Personil Pusat
Trikora	: Tri Komando Rakyat
UGM	: Universitas Gadjah Mada

UI	: Universitas Indonesia
	: <i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNESCO	
UNICEF	: <i>The United Nations Children's Fund</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
Usdek	: UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia
USOM	: <i>United States of America Operations Missions</i>
USSR	: <i>Union of Soviet Socialist Republics</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUDP	: Uang Untuk Dipertanggungjawabkan
Waperdam	: Wakil Perdana Menteri



## DAFTAR ISTILAH

Dedolarisasi	: Usaha mengurangi penggunaan mata uang dolar
Dekrit	: Keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara
Expert	: tenaga ahli asing
Ganefo	: Kompetisi olahraga dari negara-negara dunia ketiga yang merupakan kekuatan-kekuatan baru (nefos)
<i>Landreform</i>	: Perombakan secara mendasar terhadap sistem pemilikan tanah
Manifesto Politik (Manipol)	: Pidato Presiden Soekarno yang berjudul ‘Penemuan Kembali Revolusi Kita’ dan oleh MPRS dijadikan GBHN
<i>Mutual Security Act (MSA)</i>	: Undang-Undang Keamanan bersama Amerika Serikat tahun 1951 dan terkait pemberian bantuan keamanan kepada Indonesia
Nasionalisasi	: Proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing
<i>Nation &amp; Character Building</i>	: Usaha membangun karakter bangsa berdasarkan kepribadian nasional
Nekolim	: Kolonialisme dalam bentuk baru dalam bentuk ekonomi, budaya dan sosial masyarakat
Orde Baru	: Sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno
Pampasan Perang	: Penggantian kerusakan, kerugian dan penderitaan yang telah dialami oleh rakyat Indonesia selama perang dunia kedua
Pepera	: Referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia
Regrouping kabinet	: Penggabungan beberapa menteri dalam satu struktur
<i>Retooling</i>	: Perombakan, pergantian
<i>Staat van Oorlog en van Beleg (SOB)</i>	: Suatu pernyataan dari pemerintah mengenai keadaan darurat